

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum Perdana Saham :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik :
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan :
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia :

31 Agustus 2021
2 – 6 September 2021
6 September 2021
7 September 2021
7 September 2021
8 September 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GTS INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT GTS INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Distribusi Gas Alam dan Buatan, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, dan Aktivitas Perusahaan Holding;

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Tower One lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Email: corpsec@gtsi.co.id

Website: <http://gtsi.co.id>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSEROAN TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 2 September 2021

PT GTS Internasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT GTS Internasional Tbk Tahun 2021 melalui surat No. 007/DIR-GTSI/VI/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-05509/BEI.PP2/08-2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT GTS Internasional Tbk pada tanggal 5 Agustus 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	39
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	40
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	42
4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	44
5. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	46
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	57
7. SUMBER DAYA MANUSIA	59
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK	67
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	68
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	70
11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	88
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	91
13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	94
14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	95
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	96
16. ASURANSI	97
17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	98
IX. EKUITAS	120
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	122
XI. PERPAJAKAN	123

XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	126
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	128
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	130
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	144
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	150
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	145
XIX.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	146
XX.	LAPORAN PENILAI	147

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik" atau "KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Edi Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
BaU	: <i>Business as Usual</i> , adalah adalah skenario yang menggunakan asumsi dasar pertumbuhan PDB realistis yang digunakan rata-rata 5,6% per tahun. Skenario ini juga mengacu pada target – target yang terdapat dalam KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian yang disesuaikan dengan realisasi saat ini.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan
"Daftar Pemegang Saham atau DPS"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Entitas Anak"	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

"Harga Penawaran"	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian.
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"Konsultan Hukum"	: berarti Ery Yunasri & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Ery Yunasri & Partners selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. dan PT Edi Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

"OJK"	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011).
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	: berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan kemudian.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

"Penjataan Pasti"	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
"Penjataan Terpusat"	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan OJK No.16/2020"	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan OJK No.41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
"Peraturan OJK No.42/2020"	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 56/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/0621 tanggal 9 Juli 2021.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 140 tanggal 17 Juni 2021, Addendum No 249 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Badan Administrasi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 139 tanggal 17 Juni 2021 Jo, Akta addendum No. 44 tanggal 8 Juli 2021, Akta Addendum No. 146 tanggal 29 Juli 2021, Akta addendum No. 248 Tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	: berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"PP No. 13/2018"	: berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek,

"Prospektus Ringkas"	: penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti Saham Baru, yaitu sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SABH"	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
"Tanggal Distribusi"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pencatatan"	: berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Penjatahan"	: berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.

"UUPT"

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"GTSI"	:	berarti PT GTS Internasional
"HSB "	:	berarti PT PT Hikmah Sarana Bahari
"BIS"	:	berarti PT Bhaskara Inti Samudera
"HLI"	:	berarti PT Humolco LNG Indonesia
"PKR"	:	berarti PT Permata Khatulistiwa Regas

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan Perseroan didirikan dengan nama "PT GTSI Internasional " sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 , serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 ("**Akta Pendirian**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021.

I. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Logistik;
 - b. Penyimpanan;
 - c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
 - b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
 - d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
 - e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 - g. Aktivitas Perusahaan Holding;
 - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
 - b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
 - c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

Kegiatan Usaha

Embrio bisnis Perseroan telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG – *Liquefied Natural Gas*) setelah ditandatanganinya new venture antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikannya PT Humpuss Intermoda Transportasi pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*, LNG) dan Minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan Kargo dan Keagenan Kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagaimana halnya minyak bumi, transportasi gas alam cair, dari kilang gas baik *on-shore* dan *off-shore* menuju titik-titik regasifikasi dan sentra pembangkit listrik, memetakan *supply chain* yang melibatkan banyak pihak dan membuka peluang usaha bagi Perseroan. Dengan pengalaman grup usaha HITS yang telah berkecimpung dalam industri transportasi laut, khususnya untuk pengangkutan sumber daya mineral (minyak bumi).

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136,000 m³. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus menambah kapasitas angkut hingga mencapai DWT 91,931 atau jumlah keseluruhan sekitar 158,000 m³. Jenis dan jumlah kapal yang dimiliki maupun dioperasikan juga menjadi lebih bervariasi hingga saat ini. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu Perseroan, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Liberia dengan fokus usaha penyediaan jasa manajemen kapal yang memprioritaskan untuk kebutuhan grup Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya operasional armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

Perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangki penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya Penawaran Umum ini, Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR adalah pemilik tidak langsung dari kapal FSRU karena secara hukum kapal FSRU dimiliki oleh JSR, yang mana PKR adalah pemegang saham JSR sebanyak 25% (dua puluh lima persen); dan HLI sebagai operator dan penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian Perseroan berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat 5 kapal LNG dalam operasional Perseroan melalui Entitas Anak HLI termasuk didalamnya adalah 3 kapal milik Perseroan, sedangkan 2 kapal lainnya adalah milik pihak ketiga lain. Berikut ini adalah ringkasan kontrak manajemen kapal yang dilakukan oleh HLI.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Daerah Operasional	Keterangan
1.	Ekaputra 1	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bontang, Kaltim – Muara Karang, Jakarta	-
2.	Triputra	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	▪ Bontang, Kaltim – Benoa, Bali ▪ Bontang, Kaltim – Amurang, Sulut	-
3.	FSRU Jawa Satu	Perseroan	2020 - ulang tahun ke-25 COD dalam PPA antara PLN dan PT Jawa Satu Power	Patimban – <i>stationary position</i>	-
4.	Surya Aki	MCGC International	2016 – berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bintulu, Port Klan, Myanmar	Saat ini lay-up di Batam
5.	LNG Aquarius	PT Hanochem Shipping	2012 – 2022	Bontang – Jakarta (FSRU NR)	Non Operasional

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

C. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) lembar saham baru
2. Nilai Nominal : Rp50 (lima puluh Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah)
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebesar 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah)

6. Perkiraan Tanggal Penawaran : 2 September 2021 – 6 September 2021
Umum
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan di : 8 September 2021
BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96	13.414.263.079	670.713.153.950	84,80
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04	4.879.688	243.984.400	0,03
3. Masyarakat	-	-		2.400.000.000	120.000.000.000	15,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.419.142.767	670.957.138.350	100,00	15.819.142.767	790.957.138.350	100,00
Saham dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-	14.180.857.233	709.042.861.050	-

D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 64% untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA"), dengan perkiraan suku bunga 7% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun serta *grace period* 2 (dua) tahun. Adapun penggunaan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membangun *permanent* FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021. Jangka waktu pembangunan yang dibutuhkan sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan diperkirakan akan memerlukan dana sebesar USD 55 juta. Nilai asumsi kurs yang dipergunakan adalah sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD). Dalam hal dana tersebut telah dibayarkan kembali kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja dan belanja modal.

Dengan pembangunan FSRU di ANOA diharapkan akan:

- Bahwa, pembangunan FSRU untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Utara;
 - Bahwa, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik di Sulawesi Utara diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat di Sulawesi Utara; dan
 - Bahwa, saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
2. Sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan seperti operasional Perseroan yang meliputi antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada cadangan *docking*, membangun *war room* sistem akuntansi dan keuangan, serta *shipping monitoring online system*.
 3. Sekitar 16% untuk penyertaan modal kepada ANOA dengan nilai asumsi kurs sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD).

Penyertaan modal di ANOA oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja di ANOA sehingga mampu memberikan kontribusi secara konsolidasi stabilitas pendapatan Perseroan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ke depan.

E. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021 struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	

F. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Serta surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi

keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei	2020 (Audit)	31 Desember	2018 (Audit)
	2021 (Tidak Audit)		2019 (Audit)	
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
TOTAL EKUITAS	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei	2020 (Audit)	31 Desember	2018 (Audit)
	2021 (Tidak Audit)		2019 (Audit)	
PENDAPATAN USAHA	7.943.977	12.231.837	31.329.115	27.184.510
BEBAN POKOK PENDAPATAN	7.542.739	5.809.482	(13.958.330)	(14.785.624)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	7.470.911
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(1.592.332)	4.318.944	16.214.238	7.470.911
LABA (RUGI) PER SAHAM (Dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)	(0,000049)	0,00039	0,00099	0,00050

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei	2020	31 Desember	2018
	2021		2019	
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	(35,5)	3,8	11,0	(8,2)
Laba Tahun Berjalan	(112,5)	52,0	42,8	(41,3)
Jumlah Aset	13,9	17,0	22,6	5,5
Jumlah Liabilitas	11,3	2,8	22,4	(9,3)
Jumlah Ekuitas	15,7	29,6	22,7	23,4
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	5,1	55,4	48,5	45,6
Laba Bruto Terhadap Aset	0,4	30,5	34,4	38,0
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	0,7	52,0	64,9	71,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	(7,3)	53,3	36,8	29,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	(0,6)	16,3	12,7	11,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	(1,0)	26,9	22,9	19,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	(8,3)	51,8	35,4	27,5
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	(0,7)	15,8	12,2	10,4
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	(1,1)	26,9	22,9	19,7
Rasio Efisiensi (x)				
Inventory Turnover Ratio	15,5	16,9	223,5	201,4
Asset Turnover Ratio	0,1	0,3	0,3	0,4
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	56,3	127,2	157,3	47,1
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	95,0	182,2	172,8	50,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	65,5	70,4	88,7	88,9
Jumlah liabilitas/jumlah aset	39,9	41,3	47,0	47,1
Interest coverage ratio	(1,1)	12,2	9,1	13,9
Debt service coverage ratio	(0,2)	6,5	1,0	0,8

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak dan 1 Entitas Anak dengan kepemilikan secara tidak langsung, yakni:

Entitas Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2010	Pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal	95%	Operasional
PT Bhaskara Inti Samudera	2013	2014	Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri	51%	Operasional
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2014	Jasa, Pengangkutan dan Perdagangan	99,96%	Operasional
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,99%	Operasional
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2021	Perusahaan Holding dan Jasa.	88,22%	Operasional
PT Sulawesi Regas Satu	2019	2019	Pergudangan dan Penyimpanan	99,99%	Operasional

***Keterangan:**

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing anak memberikan kontribusi sebagai berikut:

Entitas Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap total liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap total ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap penjualan bersih Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak Perseroan
PT Hikmah Sarana Bahari	44%	14%	65%	64%	63%
PT Bhaskara Inti Samudera	29%	2%	48%	34%	31%
PT Humolco LNG Indonesia	2%	3%	1%	3%	4%
PT Permata Khatulistiwa Regas	22%	2%	36%	0%	14%

H. RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko perseroan terhadap kecelakaan dan kerusakan kapal Perseroan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- 1) Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan
- 2) Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan

- 3) Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang
- 4) Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga
- 5) Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya
- 6) Risiko kehilangan sumber daya manusia
- 7) Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional
- 8) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya
- 9) Risiko persaingan usaha dalam negeri
- 10) Risiko Perubahan Teknologi

C. RISIKO UMUM

- 1) Kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya
- 3) Risiko fluktuasi suku bunga
- 4) Tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- 1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
- 5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak – banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 yang akan dibagikan pada tahun 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT GTS INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Distribusi Gas Alam dan Buatan, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, dan Aktivitas Perusahaan Holding;

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Tower One lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Email: corpsec@gtsi.co.id

Website: <http://gtsi.co.id>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSEROAN TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal diatas maka maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96	13.414.263.079	670.713.153.950	84,80
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04	4.879.688	243.984.400	0,03
3. Masyarakat	-	-		2.400.000.000	120.000.000.000	15,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.419.142.767	670.957.138.350	100,00	15.819.142.767	790.957.138.350	100,00
Saham dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-	14.180.857.233	709.042.861.050	-

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 13.419.142.767 (tiga belas miliar empat ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham tambahan untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan maksimal sebanyak-sebanyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan jika mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih dimana jumlah ini sesuai dengan SE OJK nomor 15/SEOJK.04.2020 untuk Penawaran Umum golongan II. Sumber Saham yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk Porsi Penjatahan Terpusat adalah melalui Saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum. Jika tidak terjadi kelebihan pemesanan maka atas jumlah tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Saham tersebut dan akan kembali ke dalam portepel Perseroan.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terdapat pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 64% untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA"), dengan perkiraan suku bunga 7% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun serta *grace period* 2 (dua) tahun. Adapun penggunaan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membangun *permanent* FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021. Jangka waktu pembangunan yang dibutuhkan sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan diperkirakan akan memerlukan dana sebesar USD 55 juta. Nilai asumsi kurs yang dipergunakan adalah sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD). Dalam hal dana tersebut telah dibayarkan kembali kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja dan belanja modal.

Dengan pembangunan FSRU di ANOA diharapkan akan:

- Bahwa, pembangunan FSRU untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Utara;
 - Bahwa, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik di Sulawesi Utara diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat di Sulawesi Utara; dan
 - Bahwa, saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
2. Sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan seperti operasional Perseroan yang meliputi antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada cadangan *docking*, membangun *war room* sistem akuntansi dan keuangan, serta *shipping monitoring online system*.
 3. Sekitar 16% untuk penyertaan modal kepada ANOA dengan nilai asumsi kurs sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD).

Penyertaan modal di ANOA oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja di ANOA sehingga mampu memberikan kontribusi secara konsolidasi stabilitas pendapatan Perseroan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ke depan.

Untuk memastikan kewajaran atas Rencana penyertaan modal kepada ANOA dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan juga menyampaikan bahwa transaksi ini wajar dengan didukung dengan Laporan Penilai No. 00141/2.0110-00/BS/02/0113/1/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penilaian Saham PT Anoa Sulawesi Regas.

Adapun ringkasan laporan Penilaian sebagai berikut:

a. Obyek Penilaian

Saham PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA") termasuk anak perusahaannya PT Sulawesi Regas Satu ("SRGS").

b. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penilaian saham ANOA dan entitas anak yaitu SRGS terkait rencana transaksi penyertaan modal di ANOA oleh GTSI. Tujuan penilaian adalah untuk kepentingan manajemen dan memenuhi kebutuhan Rencana Transaksi dan persyaratan di Pasar Modal sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 ("POJK 17") dan OJK No. 42/POJK.04/2020 ("POJK 42"), namun kepemilikan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HITS") terhadap ANOA adalah sebesar 99,88% atau $\geq 99\%$ sehingga dikecualikan berdasarkan POJK 17 dan POJK 42. Untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

c. Pendekatan dan Metode Penilaian

ANOA

Dengan memperhitungkan bahwa ANOA merupakan *holding company* yang seluruh pendapatannya berasal dari penyertaan pada SRGS, maka pendekatan aset dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau *Net Adjusted Book Value (NABV) method* lebih tepat digunakan sebagai metode tunggal. Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan kewajiban harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.

SRGS

Dengan memperhitungkan bahwa SRGS akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan lebih tepat digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi SRGS diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan SRGS sampai dengan tahun 2035. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan selama periode proyeksi.

Pendekatan kedua yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham SRGS adalah pendekatan aset dengan metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan atau *Excess Earning method (EEM)*. Dalam perhitungan dengan menggunakan EEM, diperoleh nilai normalisasi laba ekonomis lebih besar daripada balikan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*), sehingga terdapat *Excess Economic Income*.

d. Kesimpulan Nilai

Berikut adalah hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham:

ANOA

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, yang dihasilkan dari metode NABV, maka diperoleh nilai sebesar USD 12.231.647 sebagai Indikasi Nilai Pasar 100% Ekuitas/Saham ANOA per tanggal 31 Desember 2020.

SRGS

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 60:40 atas metode utama dan pembanding yang dihasilkan dari metode DCF dan EEM, maka diperoleh nilai sebesar USD 12.231.529 sebagai Indikasi Nilai Pasar 99,9% Ekuitas/Saham SRGS per tanggal 31 Desember 2020.

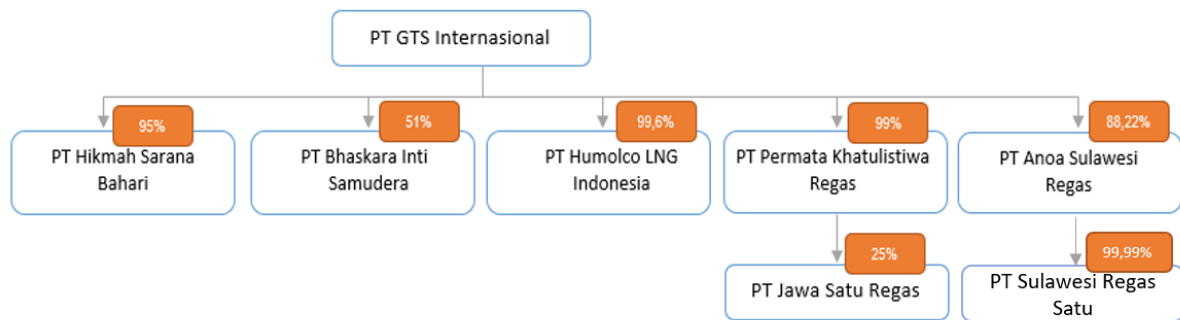
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham dan pinjaman bank.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Jo POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, selanjutnya transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 dan 3 diatas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, atas hal tersebut Perseroan wajib tunduk pada Ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 dan 3 diatas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi afiliasi namun bukan transaksi benturan kepentingan, selanjutnya Perseroan wajib tunduk kepada POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Adapun sifat dan hubungan afiliasi Perseroan dengan PT Anoa Sulawesi Regas adalah sebagai berikut:



Perseroan merupakan pemegang saham utama PT Anoa Sulawesi Regas

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam hal Perseroan menerima dan menggunakan dana dari tujuan penggunaan dana setelah Penawaran Umum, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 4,063% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,150%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,500%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,500%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,708% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,395%; Konsultan Hukum: 0,250%; dan Notaris 0,063%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,112% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,010% dan Kantor Jasa Penilai Publik 0,102% ; dan
- Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan dan iklan): 0,093%.

III. PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$42.419.764 sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

(dalam Dolar Amerika)	
Keterangan	31 Desember 2020 (Audit)
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha:	
- Pihak-pihak ketiga	572.354
Utang deviden	756.341
Utang Pajak	124.684
Utang lain-lain:	
- Pihak-pihak Ketiga	174.639
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549
Uang muka dari pihak ketiga	907.216
Pendapatan ditangguhkan	
- Bagian lancar	-
Bagian lancar atas liabilitas	
Jangka panjang:	
- Pinjaman dari pihak ketiga	-
- Liabilitas sewa	-
- Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.270.801
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain:	
- Pihak berelasi	7.906.593
Pendapatan yang ditangguhkan	
- Bagian tidak lancar	-
Liabilitas jangka Panjang, setelah	
Bagian tidak lancar:	
- Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397
- Pinjaman dari pihak berelasi	2.799.973
- Liabilitas sewa	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.148.963
TOTAL LIABILITAS	42.419.764

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman dari Pihak Berelasi (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.28)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.078.991 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika)	
Keterangan	31 Desember 2020
PT Humpuss Transportasi Kimia	
Jangka Pendek	1.279.018
Jangka Panjang	2.799.973
Jumlah	4.078.991

Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Pinjaman ini tanpa jaminan, dalam mata uang Dolar AS dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tersebut diangsur setiap bulan mulai Juli 2017 hingga Juli 2023.

2. Utang Usaha (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.14)

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pembelian persediaan dan suku cadang yang digunakan untuk keperluan kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, serta utang atas biaya pengedokan kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, utang usaha yang timbul kepada pemasok adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan pihak-pihak yang terkait:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
MOL Techno-Trade, Ltd	208.120
MHI Marine Engineering Co., Ltd	126.014
Nakakita Seisakusho Co., Ltd	83.093
ISS Machinery Service Limited	72.520
LGE Japan Ltd	40.776
Schneider Electric Systems	16.000
MOL Techno-Trade Asia Pte, Ltd	11.761
Utsuki Keiki Co., Ltd	4.838
CV. Ainia Rasyifa	4.087
PT. Control System Arena para Nusa	3.135
PT Bahari Tirta Jaya	798
CV. Mega Prima Mandiri	586
PT. Raya Perdana gemilang	352
PT. Eagle Industry Indonesia	180
PT. Lumrah Sarana Niaga	94
Jumlah	572.354

b) Berdasarkan mata uang:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Rupiah	9.177
Dolar Amerika Serikat	93.740
Dolar Singapura	11.761
Yen Jepang	457.676
Jumlah	572.354

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha.

3. Utang Dividen (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.15)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang Dividen sebesar AS\$756.341 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Pihak ketiga:	576.000
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	
Pihak-pihak berelasi:	
PT Hateka Trans Internasional	180.269
Koperasi Karyawan	
- Bhakti Samudera	72
Sub Jumlah	180.341
Jumlah	756.341

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang dividen kepada pemegang saham PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS"), entitas anak, tanggal 8 September 2020 yang berasal dari distribusi interim dividen periode 2020 sebesar AS\$576,000 kepada pihak non-pengendali, yaitu Mitsui O.S.K Lines Ltd., dan kepada pemegang saham Perusahaan, tanggal 20 Mei 2020 sebesar AS\$180.269 kepada pihak pengendali, yaitu PT Hateka Trans Internasional dan AS\$72 kepada pihak non-pengendali yaitu Koperasi Karyawan Bhakti Samudera, yang belum dibayarkan di tahun 2020

4. Utang lain-lain (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.16)

Akun ini merupakan transaksi atas kekurangan pembayaran yang dibayarkan atas uang muka yang diterima dari PT Pertamina Hulu Mahakam untuk pengawakan, pengedokan dan biaya operasional lainnya yang timbul di kapal, Utang lain-lain tersebut terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Pihak ketiga		
- PT Pertamina Hulu Mahakam	167.385	
- Lain-lain (kurang dari AS\$50.000)	7.254	
Jumlah	174.639	
Pihak berelasi		
- PT Humpuss Transportasi Kimia	7.862.546	
- PT Humpuss Transportasi Curah	44.047	
Jumlah	7.906.593	
Total	8.081.232	

b. Berdasarkan mata uang:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Dolar Amerika Serikat	8.081.232	
Jumlah	8.081.232	

5. Utang pajak (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.22)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar AS\$124.684 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Perseroan:		
PPh Pasal 23	665	
Entitas Anak:		
PPh Pasal 26	98.079	
PPh Pasal 29	17.009	
PPh Pasal 23	5.360	
PPh Pasal 4 (2)	247	
PPN	3.324	
Jumlah	124.684	

6. Uang muka dari pihak Ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.17)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka sebesar AS\$907.216 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
PT MOL Indonesia	907.216
Jumlah	907.216

Pada 2020, uang muka diterima dari PT MOL Indonesia, pihak ketiga, merupakan uang muka yang diterima untuk pembayaran biaya kapal Jawa Satu oleh HLI, entitas anak, sebagai manajemen kapal Jawa Satu.

7. Biaya yang masih harus dibayar (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.18)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar AS\$8.456.549 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Pengedokan	2.472.167
Bunga	2.180.613
Bahan bakar	1.722.451
Operasi kapal	467.400
Jasa profesional	42.378
Lain-lain	1.571.540
Jumlah	8.456.549

8. Pinjaman pihak ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.21)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	2020
Jangka panjang	
Bamboo Mountain Power B.V	19.442.397
Jumlah	19.442.397

Ketentuan dan syarat atas pinjaman sebagai berikut:

- Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,08% per tahun sampai dengan tanggal operasi komersial yang dijadwalkan untuk konstruksi FSRU dan pada tingkat 8,93% per tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Februari 2047.
- Pinjaman ini dijamin dengan jaminan saham Perusahaan dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PT Permata Khatulistiwa Regas
- Pinjaman ini dapat dilunasi mulai Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir pada Februari 2047.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban lainnya yang telah Jatuh Tempo tetapi belum dilunasi atau di bayar oleh perseroan. Mengenai Perjanjian Utang (laporan keuangan konsolidasian catatan 36), Perseroan menyatakan bahwa akan tetap berkomitmen akan tetap melaksanakan kewajiban dari perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama.

Perseroan juga menyatakan bahwa:

- 1) tidak adanya liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik; dan
- 2) tidak adanya liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021. Di dalam Prospektus ini Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan Interim hingga 31 Mei 2021, dimana Laporan Keuangan Interim ini tidak diaudit dan merupakan tanggung jawab dari manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Dollar Amerika)			
	31 Mei 2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	31 Desember 2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.067.866	15.607.709	11.010.175	6.750.168
Piutang usaha:				
Pihak-pihak ketiga	1.515.828	-	555.675	130.556
Pihak Berelasi	3.217.027	2.982.649	-	-
Piutang lainnya:				
Pihak-pihak ketiga	702.441	28.512	88.540	11.803
Pinjaman kepada pihak berelasi	1.421.789	1.420.984	-	-
Persediaan	513.419	1.857.451	135.000	135.000
Pajak dibayar di muka	600.012	298.654	204.579	93.112
Aset lancar lainnya	366.804	160.839	100.987	56.253
Total Aset Lancar	18.405.186	22.356.798	12.094.956	7.176.892
ASET TIDAK LANCAR				
Pinjaman kepada pihak berelasi	14.998.890	14.998.890	14.998.890	-
Piutang lainnya:				
Pihak berelasi	3.788.787	3.455.091	971.853	209.617
Aset Derivatif	5.741.915	5.741.915	4.091.405	-

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi Penyusutan sebesar AS\$14.531.102 (2019: AS\$24.803.473 & 2018: AS\$17.027.361)	56.094.542	54.741.336	55.371.801	64.184.494
Aset hak guna, neto	10.966	12.063	-	-
Aset pajak tangguhan	5.848	5.848	7.733	-
Estimasi tagihan pajak	-	41.518	-	-
Aset tidak lancar lainnya	115.044	1.336.457	232.541	47.261
Total Aset Tidak Lancar	80.755.992	80.333.118	75.674.223	64.441.372
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha:				
- Pihak-pihak ketiga	169.932	572.354	297.146	317.987
Utang deviden	-	756.341	316.400	238.000
Utang Pajak	234.590	124.684	127.661	93.971
Utang lain-lain:				
- Pihak-pihak Ketiga	3.890	174.639	26.243	959.682
Beban yang masih harus dibayar	6.814.240	8.456.549	2.525.865	3.807.496
Uang muka dari pihak ketiga	837.465	907.216	-	-
Pendapatan ditangguhkan				
- Bagian lancar	-	-	1.929.023	2.576.955
Bagian lancar atas liabilitas				
Jangka panjang:				
- Pinjaman dari pihak ketiga	-	-	-	235.237
- Liabilitas sewa	-	-	3.538	5.009
- Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	1.279.018	1.773.772	6.086.612
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.339.135	12.270.801	6.999.648	14.320.949
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	7.970.664	7.906.593	8.856.816	8.612.664
Pendapatan yang ditangguhkan				
- Bagian tidak lancar	-	-	1.157.632	2.465.334
Liabilitas jangka Panjang, setelah				
Bagian tidak lancar:				
- Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	19.442.397	-
- Pinjaman dari pihak berelasi	2.799.973	2.799.973	4.800.212	8.295.402
- Liabilitas sewa	-	-	-	3.538
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.213.034	30.148.963	34.257.057	19.376.938
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik				
Entitas induk Modal saham – nilai nominal				
Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				
Modal dasar – 2.750 saham	243.009	243.009	243.009	243.009
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan				
Pihak non-pengendali	308.306	308.306	308.306	-
Selisih kurs	(240.395)	(240.395)	(240.395)	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.945)	(75.944)	(75.944)	(30.353)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	45.155.244	46.747.577	33.645.132	25.404.627
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	43.152.466	44.744.800	31.642.355	23.139.135
KEPADA PEMILIK PERSEROAN	16.456.543	15.525.352	14.870.119	14.781.242
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377
TOTAL EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264

(dalam Dollar Amerika)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Pendapatan usaha	7.943.977	12.231.837	31.329.115	30.171.862	27.184.510
Beban pokok pendapatan	(7.542.739)	(5.809.481)	(13.958.330)	(15.553.154)	(14.785.624)
Laba bruto	401.238	6.422.356	17.370.785	14.618.708	12.398.886
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	(984.639)	(815.906)	(2.190.385)	(3.088.028)	(3.512.507)
Pendapatan operasi lainnya	169.146	143.036	2.082.154	288.813	-
Beban operasi lainnya	(7.022)	(54.855)	(308.700)	(265.430)	(521.564)
Total beban usaha	(822.515)	(727.725)	(416.931)	(3.064.645)	(4.034.071)
LABA (RUGI) USAHA	(421.277)	5.694.631	16.953.854	11.554.063	8.364.815
Pendapatan keuangan	391.097	352.111	1.118.840	864.011	77.403
Biaya Keuangan	(550.393)	(575.266)	(1.373.051)	(1.214.310)	(567.525)
Bagian rugi Neto dari entitas asosiasi	-	-	-	(99.409)	-
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	(580.573)	5.471.476	16.699.643	11.104.355	7.874.693
Beban pajak final	(80.408)	(148.953)	(367.762)	(356.124)	(320.150)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(660.981)	5.322.523	16.331.881	10.748.231	7.554.543
Beban pajak penghasilan kini	-	(43.530)	(115.758)	(86.876)	(83.632)
(Beban)/penghasilan pajak tangguhan	-	-	(1.885)	7.733	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.669.088	7.470.911
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	(45.591)	-
Dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-
Jumlah rugi Komprehensif lain	(660.981)	5.278.993	-	(45.591)	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.592.332)	4.318.945	13.282.605	8.240.505	6.754.568
Kepentingan non pengendali	931.351	960.048	2.931.633	2.428.583	716.343
	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.669.088	7.470.911
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.592.332)	4.318.945	13.282.605	8.194.914	6.754.568
Kepentingan non pengendali	931.351	960.048	2.931.633	2.428.583	716.343
	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS Per saham)	(0,000049)	0,00039	0,00099	0,00061	0,00050

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	(35,5)	3,8	11,0	(8,2)
Laba Tahun Berjalan	(112,5)	52,0	42,8	(41,3)
Jumlah Aset	13,9	17,0	22,6	5,5
Jumlah Liabilitas	11,3	2,8	22,4	(9,3)
Jumlah Ekuitas	15,7	29,6	22,7	23,4
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	5,1	55,4	48,5	45,6
Laba Bruto Terhadap Aset	0,4	30,5	34,4	38,0
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	0,7	52,0	64,9	71,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	(7,3)	53,3	36,8	29,0

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	(0,6)	16,3	12,7	11,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	(1,0)	26,9	22,9	19,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	(8,3)	51,8	35,4	27,5
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	(0,7)	15,8	12,2	10,4
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	(1,1)	26,9	22,9	19,7
Rasio Efisiensi (x)				
<i>Inventory Turnover Ratio</i>	15,5	16,9	223,5	201,4
<i>Asset Turnover Ratio</i>	0,1	0,3	0,3	0,4
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	56,3	127,2	157,3	47,1
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	95,0	182,2	172,8	50,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	65,5	70,4	88,7	88,9
Jumlah liabilitas/jumlah aset	39,9	41,3	47,0	47,1
<i>Interest coverage ratio</i>	(1,1)	12,2	9,1	13,9
<i>Debt service coverage ratio</i>	(0,2)	6,5	1,0	0,8

Sesuai dengan Akta Notaris No. 35 tertanggal 7 Juni 2021, Perseroan membagikan dividen saham sebesar Rp668.207.138.350 kemudian pada Akta Notaris No. 81 tanggal 10 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menerbitkan 13.364.142.767 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham, sehingga total nilai nominal atas saham baru adalah sebesar Rp668.207.138.350.

Sehingga kepemilikan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Shareholders
Non manajemen:				Non-management:
PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.154	99.96%	PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan Bhakti	4.879.688	243.984	0.04%	Koperasi Karyawan Bhakti
	13.419.142.767	670.957.138	100%	

Untuk Konversi Nilai Dolar, Perseroan menggunakan Kurs Tengah BI untuk Transaksi yang di lakukan sebagai berikut:

1. Nilai kurs pada tanggal paling akhir (7Juli 2021): Rp14.468/AS\$1
2. Nilai kurs tertinggi dan terendah selama 6 bulan terakhir:

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Tertinggi	14.302,16	14.300,15	14.644,86	14.721,24	14.539,34	14.568,48
Terendah	13.833,49	13.805,63	14.227,51	14.395,66	14.127,01	14.134,97

3. Nilai kurs rata-rata setiap tahun dan periode interim:

2018	2019	2020	Interim
14.481,00	13.901,00	14.105,01	14.310,00

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "GTS Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021 ("**Akta No. 105/2021**"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 105/2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Logistik;
- b. Penyimpanan;
- c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
- b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- g. Aktivitas Perusahaan Holding;
- h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
- c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, liabilitas sewa, pinjaman dari pihak ketiga, dan pinjaman dari pihak berelasi yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/tinggi sebesar AS\$77.537 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

- a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"/"AS\$"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

- b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru
Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- PSAK No. 1 (Penyesuaian dan Amandemen 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 25 (Amandemen 2019) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material".
- PSAK No. 71 tentang "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

- PSAK No. 73 tentang “Sewa”.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Entitas Anak merupakan entitas dimana Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Secara spesifik, Perusahaan mengendalikan investee jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali (“KNP”), walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intragrup berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Semua saldo dan transaksi antar anggota Perseroan dan Entitas Anak yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Pendapatan usaha	31.329.115	30.171.862	27.184.510
Beban pokok pendapatan	(13.958.330)	(15.553.330)	(14.785.624)
Laba bruto	17.370.785	14.618.708	12.398.886
BEBAN USAHA			
Umum dan administrasi	(2.190.385)	(3.088.028)	(3.512.507)
Pendapatan operasi lainnya	2.082.154	288.813	-
Beban operasi lainnya	(308.700)	(265.430)	(521.564)
Total beban usaha	(416.931)	(3.064.645)	(4.034.071)
LABA USAHA	16.953.854	11.554.063	8.364.815
Pendapatan keuangan	1.118.840	864.011	77.403
Biaya Keuangan	(1.373.051)	(1.214.310)	(567.525)
Bagian rugi Neto dari entitas asosiasi	-	(99.409)	-
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	16.699.643	11.104.355	7.874.693
Beban pajak final	(367.762)	(356.124)	(320.150)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.331.881	10.748.231	7.554.543
Beban pajak penghasilan kini	(115.758)	(86.876)	(83.632)
(Beban)/penghasilan pajak tangguhan	(1.885)	(7.733)	-
LABA TAHUN BERJALAN	16.214.238	10.669.088	7.470.911
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Bagian penghasilan komprehensif lainnya	-	(45.591)	-
Dari entitas asosiasi	-	(45.591)	-
Jumlah rugi Komprehensif lain	-	(45.591)	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	13.282.605	8.240.505	6.754.568
Kepentingan non pengendali	2.931.633	2.428.583	716.343
	16.214.238	10.669.088	7.470.911
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	13.282.605	8.194.914	6.754.568
Kepentingan non pengendali	2.931.633	2.428.583	716.343
	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS Per saham)	0.00099	0.00061	0.00050

4.1.1. Penjualan bersih

Berikut ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga			
PT Pertamina Hulu Mahakam	20.098.597	19.158.597	6.197.356

	2020	2019	2018
PT Hanochem Shipping	300.000	300.000	300.000
PT MOL Indonesia	166.667	-	-
MCGC International Ltd.	100.000	100.000	100.000
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	12.000	12.000	12.000
Pacific LNG Transport Ltd.	-	35.000	93.334
PT Pertamina (Persero)	-	-	11.211.167
Sub jumlah	20.677.264	19.605.597	17.913.857
Pihak berelasi			
PT Humpuss Transportasi Kimia	10.548.240	10.518.600	9.270.653
PT Humpuss Transportasi Curah	103.611	47.665	-
Sub jumlah	10.651.851	10.566.265	9.270.653
Jumlah	31.329.115	30.171.862	27.184.510

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$31.329.115 dengan kontribusi terbesar terdapat pada jasa penyewaan kapal pengangkut gas alam cair yaitu sebesar 97.82% dari total pendapatan perseroan

Perbandingan Pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sekitar 3.8% atau senilai US\$1.157.253 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan atas sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$940.000 terkait dengan kenaikan pendapatan atas komponen biaya operasi yang ditagihkan ke Pertamina. Peningkatan pendapatan juga berasal dari kenaikan pendapatan atas jasa manajemen kapal dari PT MOL Indonesia sebesar AS\$166.667.

Perbandingan Pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik sekitar 11% atau senilai US\$2.987.352 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kapal Eka Putra masing-masing sebesar AS\$1.750.075 dan kapal Triputra sebesar AS\$1.247.947 sehubungan dengan adanya *off-hire* atas aktivitas pengedokan pada tahun 2018 yang menyebabkan pendapatan di 2018 menjadi lebih rendah.

4.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Biaya penyusutan	6.568.943	7.766.380	6.263.288
Biaya anak buah kapal	4.076.844	4.182.499	4.178.844
Perbaikan dan perawatan	1.019.345	2.032.971	1.140.183
Biaya asuransi kapal	480.922	574.837	474.242
Perlengkapan kapal	458.231	281.382	422.559
Biaya pelabuhan	291.916	82.522	54.009
Biaya persediaan kapal	64.330	85.234	40.397
Biaya sewa kapal	411	750	500.856
Lain-lain	997.388	546.579	1.711.246
Jumlah	13.958.330	15.553.154	14.785.624

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$13.958.330 dengan kontribusi terbesar terdapat pada biaya penyusutan (catatan 11 pada laporan keuangan konsolidasian) yaitu sebesar 47.06% dari total beban pokok pendapatan perseroan.

Perbandingan Beban pokok pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sekitar 10.25% atau senilai US\$1.594.824 dibandingkan periode yang sama tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh penurunan biaya penyusutan atas pengedokan kapal Triputra karena telah dibebankan penuh pada Juni 2020 sebesar AS\$1.206.485 (2019: AS\$2.471.514).

Perbandingan Beban pokok pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik sekitar 5.19% atau senilai US\$767.530 dibandingkan periode yang sama tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh:

- a. Peningkatan beban penyusutan sebesar AS\$1.503.092 yang berasal dari penyusutan biaya pengedokan yang dikapitalisasi sebagai aset. Adapun peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya biaya pengedokan kapal Ekaputra dan kapal Triputra yang selesai dipertengahan tahun 2018, dibandingkan dengan dengan biaya pengedokan yang terjadi sebelumnya.
- b. Peningkatan perbaikan dan pemeliharaan sebesar AS\$892.788 terutama disebabkan oleh modifikasi boiler kapal Ekaputra dan Triputra dalam rangka penerapan peraturan internasional terkait pemakaian bahan bakar yang bersulfur rendah untuk kapal-kapal di seluruh dunia, sebesar AS\$1.071.823.
- c. Dikompensasikan dengan penurunan beban kapal lainnya yang diakibatkan oleh:
 1. Penurunan beban sewa kapal sebesar AS\$500.106 yang terjadi pada tahun sebelumnya dikarenakan perusahaan harus membayar biaya-biaya terkait kapal pengganti kepada PEL karena Triputra sedang melakukan pengedokan schedule selama Mei - Juni 2018.
 2. Penurunan biaya bahan bakar sehubungan dengan aktivitas pengedokan kapal pada point C.1 diatas sebesar AS\$532.981.
 3. Penurunan biaya konsumsi lain-lain untuk keperluan dek dan operasional kapal sebesar AS\$141.177 dan AS\$306.745 dikarenakan tidak ada pengedokan yang terjadi seperti tahun sebelumnya.

4.1.3. Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan laba kotor secara keseluruhan pada tahun berjalan sebesar AS\$2.752.007 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kapal Ekaputra dan penurunan beban pokok pendapatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan laba kotor secara keseluruhan pada tahun berjalan sebesar AS\$2.219.882 terutama disebabkan oleh pendapatan sewa kapal dari kapal Ekaputra dan Triputra. Kenaikan pendapatan dari kapal Ekaputra dikarenakan adanya pengakuan pendapatan atas biaya pengedokan yang ditanggung oleh Penyewa. Sedangkan kenaikan pendapatan dari kapal Triputra dikarenakan adanya off-hire pada tahun 2018 ketika kapal melakukan pengedokan. Adapun peningkatan pendapatan pada tahun 2019 untuk kedua kapal ini adalah sebesar AS\$1.750.075 (2019: AS\$19.158.598; 2018: AS\$17.408.523) dan AS\$1.247.947 (2019: AS\$10.518.600; 2018: AS\$9.270.653).

4.1.4. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Beban tenaga kerja	1.058.544	1.085.544	1.058.902
Jasa Profesional	370.400	775.080	494.472
Beban kantor	289.818	357.588	99.098

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perjalanan Dinas	145.862	357.118	512.247
Sewa Kantor	41.688	24.827	23.907
Biaya Penyusutan	12.357	9.732	7.899
Jasa Pengadaan Staf	12.069	34.060	24.031
Promosi	7.619	10.911	15.607
Lain-lain	252.028	460.168	1.276.884
Jumlah	2.190.385	3.088.028	3.512.507

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.190.385 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Beban Tenaga Kerja yaitu sebesar 48% dari total Beban Umum dan Administrasi perseroan.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sekitar 29% atau senilai US\$897.643 dibandingkan dengan periode yang sama tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh penurunan beban jasa profesional sebesar AS\$404.680 terkait dengan jasa pengurusan pembelian kapal tunda dan restrukturisasi komposisi pemegang saham Entitas Anak pada tahun 2019. Penurunan ini juga berasal dari penurunan biaya perjalanan sebesar AS\$211.256 pada tahun berjalan sebagai dampak dari situasi Covid-19 sepanjang tahun yang mengakibatkan kebijakan bekerja dari rumah akibat adanya pembatasan sosial berskala besar dan frekuensi perjalanan domestik dan luar negeri yang lebih rendah untuk kebutuhan operasional.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 turun sekitar 12% atau senilai US\$424.479 dibandingkan dengan periode yang sama tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh penurunan beban lain-lain yang terutama disebabkan oleh pencatatan penyisihan penurunan nilai piutang sehubungan dengan kontrak sewa kapal Triputra di tahun 2018. Penurunan ini dikompensasikan dengan kenaikan biaya profesional terkait dengan pengurusan proyek FSRU Jawa 1 di tahun 2019.

4.1.5. Pendapatan Operasional Lainnya

Berikut ini merupakan rincian pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivatif	1.650.510	-	-
Lain-lain	431.644	288.813	-
Jumlah	2.082.154	288.813	-

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$2.082.154 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivative sebesar 79% dari total Pendapatan Operasi Lainnya perseroan.

Perbandingan Pendapatan Operasi Lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan pendapatan operasi lainnya Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sekitar 521% atau senilai AS\$1.793.341 terutama disebabkan keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Pendapatan Operasi Lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan pendapatan operasi lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik senilai AS\$288.813 hal ini disebabkan oleh adanya keuntungan selisih kurs sebesar AS\$288.813.

4.1.6. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian Beban Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Beban bunga dari pinjaman			
Dari pihak ketiga	1.200.000	949.000	-
Beban bunga dari			
Pinjaman pihak berelasi	172.962	264.735	566.712
Beban bunga			
Liabilitas sewa	89	575	813
Jumlah	1.373.051	1.214.310	567.525

Beban keuangan perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$1.373.051 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Beban bunga dari pinjaman pihak ketiga sebesar 87% dari total beban keuangan perseroan.

Perbandingan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kenaikan beban keuangan sekitar 13% atau sebesar AS\$158.741 disebabkan oleh kenaikan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari Bamboo Mountain Power BV untuk proyek FSRU Jawa 1 sebesar AS\$1.200.000 (2019: AS\$949.000) karena kenaikan jumlah bulan yang masih harus dibayar (2020: Jan – Des 2020; 2019: Mar – Des 2019).

Perbandingan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kenaikan beban keuangan sekitar 114% atau sebesar AS\$646.785 disebabkan oleh kenaikan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari Bamboo Mountain Power BV untuk proyek FSRU Jawa 1 sebesar AS\$949.000 dan penurunan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$301.977.

4.1.7. Laba (rugi) tahun Berjalan

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$5.939.974 atau sekitar 104,3% dibandingkan dengan 31 Mei 2020, hal ini disebabkan oleh Kapal Ekaputra pada tahun 2020 dikontrak dengan skema *Time Charter*, Sementara pada tahun 2021 menggunakan skema *Spot Charter*.

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$5.545.150 atau sebesar 52% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan laba kotor seperti yang dijabarkan sebelumnya. Peningkatan ini juga disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi serta kenaikan pada pendapatan operasi lainnya.

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun 2019 meningkat sebesar AS\$3.198.177 atau sebesar 43% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan laba kotor sebesar AS\$2.219.822 dan kenaikan pendapatan keuangan sebesar AS\$786,608

4.1.8. Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan penghasilan komprehensif lain dikarenakan pada tahun lalu pencatatan kerugian atas investasi atas PT Jawa Satu Regas pada tahun 2019, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas.

Penghasilan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan penghasilan komprehensif lain dikarenakan pada tahun lalu pencatatan kerugian atas investasi atas PT Jawa Satu Regas pada tahun 2018, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas.

4.1.9. Laba (rugi) komprehensif

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Total laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar AS\$5.939.974 atau sekitar 104,3% dibandingkan dengan 31 Mei 2020, hal ini disebabkan oleh Kapal Ekaputra pada tahun 2020 dikontrak dengan skema *Time Charter*, Sementara pada tahun 2021 menggunakan skema *Spot Charter*.

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar AS\$5.590.741 atau 53% dari AS\$10.623.497 menjadi AS\$16.214.238 yang disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar AS\$5.545.150 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar AS\$3.152.586 atau 42% dari AS\$7.470.911 menjadi AS\$10.623.497 yang disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar AS\$3.198.177 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar	18.405.186	22.356.798	12.094.956	7.176.892
Aset Tidak Lancar	80.755.992	80.733.118	75.674.223	64.441.372
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
Liabilitas Jangka Pendek	9.339.135	12.270.801	6.999.648	14.320.949
Liabilitas Jangka Panjang	30.213.034	30.148.963	34.257.057	19.376.938
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
TOTAL EKUITAS	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264

4.2.1. ASET

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$99.161.178 mengalami penurunan sebesar 3,4% atau AS\$3.528.738 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$102.689.916 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar AS\$3.951.612 yang berasal dari penurunan kas untuk pembayaran pengedokan.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$102.689.916 mengalami kenaikan sebesar 17% atau AS\$14.920.737 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$87.769.179. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$4.597.534 serta piutang usaha dan piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi sejumlah AS\$6.886.871. Kenaikan aset derivatif sebesar AS\$ 1.650.510 dan Persediaan sebesar AS\$ 1.722.451.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$87.769.179 mengalami kenaikan sebesar 23% atau AS\$16.150.915 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$71.618.264. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$14.998.890 untuk pendanaan proyek FSRU Jawa Satu.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$18.405.186 mengalami penurunan sebesar 17,7% atau AS\$3.951.612 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$22.356.798. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pengedokan.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$22.356.798 mengalami kenaikan sebesar 85% atau AS\$10.261.842 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$12.094.956. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas serta piutang usaha dari pihak-pihak berelasi sebesar AS\$4.597.534 dan AS\$2.982.649 sehubungan dengan pendapatan dari penyewaan kapal, serta kenaikan Persediaan sebesar AS\$ 1.722.451.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$12.094.956 mengalami kenaikan sebesar 69% atau AS\$4.918.064 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$7.176.892. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$4.260.007 sehubungan dengan penerimaan pendapatan dari penyewaan kapal.

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$80.755.992 mengalami kenaikan sebesar 0,5% atau AS\$422.874 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$80.333.118. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi akun pengedokan yang sebesar AS\$2,5jt dan pada periode yang sama terdapat depresiasi aset sebesar AS\$2,1jt.

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$80.333.118 mengalami kenaikan sebesar 6% atau AS\$4.658.895 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$75.674.223. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dan piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi sebesar AS\$2.483.238

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$75.674.223 mengalami kenaikan sebesar 17% atau AS\$11.232.851 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$64.441.372. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$14.998.890 untuk pendanaan proyek FSRU Jawa Satu.

- **Piutang Usaha**

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$555.675 merupakan penurunan dari piutang sehubungan dengan sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$505.675 dan jasa manajemen kapal sebesar AS\$50.000.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Kenaikan piutang usaha sebesar AS\$425.199 disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sehubungan dengan sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$399.284.

- **Persediaan**

Berikut ini merupakan rincian persediaan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Suku cadang dan bahan bakar	1.857.451	135.000	135.000
TOTAL	1.857.451	135.000	135.000

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan persediaan sebesar AS\$1.722.451 berasal kenaikan atas persediaan bahan bakar sehubungan dengan redelivery kapal Ekaputra dari Pertamina pada bulan Desember 2020.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Tidak terdapat perubahan pada nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018.

- **Aset Tetap - Bersih**

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan aset tetap - bersih sebesar AS\$630.645 disebabkan oleh biaya penyusutan yang dibebankan selama tahun 2020 sebesar AS\$6.578.666. Penurunan ini dikompensasi dengan penambahan kapitalisasi biaya pengedokan Ekaputra sebesar AS\$5.947.979.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Penurunan aset tetap - bersih AS\$8.812.693 terutama disebabkan oleh biaya penyusutan yang dibebankan selama tahun 2019 sebesar AS\$7.776.112 yang berasal dari penyusutan kapal Ekaputra dan Triputra.

LIABILITAS

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$39.552.169 mengalami penurunan sebesar 6,7% atau AS\$2.867.595 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$42.419.764. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- a. Adanya pembayaran dividen AS\$756 ribu
- b. Adanya penurunan Accrue Biaya pengedokan dan pemeliharaan sebesar AS\$1,6 juta
- c. Adanya penurunan hutang pihak ketiga sebesar AS\$402 ribu.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$42.419.764 mengalami kenaikan sebesar 2,8% atau AS\$1.163.059 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$41.256.705. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar AS\$5.930.684 yang berasal dari kenaikan biaya pengedokan kapal, utang bunga pinjaman dan biaya bahan bakar kapal. Kenaikan tersebut dikompensasi dengan adanya penurunan atas Hutang kepada pihak berelasi sebesar AS\$3.445.216.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$41.256.705 mengalami kenaikan sebesar 22,4% atau AS\$7.558.818 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$33.697.887. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 sehubungan dengan pembiayaan proyek FSRU Jawa Satu dan dikompensasikan dengan penurunan bagian lancar pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.312.840

Laporan posisi Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$9.339.135 mengalami penurunan sebesar 23,89% atau AS\$2.931.666 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$12.270.801. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya akrual pengedokan sebesar AS\$1.642.309.

Laporan posisi liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$12.270.801 mengalami kenaikan sebesar 75,3% atau AS\$5.271.153 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$6.999.648. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan beban akrual pengedokan kapal sebesar AS\$2.472.167, utang bunga pinjaman sebesar AS\$1.006.262 serta beban pemakaian bahan bakar kapal sebesar AS\$1.722.451

Laporan posisi liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$6.999.648 mengalami penurunan sebesar 51,1% atau AS\$7.321.301 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$14.320.949 yang disebabkan terutama oleh penurunan bagian lancar pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.312.840 dan penurunan beban akrual pengedokan kapal sebesar AS\$2.563.160

Laporan posisi Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$30.213.034 mengalami kenaikan sebesar 0,21% atau AS\$64.071 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$30.148.963. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang pihak berelasi sebesar AS\$64.071.

Laporan posisi liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$30.148.963 mengalami penurunan sebesar 12,0% atau AS\$4.108.094 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$34.257.057. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$2.000.239 sehubungan pembayaran di tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima dimuka sebesar AS\$1.157.632

Laporan posisi liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$34.257.057 mengalami kenaikan sebesar 76,8% atau AS\$14.880.119 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$19.376.938. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 sehubungan dengan pembiayaan proyek Jawa Regas Satu yang dikompensasikan dengan penurunan bagian jangka panjang piutang pihak berelasi sebesar AS\$3.495.190.

4.2.2. Perkembangan Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$59.609.009 mengalami penurunan sebesar 1% atau AS\$661.143 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$60.270.152. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sampai dengan periode 31 Mei 2021.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$60.270.152 mengalami peningkatan sebesar 29,6% atau AS\$13.757.678 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$46.512.474. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$46.512.474 mengalami peningkatan sebesar 22,7% atau AS\$8.592.097 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$37.920.377. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

4.3. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

A. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Rasio Kas	127,2%	157,3%	47,1%
Rasio Lancar	182,2%	172,8%	50,1%

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 127,2%; 157,3% dan 47,1%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali dan perubahan pinjaman modal.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 182,2%; 172,2% dan 50,1%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini.

B. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. :

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Liabilitas Terhadap Aset	41%	47%	47%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	70%	89%	89%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 41%; 47% dan 47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 70%; 89% dan 89%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

C. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Imbal Hasil Aset (ROA)	16%	12%	10%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	27%	23%	20%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 16%; 12% dan 10% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih dan total aset yang meningkat setiap tahun nya.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 27%; 23% dan 20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba Perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya.

5. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	12.125.874	14.981.774	17.729.169
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3.330.567)	(19.842.597)	(10.038.885)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(4.199.020)	9.122.082	(10.120.866)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	1.247	(1.252)	987
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	4.597.534	4.260.007	(2.429.595)
Kas dan setara kas pada awal tahun	11.010.175	6.750.168	9.179.763
Kas dan setara kas pada akhir tahun	15.607.709	11.010.175	6.750.168

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$3.855.900 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima dari pelanggan sebesar AS\$1.068.807 dan kenaikan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar AS\$1.863.816.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$2.747.395 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima dari pelanggan sebesar AS\$3.114.595 yang dikompensasi dengan penurunan kas yang dibayarkan oleh pemasok sebesar AS\$276.880.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$16.512.030 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan terkait dengan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$17.876.016 yang dikompensasikan dengan kenaikan kas yang digunakan sehubungan dengan uang muka biaya pengedokan kapal sebesar AS\$828.394. Pinjaman kepada pihak berelasi tersebut terkait dengan pembiayaan proyek FSRU Jawa Satu.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$9.803.712 terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang digunakan terkait dengan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$19.297.000 di tahun 2019 yang dikompensasikan dengan penurunan kas yang digunakan sebesar AS\$9.689.439 sehubungan dengan pembayaran biaya pengedokan kapal Ekaputra dan Triputra di tahun 2018.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$13.321.102 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima terkait dengan penerimaan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Bamboo Mountain Power B.V. sebesar AS\$19.442.397 yang dikompensasikan dengan penurunan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$5.313.037.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$19.242.948 terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang diterima terkait dengan penerimaan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Bamboo Mountain Power B.V. sebesar AS\$19.442.397 serta adanya penurunan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$1.395.994..

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya kapal dan investasi. Untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dari penerimaan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar AS\$15.607.709. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu dari piutang usaha sebesar AS\$2.982.649.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman pihak berelasi.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Perseroan dan Entitas anaknya dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara HTK, BIS dan Pelindo Energi Logistik (PEL) selama 7 tahun dan berakhir pada 31 Maret 2023, akan meningkatkan likuiditas Perseroan.
2. Perjanjian antara Perseroan dan Bamboo Mountain Power B.V (Bamboo) yang akan jatuh tempo pada Februari 2047, tidak akan mempengaruhi likuiditas Perseroan dikarenakan seluruh pembayaran bunga dan pokok pinjaman disesuaikan dengan dividen yang diterima Perseroan dari JSR.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material. Sehingga tidak ada pengungkapan tambahan mengenai komitmen investasi belanja modal. Perseroan memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, yaitu instalasi permesinan di sistem pembakaran bahan bakar *low Sulphur* dan pembuangan sampah non organik.

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing dikarenakan kontra *Time Charter Party* dimana harga tidak berubah.

7. MANAJEMEN RISIKO

Kebutuhan likuiditas kas Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman jangka panjang.

Perseroan dan Entitas Anak secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
31 Desember 2020						December 31, 2020
Utang usaha						Trade payables
- Pihak-pihak ketiga	572.354	-	-	-	572.354	Third parties -
Utang dividen	756.341	-	-	-	756.341	Dividends payable
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak-pihak ketiga	174.639	-	-	-	174.639	Third parties -
- Pihak berelasi	7.906.593	-	-	-	7.906.593	Related parties -
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549	-	-	-	8.456.549	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	2.799.973	-	-	4.078.991	Loan from related parties
	19.145.494	2.799.973	-	-	21.945.467	

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko perseroan terhadap kecelakaan dan kerusakan kapal Perseroan

Karena sifat dari operasi penyewaan kapal, Perseroan rentan terhadap risiko adanya karyawan atau pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan di kapal Perseroan. Kecelakaan dapat terjadi karena kebakaran, ledakan atau kejadian lainnya. Selain itu, kapal Perseroan dapat terlibat dalam tabrakan yang berakibat pada kerusakan terhadap muatan atau kapal atau hilangnya nyawa, dimana Perseroan dapat diklaim oleh pihak ketiga. Kecelakaan dan gangguan terhadap operasional Perseroan akan menimbulkan akibat yang negatif terhadap citra perusahaan dan kinerja keuangan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1) Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan

Kegiatan penyewaan kapal didasarkan pada kontrak kerja dengan para pelanggan dengan masa kontrak antara 7(tujuh) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan untuk Multi-spot Charter berlaku 1 (satu) tahun. Kontrak kerja tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan beberapa saat sebelum kontrak tersebut berakhir. Kontrak dapat juga diakhiri sebelum jatuh tempo jika terjadi *force majeure* atau salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak.

Apabila Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang sudah berakhir, hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional serta prospek kegiatan usaha Perseroan.

2) Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan

Secara historis, Perseroan membukukan pendapatan usaha secara mayoritas berasal dari salah satu perusahaan minyak yang dimiliki oleh negara dan anak usaha nya; yaitu rata-rata tertimbang sebesar 63,9% dalam periode sejak 2018 hingga

akhir tahun 2020. Per tanggal 31 Desember 2020 jumlah seluruh pendapatan dari persewaan kapal dan galangan yang diperoleh dari pelanggan tersebut adalah sekitar 64.15% dari jumlah keseluruhan pendapatan. Meskipun pendapatan usaha yang dibukukan yang berasal dari pelanggan selain pelanggan diatas secara nilai jumlahnya semakin meningkat, namun pertumbuhan pendapatan dari pelanggan tersebut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3) Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang

Sebagian besar dari pendapatan Perseroan diterima dalam USD, sementara ada sebagian biaya operasional dan pinjaman Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Penguatan nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan.

4) Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga

Biaya operasional selalu meningkat setiap tahunnya dan tingkat kenaikannya berfluktuasi tergantung keadaan ekonomi Indonesia. Dalam setiap tahap negosiasi dan berkesepakatan dengan pihak Penyewa, Perseroan berupaya agar biaya bahan bakar (BBM) dan port charges yang sangat fluktuasi dan sangat besar menjadi beban Penyewa. Selain itu mungkin terjadi biaya lain yang belum diantisipasi oleh Perseroan yang dapat meningkatkan biaya operasional kapal yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba Perseroan.

5) Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya

Perseroan umumnya memberikan termin pembayaran kepada pelanggannya dan karenanya rentan terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau gagal bayar pelanggannya. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat menagih piutang tersebut pada waktunya atau seluruhnya. Jika pelanggan Perseroan mengalami kesulitan arus kas atau penurunan dalam kinerja usahanya, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Perseroan. Selain itu, dalam masa resesi ekonomi, pelanggan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan kemungkinan gagal bayar akan menjadi lebih tinggi. Sebagai akibatnya, Perseroan dapat mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya piutang oleh pelanggan. Dalam hal tersebut Perseroan harus mencadangkan piutang ragu-ragu atau menghapuskan piutangnya, yang akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

6) Risiko kehilangan sumber daya manusia

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior dan awak kapal yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personel senior karena alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan berpengalaman, serta mempertahankan awak kapalnya. Upaya Perseroan memberikan insentif seperti membayarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun dan tabungan pension dalam bentuk DPLK serta pemberian asuransi Kesehatan dilakukan agar awak kapal memiliki loyalitas dan motivasi yang tinggi terhadap perusahaan. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan.

7) Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional

Kapal-kapal Perseroan dapat ditahan oleh otoritas untuk investigasi sehubungan dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan, seperti pemenuhan aspek keselamatan, atau bila ada selisih pendapat (*dispute*) dengan penyewa baik perbedaan pendapat mengenai cargo yang diangkut atau selisih pendapat lainnya. Penahanan satu atau lebih kapal Perseroan berakibat terhadap tidak dapat disewakannya kapal tersebut dan dapat mengharuskan Perseroan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit untuk membebaskan kapal tersebut, dan karenanya akan mempengaruhi kegiatan usaha, posisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Selama beberapa tahun terakhir ini, kapal-kapal Perseroan tidak pernah ditahan oleh pihak otoritas. Namun, seperti halnya aset-aset tetap lainnya (seperti gedung, alat alat berat, dan lain-lain), kami menyadari resiko penahanan terhadap kapal itu memungkinkan dan berpotensi mengganggu kinerja operasional perusahaan.

8) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas *cabotage* di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 36/2010 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat perusahaan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih.

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan *crew* serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

9) Risiko persaingan usaha dalam negeri

Munculnya para pesaing Perseroan maupun pendatang baru merupakan tantangan yang harus disikapi and diantisipasi dengan melakukan optimalisasi sumber daya dan rekayasa teknologi sehingga dapat menekan biaya operasional. Pesaing lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan di bawah Perseroan dapat berkompetisi dengan menawarkan harga yang lebih agresif untuk mendapatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan resiko tingkat profit yang rendah bagi pesaing. Perseroan dalam setiap kesempatan saat mengikuti tender/penawaran untuk proyek LNG selalu melihat pesaing yang terdaftar dan melakukan analisa dan mencari informasi kemampuan pesaing dalam upaya memberikan proposal yang terbaik untuk proyek tersebut. Jika pesaing Perseroan dapat memberikan tingkat layanan yang sebanding dengan harga yang lebih rendah dan/atau waktu persiapan yang lebih pendek, Perseroan mungkin harus menurunkan harga sewanya untuk mendapatkan kontrak, yang akan berakibat pada margin keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, Perseroan dapat kehilangan kontrak yang sedang diprosesnya.

10) Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan dan perkembangan teknologi di masa yang akan datang tentu saja tidak bisa dipungkiri karena aset yang dimiliki oleh Perseroan dibangun dan dilengkapi teknologi yang mumpuni dan terbukti untuk dioperasikan dalam rangka menunjang kegiatan Perseroan.

Implementasi atas teknologi di bidang LNG logistik, storage dan infrastruktur memerlukan kajian, diskusi, sosialisasi dan aturan serta pedoman pelaksanaan yang diwujudkan dalam proses sertifikasi yang diakui secara internasional.

Pengumuman perubahan aturan yang dikarenakan oleh teknologi akan dilakukan oleh badan International Maritime Organization (IMO) secara formal dan pemberlakuan atas aturan tersebut yang dituangkan dalam Internasional Code dengan persyaratan jumlah negara yang telah meratifikasi atau jumlah gross tons (GT) negara yang meratifikasi. Setelah pengumuman aturan diundangkan, para pemilik dan industri, diberikan waktu tenggang sebelum aturan tersebut efektif diberlakukan untuk melakukan pemasangan atau instalasi dalam rangka mengadopsi teknologi tersebut.

Total timeline suatu aturan tentang perubahan teknologi diberlakukan kira-kira 5-10 tahun, dimana pihak pemilik dan industri bisa mengajukan keberatan dan penundaan karena ketidaksiapannya.

C. RISIKO UMUM

1) Kondisi perekonomian secara makro atau global

Seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung kepada industri LNG seperti penetapan tarif, subsidi, perpajakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- g. Keterbatasan infrastruktur; dan
- h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan.

2) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas cabotage di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 36/2010 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat perusahaan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih.

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan crew serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

3) Risiko fluktuasi suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

4) Tuntutan atau gugatan hukum

Hingga tanggal prospektus ini, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara/sengketa hukum ataupun menghadapi tuntutan atau gugatan hukum. Kedepannya pun tidak ada yang dapat menjamin Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terhindari dari tuntutan atau gugatan hukum. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan bersalah dalam gugatannya, maka kinerja keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat berpotensi terdampak secara material.

5) Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa distribusi secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk

memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan baik dengan pihak afiliasi maupun pihak selain afiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS dolar, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst and Young) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) yang menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 bertanggal 7 Juli 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dalam rangka pemanfaatan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan konsolidasian interim ini tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan dari Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan Perseroan didirikan dengan nama "PT GTSI Internasional " sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 , serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 tanggal ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	250	250.000.000	100

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021 ("Akta No. 105/2021"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 105/2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Logistik;
- Penyimpanan;
- Pengolahan dan Infrastruktur Gas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
- Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- Aktivitas Perusahaan Holding;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
- Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
- Aktivitas Konsultasi Transportasi;

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	-

Tahun 2013

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 67 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Persetujuan No. AHU-54888.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099889.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ("Akta 67/2013"), struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000	

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Akta 67/2013, para pemegang saham:

- Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000, yang terbagi atas 1.000 saham menjadi sebesar Rp 11.000.000.000 yang terbagi atas 11.000 saham.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp 250.000.000 yang terbagi atas 250 saham menjadi sebesar Rp 2.750.000.000 yang terbagi atas 2.750 saham.
- Menyetujui menerbitkan saham-saham baru sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp 2.500.000.000 sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan, yang keseluruhannya akan diambil oleh PT Hateka Trans Internasional dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra dengan ini juga setuju untuk melepaskan hak nya terlebih dahulu (pre-emptive rights) untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan tersebut.
- Memutuskan untuk membuat perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana termaktub dalam Akta 67/2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100

Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000
-----------------------------	-------	---------------

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana termaktub dalam Akta 67/2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000	

Tahun 2021

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021 ("**Akta 81/2021**"), struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

Bahwa berdasarkan Akta 81/2021, para pemegang saham:

- Menyetujui pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000 menjadi sebesar Rp 50.
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 11.000.000.000 menjadi sebesar 1.500.000.000.000.
- Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 dengan jumlah sebesar Rp 668.207.138.350
- Menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal ayat 2 Anggaran Dasar.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tahun	Kejadian
1990	LNGC Ekaputra merupakan kapal LNG Pertama dan terbesar di Indonesia, dan mulai beroperasi.
2016	Small LNGC Triputra merupakan kapal small LNG pertama di Indonesia yang mengangkut kargo domestik untuk Benoa Project.
2018	Perseroan melalui Entitas Anak PKR memiliki kepemilikan 25% di FSRU Jawa Satu
2020	Penyelesaian pembangunan FSRU Jawa Satu yang merupakan bagian dari Integrated IPP Project (1.760 MW) terbesar di Asia Tenggara bersama Jawa Satu Power.
2021	Penyertaan modal pada PT Anoa Sulawesi Regas, Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas sebanyak 88%

Berikut merupakan sertifikat-sertifikat yang telah diperoleh oleh LNGC Ekaputra dan LNGC Triputra

1) Ekaputra

No	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATE NUMBER	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED	DATE OF ISSUED	EXPIRE
1	Certificate of Class	2015350	Lloyd's Register	BATAM	14-Dec-18	09-Feb-24
2	Cargo Ship Safety Construction Certificate	00194-SC	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
3	Cargo Ship Safety Equipment Certificate	00193-SE	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
4	Cargo Ship Safety Radio Certificate	00197-SR	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
5	International Load Line Certificate	2015350	Lloyd's Register	BATAM	14-Dec-18	09-Feb-24
6	International Tonnage Certificate	4076/Ba	HUBLA	JAKARTA	30-Sep-15	Permanent
7	International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk	00038-GS	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	07-Aug-19	09-Feb-24
8	Permanent Certificate of Registry (Surat Laut)	PK.205/1874/SL-PM/DK-15	HUBLA	JAKARTA	08-Oct-15	Permanent
9	Minimum Safe Manning Certificate	AL.527/07/20/KSOP.BTG-2020	HUBLA	BONTANG	25-Mar-20	24-Mar-21
10	International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate	00161-AP	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
11	International Sewage Pollution Prevention Certificate	00162-SP	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
12	International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate	PK.402/711/IOPP/DK-17	HUBLA	JAKARTA	07-Sep-17	27-Aug-22
13	International Ballast Water Management Certificate	PK.406/107/BWM/DK-17	HUBLA	JAKARTA	11-Sep-17	27-Aug-22
14	International Anti-Fouling System Certificate	00304-AF	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	18-Feb-2021	-

2) Triputra

NO.	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATES NUMBER	DATE OF ISSUED	VALIDITY	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED
1	Certificate of Registry	PK.205/1004/SL-PM/DK-16	8-Sep-2016	Permanent	HUBLA	Jakarta
2	Minimum Safe Manning Certificate	AL.527/13/07/KSOP.BTG-2021	26-Apr-2021	25-Okt-2021	HUBLA	Bontang
3	International Load Line Certificate	121JK0031-LLC	18-Feb-2021	19-Oct-2025	Class NK	Jakarta
4	International Tonnage Certificate (1969)	4184/Ba	1-Sep-2016	Permanent	HUBLA	Jakarta
5	Cargo Ship Safety Construction Certificate	AL.501/21/3/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
6	Cargo Ship Safety Equipment Certificate	AL.501/21/4/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
7	Cargo Ship Safety Radio Certificate	AL.502/7/20/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
8	International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk	AL.501/1/16/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
9	Internal Oil Pollution Prevention	PK.402/712/IOPP/DK-17	7-Sep-2017	27-Aug-2022	HUBLA	Jakarta
10	International Ballast Water Management Cert.	PK.406/108/BWM/DK-17	12-Sep-2017	27-Aug-2022	HUBLA	Jakarta

NO.	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATES NUMBER	DATE OF ISSUED	VALIDITY	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED
11	Certificate of Classification	21JK0031-CLS	18-Feb-2021	19-Oct-2025	Class NK	Jakarta
12	International Sewage Pollution Prevention Certificate	AL.602/113/2/DK/2021	15-Apr-2021	4-Feb-2024	HUBLA	Jakarta
13	International Air Pollution Prevention Certificate	AL.602/113/1/DK/2021	15-Apr-2021	4-Feb-2024	HUBLA	Jakarta
14	International Anti-Fouling System Certificate	AL.602/113/3/DK/2021	14-Apr-2021	10-Aug-2023	HUBLA	Jakarta

4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120014171125 tanggal 17 Mei 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.255.267.1-063.000 tanggal mulai terdaftar 9 Agustus 2012.	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setia Budi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") No. AL.001/134/SP_SIUPAL/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh Menteri Perhubungan
4.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan No. Pendaftaran Perusahaan: 19066969 No. Kendali : 2017-216843
5.	Sertifikat BPJS Kesehatan	Periode 11 Mei 2021 – 10 Mei 2022	Atas nama Perseroan Nomor: 00021163 tanggal 11 Mei 2021

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HSB telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Perdagangan			
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor. B XXXIV-15/AT/54	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan atas nama PT Hikmah Sarana Bahari
2.	Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh Online Single Submission Indonesia tertanggal 7 Februari 2020	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan untuk Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50132), Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI 50142 dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI Nomor 52229).

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220006200477 tertanggal 7 Februari 2021	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan atas nama PT Hikmah Sarana Bahar Diterbitkan Oleh OSS
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Kementrian Keuangan No. 03.088.701.2-063.000	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diterbitkan oleh KPP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BIS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 1274000353204 tanggal 30 Maret 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.324.134.0-063.000 tanggal mulai terdaftar 10 Oktober 2013.	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setia Budi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") No. 1/1/SIUPAL/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh Menteri Perhubungan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HLI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha 912030780023 tanggal 2 Agustus 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Sekaligus merupakan pengesahan TDP, API, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 66.709.369.4-063.000 tanggal mulai terdaftar 19 Maret 2014	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HLI Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") AL.001/90/SP_SIUPAL/IX/2019 tanggal 20 September 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Tanggal 2 Agustus 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Diterbitkan oleh Lembaga OSS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PKR telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015191624 dicetak tanggal 12 November 2018	tidak ada masa berlaku	Atas nama PKR.

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 115/AC.1.7/31.74.02/-1.824.27/e/2018 tanggal 3 Oktober 2018	berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan izin ini	Atas nama PKR. Diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 84.600.395.2-067.000	tidak ada masa berlaku	Atas nama PKR. NPWP tersebut termasuk pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, ANOA telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 1272000602693 dicetak tanggal 29 Juni 2021	tidak ada masa berlaku	Atas nama ANOA. Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 93.527.428.2-067.000	tidak ada masa berlaku	Atas nama ANOA. NPWP tersebut termasuk pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

5. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GTS Internasional Tbk No. 36 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0359402 tanggal 08 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100671.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 08 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris Independen : Hari Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Kemal Imam Santoso
Direktur : Dandun Widodo

DEWAN KOMISARIS



Budi Haryono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun.

Menempuh pendidikan Akademi Akuntansi di Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta tahun 1981, lalu menamatkan Pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1988.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Komisaris Utama PT GTS Internasional
2018 – 2021	Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
2012 – 2018	Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2006 – 2012	Direktur Utama PT Humpuss Transportasi Curah
2000 – 2006	Direktur Keuangan Timor Grup merangkap Anggota Dewan Komisaris Humpuss Grup
1994 – 2000	Direktur Keuangan PT Kaltim Methanol Indonesia
1986 – 1994	Manager/General Manager Humpuss Trading
1981 – 1986	Finance Adm. Manager Dwima Grup
1980 – 1981	Kantor Akuntan Publik Hadori



Hari Purnomo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga tahun 1993 dan meraih Master Program, MBA bidang Keuangan, Universitas Gajah Mada.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Komisaris Independen PT GTS Internasional
2020 – Sekarang	<i>Member of Audit Committee of PEFINDO Credit Bureau</i>
2020 – 2021	Anggota Komite Audit – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2020 – 2021	Anggota Komite GCG & CSR – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2016 – 2020	Direktur Indonesia Credit Rating Agency (PEFINDO)
2013 – 2016	Direktur Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)
2010 – 2013	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia
2007 – 2010	Kepala Divisi Perdagangan Derivatif Bursa Efek Indonesia
2005 – 2007	Vice President, Kepala Divisi Penelitian Bursa Efek Surabaya
2003 – 2005	Manajer Senior Kepala Divisi Penelitian Bursa Efek Surabaya
1999 – 2003	Manajer, Kepala Divisi Keanggotaan, Bursa Efek Surabaya
1998 – 1999	Manajer, Kepala Divisi Listing, Bursa Efek Surabaya
1996 – 1998	Manajer, Kepala Divisi Perdagangan Bursa Efek Surabaya
1995 – 1996	Asisten Manajer, Divisi Pengawasan Pasar Modal, Bursa Efek Surabaya

1993 – 1995	Staf, Divisi Perdagangan dan Pengawasan Pasar Modal Bursa Efek Surabaya
1992 – 1993	Staf, Divisi Keuangan, Omya International Co. Ltd, Indonesia

DIREKSI



Kemal Imam Santoso

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Airlangga tahun 1983, lalu menamatkan Pendidikan Master of Business and Administration dari California State University pada tahun 1988.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Direktur Utama PT GTS Internasional
2021 – Sekarang	Komisaris Independen PT Prodia Widyahusada Tbk
2021 – Sekarang	Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2016 – 2020	Direktur Keuangan & Investasi - BPJS Kesehatan
2014 – 2015	Senior Advisor Investment Banking - Creador
2014 – 2015	Komisaris Utama - PT Asuransi Reliance Indonesia
2013 – 2014	President Direktur - Peruri Digital Security
2008 – 2013	Wakil Direktur Utama dan Chief Information Officer – PT. ASKES
2006 – 2007	Deputy Country Manager Visa Internasional Indonesia
2005 – 2006	Country Marketing Director Citibank
1999 – 2005	Senior Vice President – Group Head Wealth Management Bank Mandiri, Komisaris Utama PT AXA Mandiri, Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi.
1996 – 1999	Vice President Marketing PT Bank Papan Sejahtera
1989 – 1996	Assistant to Vice Merchant Acquiring Business Citibank & Citicorp.

Dandun Widodo

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi - Manajemen Keuangan dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 1985.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Direktur PT GTS Internasional
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Humolco LNG Indonesia
2018 – 2020	General Manager of Commercial PT OTS Internasional dan PT Humolco LNG Indonesia.
2016 – 2018	Sr. Commercial & Accounting Manager PT GTS Internasional dan PT Humolco LNG Indonesia.
2008 – 2016	Commercial & Accounting Manager LNG Division PT Humpuss Transportasi Kimia.

2007 – 2008	<i>Commercial Supervisor</i> LNG Division PT Humpuss Transportasi Kimia.
1993 – 2006	<i>Finance & Accounting General Manager</i> PT FSCM Manufacturing Indonesia (Astra Group)
1991 – 1992	Internal Audit Overseas Express Bank / Bank Utama

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan keuangan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi dan komisaris berakhir

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki masa jabatan 5 tahun.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Dewan Komisaris diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusandiambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan- kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; dan Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, penyelenggaraan rapat yang dilakukan Dewan Komisaris telah menghasilkan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis GTSI. Perhatian utama tetap diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berkaitan dengan operasional baik nasional maupun internasional.

Dewan Komisaris juga menyusun dan menjalankan fokus pengawasan yang mencakup beberapa aspek penting di tahun 2020, meliputi:

1. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk melakukannya untuk disampaikan kepada induk Perusahaan.
2. Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP secara berkala.
3. Dewan Komisaris juga memantau, menganalisis dan memberi masukan atas rencana strategis GTSI.
4. Pengawasan juga dilakukan secara aktif terhadap manajemen risiko untuk operasional kapal.
5. Melakukan review atas laporan keuangan mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Selama tahun 2020, Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.

Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris GTSI wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 3 bulan.

Agenda yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris adalah Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional setiap Triwulan. Dewan Komisaris dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan kondisi semua anggota Dewan Komisaris telah diinformasikan secara tertulis mengenai proposal tersebut dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas proposal tersebut serta menandatangani. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat Dewan Komisaris. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat mencapai 100%.

Hal ini menandakan anggota Dewan Komisaris telah memberikan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas pengawasan.

No.	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran %	Rata-Rata Tingkat Kehadiran %
1	Komisaris Utama	4/4	100	100
2	Komisaris	4/4	100	

Rapat Direksi GTSI wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.

Direksi dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan kondisi semua anggota Direksi telah diinformasikan dan setiap anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis atas proposal tersebut serta menandatangani. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui Rapat Direksi.

Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan 12 kali Rapat Direksi. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi mencapai 96%. Hal ini menandakan anggota Direksi telah memberikan waktu cukup dalam mengurus Perusahaan.

No.	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran %	Rata-Rata Tingkat Kehadiran %
1	Direktur Utama	12/12	100	96
2	Direktur	11/12	92	

*Pada tanggal 5 Desember 2020, Direktur meninggal dunia, sehingga Rapat dihadiri oleh Direktur Utama dan 1 level dibawahnya.

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi:

1. Budi Haryono – Komisaris Utama

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	<i>Leadership Development Forum</i>	17 - 18 Jan 2020	HITS
2	<i>Business Valuation</i>	06 Feb 2020	HITS
3	<i>Mid-Year Economic Outlook 2020: Peluang dan tantangan Indonesia di era new normal</i>	28 Jul 2020	Bisnis Indonesia
4	Peluang dan Tantangan Indonesia di New Normal	28 Juli 2020	Bisnis Indonesia
5	<i>Sustainability strategic development</i>	05 - 06 Agt 2020	HITS
6	Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa COVID 19	19 Agt 2020	INSA
7	Strategi Ekosistem di Era VUCA dan Disrupsi Digital, beserta <i>Economic Outlook Perspective 2021</i>	18 Sept 2020	HITS
8	<i>Health Talk "Sehat Dimasa Pandemi"</i>	02 Okt 2020	HITS
9	Sosialisasi kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik	08 Okt 2020	AEI
10	Vaksin Hati	16 Okt 2020	HITS - ESQ
11	<i>Outlook 2021: The Year of Opportunity</i>	21 Okt 2020	AEI
12	<i>Values HITS "Honesty & Harmony"</i>	06 Nov 2020	HITS - ESQ
13	<i>Values HITS "Innovation"</i>	13 Nov 2020	HITS - ESQ
14	Webinar: EY ISO 37001	13 Nov 2020	EY Forensics
15	Webinar: <i>Indonesian Upstream Outlook</i>	19 Nov 2020	Petromindo
16	<i>Values HITS "Trust"</i>	20 Nov 2020	HITS - ESQ
17	<i>CEO Power Breakfast "Kebijakan Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital"</i>	20 Nov 2020	Berita Satu
18	<i>CEO Networking 2020</i>	24 Nov 2020	OJK, KPEI, KSEI

2. Hari Purnomo – Komisaris Independen

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Advancing Economic Diplomacy Through Rating Agency	02 Mar 2020	PEFINDO
2	Business Resilience During Covid-19	13 Mei 2020	OJK
3	Digital Supply Chain Forum	13 Mei 2020	Kafegama UGM
4	Health Talk "Sehat Dimasa Pandemi"	02 Okt 2020	HITS - BRI Life
5	Indonesia Economic Market and Credit Market Outlook During Covid-19	10 Okt 2020	Proxis
6	Vaksin Hati	16 Okt 2020	HITS - ESQ
7	Preparing for Unprecedented Scenario on The Capital Market: Do Whatever It Takes	21 Okt 2020	UNILA
8	Values HITS "Honesty & Harmony"	06 Nov 2020	HITS - ESQ
9	Values HITS "Innovation"	13 Nov 2020	HITS - ESQ
10	Values HITS "Trust"	20 Nov 2020	HITS - ESQ
11	Capital Market Outlook Key Drivers of Market Growth 2021 & 2021	30 Nov 2020	OJK
12	Key Drivers of Market Growth 2021 and 2021	04 Des 2020	UGM

3. Kemal Imam Santoso – Direktur Utama

Selama tahun 2020, Direktur Utama menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi di BPJS Kesehatan, sehingga kurun waktu tersebut fokus dalam penyelesaian banyaknya kebijakan Pemerintah RI mengenai kesehatan untuk masyarakat Indonesia karena dampak pandemi Covid-19.

4. Dandun Widodo - Direktur

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Business Valuation	06 Feb 2020	HITS
2	Professional Director Program Batch 156	25 – 27 Feb 2020	IICD
3	Sustainability Strategic Development	05 Agt 2020	HITS

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah total sebesar Rp2.085.465.360,- (tidak ada perubahan dari mulai tahun 2018 – 2019 – 2020).

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Direksi adalah total sebesar Rp2.616.182.806,- (tidak ada perubahan dari mulai tahun 2018 – 2019 – 2020).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305BEJ/07-2004 Peraturan No. I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Sekuritas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan peraturan

Bapepam-LK dengan menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pemegang saham investor maupun regulator.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit PT GTS Internasional tertanggal 11 Juni 2021 No. 005/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 yang diketuai oleh Hari Purnomo dan beranggotakan sebagai berikut :

Ketua : Hari Purnomo

Anggota : HM Roy Sembel

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Menempuh pendidikan sarjana di bidang FMIPA/Statistika dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Master of Business Administration di bidang Management and Finance dari Erasmus University Rotterdam dan The Wharton School - University of Pennsylvania USA, dan Ph.D di bidang Corporate Finance/Econometrics dari University of Pittsburgh USA.

Sebelum nya menjabat sebagai Konsultan Senior McKinsey & Co Indonesia (1998 – 2001), Direktur Program MM Keuangan Universitas Bina Nusantara (2001 – 2006), Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Niaga (2005 – 2007), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara (2006 – 2007), Direktur Program Pasca Sarjana UPH (2008 – 2010), Dekan UPH Business School (2008 – 2010), Senior Counselor, Vriens & Partner (2012 – 2015), Dekan IPMI International Business School (2013 – 2017), Komisaris Independen PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2018), dan Direktur PT GTS Internasional (Okt 2019 – Mar 2021).

Anggota : Tammy Meidharma Sumarna

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun. Menempuh pendidikan sarjana Teknik Perkapalan dari ITS Surabaya dan Master of Management di STI EM Jakarta.

Sebelum nya menjabat sebagai Shipyard Maintenance Engineer – Pertamina (1987 – 1997), LNG Shipping and Technical Support – Pertamina (1997 – 2009), LNG and Oil Gas Trading and Pertamina Representative in Japan (2009 – 2012), CEO Perta Daya Gas (2012 – 2013), dan CEO Nusantara Regas (2013 – 2018).

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada tanggal 11 Juni 2021. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Nominasi & Remunerasi PT GTS Internasional tertanggal 11 Juni 2021 No. 001/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 yang diketuai oleh Hari Purnomo dan beranggotakan sebagai berikut :

Ketua : Hari Purnomo

Anggota : Okty Saptarini M.
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid, Jakarta dan Magister Management bidang Komunikasi Universitas Trisakti, Jakarta.

Sebelum nya menjabat sebagai PR Officer PT. Merah Promoseta Indonesia (1995 – 1996), Member Service Officer - PT. Baliarani Sentrawisata (1996 – 1997), Corporate Public Relations - PT Timor Distributor Nasional dan PT Timor Putra Nasional (1997 – 2008), PT Intra Golfink Resort (2010), Assistant Manager PR & GA - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2012 – 2013), Manajer Public Affairs & GA - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2015), Head of Community Development - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2015 – 2019), Corporate Secretary PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (2018 – sekarang).

Anggota : Lisda Y. Satria
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Komunikasi dari Universitas Terbuka dan MSDM dari Universitas Indonesia.

Sebelum nya menjabat sebagai Secretary - PT Timor Putra Nasional (1996 – 2003), SDM Supervisor - PT. Mandala Pratama Niaga (2006 – 2008), HR Manager - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2009 – 2010), General Manager HR - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2011 – 2013), Corporate Secretary - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2014), Komisaris - PT MCS Internasional (2013 – 2015), Direktur PT MCS Internasional (2019 - sekarang), dan Direktur PT ETS Internasional (2018 - sekarang).

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 - a. terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Komite Nominasi & Remunerasi belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Nominasi & Remunerasi baru diangkat pada tanggal 11 Juni 2021. Akan tetapi Komite Nominasi & Remunerasi sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 3 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/DIREKSI-GTSI/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 mengenai pembentukan dan pengangkatan Ketua Internal Audit, yaitu:

Ketua : Dharma Gemiardi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum nya menjabat sebagai Auditor - Osman Bing Satrio (Deloitte Touch Tohmatsu) (1991 – 1996), Factory Controller - Philips Ralin Electronics (1996 – 2003), Accounting Manager - PT. Ramasari Surya Persada (2003 – 2005), Finance Controller- Novotel Surabaya Hotel & Suite (2005 – 2012), Wiraswasta - Brand Vanoser & Picco (2012 – 2013), Senior Manager Finance & Accounting - PT. Reza Perkasa (2013 – 2014), Finance Controller - Artotel Thamrin (2014 – 2015), Finance Controller - Artotel Sanur Bali (2015 – 2016), dan Cluster Finance Controller - Sens & Spa Hotel - Seres Hotel (2016 – 2017).

Fungsi Internal Audit ini adalah:

1. Bahwa Internal Audit merupakan Penunjang Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam menjalankan fungsinya.
2. Bahwa Internal Audit dibentuk oleh Direksi untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan intern dan sistem Manajemen Risiko, sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Bekerjasama dengan Komite Audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait dengan Internal Audit, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan No 009/SK/DIREKSI-GTSI/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk Dandun Widodo, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten untuk mematuhi ketentuan perundang – undangan di bidang Pasar Modal.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT GTS Internasional
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
5. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Perseroan;
6. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
7. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris
10. Mengelola dan mengembangkan citra positif Perseroan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.
11. Mengelola dan memantau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan.
12. Merumuskan kebijakan hubungan dengan investor, kelembagaan dan kegiatan protokoler lain.
13. Mengelola peraturan, perundangan dan dokumen legal perusahaan
14. Merumuskan kebijakan dan strategi kehumasan serta menjamin pelaksanaannya
15. Menyelenggarakan publikasi informasi perusahaan untuk Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya
16. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, *Corporate Action* dan *Public Expose* Tahunan
17. Memastikan frekuensi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk komite – komite di tingkat Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik di bidang Pasar Modal maupun peraturan lainnya, termasuk dalam hal ketersediaan agenda dan materi rapat.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Dandun Widodo
Jabatan	:	Direktur dan Sekretaris Perusahaan
Domisili	:	Mangkuluhur City Tower One, lantai 26 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
Telepon/Faks	:	(+6221) 509 33163 / (+6221) 509 66343
Email	:	corpsec@gtsti.co.id

Demi meningkatkan kompetensi sekretaris perusahaan, berikut pelatihan-pelatihan yang telah diikuti:

- 28 – 30 Juni 2021, *Corporate Governance Officer* yang diadakan oleh *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA).

- 1 – 2 Juli 2021, Transaksi Material & Transaksi Afiliasi yang diadakan oleh *In House*, dengan pembicara Bapak Iwan Setiawan, SH, Senior Partners Makes & Law.

Manajemen Risiko

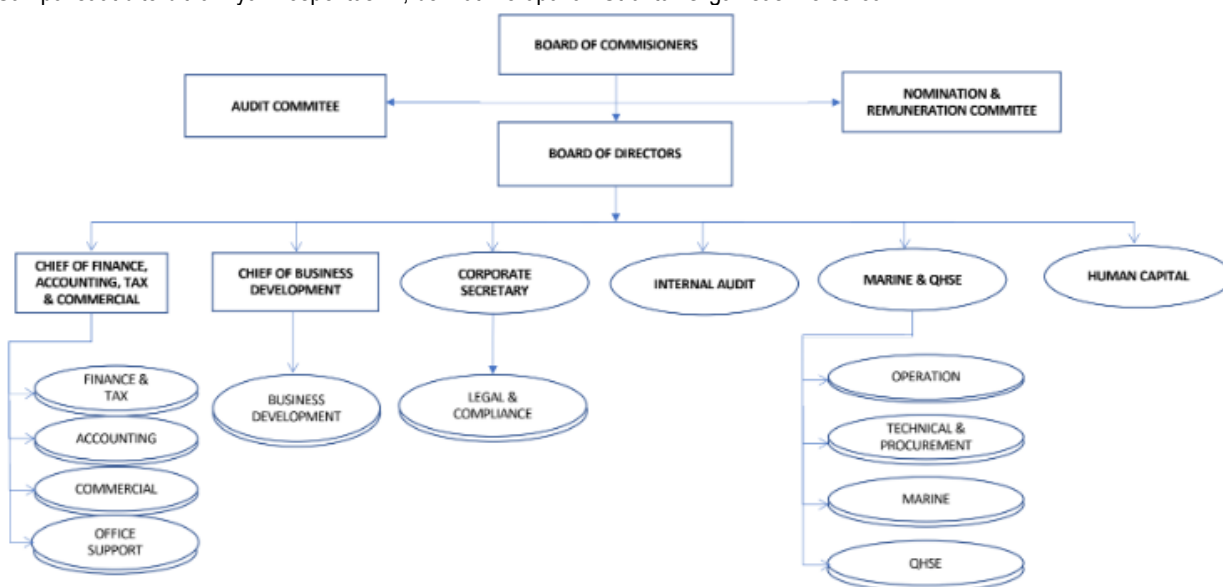
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki manajemen yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam memitigasi risiko-risiko sebagaimana sudah diungkapkan pada bab VI pada prospektus ini. Berikut merupakan mitigasi-mitigasi yang dilakukan terhadap risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan.

No	Risiko	Mitigasi yang dilakukan
1	Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan	(a) Menghitung ulang break even operation cost per day yang harus dipenuhi oleh kapal/unit selama satu tahun. (b) Membuat target dan proyeksi minimum pencapaian dengan 3 asumsi (pesimis, konservatif dan optimis) sesuai point (a) diatas. (c) Bila hasil point (a) dan (b) di atas berdampak negatif, maka kapal/unit di lay-up untuk mengurangi kerugian atas biaya operasi. (d) Pencapaian target dilakukan dengan menawarkan kapal/unit dipasar spot untuk domestik dan juga internasional.
2	Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan	(a) Mengembangkan proyek LNG bersama partner baru yang mumpuni. (b) Mengembangkan potensi kerja sama dengan industri sebagai end user LNG.
3	Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang	(a) Rekening Perseroan dalam USD. (b) Konversi untuk pembayaran dilakukan di hari transaksi (c) Dana cadangan operasi diupayakan seminimum mungkin.
4	Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga	(a) Dalam penyusunan budget ada komponen biaya "Other Cost" yang digunakan untuk biaya tak terduga tersebut. (b) Dalam setiap Perjanjian Sewa Kapal ada klausul terkait biaya untuk instalasi tambahan untuk pemenuhan kapal terhadap terminal LNG akan dibebankan kepada Penyewa. (c) Beban biaya tak terduga akan diusulkan menjadi beban Penyewa pada saat rapat pembahasan budget kapal.
5	Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya	Untuk pinjaman yang menjadi beban afiliasi GTSI (PKR dari Bamboo), pembayarannya akan dibayarkan dari dividen yang akan diterima dari JSR (FSRU Jawa Satu).
6	Risiko kehilangan sumber daya manusia	(a) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa pelayaran yang berprestasi dan kompeten. (b) Merekrut cadet/mahasiswa PKL di Perseroan. (c) Memberikan kesempatan perwira kapal LNG untuk bekerja di kapal. (c) Memberikan insentif/benefit tambahan kepada crew LNG untuk menambah loyalitas kepada Perseroan.
7	Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional	a) Pemenuhan atas semua ketentuan dan aturan yang dipersyaratkan untuk operasi kapal diperhatikan dengan seksama: - Sertifikasi dan ijin operasi - Pemenuhan atau aturan terkait lingkungan - Mempertahankan kondisi kapal untuk layak beroperasi (b) Perseroan berusaha untuk tidak terlibat kasus hukum yang akan berdampak pada gangguan operasional dan penahanan kapal.
8	Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya	(a) Memonitor rencana perubahan kebijakan Pemerintah. (b) Menghitung ulang dampak komersil akibat perubahan kebijakan Pemerintah

No	Risiko	Mitigasi yang dilakukan
9	Risiko persaingan usaha dalam negeri	(a) Berupaya untuk memenangkan setiap proyek LNG yang ditenderkan. (b) Berkordinasi dan aktif dalam organisasi INSA. (c) Memberikan harga penawaran komersial yang kompetitif pada saat tender dilakukan. (d) Menjaga hubungan dengan strategic partner dan client.
10	Risiko Teknologi	(a) Memonitor informasi rencana perubahan teknologi dari badan klasifikasi, asosiasi, bendera kapal dan industri. (b) Berkomunikasi dengan vendor/supplier yang menyediakan teknologi baru.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sampai saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut merupakan Struktur Organisasi Perseroan:



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Perseroan tidak memiliki karyawan hingga 31 Desember 2020, namun pada 31 Mei 2021 Perseroan telah memiliki 26 karyawan. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

PERSEROAN - GTSI

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<26 Tahun	3	-	-	-
26 – 35 Tahun	6	-	-	-
36 – 45 Tahun	14	-	-	-
46 – 55 Tahun	3	-	-	-
>56 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	15	-	-	-
Supervisor	2	-	-	-
Assistant	2	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Manager	5	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	2	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Magister (S2)	10	-	-	-
Sarana (S1)	12	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	3	-	-	-
Non Sarjana	1	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Karyawan Tetap	23	-	-	-
Kontrak	3	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Support	26	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jakarta	26	-	-	-
Vessel:	-	-	-	-
Bontang - Benoa	-	-	-	-
Bontang - Jepang	-	-	-	-
Bontang - Kepri	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

ENTITAS ANAK – HSB

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<26 Tahun	1	3	7	7
26 – 35 Tahun	18	7	19	18
36 – 45 Tahun	17	15	7	7
46 – 55 Tahun	10	9	10	10
>56 Tahun	1	1	3	3
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	=	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-
Perwira	19	18	16	25
Rating	28	27	30	30
General Manager	-	0	0	0
Tenaga Ahli	-	0	0	0
Jumlah	47	45	46	45

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Magister (S2)	8	13	12	11
Sarana (S1)	10	5	4	4
Sarjana Muda (D3)	1	-	-	-
Non Sarjana	28	27	30	30
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	47	45	46	45
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Support	0	0	0	0
Distribusi Energi	47	45	46	45
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel:				
Bontang – Jepang	-	45	46	45
Bontang – Kep. Seribu	47	-	-	-
Jumlah	47	45	46	45

ENTITAS ANAK – BIS

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	2	2	3	3
26 – 35 Tahun	14	12	11	11
36 – 45 Tahun	13	17	18	17
46 – 55 Tahun	9	13	15	14
>56 Tahun	4	1	3	2
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-
Perwira	18	19	21	20
Rating	24	26	29	27
General Manager	-	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	42	45	50	47

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Magister (S2)	11	15	14	13
Sarana (S1)	2	4	7	7
Sarjana Muda (D3)	5	-	-	-
Non Sarjana	24	26	29	27
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	42	45	50	47
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Support	-	-	-	-
Distribusi Energi	42	45	50	47
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel:				
Bontang - Benoa	42	45	50	47
Bontang – Jepang	-	-	-	-
Bontang – Kep. Seribu	-	-	-	-
Jumlah	42	45	50	47

ENTITAS ANAK – HLI

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	-	-	-	-
26 – 35 Tahun	-	-	-	-
36 – 45 Tahun	1	-	-	-
46 – 55 Tahun	-	-	-	-
>56 Tahun	1	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent				
Manager	2	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	-	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Magister (S2)	-	-	-	-
Sarana (S1)	2	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	-	-	-	-

Non Sarjana	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	2	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Support	2	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	2	-	-	-
Vessel:	-	-	-	-
Bontang - Bena				
Bontang – Jepang				
Bontang - Kepri				
Jumlah	2	-	-	-

ENTITAS ANAK – PKR

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	-	-	-	-
26 – 35 Tahun	-	-	-	-
36 – 45 Tahun	-	-	-	-
46 – 55 Tahun	-	-	-	-
>56 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent				
Manager	-	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	-	-	-	-

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Magister (S2)	-	-	-	-
Sarana (S1)	-	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	-	-	-	-
Non Sarjana	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Support	-	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel	-	-	-	-
Bontang - Benoa	-	-	-	-
Bontang – Jepang	-	-	-	-
Bontang – Kep. Seribu	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperkerjakan tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:

Nama TKA	Jabatan	Paspor		Notifikasi		Izin Tinggal Terbatas	
		No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Takashi Matsuda	Operating Manager	TZ1140980	15-06- 2026	042262/PP TK/PTA/N OTIF/2020	13-08- 2021	2C21JE86 01-U	13-08-2021
Tomohiro Ryono	Operating Manager	TR8346015	19-05-2027	043224/PP TK/PTA/N OTIF/2021	09-06- 2022	2C11JE27 36-V	18-06-2022

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Para karyawan dituntut terus mengembangkan kompetensi agar mampu menyesuaikan diri dengan teknologi dan berinovasi guna mendukung kebijakan efisiensi Perseroan. Pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan dengan pendekatan kesempatan setara kepada setiap karyawan. Selama tahun 2020, dalam kondisi pandemi PT GTS Internasional mendorong seluruh karyawan untuk melakukan pelatihan secara daring. Kegiatan pelatihan menjadi salah satu target pencapaian kinerja (KPI) yang harus dicapai.

Selain melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, pengembangan karir karyawan juga ditentukan hasil penilaian kinerja individu. Secara prinsip Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karir mereka, tanpa melihat latar belakang jenis kelamin, suku, agama, ras, afiliasi politik maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif.

Remunerasi

Berdasarkan statusnya, pekerja di Perseroan terbagi dalam tiga kategori besar, yakni Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu Tertentu (PWT), dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP). Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima pekerja sebagai komponen upah. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Secara rinci, tunjangan yang diterima oleh masing-masing pekerja berdasarkan statusnya adalah sebagai berikut:

PROGRAM K3	FREKUENSI	KANTOR	LAPANGAN
Induksi dan re-induksi untuk karyawan dan tamu	Setiap naik kapal		√
Kampanye K3	Setiap bulan	√	√
OSI (on spot inspection) untuk area kerja	Setiap bulan		√
Inspeksi Kapal	Setiap 6 Bulan		√
Inspeksi Terpadu dari Kementerian Terkait	Setiap 6 Bulan		√
Commissioning kendaraan atau Kapal			
Pemasangan, inspeksi, dan pemantauan rambu dan label safety	Situasional	√	√
Pengembangan Kompetensi Karyawan terkait K3	Setahun Sekali	√	
Inspeksi fatigue	Setiap bulan		√
HSE Meeting untuk tiap tingkatan	Setiap Minggu	√	
Inspeksi kelengkapan unit dan kelengkapan karyawan terkait K3	Setiap Bulan	√	√
Monitoring kesehatan karyawan	Setiap Bulan	√	√
Kampanye dan in-house training K3	Situasional		
Monthly QS-SHE Meeting	Setiap Bulan	√	√
Safety Committee Meeting	Setiap Bulan	√	√
Safety Awareness Meeting	Setiap 2 Minggu	√	√
Health Check (Heart Beat, Heart Rate, BMI, Height, Weight)	Setiap Bulan	√	√
General Medical Check Up	Setiap tahun sekali	√	√

PROGRAM K3	FREKUENSI	KANTOR	LAPANGAN
Drill keadaan Darurat di Kantor	Setiap tahun sekali	√	
Drill keadaan darurat di Kapal	Setiap Bulan		√
Pengecekan temperatur/suhu tubuh karyawan dan kru kapal	Setiap Hari	√	√

Sarana dan Keselamatan Kerja

K3 menjadi bagian dari penerapan aspek QHSE Perseroan yang merupakan salah satu fokus PT GTS Internasional sebagai QHSE *Excellence* di semua aspek operasional. Untuk mewujudkan QHSE *Excellence*, PT GTS Internasional memiliki Kebijakan HSSE yang memuat komitmen penerapan QHSE yang harus dipatuhi.

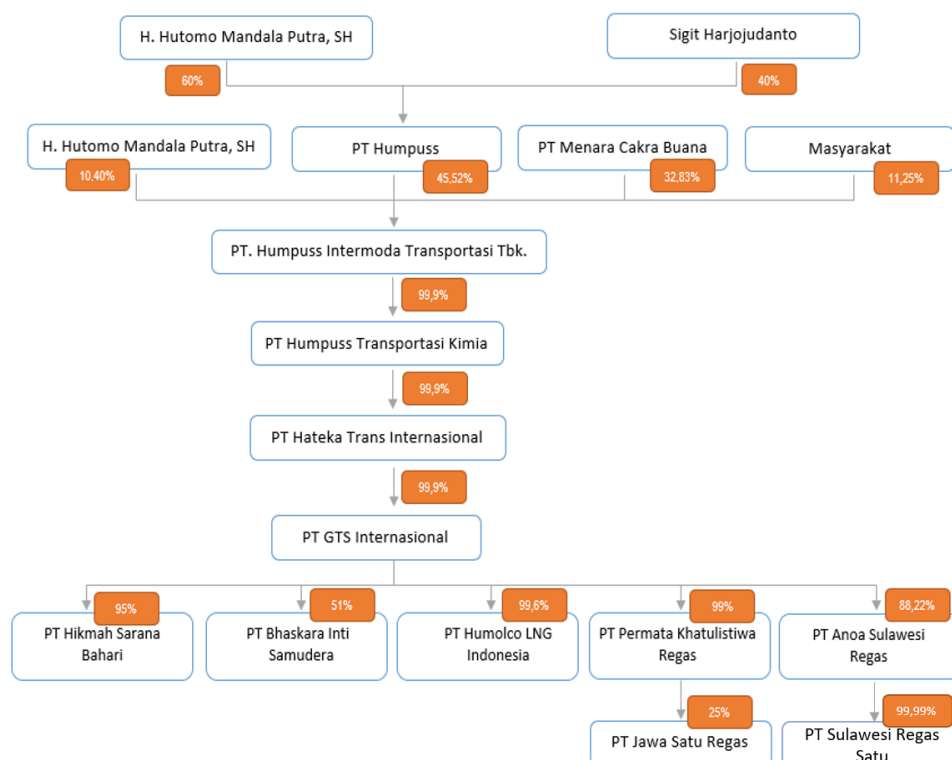
Sesuai Kebijakan QHSE, Perseroan berkomitmen menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, melakukan partisipasi dan konsultasi kepada karyawan serta melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. PT GTS Internasional melalui anak Perusahaannya, PT Humolco LNG Indonesia membangun Sistem Manajemen Mutu/Kualitas (SMMK3L) yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan ISM Code. Anak Perusahaan/Unit Usaha melaksanakan tanggung jawabnya secara konsisten dan transparan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan di dalam prosedur (SOP) setiap departemen.

Serikat Pekerja

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

Sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini, berikut merupakan struktur pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.



Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Pengendali Perseroan adalah H. Hutomo Mandala Putra, SH

Nama	Perseroan	HSB	BIS	HLI	PKR
Kemal Imam Santoso	DU	-	-	-	K
Budi Haryono	KU	K	K	-	-
Theo Lekatompessy	-	KU	-	-	-
Heru Prasetyo Kriestiantho	-	-	-	D	D
Achmadi	-	DU	-	-	-
Made Adi Putra	-	-	KU	-	-
Kenichi Ushio	-	-	K	-	-
Ryota Hayashi	-	-	K	-	-
Dandun Widodo	D	D	DU	DU	-
Yasuaki Nagata	-	-	D	KU	-
Ery Setio Cahyo Gemilang	-	-	D	-	-
Justinus Tangkelangi	-	-	-	K	-
Epriliyono Budi	-	-	-	-	DU
Makoto Oyama	-	-	-	D	-
Hari Purnomo	KI	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama
D : Direktur

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

A. Hateka Trans Internasional

Riwayat Singkat

PT Hateka Trans Internasional ("HTI") didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas HTI No. 236 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30162.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0052163.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013. HTI berdomisili di Jakarta Pusat

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian No. 236 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30162.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0052163.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013., maksud dan tujuan HTI ialah berusaha dalam bidang usaha Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam dan Luar Negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HTI dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pelayaran dalam Negeri yang menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal, Jasa Pelayaran dan Pengangkutan, Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas, Jasa Penyewaan Kapal Laut, Perwakilan Pelayaran, Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran, Usaha Pelayaran Penundaan Laut, Jasa Penyewaan Peralatan Pelayaran, Pelayaran Luar Negeri antar Negara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HTI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 144 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Persetujuan No. AHU-13728.40.20.2014

tanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0137290.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	425.810	425.810.000.000	
Humpuss Transportasi Kimia	400.301	400.301.000.000	99.99
Nyonya Lisda Yulianti	11	11.000.000	0.01
Modal Ditempatkan dan Disetor	400.312	400.312.000.000	100
Saham Dalam Portepel	25.498	25.498.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0222524 tanggal 17 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091735.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 17 Juli 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HTI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : M. Rino Arief

Direksi

Direktur : M. Yyak Iskandar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 yang tidak diaudit. Melampirkan juga ikhtisar data keuangan penting dari PT. Humpuss Transportasi Kimia. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	33.107.941	33.107.941	33.108.238
Jumlah liabilitas	370	(19)	(19)
Jumlah ekuitas	33.107.571	33.107.961	33.108.257

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) kotor	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(390)	(296)	(128)
Laba (rugi) tahun berjalan	(390)	(296)	(128)
Laba (rugi) komprehensif	(390)	(296)	(128)

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Entitas Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2010	Pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal	95%	Operasional
PT Bhaskara Inti Samudera	2013	2014	Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri	51%	Operasional
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2014	Jasa, Pengangkutan dan Perdagangan	99,96%	Operasional
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,99%	Operasional
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2021	Perusahaan Holding dan Jasa.	88,22%	Operasional
PT Sulawesi Regas Satu	2019	2019	Pergudangan dan Penyimpanan	99,99%	Operasional

***Keterangan:**

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing anak memberikan kontribusi sebagai berikut:

Entitas Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap total liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap total ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap penjualan bersih Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak Perseroan
PT Hikmah Sarana Bahari	44%	14%	65%	64%	63%
PT Bhaskara Inti Samudera	29%	2%	48%	34%	31%
PT Humolco LNG Indonesia	2%	3%	1%	3%	4%
PT Permata Khatulistiwa Regas	22%	2%	36%	0%	14%

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki tidak berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

A. Hikmah Sarana Bahari

Riwayat Singkat

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Beby P. Perwita Sari, S.H., MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-4428.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 8 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020503 tanggal 15 Juni 2021.

Perubahan Anggaran Dasar HSB yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan HBS.

HSB berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT HSB Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, maksud dan tujuan HSB ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50132) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50133) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- c. Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50142) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50143) yang mencakup: Usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang (angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia) dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 52229), yang mencakup: Kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainya

Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 52229), yang mencakup: Kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainya.

Bahwa HSB telah beroperasi berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") No. 0220006200477 tanggal 7 Februari 2020 dengan perubahan ke-2 17 Juni 2021 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan menjalankan tiga bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50132), Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI 50142) dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI Nomor 52229).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HSB sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-

AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	155.000 lembar saham terbagi menjadi 128.250 Saham Seri A, 6.750 Saham Seri B dan 20.000 Saham Seri C	Seri A 1.358.400 Seri B 1.358.400 Seri C 1.000.000	100
1. Perseroan	128.250 Saham Seri A	174.214.800.000	95
2. Mitsui O.S.K Lines Ltd	6.750 Saham Seri B	9.169.200.000	5
3. Saham Treasury	20.000 Saham Seri C	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	155.000	203.384.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

- Saham Seri A merupakan saham yang mempunyai hak sudata dan hak untuk diutamakan dari saham Seri C dalam menerima pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi dan memiliki hak khusus untuk mencalonkan direktur utama
- Saham Seri B merupakan saham yang mempunyai hak suata dan mendapatkan hak untuk diutamakan dari Saham Seri C dalam menerima pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi
- Saham Seri C merupakan saham biasa dengan hak suara namun tidak diprioritaskan terlebih dahulu dalam hal keutamaan yang diberikan terhadap saham Seri A dan Seri B

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Herlina Nasution, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh penerimaan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0264549 tanggal 26 April 2021 dan telah diterima serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0076586.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HSB terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theo Lekatompessy

Komisaris : Budi Haryono

Direksi

Direktur Utama : Achmadi

Direktur : Dandun Widodo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD Dolar)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	45.226.486	39.502.826	46.098.342

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah liabilitas	5.972.846	4.020.591	11.232.075
Jumlah ekuitas	39.253.640	35.482.235	34.866.267

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam USD Dolar)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	20.098.596	19.158.598	17.408.523
Beban pokok penjualan	(8.477.476)	(9.184.092)	(7.652.896)
Laba kotor	11.621.120	9.974.506	9.755.627
Laba sebelum pajak penghasilan	10.340.596	8.592.118	7.634.607
Laba (rugi) tahun berjalan	10.099.413	8.362.215	7.425.705
Laba (rugi) komprehensif	10.099.413	8.362.215	7.425.705

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$45.226.486 mengalami kenaikan sebesar 14% atau AS\$5.723.660 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$39.502.826. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$2.746.946 dan persediaan sebesar AS\$1.722.451 yang berasal dari kenaikan atas persediaan bahan bakar sehubungan dengan redelivery kapal Ekaputra dari Pertamina pada bulan Desember 2020 serta kenaikan aset tetap sebesar AS\$1.576.303 terkait pengedokan yang terjadi di tahun 2020. Kenaikan ini dikompensasi oleh penurunan dari piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$399.284 sehubungan dengan sewa kapal.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$39.502.826 mengalami penurunan sebesar 14% atau AS\$6.595.516 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$46.098.342. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas sebesar AS\$1.316.916, penurunan piutang dari pemegang saham sebesar AS\$1.381.120 terkait dibelinya kembali saham Perusahaan, serta penurunan aset tetap, bersih disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan sebesar AS\$4.420.715.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$5.972.846 mengalami kenaikan sebesar 49% atau AS\$1.952.255 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$4.020.591. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo utang pihak ketiga terkait operasional dan pengedokan sebesar AS\$5.353.744. Kenaikan ini dikompensasi dengan penurunan pendapatan yang ditangguhkan disebabkan realisasi dan pembayaran dividen di tahun berjalan masing-masing sebesar AS\$3.086.655 dan AS\$316.400.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$4.020.591 mengalami penurunan sebesar 64% atau AS\$7.211.484 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$11.232.075. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan saldo pinjaman dengan pihak berelasi sebesar AS\$4.707.747 dan realisasi pendapatan yang ditangguhkan sebesar AS\$1.955.634.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$39.253.640 mengalami kenaikan sebesar 11% atau AS\$3.771.405 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$35.482.235. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$35.482.235 mengalami kenaikan sebesar 2% atau AS\$615.968 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$34.866.267. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$1.737.198 atau sebesar 21% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan laba kotor sebesar AS\$1.646.614 dan kenaikan pendapatan bunga dan operasi lainnya sebesar AS\$89.487.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$936.510 atau sebesar 13% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan pendapatan sewa kapal disebabkan penambahan modifikasi *Low Sulphur* yang direimburs ke pelanggan dan efisiensi beban operasional serta penurunan beban bunga karena pelunasan secara penuh pinjaman dari pihak ketiga.

B. PT Bhaskara Inti Samudera

Riwayat Singkat

PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS") didirikan berdasarkan Akta Pendirian BIS No. 153 tanggal 21 November 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63557.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 04 Desember 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020501 tanggal 15 Juni 2021.

Perubahan Anggaran Dasar BIS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BIS No. 18 tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00185095.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192964 tanggal 25 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055911.AH.01.11 Tahun 2021 ("Akta No. 18/2021"), yaitu dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan BIS serta mengangkat susunan Direksi BIS.

BIS berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 18/2021, maksud dan tujuan BIS ialah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh BIS adalah jasa pengangkutan laut (pelayaran) dalam negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham BIS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BIS No. 59 tanggal 22 September 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019378.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 April 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0091227 tanggal 20 Oktober 2016 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham di bawah No. AHU-0124190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 26 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.287.291	314.364.550.000	100
1. Perseroan	3.206.551	160.327.550.000	51
1. PPT Energy Trading Co., Ltd	1.571.817	78.590.850.000	25
2. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd	1.207.245	60.362.250.000	19,2
3. LNG Japan Corporation	301.678	15.083.900.000	4,8
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.287.291	314.364.550.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 18/2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BIS terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Made Adi Putra
 Komisaris : Budi Haryono
 Komisaris : Kenichi Ushio
 Komisaris : Ryota Hayashi

Direksi

Direktur Utama : Dandun Widodo
 Direktur : Yasuaki Nagata
 Direktur : Ery Setio Cahyo Gumilarto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	29.794.200	28.568.815	30.522.752
Jumlah liabilitas	837.492	564.483	2.949.651
Jumlah ekuitas	28.956.708	28.004.332	27.573.101

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	10.548.240	10.518.600	9.270.653
Beban pokok penjualan	(5.377.768)	(6.324.068)	(7.132.728)
Laba kotor	5.170.472	4.194.532	2.137.925
Laba sebelum pajak penghasilan	5.078.955	4.057.454	594.601
Laba tahun berjalan	4.952.376	3.931.231	483.353
Laba komprehensif	4.952.376	3.931.231	483.353

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$29.794.200 mengalami kenaikan sebesar 4% atau AS\$1.225.385 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$28.568.815. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$1.367.487 dan piutang pihak berelasi sebesar AS\$943.214 serta uang muka untuk pengedokan sebesar AS\$1.024.545. Kenaikan ini dikompensasi oleh penurunan aset tetap disebabkan depresiasi sebesar AS\$2.108.881.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$28.568.815 mengalami penurunan sebesar 6% atau AS\$1.953.937 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$30.522.752. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang sebesar AS\$2.520.496 terkait piutang usaha pihak berelasi, serta penurunan aset tetap, bersih disebabkan oleh depresiasi dan penyesuaian biaya pengedokan sebesar AS\$4.861.044. Penurunan ini dikompensasi oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$5.499.457.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$837.492 mengalami kenaikan sebesar 49% atau AS\$273.009 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$564.483. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dividen sebesar AS\$576.000 yang dikompensasi oleh penurunan hutang sebesar AS\$273.895.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$564.483 mengalami penurunan sebesar 81% atau AS\$2.385.168 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$2.949.651. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan hutang pihak ketiga atas pengedokan ditahun berjalan sebesar AS\$2.564.787.

Ekuitas**Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$28.956.708 mengalami kenaikan sebesar 3% atau AS\$952.376 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$28.004.332. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$28.004.332 mengalami kenaikan sebesar 2% atau AS\$432.231 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$27.573.101. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi**Laba (Rugi) Tahun Berjalan****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$1.021.145 atau sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan karena efisiensi biaya dan penurunan biaya depresiasi Triputra di pertengahan tahun karena aset pengedokan telah selesai diamortisasi di Juni 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$3.447.878 atau sebesar 713% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari pendapatan operasional sewa kapal dan efisiensi biaya operasional perusahaan terkait kapal pengganti dan beban piutang tak tertagih dari tahun sebelumnya

C. PT Humolco LNG Indonesia**Riwayat Singkat**

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 04 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10957.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021412.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 ("Akta Pendirian HLI").

Anggaran Dasar HLI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar HLI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HLI No. 37 tanggal 7 Juni 2021 ("Akta HLI No. 37/2021"), Akta mana berdasarkan Surat Keterangan No. 380/SL.CN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, masih dalam proses untuk dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH), yaitu dengan agenda merubah Pasal 14 ayat (2) tentang Dewan Komisaris dan perubahan susunan pengurus.

HLI berdomisili di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Humolco LNG Indonesia No. 102 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonite, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) di bawah No. No. AHU-AHU.01.03-0305230 tanggal 29 Juli 2019, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043355.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122909.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 ("**Akta HLI No. 102/2019**"), maksud dan tujuan HLI ialah berusaha dalam bidang jasa, pengangkutan, dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HLI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Transportasi, yang mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi laut;
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang, yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang, yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- e. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, yang mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang (angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia) dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri, termasuk usaha persewaan angkutan laut beserta operatornya;
- f. Angkutan Multimoda, yang mencakup usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda, yang tidak semata-mata memberikan layanan angkutan dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri ke dalam negeri;
- g. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal *lighterage*, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainnya;
- h. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh HLI adalah Aktivitas Konsultasi Transportasi dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HLI sebagaimana termaktub dalam Akta HLI No. 102/2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	100	100
1. Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keterangan No. 380/SL.CN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLI terakhir saat ini adalah berdasarkan Akta HLI No. 37/2021, Akta mana masih dalam proses untuk dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH), susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yasuaki Nagata
Komisaris : Justinus Tangkelangi

Direksi

Direktur Utama : Dandun Widodo
Direktur : Heru Prasetyo Kriestianto
Direktur : Makoto Oyama

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	1,963,883	1,160,074	1,403,345
Jumlah liabilitas	1,209,658	719,693	843,000
Jumlah ekuitas	754,225	440,381	560,345

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	819,357	671,980	705,334
Beban pokok penjualan	(42,531)	(24,810)	-
Laba kotor	776,826	647,170	705,334
Laba sebelum pajak penghasilan	628,018	412,648	354,169
Laba tahun berjalan	513,844	330,036	270,537
Laba komprehensif	513,844	330,036	270,537

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$1.963.883 mengalami kenaikan sebesar 69% atau AS\$803.809 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$1.160.074. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$1.033.324 sebagian besar dari penerimaan uang muka pelanggan sebesar AS\$907.214 dan penambahan uang muka atas renovasi kantor sebesar AS\$70.214. Kenaikan ini dikompensasi oleh pelunasan piutang usaha dari pelanggan sebesar AS\$261.161.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$1.160.074 mengalami penurunan sebesar 17% atau AS\$243.272 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$1.403.345. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar AS\$666.441 terkait pembelian kapal Semar 15 sebesar AS\$202.415, pembayaran pelunasan hutang dividen sebesar AS\$238.000 dan pelunasan biaya gaji sebesar AS\$208.968. Penurunan ini dikompensasikan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$231.232 terkait manajemen kapal dan penambahan aset tetap bersih sebesar AS\$186.818.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$1.209.658 mengalami kenaikan sebesar 68% atau AS\$489.965 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$719.693. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo uang muka diterima dari PT MOL Indonesia sebesar AS\$907.214 yang dikompensasi oleh pembayaran dividen sebesar AS\$335.390.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$719.693 mengalami penurunan sebesar 15% atau AS\$123.307 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$843.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan biaya akrual sebesar AS\$284.772 dan penambahan hutang dividen sebesar AS\$162.000.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$754.225 mengalami kenaikan sebesar 71% atau AS\$313.844 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$440.381. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$440.381 mengalami penurunan sebesar 21% atau AS\$119.964 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$560.345. Penurunan tersebut disebabkan oleh akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$183.808 atau sebesar 56% dibandingkan dengan tahun 2019 yang disebabkan penambahan pelanggan baru di tahun berjalan yaitu PT MOL Indonesia dan efisiensi beban operasional perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$59.499 atau sebesar 22% dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan karena efisiensi biaya perusahaan dari tahun sebelumnya.

D. PT PERMATA KHATULISTIWA REGAS

Riwayat Singkat

PT Permata Khatulistiwa Regas (“**PKR**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PKR No. 117 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017586.AH.01.01 TAHUN 2018 tanggal 3 April 2018, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046285.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 3 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020502 tanggal 15 Juni 2021 (“**Akta Pendirian PKR**”).

Anggaran Dasar PKR telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir PKR adalah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PKR No. 21 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0040590.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0126389.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 21 Juli 2021 (“**Akta PKR No. 21/2021**”) dengan agenda perubahan pasal 3 terkait maksud dan tujuan PKR.

PKR berdomisili di Jakarta Selatan, yang saat ini beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Jakarta 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PKR, maksud dan tujuan PKR ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PKR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh PKR adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham PKR sebagaimana termaktub dalam Akta PKR No. 40/2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000	500.000.000.000	
1. Perseroan	2.739.770	273.977.000.000	99,999
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	25	2.500.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.739.795	273.979.500.000	100
Saham Dalam Portepel	2.260.205	226.020.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PKR No. 39 tanggal 7 Juni 2021 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0383179 tanggal 17 Juni 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PKR terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kemal Imam Santoso

Direksi

Direktur Utama : Epriliyono Budi

Direktur : Heru Prasetyo Kriestiantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Randall International) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0916.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	22.242.486	19.771.260	20.213
Jumlah liabilitas	786.958	583.175	55.512
Jumlah ekuitas	21.455.528	19.188.085	(35.299)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	-	-	-
Beban pokok penjualan	1.437.668	(843.774)	-
Laba (rugi) kotor	1.437.668	(843.774)	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.267.443	(173.036)	23.088
Laba (rugi) tahun berjalan	2.267.443	(173.036)	23.088
Laba (rugi) komprehensif	2.267.443	(218.627)	53.441

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$22.242.486 mengalami kenaikan sebesar 12% atau AS\$2.471.226 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$19.771.260. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar aset derivative sebesar AS\$1.650.510 serta akrual bunga dari pihak berelasi sebesar AS\$827.738.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$19.771.260 mengalami kenaikan sebesar 97.715% atau AS\$19.751.047 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$20.213. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh aset derivatif dan pinjaman kepada pihak berelasi masing-masing sebesar AS\$4.091.405 dan AS\$14.998.890. Kenaikan sebesar AS\$653.641 juga disebabkan karena akrual pendapatan bunga dari pihak berelasi.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$786.958 mengalami kenaikan sebesar 35% atau AS\$203.783 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$583.175. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dengan pihak berelasi sebesar AS\$173.114 dan beban akrual sebesar AS\$30.330.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$583.175 mengalami kenaikan sebesar 951% atau AS\$527.663 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$55.512. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dengan pihak berelasi dan akrual terkait biaya legal proyek Jawa Satu.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$21.455.528 mengalami kenaikan sebesar 12% atau AS\$19.188.085 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$2.267.443. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$19.188.085 mengalami kenaikan sebesar 54.459% atau AS\$19.223.384 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$35.299. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan modal sebesar AS\$19.442.011.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi**Laba (Rugi) Tahun Berjalan****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$2.240.479 atau sebesar 1.410% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan asset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dan peningkatan pendapatan bunga dari JSR sebesar AS\$159.037 yang dikompensasi dengan penurunan beban umum dan administrasi sebesar AS\$480.504.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar AS\$149.148 atau sebesar 649% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan biaya umum dan administrasi dan kerugian aset derivatif sebesar AS\$536.421 dan AS\$206.705 yang dikompensasi dengan kenaikan dari pendapatan bunga dari JSR sebesar AS\$670.732

E. PT ANOA SULAWESI REGAS**Riwayat Singkat**

PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA") ANOA didirikan berdasarkan Akta Pendirian ANOA No. 80 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069336.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252495.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Perubahan Anggaran Dasar ANOA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039453.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122317.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan agenda peningkatan modal dasar.

ANOA berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian ANOA No. 80 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069336.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252495.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, maksud dan tujuan ANOA ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan ANOA ialah menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Holding dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ANOA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Perusahaan Holding**
Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utama nya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham ANOA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039453.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122317.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	93.420	93.420.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	2.475	2.475.000.000	10,60
2. PT OTS Internasional	275	275.000.000	10
3. Perseroan	20.605	20.605.000.000	88,22
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.355	23.355.000.000	100
Saham Dalam Portepel	70.065	70.065.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0091858 tanggal 11 Februari 2021 dan telah dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027463.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ANOA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Epriliyono Budi

Direktur : Achmadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwani dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0916.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Jumlah aset	25.837.675	198.024
Jumlah liabilitas	30.747.253	-
Jumlah ekuitas	(4.909.576)	198.024

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Penjualan bersih	4.005.831	-
Beban pokok penjualan	(6.616.480)	-
Laba kotor	(2.610.649)	-
Laba sebelum pajak penghasilan	(5.107.602)	-
Laba (rugi) tahun berjalan	(5.107.602)	-
Laba (rugi) komprehensif	(5.107.602)	-

F. PT SULAWESI REGAS SATU

Riwayat Singkat

PT Sulawesi Regas SATU ("SRGS") SRGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian SRGS No. 83 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252806.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Perubahan Anggaran Dasar SRGS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0003701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0008835.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 16 Januari 2020 dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan SRGS serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris.

SRGS berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0003701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0008835.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 16 Januari 2020, maksud dan tujuan SRGS ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang perdagangan dan penyimpanan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan SRGS ialah menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Holding dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SRGS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengadaan fasilitas Floating Storage Regasification LNG yaitu melakukan pengadaan fasilitas penyimpanan LNG termasuk namun tidak terbatas ada sarana/prasana terkait;
 - b. Melakukan kegiatan penyewaan fasilitas penyimpanan LNG dan sarana/prasarana terkait;
 - c. Melakukan kegiatan penyimpanan dan regasifikasi LNG;

- d. Memastikan dilakukannya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas FSRU dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- e. Melakukan kegiatan lain yang mendukung operasional perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham SRGS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SRGS No. 83 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252806.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000	1.000	
1. PT Anoa Sulawesi Regas	2.747.250	2.747.250.000	99,9
2. PT Humpuss Transportasi Kimia	2.750	2.750.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750.000	2.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250.000	8.250.000.000	-

*Keterangan:

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0091858 tanggal 11 Februari 2021 dan telah dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027463.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ANOA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theo Lekatompessy
 Komisaris : Achmadi

Direksi

Direktur Utama : Ery Setio Cahyo Gumilarto
 Direktur : Andy Dwi Putranto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst and Young), dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Jumlah aset	25.837.478	197.827
Jumlah liabilitas	30.747.253	-
Jumlah ekuitas	(4.909.775)	197.827

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Penjualan bersih	4.005.831	-
Beban pokok penjualan	(6.616.480)	-
Rugi kotor	(2.610.649)	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5.107.602)	-
Rugi tahun berjalan	(5.107.602)	-
Rugi komprehensif	(5.107.602)	-

11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
Perjanjian Pinjam Meminjam					
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam antara Bamboo Mountain Power B.V. dan Perseroan tanggal 8 Maret 2019,	Perseroan dan Bamboo Mountain Power B.V.	Bamboo Mountain Power B.V. meminjamkan uang sebesar USD 19.442.397	15 Februari 2047	US\$ 19.442.397
Perjanjian Manajemen Kapal					
2.	Amandemen No. 1 Perjanjian Manajemen Kapal "LNG Aquarius" tanggal 17 Januari 2012 ("Amandemen No. 1") tanggal 1 April 2016	- PT Hanochem Shipping (Pemilik); - Mitsui O.S.K. Lines LTD (MOL) - HLI MOL dan HLI bersama-sama disebut sebagai Pengelola	MOL dan HLI menjadi Pengelola Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping	17 Januari 2012 - berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian	\$300.000 per tahun (dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan JISDOR pada tanggal tagihan).
				*Keterangan: Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku	
3.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Surya Aki tanggal 01 Januari 2016	- HLI (Pengelola) - MCGC International Limited (Pemilik)	HLI mengelola Kapal Surya Aki yang dimiliki oleh Pemilik	02 Januari 2016 – berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian	US\$100,000 per tahun, tunduk pada tariff PPN
				*Keterangan: Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
4.	Ship Management Agreement	- HLI (Manager) PT MOL Indonesia (Molindo)	Molindo untuk dan atas nama PT Jawa Satu Regas menunjuk HLI sebagai Manager untuk memberikan jasa pengelolaan Kapal Jawa Satu, terkait dengan pelaksanaan Power Purchase Agreement antara PT Jawa Satu Power dan PT PLN (Persero)	25 tahun setelah COD PPA PT Jawa Satu Power dan PT PLN (Persero) (diasumsikan 1 Januari 2022) *Keterangan: <i>Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku</i>	a. Untuk setiap bulan selama periode antara Maret 2020 sampai dengan tanggal COD: (MF/12) x (RDm/RDb) - MF: Rp 2.653.400.000 - RDm: Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) - RDb: Rp 13.367 b. Untuk periode tagihan dalam 5 (lima) tahun setelah COD: (MF/12) x (RDm/RDB) - MF: Rp 4.975.125.000 - RDm: Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) - RDb: Rp 13.367
5.	Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu	PT Hikmah Sarana Bahari dan PT Pertamina (Persero) dan perusahaan afiliasinya	Penyewaan Kapal Ekaputra	5 (lima) Tahun sampai dengan 31 Desember 2020	Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar AS\$20.098.597 dari perjanjian ini.
6.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus SRGS No. 005/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 No. 1/HK.301/3/MDO-	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Memanfaatkan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional PT	19 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	Tarif Bagi Hasil: 1. Jasa Pemanduan = Pihak I: 0% & Pihak II: 100% 2. Jasa Penundaan = Pihak I: 85% & Pihak II: 15%

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	2020 tanggal 21 Agustus 2020		Sulawesi Regas Satu di Perairan Amurang.		
7.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus SRGS No. 005/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 No. 1/HK.301/3/MDO-2020 tanggal 21 Agustus 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Memfaatkan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional PT Sulawesi Regas Satu di Perairan Amurang.	19 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	Tarif Bagi Hasil: 1. Jasa Pemanduan = Pihak I: 0% & Pihak II: 100% 2. Jasa Penundaan = Pihak I: 85% & Pihak II: 15%
8.	Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Kapal Tunda (Time Charter) di Tersus SRGS No. 4/HK.301/3/MDO-2020 No. 004/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyewakan kapal miliknya kepada PT Sulawesi Regas Satu	Berlaku 1 tahun terhitung saat penyerahan kapal	Rp 450.000.000,-/unit/bulan
9.	Time Charter Party for the Carriage of LNG tanggal 2 Maret 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan Zhejiang Huaxiang Shipping, Co, Ltd	PT Sulawesi Regas Satu menyewa kapal Hua Xiang 8 dari Zhejiang Huaxiang Shipping, Co, Ltd untuk penyimpanan dan regasifikasi LNG	2 tahun dari tanggal 20 Mei 2020	US\$ 32,500/hari
10.	Time Charter Party for the Carriage of LNG tanggal 2 Maret 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT PLN Gas & Geothermal	PT Sulawesi Regas Satu menyediakan sewa fasilitas penyimpanan LNG dan mengelola proses regasifikasi untuk keperluan Kapal Pembangkit Listrik Amurang ("MVPP Amurang") yang disewa oleh PLN	Dimulai pada Tanggal Pengiriman dan berakhir pada tahun ke-15 sejak Tanggal Pengiriman sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1A.	Rp 642.709.606,- per hari, perhitungannya diatur di dalam Perjanjian

12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Triputra tanggal 01 Juni 2016	BIS (Pemilik) dan HLI (Pengelola)	Pemilik menunjuk Pengelola kapal Triputra, termasuk pengawasan dan pemeliharaan, perekrutan dan penyediaan awak kapal, pengaturan pemuatan dan lain lain.	2 Januari 2016 - berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
2.	Perjanjian Jasa dan Konsultasi tertanggal 6 Januari 2020 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan PT Hikmah Sarana Bahari	HSB dan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Perjanjian penyediaan jasa dan konsultasi sehubungan dengan pengelolaan kapal dengan biaya USD 5.000 per bulan	berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
3.	Perjanjian Sewa Kapal Berjangka Waktu (Time Charter Party) tanggal 31 Maret 2016 dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali tanggal 1 Januari 2021 tanggal 01 Juni 2016	BIS (Pemilik) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (Penyewa)	Pemilik bermaksud untuk menyewakan Kapal Triputra kepada Penyewa dengan tujuan untuk menyewakan kembali kepada PT Pelindo Energi Logistik untuk mengangkut LNG.	06 April 2016 – 06 April 2023
4.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charter) tanggal 20 Mei 2019	HLI (Pemilik) dan Humpuss Transportasi Curah (Penyewa)	Penyewa menyewa Kapal Semar Limabelas dari Pemilik untuk mendukung kegiatan jasa penundaan kapal yang dilakukan Penyewa di Pelabuhan Sorong	20 Mei 2022
5.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Ekaputra 1 tanggal 01 Juni 2016	HLI (Pengelola) dan HSB (Pemilik)	1) Pemilik menunjuk Pengelola untuk mengelola Kapal Ekaputra 1 2) Melindungi dan mendukung kepentingan Pemilik dalam semua permasalahan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kapal dan pengelolaan, operasi, perdagangan, pemeliharaan, asuransi, survey dan perbaikan Kapal.	02 Januari 2016 – berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
6.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong tertanggal 21 Agustus 2019 PT Humpuss Transportasi Curah dan Perseroan dengan Addendum 1 tanggal 18 Agustus 2020 dan Amandemen 2 tanggal 27 Juli 2021	PT Humpuss Transportasi Curah dan Perseroan (Pemilik)	Perseroan menyewakan Kapal Semar Tujuhbelas terhadap PT Humpus Transportasi Curah dengan harga sewa Rp. 78.833.333 per bulan	Sampai dengan 22 Agustus 2022
7.	Subordinated Loan Agreement	PT Permata Khatulistiwa Regas (Pemberi)	Pinjaman ini digunakan untuk pengembangan dan	Jatuh tempo pada 15 Oktober 2039

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
		Pinjaman) dan PT Jawa Satu Regas (Peminjam FSRU)	pembangunan proyek dan untuk keperluan modal kerja. Jumlah pinjaman sebesar US\$ 19.297.000.	
8.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 002/SRGS/LOAN/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Amandemen II No. 002/SRGS/LOAN/A2/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 724,698.91	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
9.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 001C/LGT-HTC/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, Amandemen I No. 001C/LGL-HTC/A1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Transportasi Curah (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung operasional sebesar Rp 5.750.000.000,-	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
10.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 003/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 003/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Transportasi Kimia (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 967,414.79	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
11.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 004/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 004/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Utama Trans Kontinental (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 141,323.65	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
12.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 005/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 005/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Utama Trans Kencana (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 250,000	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
13.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 006/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 006/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT OTS Internasional (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 1,599,212.75	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023

***Keterangan:**

Sehubungan dengan perjanjian afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, telah dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan mengikat para pihak. perjanjian dibuat oleh para pihak dengan memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

Perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 25 huruf h angka 20 dan 21 POJK 8/2017.

Adapun perjanjian yang dilakukan perseroan dengan pihak afiliasi, dilakukan secara wajar menurut ketentuan yang berlaku, dan Perseroan berkomitmen untuk transaksi-transaksi yang terjadi di kemudian hari dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi, yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian ini dilakukan dengan perhitungan bisnis yang matang, memperhitungkan antara waktu pinjaman dan imbal hasil yang akan diterima Perseroan atas pinjaman yang diberikan, dan juga memperhatikan aspek kewajaran pada transaksi tersebut.

13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa kapal dan kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai aset yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Kapal

No.	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Pemilik	Pemanfaatan
1.	Semar Tujuhbelas	2004	No. 8848 tanggal 20 September 2019	Perseroan	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Curah untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: - Penundaan kapal; - Menarik tongkang (towing); dan/atau - kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan guna melayani kepentingan Penyewa, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan operasi Kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia.
2.	Triputra	1999	No. 9225 tanggal 15 Agustus 2016	BIS	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Kimia dengan tujuan untuk menyewakan kembali kepada PT Pelindo Energi Logistik untuk mengangkut LNG.
3.	Ekaputra 1	1988	N0. 8976 tertanggal 30 September 2015	HSB	Dikelola oleh HLI pengelolaan Kapal, operasi, perdagangan, pemeliharaan, asuransi, survey dan perbaikan Kapal untuk mendukung usaha time charter ataupun spot contract untuk pengangkutan LNG
4.	Semar Limabelas	2005	No. 5824 tanggal 03 September 2019	HLI	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Curah untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: - Penundaan kapal; - Menarik tongkang (towing); dan/atau - Kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan guna melayani kepentingan Penyewa sepanjang kegiatan

No.	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Pemilik	Pemanfaatan
					tersebut diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan operasi Kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia

2) Aset Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	Pemilik
1.	Toyota Kijang innova 2.96 M/T	2017	B 2695 SOZ	N-04683550	BIS

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebagai Perusahaan yang beroperasi di angkutan laut untuk minyak dan gas, GTSI berkomitmen untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab yang dipastikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih luas dari kegiatan usaha Perseroan. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perseroan selama tahun 2020 dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap situasi Pandemi Covid-19. Fokus utama program tanggung jawab sosial GTSI sepanjang tahun 2020, yaitu di bidang kesehatan karyawan dan awak kapal serta lingkungan.

Kesehatan Karyawan dan Awak Kapal

Perseroan telah meletakkan karyawan sebagai salah satu aset utama. Hal ini ditindaklanjuti dengan upaya maksimum untuk menciptakan suasana dan kondisi yang aman dan nyaman bagi karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan berdampak positif pada semangat, loyalitas dan dedikasi karyawan dalam bekerja. Seiring akan terciptanya hubungan yang selaras antara produktivitas kerja yang meningkat dengan pertumbuhan kinerja Perseroan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan meningkatkan loyalitas serta motivasi awak kapal, Perseroan menyertakan awak kapal dalam program BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan, terutama untuk perwira kapal juga diikuti keluarga dari awak kapal.

Protokol kesehatan GTSI yang harus dipatuhi ketika bekerja di area Perusahaan (Work Form Office/WFO), yaitu:

1. Karyawan wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang telah disediakan sebelum masuk..
2. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker selama berada di area kantor dan pada saat berbicara.
3. Setiap karyawan dicek suhu tubuhnya, apabila karyawan memiliki suhu tubuh ≥ 37 derajat Celsius/batuk ringan/demam ringan, maka dilarang masuk kantor dan wajib memeriksakan diri ke dokter atau istirahat di rumah.
4. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu disesuaikan dengan isian kesehatannya.
5. Seluruh karyawan membawa makan siang dan peralatan makannya.
6. Setiap karyawan beribadah menggunakan perlengkapan ibadah masing-masing.
7. Seluruh karyawan harus selalu menerapkan physical distancing antar pekerja di area kerja.
8. Pelaksanaan protokol kesehatan di GTSI diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 dan HC Departemen yang berhak menegur serta memulangkan karyawan jika melanggar protokol kesehatan.

Program *awareness kesehatan* bagi para karyawan dilakukan bersama antara Satuan Tugas yang dibentuk oleh Manajemen mengintegrasikan koordinasi antar unit usaha dengan melibatkan tim QHSE untuk memitigasi operasional kapal dan *crew* kapal serta HC untuk memitigasi terkait karyawan kantor.

Selama krisis dan keadaan darurat, Satuan Tugas dan HC juga bertugas untuk media konsultasi tentang kesehatan dan keselamatan fisik, akses terhadap layanan rumah sakit. Penyampaian pesan yang terus menerus dilakukan dan, taat pada pola *shift* bekerja, *stay at home*.

Memberikan dukungan untuk implementasi vaksin, didorong dengan kemampuan memiliki pengetahuan atas vaksin tersebut dan pengembangan dari Covid-19. Semua dilakukan melalui *training* atau *coaching* dari para *leader* yang memahami perjalanan Covid-19.

Sebagai bentuk kepedulian PT GTS Internasional terhadap karyawan di tahun 2020, PT GTS Internasional telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.242.000.000,- untuk pembelian vitamin, pemeriksaan Rapid dan PCR secara terjadwal, penyemprotan disinfektan, subsidi penyembuhan. Karyawan yang terpapar selama tahun 2020 sebanyak 2 orang.

Efektif Kerja dalam Work From Home

Pola kerja berubah menjadi *shift*, *Work From Home* dan *Work From Office*, maka *tools* komunikasi difokuskan melalui *soft file flyer* dan artikel kesehatan pencegahan Covid-19 yang dilakukan melalui seluruh saluran yang ada di Perusahaan, mulai *Whatsapp* Grup formal dan informal (komunitas karyawan), email, intranet untuk membangun *awareness and understanding of the changes (all stages)*.

Setiap karyawan memasuki tahap *understanding* dan tetap *up to date* terhadap perubahan, sehingga *negative perception* terhindari. Melalui *socialisation*, *face to face discussion by zoom meeting*, *controlling and monitoring daily tasks* dari setiap *leader* ke anggota timnya. Tujuannya untuk membangun pemahaman terkait kebijakan komunikasi dan keberlangsungan *business process* Perusahaan serta implikasinya terhadap pekerjaan.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Melalui kegiatan filantropi, GTSI memberikan bantuan berupa donasi selama tahun 2020, melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Anak Perusahaan yang dikendalikan oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. selaku induk Perusahaan, diantaranya :

Wonderful Ramadhan, Let's Spread Our Love and Tenderness

Kegiatan bulan Ramadhan tahun ini sedikit berbeda seperti biasanya karena pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Dengan tetap melakukan *physical distancing* dan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), karyawan PT GTS Internasional tetap melakukan serangkaian kegiatan berbagi, namun terbatas, dengan rangkaian kegiatan :

- Khatam Al Qur'an secara online oleh karyawan selama bulan Ramadhan.
- Donasi Jum'at Barokah Karyawan yang disalurkan ke Masjid dan para ulama yang dekat dengan PT GTS Internasional , juga ke Yayasan Yatim Piatu.
- Free Tajil on The Road yang dibagikan kepada pengendara sepeda motor khususnya pengendara ojek.
- Santunan Ramadhan ke 125 anak Yatim Piatu dari 5 Yayasan, di daerah Jakarta dan sekitarnya.
- Paket Sembako yang terdiri dari beras, minyak sayur, gula pasir serta makanan siap saji didistribusikan kepada masyarakat sekitar Granadi melalui Masjid Al Barokah.

Berkurban untuk Masyarakat

PT GTS Internasional pada tahun 2020, berkorban sebanyak 2 ekor sapi pada Hari Idul Adha 1441 H. Distribusi penyembelihan menyebar ke beberapa lokasi sesuai operasi kapal, yaitu di Bontang dan Bali.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Entitas Anak dan Direksi Entitas Anak serta didukung surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing

Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Entitas Anak dan Direksi Entitas Anak, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan

16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	TB2101401	Japan P&I Club	BIS	Protection and Indemnity	Kapal Triputra	1. Polusi Minyak - \$ 1.000.000.000 2. War Risk - \$500.000.000 3. Bio-Chem - \$30.000.000 4. Penumpang dan awak kapal - \$ 3.000.000	20 Februari 2022
2.	90281805	MSIG	BIS	Loss of Hire	Kapal Triputra	\$5.400.000	1 Juli 2021 - 1 Juli 2022
3.	90157082	MSIG	BIS	Hull & Machinery Insurance	Kapal Triputra	\$17.667.650	1 Juli 2021 - 1 Juli 2022
4.	TB2101405	Japan P&I	HSB	Protection and Indemnity	Kapal Ekaputra 1	1. Polusi Minyak - \$ 1.000.000.000 2. War Risk - \$500.000.000 3. Bio-Chem - \$30.000.000 4. Penumpang dan awak kapal - \$ 3.000.000	20 February 2022
6.	Hull & Machinery Risk Insurance tertanggal 23 Juni 2021	Mitsui Sumitomo Insurance	HSB	Hull & Machinery, & c. and War P&I Insurance conditions: Institue War and Strikes Clauses Hulls-Time	Kapal Ekaputra I	US\$ 20.800.000	1 July 2022

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	Marine Risk Insurance tertanggal 23 Juni 2021	Mitsui Sumitomo Insurance	HSB	Hull & Machinery, & c. Insurance conditions: Institute Time Clause-Hulls	Kapal Ekaputra I	US\$ 20.800.000	1 Juli 2022
9.	FPG.14.040.21.0 0014	PT Asuransi FPG Indonesia	HTC	- Hull & Machinery Insurance - Increased Value/Disbursement Insurance - War Risk Insurance	Kapal Semar Limabelas	- Hull & Machinery Insurance: Rp 865.193.906,25 - Increased Value/Disbursement Insurance: Rp 288.397.968,75 - War Risk Insurance: 1.153.591.875	05 Januari 2021 – 04 Januari 2022
8.	FPG.14.040.21.0 0091	PT Asuransi FPG Indonesia	HTC	- Hull & Machinery Insurance - Increased Value/Disbursement Insurance - War Risk Insurance	Kapal Semar Tujuhbelas	- Hull & Machinery Insurance: Rp 662.677.339,20 - Increased Value/Disbursement Insurance: Rp 165.669.334,80 - War Risk Insurance: 828.346.674	11 April 2021 – 11 April 2022

17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Umum

Embrio bisnis Perseroan telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG – *Liquefied Natural Gas*) setelah ditandatanganinya new venture antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikan nya PT Humpuss Intermoda Transportasi pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*, LNG) dan Minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan Kargo dan Keagenan Kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagaimana halnya minyak bumi, transportasi gas alam cair, dari kilang gas baik *on-shore* dan *off-shore* menuju titik-titik regasifikasi dan sentra pembangkit listrik, memetakan *supply chain* yang melibatkan banyak pihak dan membuka peluang usaha bagi Perseroan. Dengan pengalaman grup usaha HITS yang telah berkecimpung dalam industri transportasi laut, khususnya untuk pengangkutan kargo sumber daya mineral (minyak bumi).

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136,000 m³. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus menambah kapasitas angkut hingga mencapai jumlah keseluruhan sekitar 328,500 m³ khusus untuk kapal yang dimiliki sedangkan untuk keseluruhan kapal yang dioperasikan mencapai 472.500 m³. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu Perseroan, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Leberia dengan fokus usaha penyediaan jasa manajemen kapal yang memprioritaskan untuk kebutuhan group Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya operasional armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

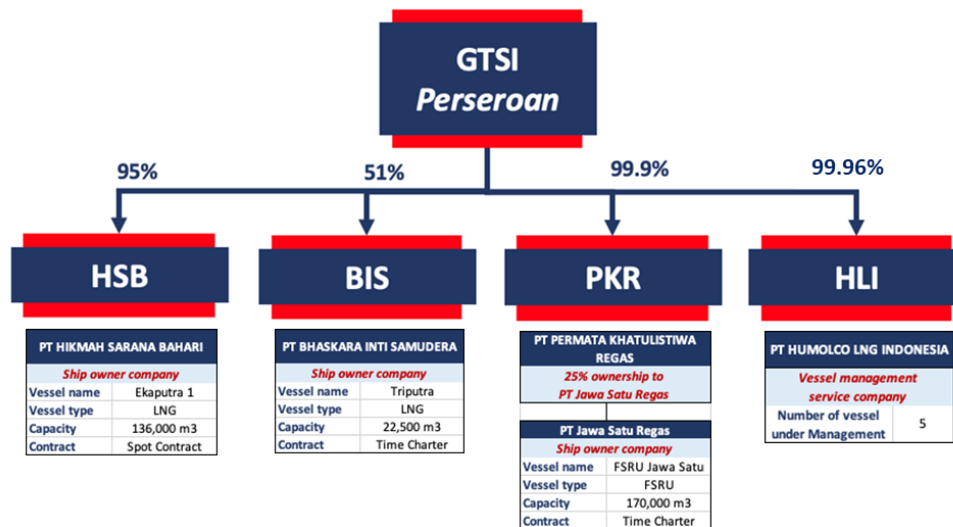
Perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangka penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya Penawaran Umum ini, Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR sebagai pemilik dan operator FSRU; dan HLI sebagai penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian Perseroan berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

Berikut ini merupakan *milestone* Perseroan secara keseluruhan pada saat dimulainya lini bisnis yang dicetuskan dari perusahaan pendahulunya.



Berikut ini adalah struktur kepemilikan usaha Perseroan dengan beberapa Entitas Anak yang dimiliki serta jenis usahanya.



B. Profil Singkat Grup Usaha PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. (“HITS”)

HITS adalah sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1997. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1992 hingga saat ini HITS menjalankan usaha jasa pengangkutan laut untuk berbagai macam jenis sumber daya energi antara lain minyak bumi, gas alam cair dan *petrochemical*. Hingga diterbitkannya Prospektus ini, HITS memiliki 34 armada kapal (minyak jadi, minyak mentah, LNG, kimia cair, keruk, tongkang, tunda dan tambat) dengan tonase total sebesar 158,000 CBM, 121,207 DWT, dan 19,984 MT yang didukung oleh 244 karyawan dalam administrasi Perusahaan, 835 orang Awak Kapal (Milik Sendiri), dan 824 orang Awak Kapal (Milik Prinsipal Lain)

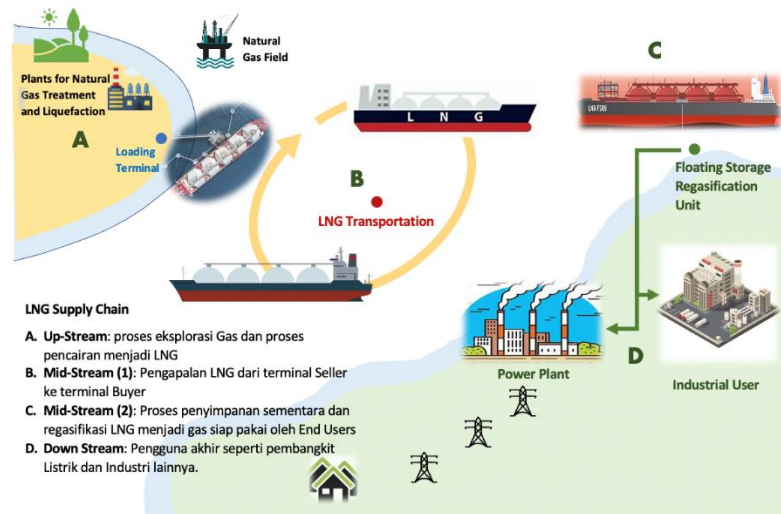
Cakupan lini usaha HITS disamping jasa persewaan kapal untuk minyak bumi, gas alam cair dan bahan kimia berbasis minyak bumi (*petrochemical*); juga meliputi jasa-jasa lain disekitar operasional moda transportasi laut yaitu jasa manajemen kapal, pengawakan (*crewing*), aktivitas pendukung kilang lepas pantai (*offshore support vessels*), jasa kapal pandu dan tunda (*pilot and tug boats*), serta jasa pengerukan pelabuhan (*dredging*).

HITS memiliki sebaran pelanggan yang merupakan nama-nama besar dalam industri pengolahan dan distribusi sumber energi listrik termasuk Badan Usaha Milik Negara, semisal PLN dan Pertamina, serta bermitra dengan berbagai pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

C. Jenis Kegiatan Usaha

Sebagaimana dijelaskan dalam Subbab A Bab VIII ini, sejarah pendirian Perseroan dimulai sejak pertumbuhan jenis kargo LNG yang semula dikerjakan oleh HITS. Seiring dengan pertumbuhan volume dan permintaan pasar pengangkutan kargo LNG milik Pertamina dan PLN. Dengan kompleksitas operasional pengangkutan kargo LNG ini, maka terciptalah sistem rantai suplai LNG (*LNG Supply Chain*) yang melibatkan beberapa pihak seperti digambarkan dalam diagram grafik dibawah ini.

Diagram Rantai Suplai LNG



Aktivitas operasional *up-stream* (A) dilaksanakan oleh perusahaan eksplorasi dan produsen gas alam di kilang gas baik di daratan (*on-shore*) maupun lepas pantai (*off-shore*) untuk mengambil gas alam dari dalam bumi. Proses *up-stream* ini dilanjutkan dengan pemrosesan untuk likuifikasi (*gas liquefaction*) berupa kondensasi yang mengubah wujud gas menjadi benda cair dengan menggabungkan kompresi tinggi serta temperatur rendah yang jauh melewati titik beku ($\pm 160^\circ \text{C}$). Proses likuifikasi ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses logistik untuk mengangkut gas alam dalam jumlah besar dan memungkinkan melalui jarak tempuh yang jauh antar lokasi. Setelah gas alam diubah menjadi bentuk cair maka akan dipersiapkan untuk dapat diangkut oleh kapal pengangkut LNG (*LNG vessels*) dimulai dari loading terminal di area pelabuhan. Karena lokasi *field* gas alam terletak di daerah yang rural, maka kebanyakan status pelabuhan tempat operasional terminal LNG statusnya adalah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan (atau) Terminal Khusus (Tersus).

Pengangkutan dari terminal LNG penjual menuju terminal LNG pembeli (*mid-stream* – B) dilakukan untuk selanjutnya diproses sebagai bahan pembangkit energi dilakukan oleh kapal LNG yang secara komersial dilakukan dengan beberapa metode kontrak persewaan (*charter*) yang akan dijelaskan lebih lanjut kemudian. Gas alam cair yang telah tiba di terminal penerimaan akan kemudian disalurkan untuk dilakukan proses regasifikasi (*regasification*) yang mengubah kembali bentuk gas alam cair menjadi gas dalam temperatur atmosfer normal. Untuk kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pembangkitan energi, utamanya adalah energi listrik. Karena perbedaan kuantitas suplai dan kapasitas konsumsi gas alam di fasilitas pembangkit listrik (*power plant*) maka diperlukan fasilitas penyimpanan (*storage*) yang dibangun berdekatan dengan fasilitas regasifikasi dan *power plant*.

Dengan penerapan teknologi moderen, operasional penyimpanan dan regasifikasi dapat dilakukan diatas kapal *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU vessel) dengan keunggulan bahwa fasilitas ini dapat berpindah tempat serta efisien untuk melakukan beberapa proses di satu lokasi yang sama (proses *mid-stream* – C). Kapal FSRU bisa dibangun baru dengan spesifikasi peruntukan FSRU atau juga merupakan kapal hasil konversi dari kapal pengangkutan LNG atau kapal gas pada umumnya. Opsi konversi spesifikasi ini membuka peluang untuk menjaga efisiensi investasi belanja modal (*capex*) yang lebih ekonomis dan efisien.

Proses terakhir dari alur rantai suplai LNG adalah distribusi listrik dari fasilitas *power plant* kepada pengguna akhir tenaga listrik, yaitu masyarakat luas. Sistem distribusi listrik secara dominan dilakukan dengan media kabel (*stringing*) yang mengaliri daya listrik dari *distribution center* ke rumah-rumah atau gedung-gedung dalam jaringan PLN (proses *down-stream*).

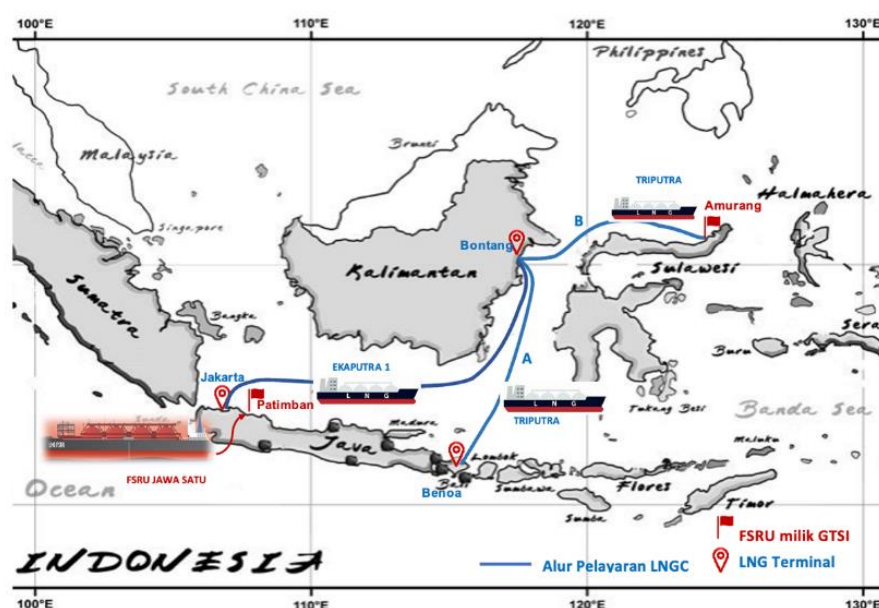
Ragam jenis kegiatan utama Perseroan saat ini dan dimasa yang akan datang mengusahakan untuk dapat memiliki eksistensi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi mulai dari proses logistik pengangkutan LNG, operasional kapal, FSRU, pembangkit tenaga listrik serta jasa-jasa disekitar operasional kapal-kapal yang digunakan termasuk kapal-kapal support semisal kapal pandu (*pilot boat*), kapal tunda (*tug boat*), STS (*ship-to-ship*) dan jasa manajemen kapal

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
1	Document of Compliance - Bahama	Class NK	14 Agustus 2018	13 Agustus 2023
2	Document of Compliance - Indonesia	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	13 Desember 2019	24 September 2024
3	ISO 9001 : 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
4	ISO 14001: 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
5	ISO 45001: 2018	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
6	SMC LNGC Ekaputra-1	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	21 Januari 2021	23 Juni 2025
7	SMC LNGC Triputra	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5 Maret 2020	14 Oktober 2024
8	ISSC LNGC Ekaputra-1	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	17 Desember 2020	Mei 2022
9	ISSC LNGC Triputra	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1 April 2020	12 April 2025

E.1 Jasa Pengangkutan Gas Alam Cair (LNG Transportation)

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menyediakan jasa persewaan kapal LNG dengan daerah operasional yang digambarkan dalam peta dibawah ini.

Peta Regional Operasi Persewaan Kapal LNG Perseroan

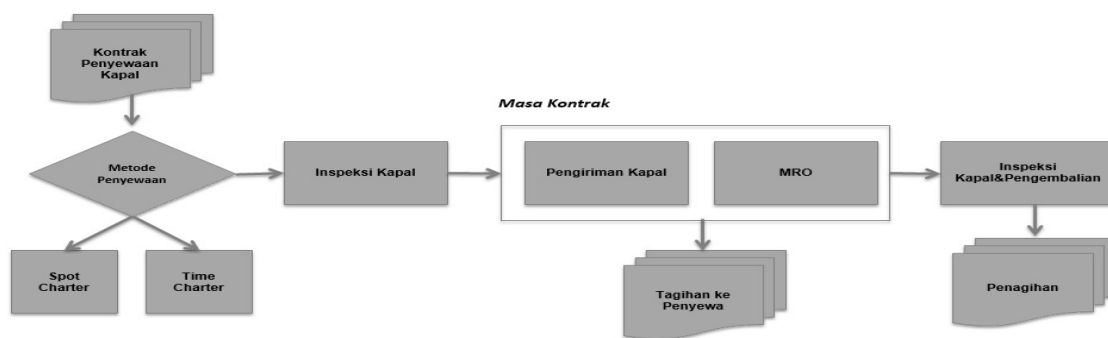


Beberapa jalur pelayaran yang dilayani oleh Perseroan dengan kapal milik sendiri adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Pelabuhan Maut	Pelabuhan Bongkar	Penyewa
1.	Ekaputra 1	Bontang	FSRU Nusantara Regas (NR); FSRU Lampung (PGN); Arun LNG Terminal (Pertamina)	PT Nusantara Regas;
2.	Triputra	Bontang	Benoa LNG Terminal (PEL); FSRU Amurang (SRGS)	PT Pelindo Energi Logistik

Secara garis besar proses bisnis persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan *Request For Proposal* (RFP) yang dikirimkan oleh calon pemberi kerja; termasuk diantaranya adalah penjelasan termin komersial mengenai tipe kontrak apakah *time charter* maupun *spot charter*.

Diagram Alur Proses Bisnis Persewaan Kapal LNG



Divisi Business Development dari Perseroan bertugas untuk menganalisa kebutuhan kapal pengangkutan LNG di seluruh daerah operasional ladang gas di Indonesia baik yang sudah menjadi pelanggan Perseroan maupun lokasi-lokasi baru yang berpotensi untuk menjadi area pengembangan usaha Perseroan. Informasi permintaan jasa penyewaan kapal bisa merupakan komunikasi langsung dari calon penyewa, namun sering kali juga hasil intelijen pasar yang dilakukan oleh Business Development Perseroan berbekal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diterbitkan dan ditinjau kembali setiap tahun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan mampu memberikan solusi untuk dibahas lebih lanjut dengan calon pelanggan dan mitra investasi di proyek LNG. Hal ini selaras dengan semangat perseroan sebagai “One Stop Service” untuk bisnis LNG di Indonesia. Sehingga analisa komersial atas kebutuhan kapal mampu dilakukan dengan tepat sasaran dengan membandingkan investasi kapal baru atau konversi dari kapal yang ada bisa memenuhi kebutuhan baik secara operasional, teknis dan ekonomi di proyek yang akan dikembangkan. Namun demikian untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam RFP tender, Perseroan berusaha untuk memberikan harga penawaran yang kompetitif dengan kualitas pelayanan dan operasi kapal dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan praktek industri perkapalan, kontrak persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan metode *time charter* atau *spot charter*.

a. Kontrak *Time Charter*

Perseroan melakukan penyewaan kapal kepada para pelanggan untuk periode yang telah ditentukan dengan imbalan sewa hasil negosiasi antara kedua belah pihak. Selama periode penyewaan, pihak penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya perjalanan, termasuk bahan bakar dan pelabuhan, serta imbalan keagenan. Di sisi lain, sebagai pemilik kapal,

Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan sehari-hari), pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana seluruh biaya ini telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa kontrak tertentu, biaya-biaya tersebut dapat dibebankan kepada para penyewa (reimbursable).

Secara garis besar, dalam skema *time charter*, pelanggan menyewa kapal dan awak kapal secara penuh selama periode tertentu dan dapat secara langsung mengarahkan kemana kapal harus pergi dan muatan apa yang akan dibawa. Perhitungan untuk penyewaan kapal jenis ini adalah berdasarkan waktu (*time*).

Total pendapatan Perseroan yang berasal dari model bisnis *time charter* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar USD30.750.448, USD29.724.862 dan USD26.679.176.

b. Kontrak Spot Charter

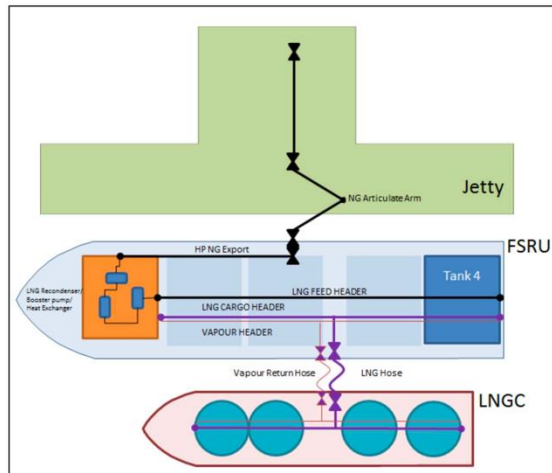
Perseroan melakukan pengangkutan kargo dengan jumlah dan jenis yang khusus dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai permintaan pelanggan (penyewa). Perhitungan imbalan jasa pengangkutan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kargo yang dibawa, serta jarak tempuh kapal. Pelanggan kemudian menetapkan tanggal kedatangan kapal di pelabuhan muat, perkiraan waktu untuk pemuatan dan pembongkaran kargo, dan lamanya perjalanan. Dengan skema tersebut, pihak penyewa akan membayar kepada perusahaan imbalan atas sewa kapal dan perusahaan menanggung semua biaya termasuk biaya perjalanan, bahan bakar, pelabuhan, awak kapal serta biaya operasional lainnya.

Alur proses bisnis persewaan kapal diatas biasanya akan diulang kembali sekitar satu tahun sebelum kontrak persewaan berakhir (untuk *time charter*), namun untuk kontrak *spot charter* karena sifat kontrak berdasarkan suatu perjalanan (*trip*) yang sudah ditentukan maka termin komersialnya akan berulang apabila terdapat permintaan yang serupa dan kontinu untuk beberapa *trip* sekaligus.

E.2 Jasa Penyimpanan & Regasifikasi LNG (*LNG Storage & Regasification*)

Penyediaan kapal FSRU pada prinsipnya akan mengikuti proses bisnis seperti penyediaan jasa persewaan kapal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hingga saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan mengoperasikan FSRU dengan rincian informasi sebagai berikut.

No.	Nama Kapal	Kontrak Sewa	Periode Kontrak	Jalur Tujuan	Jenis Kargo	Penyewa
1.	FSRU – Jawa Satu	Time charter	2021 – 2046	Patimban – <i>stationary position</i>	LNG & Regasifikasi Unit	PT Jawa Satu Power
2	FSRU – Amurang	Time charter	2019 – 2034	Amurang, Gorontalo, Likupang – <i>stationary position</i>	LNG & Regasifikasi Unit	PT PLNGG



Disamping ini merupakan gambaran *layout* dari sebuah kapal FSRU yang terkoneksi dengan pipa ke terminal atau *jetty* fasilitas *power plant* di daratan.

FSRU menerima pasokan LNG dari LNG Carrier yang diangkut dari Terminal Penjual LNG (Seller) menuju Terminal Pembeli LNG (Buyer). Proses sandar antara kapal LNG dengan FSRU ini disebut sebagai operasi *ship-to-ship* (STS) yang juga menjadi area pengembangan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

FSRU melakukan proses regasifikasi unit untuk mengubah LNG cair dengan suhu -160°C menjadi gas LNG dengan suhu lebih dari $+10^{\circ}\text{C}$. Kemudian FSRU mengalirkan gas LNG tersebut melalui pipa gas bawah laut ke pembangkit listrik, jaringan pipa gas transmisi atau menuju *end user*.

Mengingat spesifikasi operasional FSRU yang disesuaikan dengan kebutuhan penyewa, kontrak bisnis yang diterbitkan adalah *time charter*.

Sumber: Schematic Design of LNG Import Terminal: FSRU Terminal Risk Assessment, ERM – July 2019

E.3 Jasa Manajemen Kapal (Ship Management)

Operasional kapal untuk kepentingan aktivitas minyak dan gas dan khususnya LNG membutuhkan tingkat kompleksitas operasional dan teknis yang sangat tinggi dan aspek Quality, Security, Safety, Health & Environmental dan (QS-SHE) yang tidak dapat dikompromi oleh semua pemangku kepentingan. Dari sisi komersial, operasional kapal-kapal LNG membutuhkan biaya operasi yang tidak murah, ketepatan dari sisi waktu dan pengelolaan biaya menjadi aspek kritis yang diperhatikan. Mengingat hal tersebut, menjadi suatu kebutuhan yang vital untuk dapat mengandalkan pihak yang berpengalaman untuk menjalankan semua roda kegiatan kapal untuk memenuhi kewajiban kontrak sewa.

Lini bisnis Jasa Manajemen Kapal (*ship management*) merupakan jembatan yang menghubungkan bisnis-bisnis Perseroan dan grup usahanya. Dimana semua kapal yang beroperasi membutuhkan jasa manajemen kapal yang membutuhkan kualifikasi khusus dan sertifikasi yang berhubungan dengan khususnya LNG. Sampai saat ini masih sangat sedikit perusahaan di Indonesia yang mampu menyediakan jasa manajemen kapal untuk LNG. Berikut merupakan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
1	Document of Compliance (DOC) – Bahama	Class NK	14 Agustus 2018	13 Agustus 2023
2	Document of Compliance (DOC) – Indonesia	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (HUBLA)	13 Desember 2019	24 September 2024
3	ISO 9001:2015 untuk Quality Management System (QMS)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
4	ISO 14001:2015 untuk Environmental Management System (EMS)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
5	ISO 45001: 2018 untuk Occupational Health and Safety Management System (OH&S)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023

Note:

- DOC adalah Dokumen Pemenuhan yaitu suatu dokumen yang diterbitkan untuk setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan Kodefikasi Management Keselamatan Internasional. Dokumen ini diterbitkan oleh Pemerintah, atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Pemerintah, atau atas permintaan pemerintah oleh suatu Pemerintah peserta lain.
- ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.
- ISO 14001 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk:
 - (1) meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan (proses dll) mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah;
 - (2) mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku;
 - (3) memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan.
- ISO 45001 adalah standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk system manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), dnegan panduan untuk penggunaannya, untuk memungkinkan organisasi secara proaktif meningkatkan kinerja SMK3 dalam mencegah kecelakaan/cedera dan kesehatan yang buruk.

Dengan memiliki sertifikasi-sertifikasi tersebut jangkauan Perseroan dan Anak Usaha dalam menyediakan jasanya menjadi semakin luas dan tentunya hal ini menjadi keunggulan Perseroan.

Pada saat mengoperasikan sebuah kapal khususnya LNG, ketepatan waktu merupakan hal yang sangat vital dan signifikan pada saat pengapalan LNG dari Pelabuhan muat menuju Pelabuhan bongkar, hal tersebut berlaku untuk tujuan domestik atau antar negara. Terdapat beberapa area yang menjadi aspek pengawasan dan asistensi dari jasa manajemen kapal adalah:

- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Safety Management System kapal
- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Standard Operasi Prosedur kapal
- Memberikan pelatihan dan edukasi terhadap crew kapal
- Menyiapkan, memonitor, melaporkan dan mensettle budget/pengeluaran jangka pendek dan jangka Panjang kapal
- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Rencana Pemeliharaan kapal
- Menyiapkan, memonitor dan merekam rencana kegiatan operasi kapal.
- Menyiapkan, memonitor dan merekam data perjalanan voyaga kapal
- Menyiapkan, memonitor dan merekam penyesuaian antara kapal dan Pelabuhan (SSCS – Ship Shore Compatibility Study) untuk masing-masing terminal
- Memonitor and mengingatkan kapal terhadap bahaya navigasi, keamanan dan berita cuaca.
- Menyiapkan, memonitor, mengawasi, melaporkan dan mensettle rencana dock kapal.
- Membantu dan memberikan data-data yang diperlukan Pemilik / Bisnis Pengembangan Usaha untuk mengikuti tender.
- Menyiapkan, memonitor dan melaporkan kewajiban atas pajak dan audit keuangan
- Berkomunikasi, berdiskusi dan bernegosiasi dengan penyewa kapal untuk kepentingan Pemilik dan Perseroan
- Memonitor dan menimplementasikan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk kapal LNG and FSRU serta fasilitas Pelabuhan lainnya.
- Berkomunikasi, berdiskusi dan bernegosiasi dengan maker, specialist engineer dan galangan kapal.
- Melakukan kajian and Analisa resiko atas operasional kapal.
- Pengadaan tenaga ahli dan awak kapal untuk operasi kapal
- Manajemen proses *Maintenance Repair & Overhaul* (MRO)

Dalam menyediakan jasa manajemen kapal, Perseroan melalui Entitas Anak telah berhasil menjaga kualitas kepada konsumen-konsumennya. Perseroan mengedepankan prinsip kepatan waktu dalam transportasi LNG, ketepatan waktu akan berdampak

sangat signifikan terhadap kepuasan konsumen dan keberhasilan pengiriman tersebut. Gas alam yang sudah di cairkan menjadi LNG akan mengalami proses penguapan dengan rata-rata 0,1% - 0,25% per hari sesuai design BOR (Boil of Rate) untuk masing-masing kapal dan FSRU yang telah ditetapkan oleh Shipyard dan Cargo tank maker. Hal tersebut untuk memastikan volume LNG akan berkurang seiring dengan semakin lamanya periode pengapalan tidak merugikan konsumen dan kepuasan konsumen tetap terjaga.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat 5 kapal LNG dalam operasional Perseroan melalui Entitas Anak HLI termasuk didalamnya adalah 3 kapal milik Perseroan, sedangkan 2 kapal lainnya adalah milik pihak ketiga lain. Berikut ini adalah ringkasan kontrak manajemen kapal yang dilakukan oleh HLI.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Daerah Operasional	Keterangan
1.	Ekaputra 1	Perseroan	-2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bontang, Kaltim – Muara Karang, Jakarta	-
2.	Triputra	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	▪ Bontang, Kaltim – Benoa, Bali ▪ Bontang, Kaltim – Amurang, Sulut	-
3.	FSRU Jawa Satu	Perseroan	2020 - ulang tahun ke-25 COD dalam PPA antara PLN dan PT Jasa Satu Power	Patimban – <i>stationary position</i>	-
4.	Surya Aki	MCGC International	2016 – berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bintulu, Port Klan, Myanmar	Saat ini lay-up di Batam
5.	LNG Aquarius	PT Hanochem Shipping	2012 – 2022	Bontang – Jakarta (FSRU NR)	Non Operasional

D. Armada Kapal Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan armada kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:



EKA PUTRA 1	
Jenis Kapal	LNG carrier
Tahun pembangunan	1988
Kapasitas angkut	136,000 m3
Gross Tonnage	109,258 T
Kelas	Lloyd's Register (LR)
Deadweight	78,988 T
Builder	Mitsubishi Heavy Industry Ltd, No. 2011
Flag	Indonesia



TRIPUTRA	
Jenis Kapal	LNG carrier
Tahun pembangunan	1999
Kapasitas angkut	22,500 m3
Gross Tonnage	21,056 T
Kelas	Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Deadweight	12,493 T
Builder	NKK CORPORATION, TSUWORKS, NO. 192
Flag	Indonesia



JAWA SATU	
Jenis Kapal	FSRU
Tahun pembangunan	2018
Kapasitas angkut	170,000 m3
Gross Tonnage	106,900 T
Kelas	American Bureau of Shipping (ABS)
Deadweight	90,191 T
Builder	Samsung Heavy Industries Co.Ltd
Flag	Indonesia

MRO (Maintenance Repair Overhaul)

Pemeliharaan kapal yang terjadwal secara reguler menjadi kunci efektivitas operasional karena semua fasilitas yang dioperasikan menjadi lebih terjamin tanpa kekhawatiran akan mengalami gangguan teknis yang dapat menyebabkan hambatan dalam periode kontrak. Kegiatan perawatan, perbaikan dan overhaul (MRO) saat ini masih mengandalkan fasilitas galangan milik pihak ketiga yang berada di kawasan perairan Indonesia maupun luar negeri tergantung dari kebutuhan jenis perawatan yang diperlukan.

Perseroan memiliki beberapa kontrak kerjasama dengan pemilik galangan di kawasan Batam untuk melakukan pekerjaan MRO secara terjadwal dengan terlebih dahulu melewati proses seleksi vendor yang memakan waktu sekitar 3 tahun sebelum memutuskan akan memakai jasa yang ditawarkan oleh vendor galangan yang diperlukan, guna menjamin kualitas pekerjaan dan memberikan benefit kelancaran operasional di lapangan.

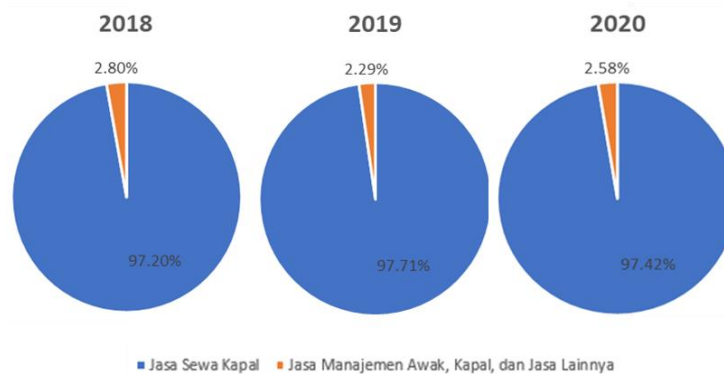
Umumnya untuk jenis kapal LNG carrier akan memerlukan pekerjaan MRO dan *docking* setiap 2,5 tahun sekali yang akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun demikian, apabila LNG carrier dimaksud adalah kapal new build maka kewajiban *docking*

bisa dilakukan setelah 5 tahun beroperasi. Untuk jenis kapal FSRU, dengan tingkat mobilitas yang relatif lebih rendah maka pekerjaan MRO bisa dilakukan setiap setelah 20 tahun beroperasi tanpa meninggalkan pekerjaan perawatan rutin diatas kapal sambil terus menjalankan aktivitas penyimpanan dan regasifikasi.

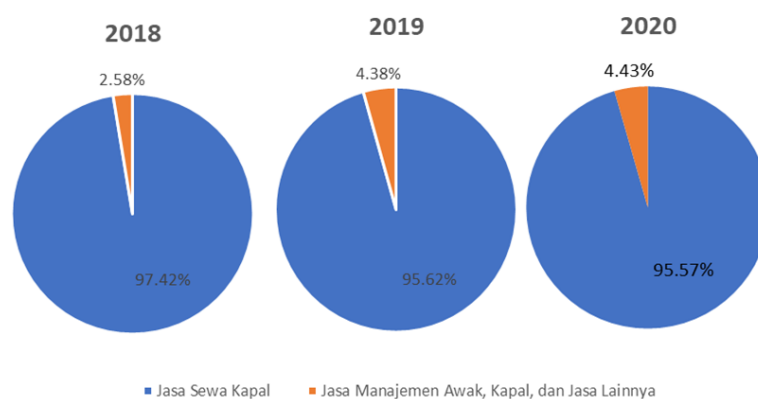
E. Kontribusi Pendapatan per Segmen Usaha & Pelanggan Utama Perseroan

Segmen pendapatan Perseroan terbagi menjadi jasa sewa kapal dan jasa manajemen awak, kapal, dan jasa lainnya. Selama tahun 2018-2020, pendapatan jasa sewa kapal merupakan mayoritas pendapatan Perseroan dimana pada setiap tahun lebih dari 97% pendapatan didapatkan dari jasa sewa kapal dan manajemen awak kapal berkontribusi sebesar 2.239-2.8% pada periode yang sama. Sedangkan kontribusi laba kotor dari segmen jasa sewa kapal berkontribusi sebesar 95.26% pada periode 2018-2020 dan jasa lainnya berkontribusi sebesar 4.74%. Hal ini dikarenakan *gross profit margin* jasa lainnya lebih besar dibandingkan jasa sewa kapal, dimana jasa sewa kapala memiliki GPM sebesar 49.26% dan jasa lainnya memiliki margin sebesar 93.51% pada periode 2018-2020.

Kontribusi Pendapatan Perseroan Berdasarkan Segmen



Kontribusi Laba Kotor Perseroan Berdasarkan Segmen



Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Pendapatan Perseroan dan/atau Entitas Anak berasal dari pasar domestik dan internasional, khususnya ke Jepang.

F. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Beberapa hal berikut ini dipercaya Manajemen sebagai keunggulan kompetitif Perseroan dalam operasi bisnisnya.

1. Integrasi bisnis dengan grup usaha HITS yang memperkuat peran vital Perseroan dalam rantai suplai LNG di Indonesia.

Perseroan adalah bagian dari grup usaha HITS yang berfokus pada pengembangan jaringan usaha logistik sumber daya energi LNG yang tidak hanya bertumpu pada usaha penyediaan jasa angkutan laut tetapi juga jasa manajemen kapal serta bentuk usaha lain disekitar operasional perkapalan seperti pengawakan (*crewing*) dan sertifikasi *marine skilled workers*, kapal tunda (*tug boats*), dan beberapa jasa disekitar infrastruktur pelabuhan semisal dredging dan lain-lain.

Diversifikasi bisnis yang saat ini telah dimiliki dan akan dikembangkan dimasa yang akan datang akan memperkuat posisi Perseroan dalam mata rantai suplai LNG di Indonesia yang dipegang oleh beberapa pihak strategis dan menjalankan mandat yang diamanatkan oleh negara. Dari diagram rantai suplai LNG; Pertamina, PGN dan PLN (beserta entitas-entitas dibawahnya) adalah tiga BUMN strategis yang menjalankan penugasan pemerintah ini. Pertamina memegang mandat untuk menjamin produksi dan distribusi bahan energi meliputi minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PGN secara komersial adalah pemilik gas yang diproduksi oleh negara dan akan menjual kepada 3 segmen konsumen untuk pasar LNG, yaitu kategori pembangkit tenaga listrik, kategori industri dan kategori pasar ritel. Dan konsumsi terbesar LNG diserap oleh kategori pembangkit tenaga listrik, dimana mandat ini dipegang oleh PLN.

Dengan keahlian dan kapasitas usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan grup usaha HITS, maka hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi Perseroan untuk bisa melakukan diversifikasi jenis usaha yang dilakukan lebih dari sekedar perusahaan jasa pengangkutan laut, tetapi menjadi penyedia jasa *end-to-end* yang berkaitan dengan logistik LNG di Indonesia. Perseroan telah memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional Pertamina, PGN dan PLN; dari hulu dan ke hilir serta bermitra dengan BUMN tersebut untuk membentuk ekosistem yang terhubung dan saling membutuhkan.

Dengan integrasi usaha Perseroan dengan grup usaha HITS maka secara finansial akan memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap profitabilitas grup secara keseluruhan dan lebih terjaminnya kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Dominasi kontrak persewaan kapal jangka panjang yang memberikan kepastian arus kas untuk Perseroan.

Kontrak time charter Perseroan dengan penyewa kapal rata-rata dilakukan untuk periode selama 7 – 10 tahun. Bahkan untuk kapal FSRU dilakukan untuk durasi selama 25 tahun. Hal ini memberikan kepastian yang tinggi dari sisi kemampuan membukukan pendapatan dimasa yang akan datang karena utilisasi kapal yang dimiliki menjadi semakin tinggi. Bahwasanya penetapan harga telah dilakukan diawal sebelum penetapan kontrak persewaan kapal untuk suatu durasi waktu tertentu, namun demikian terdapat klausul eskalasi harga yang memberikan kesempatan Perseroan untuk merevisi harga sesuai dengan kondisi pasar terkini. Juga terdapat komponen-komponen harga yang dipisahkan antara beban operasional yang akan diganti (*reimburse*) oleh penyewa kapal dan biaya untuk penyediaan bahan bakar yang ditanggung oleh penyewa kapal sehingga apabila terjadi fluktuasi harga atas bahan bakar dan bahan pembantu lainnya tidak akan memberikan tekanan pada profitabilitas Perseroan.

Pada tahun 2020 seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari kontrak jangka panjang. Meskipun demikian Perseroan tetap mempertimbangkan persaingan dan daya kompetitif untuk senantiasa menjadi pilihan utama para pengguna jasanya.

3. Keunggulan teknis dan rekam jejak Perseroan yang solid sebagai modal penting dalam kompetisi industri dengan entry barrier yang sangat tinggi

Rekam jejak Perseroan selama lebih dari 30 tahun di industri logistik dan transportasi LNG telah dikenal bukan hanya dalam kancah domestik tetapi juga di pasar internasional, khususnya jasa manajemen kapal untuk LNG *carrier*. HLI sebagai Entitas Anak yang menjalankan bisnis manajemen kapal bukan hanya memiliki pengalaman operasional kapal-kapal khusus angkutan LNG dengan rute pelayaran domestik di sepanjang perairan Indonesia tetapi juga di jalur pelayaran internasional seperti Asia (Jepang, Taiwan, Malaysia dan Korea Selatan) Qatar - Timur Tengah dan Australia.

Dengan kapasitas teknis dan pengalaman rekam jejak yang panjang, Perseroan mampu untuk terus mengembangkan skala bisnisnya ditengah semakin tingginya persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan dari penerapan ketentuan Environmental, Safety & Governance (ESG). Perseroan telah menerapkan ISO 9001:15 Quality Management System untuk memastikan kualitas servis dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Dari sisi pengendalian dampak lingkungan (environmental issues), operasional kapal LNG harus memiliki sertifikasi khusus yaitu ISO 14001:2015 Environmental Management System yang menjadi standar keamanan lingkungan daerah operasional. Dalam hal penerapan perlindungan pekerja, Kesehatan pekerja dan keselamatan dalam operasional perusahaan, kapal dan FSRU ISO 45001:2018 Occupation Health and Safety Management System menjadi barometer yang diterapkan Perseroan. Dalam beberapa praktek operasional FSRU, aspek socio-ekonomi mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah sekitar karena aktivitas penyimpanan dan regasifikasi yang mendapat sorotan khusus apabila dilakukan di daratan, terkait dengan sisi keamanan operasional. Dari sisi keamanan kerja (safety), operasional kapal LNG memiliki persyaratan yang lebih tinggi karena sifat dan karakter kargo yang diangkut dan ketentuan teknis untuk dapat logistik kargo. Sedangkan dari sisi penerapan tata kelola usaha yang baik, Perseroan telah berpengalaman untuk memenuhi aspek peraturan baik yang bersifat administratif maupun komersial kepada otoritas pelayaran dan (atau) kepada pemberi kerja/ pelanggan.

4. Sasaran pangsa pasar yang jelas dan target ekspansi usaha Perseroan yang selaras dengan prioritas program pembangunan Pemerintah di bidang energi

Rencana perluasan bisnis Perseroan dimasa yang akan datang tidak hanya berfokus pada pembangunan kapasitas angkut, namun juga untuk turut mengambil andil yang lebih besar dalam mata rantai suplai LNG di Nusantara. Namun demikian bertolak dari limitasi sumber daya perusahaan, maka Perseroan menitikberatkan perluasan bentuk usaha dengan menargetkan operasi pada proyek yang tertuang dalam Kepmen ESDM No.13K/13/MEM/2020 dalam wujud pelaksanaan PGN30 yaitu insiatif Pemerintah pusat untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan pemanfaatan LNG di 30 titik strategis dengan memperhatikan kebutuhan listrik di lokasi setempat. Notabene, pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik dikategorikan mini LNG dengan kapasitas daya yang kecil (<50 – 200 MW).

Perseroan memiliki pengalaman dalam operasional kapal FSRU dengan kapasitas 170,000 m³ dimana suplai gas digunakan untuk mendukung operasional *mini LNG power plant* dan secara umum lokasi mini operasiona berada di perairan Indonesia (domestik). Dengan demikian, Perseroan berada di kuadran yang tepat untuk terus mengembangkan skala usaha logistik energi di perairan domestik untuk *small LNG power plant*. Kepastian segmen pasar ini juga ditunjang dengan intensi pemain besar yang lebih fokus pada jalur oprasi internasional dan kapasitas produks yang lebih besar; sehingga segmen market ini masih belum menjadi prioritas kompetitor.

5. Manajemen operasional yang kompeten

Perseroan merupakan salah satu dari sedikit penyedia jasa persewaan dan operasional kapal untuk kebutuhan logistik LNG di tanah air. Sepak terjang selama lebih dari 30 tahun di industri ini diiringi dengan manajemen operasional yang sangat kompeten dengan catatan kecelakaan kerja atau gangguan kerja yang minimal. Operasional kapal LNG Ekaputra 1 sejak tahun 1990 hingga saat ini yang dipekerjakan oleh Pertamina selalu mendapat sorotan positif atas pencapaian kinerja yang sangat baik. Kapal LNG Ekaputra 1 merupakan salah satu dari sedikit pelopor LNG *carrier* yang sudah lama beroperasi untuk melayani pengapalan LNG dari Bontang atau Arun menuju Taiwan, Japan dan Korea Selatan. Saat ini Kapal LNG Ekaputra 1 aktif melayani supply LNG di perairan Indonesia untuk kebutuhan PLN dan PT Nusantara Regas. Dan juga kontribusi kapal LNG Triputra dalam memelopori proyek LNG ukuran kecil di Benoa – Bali bersama PT Pelindo Energi Logistik yang merupakan anak usaha BUMN Pelindo III.

Kompetensi Perseroan bukan hanya dalam operasional lapangan, tapi juga keandalan dalam penyusunan budget operasi yang efektif dan efisien. Keandalan Perseroan dalam menyusun rencana pemeliharaan kapal untuk menunjang operasional kapal dan memastikan pemenuhan atas peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi baik dari bendera kapal (HUBLA), IMO maupun industri seperti OCIMF telah dilakukan secara baik dan terjadwal. Pengalaman operasional teknikal demikian telah dibuktikan dengan kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan LNG carrier dan yang paling mutakhir adalah pengoperasian FSRU yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lainnya.

Operational excellence dari usaha persewaan kapal LNG Perseroan tidak lepas dari dukungan profesional melalui kemitraan Perseroan dengan Mitsui OSK Line, Japan yang tidak hanya sebatas hubungan dengan vendor namun juga merupakan mitra strategis Perseroan.

6. Hubungan baik dengan Pelanggan-pelanggan utama Perseroan selama lebih dari 30 tahun

Sejak awal pendirian grup usaha Perseroan, Manajemen berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak khususnya dengan kalangan Pemerintahan dan otoritas maritim, kalangan usaha persewaan kapal dan vendor penyedia perlengkapan dan komponen kapal, serta hubungan baik dengan para konsumen.

	Sejak Tahun	Nama Proyek	Kapal	Periode Kontrak
PT Pertamina (Persero)	1990	Badak III, SC 1987 WBX (Time Charter)	Ekaputra	20 tahun
PT Pertamina (Persero)	2000	MCGC Trade Vessel 2 (Time Charter)	Surya Satsuma	15 tahun
PT Pertamina (Persero)	2011	Badak III, SC 1987 WBX Extension (Time Charter)	Ekaputra	10 tahun
PT Pelindo Energi Logistik	2016	Benoa LNG (Time Charter)	Surya Satsuma / Triputra	7 tahun
PT Jawa Satu Power	2020	Integrated IPP Jawa Satu Project (Time Charter)	FSRU Jawa Satu	25 tahun
PT Nusantara Regas	2021	Multi Spot Time Charter	Ekaputra 1	3 bulan
PT PLN	2021	Multi Spot Time Charter	Ekaputra 1	1 tahun

7. Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi asas Cabotage.

Pemberlakuan asas cabotage sesuai dengan UU No.17 tahun 2008 yang pada intinya mengatur bahwa semua pengapalan barang di dalam negeri domestik Indonesia harus menggunakan kapal berbendera Indonesia telah membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi para pelaku industri pelayaran dalam negeri. Dengan adanya asas cabotage, kompetisi antar perusahaan pelayaran hanya terbatas antar pemilik kapal dalam negeri (bendera Indonesia), kapal bendera asing tidak dapat berpartisipasi.

Asas cabotage berperan penting menjaga keseimbangan supply tonase kapal dengan demand/permintaan angkutan cargo nya karena pada prakteknya perusahaan pelayaran hanya akan berinvestasi kapal berbendera Indonesia bila ada kontrak atau komitmen jangka panjang dari pemilik cargo.

Penggunaan kapal-kapal berbendera Indonesia untuk semua moda transportasi di perairan Nusantara akan menambah tingkat utilisasi kapal lokal dan pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak keuntungan ekonomis bagi pelaku industri dalam negeri.

Dampak yang dirasakan langsung oleh Perseroan adalah tingkat permintaan dan utilisasi kapal yang dimiliki menjadi relatif tinggi dan juga kenyataan bahwa hampir seluruh kapal yang dimiliki saat ini semuanya telah memiliki kontrak persewaan yang pasti, baik itu bersifat time charter maupun spot charter yang simultan. Dari sisi persaingan, penerapan cabotage telah memfiltrasi jumlah pesaing industri menjadi lebih sedikit karena dilarangnya pemain asing untuk ikut dalam tender pengadaan (persewaan) kapal dimana pemain lokal telah mampu untuk menyediakan kapal dengan spesifikasi tertentu.

G. Iklim Kompetisi dan Analisa Pangsa Pasar Perseroan

Perseroan bergerak pada industri LNGC dan FSRU. Pangsa pasar LNGC berbendera Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebanyak 52.41%, dimana pangsa pasar LNGC yang dioperasikan oleh Perseroan sebesar 93.75%. Sedangkan, industri FSRU berbendera Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar 34.62%. Perseroan tidak memiliki kompetisi yang signifikan dikarenakan tingginya *barrier of entry*, pengalaman Perseroan di industri LNG selama tiga dekade, dan kontrak Perseroan yang bersifat *long-term contract*.

H. Strategi Bisnis Perseroan

- Perseroan akan membangun ekosistem rantai pasokan LNG dengan cara mengakuisisi perusahaan terafiliasi yang akan memberikan sinergi terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- Untuk keberlanjutan pendapatan usaha Perseroan, Perseroan merencanakan untuk memperpanjang kontrak Ekaputra-1 untuk jangka panjang dengan rencana:
 - Kontrak Sewa Time Charter kapal LNG untuk periode Januari 2022 hingga Desember 2022 sebagai kapal pengangkut LNG di proyek PT NR;
 - Setelah Desember 2022, perpanjangan kontrak sewa LNG diasumsikan diperpanjang sewanya selama 5 tahun ke depan;
 - Melakukan konversi LNGC menjadi FSRU; atau
 - Menambah armada untuk kontrak 15 tahun untuk project yang saat ini sedang ditenderkan.

I. Kepatuhan atas Ketentuan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perseroan tidak termasuk dalam perusahaan yang memiliki jenis rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189/2002 tanggal 5 Februari 2002, Perseroan juga tidak masuk ke dalam perusahaan dengan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Perseroan tidak memerlukan dokumen AMDAL maupun dokumen UKL dan UPL.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri No. KM 4 Th. 2005 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal ("Permen No. KM 4 Th. 2005"), Perseroan harus dapat menunjukkan bahwa konstruksi penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal - kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam Permen No. KM 4 Th. 25 tersebut sehingga masing-masing kapal tersebut harus memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari Kapal ("Sertifikat Pencegahan Pencemaran"). Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, konstruksi penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal-kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dan telah memiliki Sertifikat Pencegahan Pencemaran. Berikut ini daftar sertifikat yang dimiliki oleh Perseroan:

Meminimalkan risiko dan melindungi lingkungan dari dampak operasi, adalah salah satu keunggulan operasional GTSI untuk mencapai *zero* pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan. GTSI menetapkan kebijakan dan menjalankan program pengelolaan lingkungan terpadu untuk mengurangi dan mengatasi dampak lingkungan dari operasinya. Program ini termasuk konsumsi bahan bakar, mencapai rendah emisi, dan mengurangi penggunaan peralatan agar hemat energi serta pengelolaan limbah baik di kantor maupun di kapal.

Dampak dan risiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan diantaranya adalah:

1. Pencemaran Minyak;
2. Penanganan *Air Ballast*;
3. Pembuangan Limbah Kotoran (*Sewage*);
4. Pembuangan Sampah;
5. Pencemaran Udara.

Perseroan memiliki program pengelolaan lingkungan yang komprehensif mencakup aspek energi, air, emisi, serta limbah cair untuk mengurangi risiko dari semua jenis pencemaran yang berasal dari pengoperasian kapal.

Pengeluaran atas tanggung jawab pengelola lingkungan hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Pembuangan sampah ke fasilitas di darat melalui vendor yang ditunjuk.
- b) Instalasi instrumen permesinan untuk penggunaan bahan bakar yang *low sulphur*.
- c) Audit ISO 14001 terkait lingkungan.

Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terhadap pemenuhan kepatuhan atas ketentuan lingkungan hidup adalah sebesar: Rp.15.593.301.003,- untuk tahun buku 2020.

Rendah Emisi

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengacu pada Konvensi (*Marine Pollution*) Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and *Particulate Matter*, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020, kapal yang berlayar internasional wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan *sulfur* tidak boleh melebihi 0,5% m/m.

Jika, berlayar hanya di wilayah perairan Indonesia masih dapat menggunakan bahan bakar dengan kandungan *sulfur* tidak boleh melebihi 3,5% m/m. Seluruh kapal LNG milik Perseroan telah menggunakan bahan bakar *low sulfur* guna mengurangi SOx.

Penggunaan Peralatan Hemat Energi

Budaya hemat energi yang terus digiatkan melalui pengelolaan energi yang berpengaruh langsung pada pengurangan biaya serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Khususnya di kantor, beberapa inisiatif penghematan energi yang dilakukan GTSI selama tahun 2020, adalah:

1. Program Elektrik
 - Penggunaan *Air Conditioning* (AC) dengan suhu 25⁰C dan di jam kerja.
 - Penggunaan lampu hemat energi (LED), mematikan lampu apabila tidak dipergunakan, memanfaatkan cahaya alami (matahari) di sekitaran area kerja.
 - Memastikan semua peralatan televisi, audio-video dan komputer serta monitor dalam *power saving mode* (*standby* dan *sleep mode*).
2. Penghematan kertas melalui berbagai upaya, diantaranya :
 - Optimalisasi sarana *multi-function printer* untuk melakukan proses pencetakan, penyalinan (*scan file*) atau mengirim dokumen, menjadi solusi efisiensi.
 - Optimalisasi penggunaan *e-mail*.
 - Pencetakan diprioritaskan untuk warna hitam dan putih. Penggunaan cetak warna hanya dapat dilakukan untuk dokumen yang sangat diperlukan untuk kepentingan pihak luar.
 - Melakukan pencetakan satu lembar dua halaman atau mencetak bolak-balik apabila fasilitas mesin cetak memungkinkan, memo internal tidak perlu dicetak dengan memanfaatkan fasilitas e-mail secara maksimal.
3. Program optimalisasi kendaraan operasional sebagai salah satu inisiatif GTSI untuk mengurangi emisi karbon, khususnya yang berasal dari bahan bakar minyak, Program ini selain mengurangi emisi karbon juga turut menekan polusi udara yang mencemari lingkungan hidup.

Sistem Pengolahan Limbah Perusahaan

Kegiatan operasi dan usaha Perseroan juga menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sejak memulai operasi, Perseroan telah berkomitmen untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan. Serta menerapkan prinsip 5R yakni *reduce, recycle, replace, return to supplier*. Pengelolaan limbah dan efluen menjadi tanggung jawab Fungsi QHSE dan secara berkala dilaporkan kepada Direksi.

Salah satu inisiatif Perseroan adalah mengurangi pemakaian kertas. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan kembali kertas yang sudah terpakai untuk kebutuhan internal Perseroan yang memungkinkan pengurangan jumlah kertas yang dipakai dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya ini tidak terbatas pada pemakaian kertas, namun juga Perseroan bertanggung jawab dalam dalam pengelolaan limbah lainnya.

Dengan cakupan kegiatan operasi di laut, maka limbah yang dihasilkan Perseroan maupun unit usaha sangat beragam. Limbah yang dihasilkan dapat berbentuk cairan dan padatan; maupun limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dan non-B3. Pengelolaan dan pengolahan limbah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis limbah. Namun secara umum, pengelolaan dan pengolahan limbah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 5RTD, yakni *reduce, reuse, recycle, replace, return to supplier*.

Laporan ini hanya mengungkapkan informasi pengelolaan dan pengolahan limbah secara umum di Perseroan, yaitu

KATEGORI LIMBAH	JENIS	UPAYA PENGELOLAAN	JUMLAH (TON)
Cair	Oli Bekas	Diserahkan kepada pengumpul/pemanfaat berizin	0

	Minyak Goreng	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,63
Padat	Plastik	Pembuangan ke Fasilitas Darat	33,95
	Limbah Makanan	Pembuangan ke Fasilitas Darat	1,78
	Sampah Domestik, yang dihasilkan dari operasional harian kapal	Pembuangan ke Fasilitas Darat	52,9
	Debu Incinerator	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,82
	Sampah Elektronik	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,24
	Lampu Bekas (Kantor)	Pembuangan ke fasilitas gedung	0,01
	Catridge Fotocopy (Kantor)	Diserahkan kembali kepada vendor.	0,01

Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki

Perseroan senantiasa taat dan mematuhi berbagai peraturan maupun ketentuan dari pemerintah serta sertifikasi yang berlaku sesuai bidang usaha GTSI Grup baik standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

SERTIFIKASI (ISO, OHSAS)	VARIABEL PENGUKURAN	TARGET YANG DIHASILKAN
ISO 9001: 2015	Kelancaran dalam pengoperasian kapal LNG	Kelancaran dan keselamatan dalam mengoperasikan kapal sehingga tidak berdampak polusi dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilalui serta tidak merusak ekosistem laut pada rute yang dilalui kapal
ISO 14001: 2015	Kepatuhan terhadap aturan terkait dengan lingkungan hidup	Dalam pengoperasian kapal LNG, selalu mematuhi dan taat atas segala aturan yang ditetapkan mengenai pencemaran lingkungan dan membuang sampah sesuai dengan aturan internasional yang telah ditetapkan.
ISO 45001: 2018	Keselamatan dan Kesehatan Kru Kapal	Tidak ada insiden dan kecelakaan serius yang melibatkan kru kapal yang dapat mengganggu operasional kapal LNG.
International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)	Polusi dari Minyak	Dalam mengoperasikan kapal LNG, tidak ada pencemaran minyak yang dihasilkan baik selama dilaut, dipelabuhan ataupun saat melaksanakan kegiatan bunker bahan bakar kapal.
International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)	Polusi Udara	Dalam pengoperasian kapal LNG, selalu mengatur emisi gas buang dalam kadar yang telah ditentukan oleh aturan Internasional. Dan sebisa mungkin dapat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar LNG dan bahan bakar yang mengandung Sulfur tingkat rendah.
International Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPP)	Polusi dari Kotoran Pembuangan	Kapal LNG dalam melakukan pembuangan sisa kotoran sesuai dengan aturan internasional, nasional dan aturan lokal yang berlaku. Sebelum dibuang ke laut juga dilakukan pengolahan agar ramah lingkungan dan tidak terjadi pencemaran terhadap ekosistem laut.
International Ballast Water Management Certificate (IBWM)	Polusi dari pencampuran air laut	Pengoperasian Air Ballast untuk Kapal LNG dilakukan dengan memenuhi aturan Water Ballast Exchange. Hal tersebut dilakukan dilaut lepas dengan minimal 50NM dari daratan terluar. Sehingga tidak mencemari lautan di pelabuhan muat yang mempunyai ekosistem laut yang berbeda dengan pelabuhan bongkar.

J. Hubungan dengan Pemasok

Untuk memastikan Perseroan dan aset yang dimiliki dapat beroperasi dengan baik, kerjasama dengan pihak pemasok perlu dijaga dengan yang dapat dikategorikan dalam beberapa golongan berikut:

- Pemasok bahan bakar seperti: INMAR, Humpuss Trading, dan pemasok bahan bakar lainnya. Hampir disemua kontrak Time Charter, bahan bakar menjadi kewajiban Penyewa kapal untuk menyediakan.
- Galangan kapal (Shipyard) untuk perbaikan dan docking seperti: Paxocean (DDW) – Batam, Keppel Shipyard – Singapore, Sembawang Corporation – Singapore, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Shipyard – Japan dan Keppel Subic – Philippine.
- Galangan kapal (Shipyard) untuk membangun/konversi kapal seperti: Paxocean (DDW) – Batam, Samsung Heavy Industries (SHI) – South Korea, Keppel Shipyard – Singapore.
- Pemasok suku cadang orisinal yang disupply langsung dari masing-masing authorized maker dari peralatan, permesinan dan instrument yang digunakan di kapal. Sebagian besar suku cadang tersebut di import dari luar negeri.
- Pemasok kebutuhan consumable yang dibutuhkan untuk operasional kapal yang disupply dari dalam negeri dan juga luar negeri.

K. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Keterangan	Nilai per 31 Desember 2020
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham				
1.	Perjanjian Pinjaman	1. PT Humpuss Transportasi Kimia. ("Pemberi Pinjaman") 2. Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Pinjaman ini tanpa jaminan, dalam mata uang Dolar AS dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tersebut diangsur setiap bulan mulai Juli 2017 hingga Juli 2023.	USD 4.078.991
2.	Perjanjian Pinjaman	1. Perseroan ("Pemberi Pinjaman") 2. PT Jawa Satu Regas ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman kepada PT Jawa Satu Regas dikenakan bunga sebesar 4,3% per tahun sampai tanggal operasi komersial dari konstruksi FSRU, dan bunga sebesar 11% per tahun setelah itu. Pinjaman akan dibayar kembali dengan angsuran bulanan mulai Mei 2022 dan akan jatuh tempo pada Oktober 2039	USD 14.998.890

Selain dari perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usahanya antara lain yaitu pendapatan dari pihak afiliasi.

Berikut ini merupakan pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan:

Pihak	Hubungan
PT Humpuss Transportasi Kimia	Entitas dibawah pengendalian Entitas induk
PT Humpuss Transportasi Curah	Entitas dibawah pengendalian Entitas induk

L. Hak Kekayaan Intelektual

Saat ini Perseroan memiliki HAKI berupa merek yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai Brand Awareness terhadap Perseroan dan Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

MEREK	NO. PERMOHONAN/ PENDAFTARAN	TANGGAL PERMOHONAN/ TANGGAL DIMULAI PERLINDUNGAN	KODE KELAS	KETERANGAN
Logo PT GTS Internasional Tbk 	J002019033718	28 Juni 2019	39	Dalam proses
Logo PT Humolco LNG Indonesia 	IDM000865195	28 Juni 2019	35	Terdaftar Tanggal pendaftaran: 17 Juni 2021 Tanggal berakhir perlindungan: 28 Juni 2029
Logo PT Permata Khatulistiwa Regas 	IDM000862755	1 Juli 2019	35	Terdaftar Tanggal pendaftaran: 17 Juni 2021 Tanggal berakhir perlindungan: 01 Juli 2029
Logo PT Hikmah Sarana Bahari 	J002019033716	28 Juni 2019	39	Dalam proses

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam beban, dan harga sewa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kegiatan Pemasaran

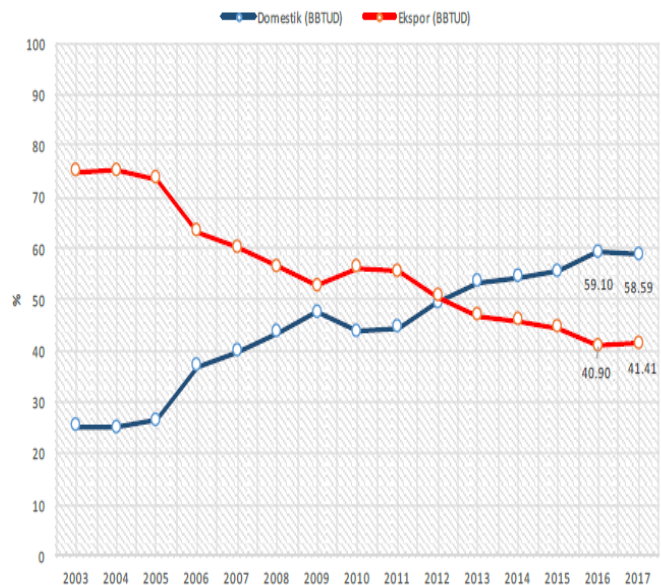
Sebagai perusahaan jasa yang memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggannya, Perseroan menerapkan strategi pemasaran dengan aktif di berbagai komunitas oil and gas dan secara aktif berbagi informasi dalam forum networking di seminar/workshop/conference oil and gas di dalam negeri dan luar negeri.

M. Prospek Industri

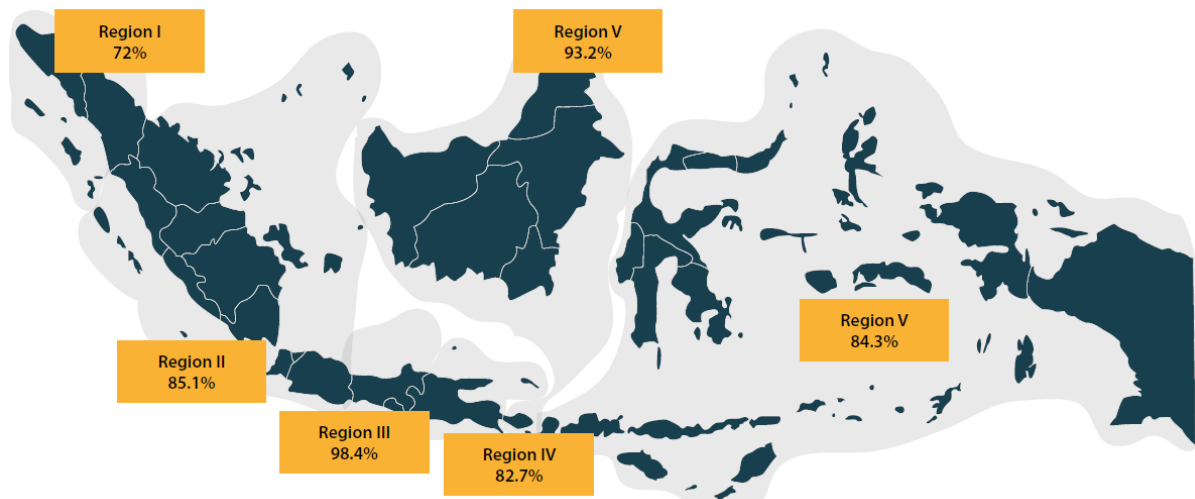
Prospek Industri Perseroan

Pada tahun 1977, Indonesia mulai mengekspor gas bumi (LNG) dari kilang Bontang dan disusul pada tahun 1978 dari kilang Arun, sehingga selama beberapa tahun kemudian Indonesia sempat menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara pengespor gas bumi dalam bentuk LNG dan gas pipa, namun pasokan gas bumi untuk ekspor menurun seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestik dari tahun ke tahun. Pemanfaatan gas bumi domestik naik rata-rata 7,8% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

Dari total produksi gas bumi di tahun 2017, pemanfaatan gas bumi Indonesia 58,89% diserap oleh domestik dan 44,41% untuk ekspor. Penyerapan domestik meliputi sector industry yang menyerap sebesar 23,18% sektor kelistrikan, *lifting* Migas sebesar 2,73%, LNG domestik sebesar 5,64%, LPG domestik sebesar 2,17% dan 0,15% untuk Jargas Rumah Tangga dan SPBG. Untuk ekspor gas pipa sebesar 12,04% dan LNG Ekspor sebesar 29,37%.



Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2017
Sumber: Ditjen Migas & SKKMigas 2018



Realisasi Penyerapan Gas Bumi 2017 vs Kontrak PJGB per Region
Sumber: Ditjen Migas & SKKMigas 2018

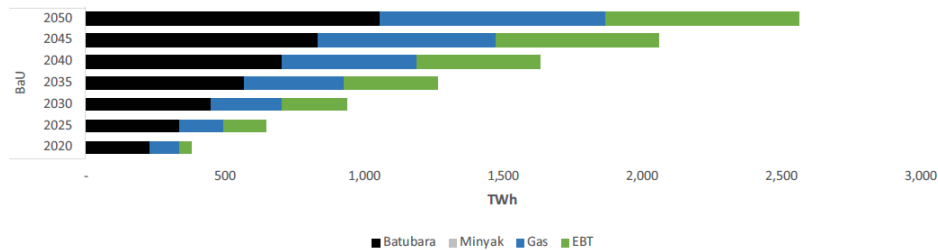
Berikut merupakan data perkiraan kebutuhan gas bumi dari masing-masing region yang terkait dengan Kelistrikan dan Ekspor/Komitmen LNG:

(Dalam satuan MMSCFD)

Region	Uraian	2018			2022			2027		
		Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III
I	Kelistrikan	134,97	114,27	114,27	141,01	132,18	132,18	148,93	192,41	192,41
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kelistrikan	589,3	689,8	689,8	615,66	773,9	773,9	650,28	1009,3	1009,3
	Ekspor LNG	926,9	926,9	926,9	895,9	895,9	895,9	215,3	215,3	215,3
III	Kelistrikan	116,94	96	96	123,22	136,29	136,29	130,15	136,29	136,29
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Kelistrikan	318,21	305,8	305,8	332,45	297,75	297,75	351,14	357,22	357,22
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Kelistrikan	51,56	72,75	72,75	53,87	86,47	86,47	56,9	99,36	99,36
	Ekspor LNG	987	987	987	492	492	492	20	20	20
VI	Kelistrikan	42,72	132,71	132,71	44,46	201,59	201,59	46,72	236,02	236,02
	Ekspor LNG	1306,2	1306,2	1306,2	1513,4	1513,4	1513,4	1686,5	1686,5	1686,5

Perkiraan Kebutuhan Gas Bumi Region I – VI (1 Januari 2018)
Sumber: Neraca Gas Indonesia 2018 - 2027

Kebutuhan terhadap Migas di Indonesia juga meningkat selaras dengan adanya peningkatan terhadap jumlah penduduk yang memicu adanya peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Berikut merupakan proyeksi produksi listrik per jenis energi di Indonesia:



Produksi Listrik per Jenis Energi
Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (ISSN25273000)

IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294..

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan			
kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	243.009	243.009	243.009
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	308.306	308.306	-
Selisih kurs	(240.395)	(240.395)	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.944)	(75.944)	(30.353)
Saldo laba:			
- Ditentukan penggunaannya			
- Belum ditentukan penggunaannya	46.747.577	33.645.132	25.404.627
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.744.800	31.642.355	23.139.135
Kepentingan non-pengendali	15.525.352	14.870.119	14.781.242
JUMLAH EKUITAS	60.270.152	46.512.474	37.920.377

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	Peningkatan modal	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebesar 2.400.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham	243.009	46.737.577	8.393.369	55.373.955
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	-	-	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	308.306	-	-	308.306
Selisih kurs	(240.395)	-	-	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.944)	-	-	(75.944)
Saldo laba:				
- Ditentukan penggunaannya	-	10.000	-	10.000
- Belum ditentukan penggunaannya	46.747.577	(46.747.577)	-	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.744.800	-	8.393.369	53.138.169
Kepentingan non-pengendali	15.525.352	-	-	15.525.352
JUMLAH EKUITAS	60.270.152	-	8.393.369	68.663.521

*asumsi menggunakan kurs akta Rp14.297 untuk Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif. Sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum ada riwayat untuk pembayaran dividen.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak – banyaknya 40% (Empat Puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 yang akan dibagikan pada tahun 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal ang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui

pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan

- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	2.400.000.000	240.000.000.000	100
Total	2.400.000.000	240.000.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 – 26 Agustus 2021 pada harga Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pelayaran dan energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: Ery Yunasri & Partners
	Prosperity Tower 12th Floor, Suite 12F District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp. (021) 2793 4825 Fax. (021) 2793 4626
	Nama Rekan : Ery Yunasri
	Nomor STTD : STTD.KH-186/PM.2/2018
	Tanggal STTD : 1 Agustus 2018
	Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
	Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No.KEP/01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
	Surat Penunjukan Kerja : No.0007/EYP/IV/2021 tanggal 29 April 2021
Tugas Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
	Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Auditor	: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
	(anggota jaringan firma Ernst & Young) Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp.: (021) 5289 5000 Fax.: (021) 5289 4100
	Nama Rekan : Deden Riyadi
	Nomor STTD : STTD.AP-79/PM.22/2018
	Tanggal STTD : 5 Februari 2018
	Keanggotaan Asosiasi : Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan
	Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
	Surat Penunjukan Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 13/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Tugas Pokok	: Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas

prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

Notaris	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.	
		Jl. KH. Zainul Arifin No. 2	
		Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5	
		Jakarta 11140	
		Telp.: (021) 634 5668.	
		Fax.: (021) 634 5666.	
		Nama Rekan	: STTD.N-29/PM.22/2018
		Nomor STTD	: 19 Maret 2018
		Tanggal STTD	: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
		Keanggotaan Asosiasi	: UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Tugas Pokok	:	Pedoman Kerja	: 810/SI.Not/X/2019
	:	Surat Penunjukan Kerja	: STTD.N-29/PM.22/2018
	:	Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	
	:	Biro Administrasi Efek	
	:	PT Edi Indonesia	
		Wisma SMR 10th & 3rd Floor	
		Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350	
		Izin Usaha	: KEP-01/PM/BAE/2000
		Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
		Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Tugas Pokok	:	Surat Penunjukan Kerja	: Perseroan menunjuk PT Edi Indonesia sebagai BAE berdasarkan Pengelolaan Administrasi Saham.
	:	Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Jasa Penilai Publik	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond	
		Graha ROI Formula, 3rd Fl. Suite 302	
		Jl. Sultan Iskandar Muda 222	
		Jakarta 12240	
		Telp. (021) 7245677	
		Fax. (021) 7258936	
		Nama Rekan	: Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)
		Nomor STTD	: STTD.PB-13/PM.2/2018
		Tanggal STTD	: 29 Juni 2018
		Keanggotaan Asosiasi	: MAPPI 03-S-01751
Tugas Pokok	:	Pedoman Kerja	: POJK 35, POJK, 17 dan POJK 42
	:	Surat Penunjukan Kerja	: No. 009/VI/SV/21/KJPPID&R tertanggal 16 Juni 2021

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021.

I. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Logistik;
 - b. Penyimpanan;
 - c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
 - b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
 - d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
 - e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 - g. Aktivitas Perusahaan Holding;
 - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
 - b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
 - c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

II. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 44,73% empat puluh empat koma tujuh tiga persen) atau sejumlah 13.419.142.767 (tiga belas miliar empat ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp670.957.138.350,00 (enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh para pemegang saham.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang
 - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK

- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;

- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

III. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (*Pasal 18 Anggaran Dasar*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS (Pasal 23 Anggaran Dasar)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasisaham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

(ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(iii) Hak Atas Pembagian Sisa Aset Dalam Hal Terjadi Likuidasi

Seluruh saham yang diterbitkan merupakan saham biasa atas nama dan tidak terdapat klasifikasi saham, oleh karenanya hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi akan dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah hak atas saham yang dimiliki.

(iv) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar)

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : -
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang
 - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau

bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

IV. Direksi

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

- 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. .
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

- 3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

V. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

- 4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

- 1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

VI. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

(Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar)

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pengajuan Permohonan Agar Perseroan Dinyatakan Pailit, Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan dan Pembubaran (Pasal 28 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Reliance Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/ atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 September 2021 – 6 September 2021

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan II dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan II paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan jika terjadi kelebihan pemesanan sampai dengan $\geq 25x$.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan berkisar dari Rp286.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) sampai dengan Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada

Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO $\leq$ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO $\leq$ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham PT GTS Internasional Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- Efek hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan,

dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 2 September 2021 – 6 September 2021.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558
Faksimili: +6221 2952 0558
Website : <https://reliancesekuritas.com/>

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ERY YUNASRI & PARTNERS

Counsellors at Law

Prosperity Tower Unit 12F, 12 Floor, District 8
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
P: (62-21) 2793 4825; F: (62-21) 2793 4626

No.Ref: 011/EYP/VIII/2021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada Yth.

PT GTS Internasional, Tbk

Mangkuluhur City Tower One 26th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Up. Direksi

Perihal: **Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT GTS Internasional, Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT GTS Internasional, Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT GTS Internasional, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**"), berdasarkan Surat Penunjukkan Konsultan Hukum No.0007/EYP/IV/2021 tanggal 29 April 2021, kami Konsultan Hukum dari Ery Yunasri & Partners (selanjutnya disebut sebagai "**EYP**"), berkantor di Gedung Prosperity Lantai 12F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum atau legal audit (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan menyampaikan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum**" atau "**LUT**") serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum ini, Perseroan merencanakan untuk menawarkan 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebesar 15,16% (lima belas koma satu enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).



PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana disebut dibawah ini dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut dibawah ini dan menunjuk kepada Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum, maka Pendapat Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bahwa Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya:

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- c. Peraturan OJK ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

2. Bahwa Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 ("KBLI").
3. Bahwa tiap-tiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya para pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah melakukan penyetoran modal secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tunai kedalam rekening Perseroan.

Sesuai dengan POJK No.25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Berkenaan dengan hal tersebut maka berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, para pemegang saham yaitu PT Hateka Trans Internasional dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, selama kurun waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa sampai dengan PSH ini dikeluarkan pengendali Perseroan adalah H. Hutomo Mandala Putra, SH. Sehubungan dengan itu Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No.3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Bahwa Perseroan sampai dengan saat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPt.

4. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selanjutnya masa jabatan anggota komite audit tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak dari luar Perseroan. Pada saat PSH ini diterbitkan Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit.

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten, sebagaimana diatur dalam POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Selanjutnya Unit Audit Internal telah memenuhi ketentuan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Penggunaan dana Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- A. Sekitar 64% untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA"), dengan perkiraan suku bunga 7% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun serta grace period 2 (dua) tahun. Adapun penggunaan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membangun permanent FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021. Jangka waktu pembangunan yang dibutuhkan sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan diperkirakan akan memerlukan dana sebesar USD 55 juta. Nilai asumsi kurs yang dipergunakan adalah sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD). Dalam hal dana tersebut telah dibayarkan kembali kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja dan belanja modal.

Dengan pembangunan FSRU di ANOA diharapkan akan:

- Bahwa, pembangunan FSRU untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Utara;
 - Bahwa, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik di Sulawesi Utara diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat di Sulawesi Utara; dan
 - Bahwa, saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
- B. Sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan seperti operasional Perseroan yang meliputi antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada cadangan docking, membangun war room sistem akuntansi dan keuangan, serta shipping monitoring online system.
- C. Sekitar 16% untuk penyertaan modal kepada ANOA dengan nilai asumsi kurs sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD).

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Jo POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, selanjutnya transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan C di atas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, atas hal

tersebut Perseroan wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan C di atas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi afiliasi namun bukan transaksi benturan kepentingan, selanjutnya Perseroan wajib tunduk kepada POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sebagaimana diatur dalam POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten wajib: (i) menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; (ii) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; (iii) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan (iv) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

6. Bahwa Perseroan telah memperoleh ijin-ijin dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana ijin-ijin tersebut masih sepenuhnya berlaku.
7. Bahwa polis-polis asuransi dengan penutupan atas risiko-risiko atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting yang diberikan dan diperlihatkan kepada kami adalah memadai untuk menampung risiko pertanggungan asuransi, dan perjanjian asuransi tersebut adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungan asuransi yang bersangkutan.
8. Bahwa perjanjian-perjanjian dimana Perseroan sebagai pihak didalamnya adalah sah dan mengikat Perseroan, dan masih berlaku sepenuhnya serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Perseroan yang memuat batasan-batasan atau larangan-larangan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat batasan-batasan atau larangan-larangan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum.

9. Bahwa harta kekayaan yang sampai saat ini dimiliki oleh Perseroan secara sah, bebas dari sengketa/perkara, dan tidak dalam penyitaan serta sedang dijamin. Bahwa apabila atas aset yang sedang dijamin tersebut, dalam hal ini yaitu aset berupa 100% saham milik Perseroan di PT. Permata Khatulistiwa Regas, dilakukan eksekusi jaminan, maka atas hal tersebut tidak akan berdampak material pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
10. Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yaitu kewajiban Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLTK"), dan telah mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan bertempat kedudukan atau mempunyai kegiatan usaha.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada saat PSH ini dikeluarkan.

11. Bahwa Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan dalam hal ini kewajiban PPh 21 dan PPh 23.
12. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.139 tertanggal 17 Juni 2021 Jo Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.44 tertanggal 8 Juli 2021 Jo Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.146 tertanggal 29 Juli 2021 Jo Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.248 tertanggal 30 Agustus 2021, kesemuanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek, bahwa antara PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dengan Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi; dan
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.140 tertanggal 17 Juni 2021 Jo Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.249 tertanggal 30 Agustus 2021, keduanya dibuat dihadapan

Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Electronic Data Interchange Indonesia disingkat PT Edi Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-05509/BEI.PP2/08-2021 tertanggal 5 Agustus 2021.

Bahwa atas perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kesemuanya masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

13. Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, niaga, sengketa pajak maupun hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat lainnya. Selanjutnya pada saat PSH ini dikeluarkan tidak terdapat somasi yang sedang diajukan terhadap Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
14. Bahwa Perseroan memiliki 6 (enam) entitas anak yaitu:
 - A. PT Hikmah Sarana Bahari ("**HSB**"), Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di HSB sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - B. PT Bhaskara Inti Samudera ("**BIS**"), Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di BIS sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - C. PT. Humolco LNG Indonesia ("**HLI**"), Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di HLI sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen);
 - D. PT. Permata Khatulistiwa Regas ("**PKR**"), Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di PKR sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen);
 - E. **ANOA**, Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di ANOA sebesar 88,22% (delapan puluh delapan koma dua puluh dua persen); dan
 - F. PT. Sulawesi Regas Satu ("**SRGS**"), Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di SRGS melalui ANOA sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

HSB, BIS, HLI, PKR, ANOA dan SRGS bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Entitas Anak**".

15. Berdasarkan anggaran dasar Entitas Anak yang berbadan hukum Indonesia tersebut di atas, bahwa kepemilikan saham Perseroan pada Entitas Anak tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa akta pendirian Entitas Anak beserta perubahan anggaran dasar Entitas

Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya perubahan anggaran dasar terakhir Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak.

16. Bahwa Entitas Anak berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak yang termuat dalam anggaran dasar Entitas Anak, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.
17. Bahwa tiap-tiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa Entitas Anak telah memperoleh ijin-ijin dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Entitas Anak, dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ijin-ijin tersebut masih sepenuhnya berlaku.
19. Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan, polis-polis asuransi dengan penutupan atas risiko-risiko atas harta kekayaan HSB, BIS, HLI, dan PKR yang diberikan dan diperlihatkan kepada kami adalah memadai untuk menampung risiko pertanggungan asuransi, dan perjanjian asuransi tersebut adalah sah dan mengikat HSB, BIS, HLI, dan PKR sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungan asuransi yang bersangkutan, serta masih berlaku pada saat PSH ini dikeluarkan.

Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan, ANOA dan SRGS tidak memiliki perjanjian asuransi.

20. Bahwa perjanjian-perjanjian dimana HSB, BIS, HLI, SRGS, dan PKR sebagai pihak didalamnya adalah sah dan mengikat HSB, BIS, HLI, SRGS dan PKR, dan masih berlaku sepenuhnya, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar HSB, BIS, HLI, SRGS dan PKR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh HSB, BIS, HLI, SRGS, dan PKR yang memuat batasan-batasan atau larangan-larangan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik di Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi yang dilakukan oleh HSB, BIS, HLI, SRGS, dan PKR, tidak terdapat batasan-batasan atau larangan-

larangan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum.

Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan, ANOA tidak memiliki perjanjian baik dengan pihak ketiga maupun pihak afiliasi.

21. Bahwa harta kekayaan yang sampai saat ini dimiliki oleh HSB, BIS, HLI, ANOA dan PKR secara sah, bebas dari sengketa/perkara, dan tidak dalam penyitaan serta tidak sedang dijaminkan, kecuali aset yang dimiliki oleh PKR yaitu berupa 100% saham milik PKR di PT Jawa Satu Regas, yang pada saat PSH ini dikeluarkan sedang dijaminkan. Bahwa apabila atas aset yang sedang dijaminkan tersebut dilakukan eksekusi jaminan, maka atas hal tersebut tidak akan berdampak material pada kelangsungan kegiatan usaha PKR maupun Perseroan. Sehubungan dengan penjaminan tersebut diatas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PKR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Bahwa sampai dengan PSH ini diterbitkan HSB, BIS, PKR, ANOA dan SRGS tidak memiliki karyawan. Sehubungan dengan itu HSB, BIS, PKR, ANOA dan SRGS tidak mempunyai kewajiban ketenagakerjaan dalam hal ini mendaftarkan para pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, WLTk serta tidak diharuskan mempunyai Peraturan Perusahaan.

Bahwa sampai dengan PSH ini diterbitkan HLI hanya memiliki 2 (dua) orang karyawan, sehingga dengan demikian HLI tidak diharuskan mempunyai Peraturan Perusahaan. Bahwa pada saat PSH ini dikeluarkan hubungan hukum antara karyawan HLI dengan HLI di dasarkan pada kontrak kerja.
23. Bahwa Entitas Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan seperti PPh 21, dan PPh 23.
24. Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, niaga, sengketa pajak maupun hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Entitas Anak, atau tempat lainnya. Selanjutnya pada saat PSH ini dikeluarkan tidak terdapat somasi yang sedang diajukan terhadap Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum atas Perseroan dan

Entitas Anak yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat dari Segi Hukum.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
3. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa dengan seksama yang mencakup:
 - i. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - ii. dokumen-dokumen asli maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari segi dokumen-dokumen aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum.
4. Sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, kami, secara terpisah dan mandiri telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada Perseroan dan Entitas Anak yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan secara tertentu, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang penting dan berhubungan erat dengan Perseroan dan Entitas Anak.
5. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami berasumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak dan pihak ketiga tersebut.
6. Didalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atau penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan Entitas Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang terkait.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Sesuai dengan ruang lingkup Pendapat dari Segi Hukum tersebut diatas, kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa data, pernyataan, penegasan tertentu dan informasi baik secara tertulis maupun lisan, baik yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan, Entitas Anak dan kegiatan usahanya, antara lain:

1. Akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta seluruh perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");
2. Perijinan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan pendaftaran-pendaftaran serta pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta badan-badan atau instansi-instansi Pemerintah lainnya, sehubungan dengan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitas Perseroan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut **"Tjin-ijin"**);

3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak menjadi pihak didalamnya, serta harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak (selanjutnya disebut **"Perjanjian-perjanjian"**);
4. Polis-polis asuransi sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Entitas Anak yang kami anggap penting; dan
5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang kami anggap perlu diperiksa dan diteliti yang berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak atau pihak ketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum.

Dengan dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini maka kami mencabut Pendapat dari Segi Hukum kami terdahulu dengan No. Ref:007/EYP/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 dan No. 008/EYP/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat Kami,
ERY YUNASRI & PARTNERS



Ery Yunasri, SH, LL.M
No. STTD.KH-180/PM.2 /2018
No. KKAJ: G.96.10866
No. HKHPM: 98026

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT GTS Internasional Tbk.
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the years then ended
with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		Statement of Directors
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 3	Consolidated Statementof Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	Consolidated Statement of Profit or Lossand Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6 - 8	Consolidated Statement ofChanges in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	9	Consolidated Statement ofCash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	10 - 96	Notes to the ConsolidatedFinancial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020,
2019, 2018 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT GTS INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR PRESENTATION
OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
PT GTS INTERNASIONAL TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / Name
Alamat Kantor / Office Address

Alamat domisili sesuai KTP / Kartu identitas lain /
Domicile address according to KTP or other identity
card

Nomor Telepon / Telephone No.
Jabatan / Position
2. Nama / Name
Alamat Kantor / Office Address

Alamat domisili sesuai KTP / Kartu identitas lain /
Domicile address according to KTP or other identity
card

Nomor Telepon / Telephone No.
Jabatan / Position

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018;
 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anaknya.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below:

- : Kemal Imam Santoso
: Mangkuluhur City Tower One, 26th floor
: Jl. Gatot Subroto Kav. 1 - 3 Jakarta Selatan 12930

: Jl. Cilandak Dalam 4-A RT 008 RW 001
: Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

: 021-50860686
: Direktur Utama / President Director
- : Dandun Widodo
: Mangkuluhur City Tower One, 26th floor
: Jl. Gatot Subroto Kav. 1 - 3 Jakarta Selatan 12930

: Jatinegara Indah Blok AB 2/8 RT 015 RW 012
: Kel. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur

: 021-50860686
: Direktur / Director

confirm that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT GTS internasional Tbk ("the Company") and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018;
 2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for year ended December 31, 2020, 2019 and 2018 have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;
 3. a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018 has been fully disclosed in a complete and truthful manner;
 - b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018 do not contain false material information or facts, nor do they omit material information for facts;
 4. We are responsible for the internal control systems of the Company and its subsidiaries.
- I certify the accuracy of this statement.

Jakarta
7 Juli 2021/July 7, 2021
Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Directors


Kemal Imam Santoso
Direktur Utama/President Director


Dandun Widodo
Direktur/Director

PT GTS Internasional

Address : Mangkuluhur City Tower One 26th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta Selatan 12930
Phone : +62-21-5093-3163 (Hunting)

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT GTS Internasional Tbk.

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk. dan entitas anaknya (secara kolektif disebut secara "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT GTS Internasional Tbk.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT GTS Internasional Tbk. and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 (lanjutan)

Report No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 (continued)

Hal-hal lain

Other matters

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2020 and 2019, and for the years then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

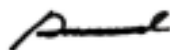
Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01492/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VI/2021 bertanggal 15 Juni, 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu melalui laporan ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

We have previously issued independent Auditors' Reports No. 01492/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VI/2021 dated June 15, 2021 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2020 and 2019, and for the years then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures through this report in connection with the proposed Initial Public Offering.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Deden Riyadi

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692/*Public Accountant Registration No. AP.0692*

7 Juli 2021/*July 7, 2021*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT GTS Internasional Tbk.

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk. dan entitas anaknya (secara kolektif disebut secara "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT GTS Internasional Tbk.*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT GTS Internasional Tbk. and its subsidiaries (collectively referred as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021 (lanjutan)

Report No. 01765/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VII/2021 (continued)

Hal-hal lain

Other matters

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2018, and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01491/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VI/2021 bertanggal 15 Juni, 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu melalui laporan ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

We have previously issued independent Auditors' Reports No. 01491/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VI/2021 dated June 15, 2021 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2018, and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures through this report in connection with the proposed Initial Public Offering.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Said Amru

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294/*Public Accountant Registration No. AP.1294*

7 Juli 2021/*July 7, 2021*

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3f,3p,5,37	15.607.709	11.010.175	6.750.168	Cash and cash equivalents
Piutang usaha:					Trade receivables:
- Pihak-pihak ketiga	3p,6a,37	-	555.675	130.556	Third parties -
- Pihak berelasi	3p,6a,28,37	2.982.649	-	-	Related parties -
Piutang lainnya:					Other receivables:
- Pihak-pihak ketiga	3p,6b,37	28.512	88.540	11.803	Third parties -
Pinjaman kepada pihak berelasi	3p,28,37	1.420.984	-	-	Loan to related parties
Persediaan	3g,7	1.857.451	135.000	135.000	Inventories
Pajak dibayar di muka	22a	298.654	204.579	93.112	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	8	160.839	100.987	56.253	Other current assets
Total aset lancar		22.356.798	12.094.956	7.176.892	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Pinjaman kepada pihak berelasi	3p,28,37	14.998.890	14.998.890	-	Loan to related parties
Piutang lainnya:					Other receivables:
- Pihak berelasi	3p,6b,28,37	3.455.091	971.853	209.617	Related parties -
Aset derivatif	3p,9,37	5.741.915	4.091.405	-	Derivative asset
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS\$14.531.102 (2019: AS\$24.803.473 & 2018: AS\$17.027.361)	3i,3l,11	54.741.336	55.371.801	64.184.494	Fixed assets, net of accumulated depreciation of US\$14,531,102 (2019: US\$24,803,473 & 2018: US\$17,027,361)
Aset hak guna, neto	12	12.063	-	-	Right use of asset, net
Aset pajak tangguhan	22e	5.848	7.733	-	Deferred tax assets
Estimasi tagihan pajak	22b	41.518	-	-	Estimated claim tax refund
Aset tidak lancar lainnya	13	1.336.457	232.541	47.261	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		80.333.118	75.674.223	64.441.372	Total non-current assets
TOTAL ASET		102.689.916	87.769.179	71.618.264	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha:					Trade payables:
- Pihak-pihak ketiga	3p,14,37	572.354	297.146	317.987	Third parties -
Utang dividen	3o,15	756.341	316.400	238.000	Dividends payable
Utang pajak	22c	124.684	127.661	93.971	Taxes payable
Utang lain-lain:					Other payables:
- Pihak-pihak ketiga	3p,16,37	174.639	26.243	959.682	Third parties -
Beban yang masih harus dibayar	3p,18,37	8.456.549	2.525.865	3.807.496	Accrued expenses
Uang muka dari pihak ketiga	17	907.216	-	-	Advance received from a third party
Pendapatan ditangguhkan	3m,3p,				
- bagian lancar	19,37	-	1.929.023	2.576.955	Deferred income - current portion
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					Current maturities of long-term liabilities:
- Pinjaman dari pihak ketiga	3p,21,37	-	-	235.237	Loan from third parties -
- Liabilitas sewa	3p,20,37	-	3.538	5.009	Lease liability -
- Pinjaman dari pihak berelasi	28	1.279.018	1.773.772	6.086.612	Loan from a related party -
Total liabilitas jangka pendek		12.270.801	6.999.648	14.320.949	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain:					Other payables:
- Pihak berelasi	3p,16,28,37	7.906.593	8.856.816	8.612.664	Related parties -
Pendapatan ditangguhkan	3m,3p,				Deferred income, net of current portion -
- bagian tidak lancar	19,37	-	1.157.632	2.465.334	Long-term liabilities, net of current portion:
Liabilitas jangka panjang, setelah bagian tidak lancar:					Loan from third parties -
- Pinjaman dari pihak ketiga	3p,21,37	19.442.397	19.442.397	-	Loan from a related party -
- Pinjaman dari pihak berelasi	3p,28,37	2.799.973	4.800.212	8.295.402	lease liability -
- Liabilitas sewa	3p,20,37	-	-	3.538	
Total liabilitas jangka panjang		30.148.963	34.257.057	19.376.938	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS		42.419.764	41.256.705	33.697.887	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham					Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 2.750 saham					Authorized - 2,750 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.750 saham	25	243.009	243.009	243.009	Issued and fully paid - 2,750 shares
Tambahan modal disetor	26	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)	Additional paid-in capital
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	2a	308.306	308.306	-	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Selisih kurs		(240.395)	(240.395)	(240.395)	Foreign exchange translation
Penghasilan komprehensif lain	3b,3p	(75.944)	(75.944)	(30.353)	Other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya		-	-	-	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		46.747.577	33.645.132	25.404.627	Unappropriated -
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		44.744.800	31.642.355	23.139.135	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	3b,23	15.525.352	14.870.119	14.781.242	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		60.270.152	46.512.474	37.920.377	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		102.689.916	87.769.179	71.618.264	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Pendapatan usaha	3p,30	31.329.115	30.171.862	27.184.510	Revenue
Beban pokok pendapatan	3p,32	(13.958.330)	(15.553.154)	(14.785.624)	Cost of revenue
Laba bruto		17.370.785	14.618.708	12.398.886	Gross profit
Beban usaha:					Operating expenses:
Umum dan administrasi	33	(2.190.385)	(3.088.028)	(3.512.507)	General and administrative
Pendapatan operasi lainnya	34a	2.082.154	288.813	-	Other operating income
Beban operasi lainnya	34b	(308.700)	(265.430)	(521.564)	Other operating expenses
Total beban usaha		(416.931)	(3.064.645)	(4.034.071)	Total operating expenses
Laba usaha		16.953.854	11.554.063	8.364.815	Operating income
Pendapatan keuangan	35a	1.118.840	864.011	77.403	Finance income
Biaya keuangan	35b	(1.373.051)	(1.214.310)	(567.525)	Finance costs
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	3h,10	-	(99.409)	-	Equity in net loss of associated company
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan		16.699.643	11.104.355	7.874.693	Profit before final and corporate income tax
Beban pajak final	3o,22d	(367.762)	(356.124)	(320.150)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan		16.331.881	10.748.231	7.554.543	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan kini	3o,22d	(115.758)	(86.876)	(83.632)	Income tax expense
(Beban)/penghasilan pajak tangguhan	3o,22d	(1.885)	7.733	-	Deferred tax (expense)/income
Laba tahun berjalan		16.214.238	10.669.088	7.470.911	Profit for the year
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian penghasilan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi	3b,27	-	(45.591)	-	Item that will be reclassified to profit or loss: Equity in other comprehensive income of associated company
Jumlah rugi komprehensif lain		-	(45.591)	-	Total other comprehensive loss
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		16.214.238	10.623.497	7.470.911	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		13.282.605	8.240.505	6.754.568	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	3b,23	2.931.633	2.428.583	716.343	Non-controlling interests
		<u>16.214.238</u>	<u>10.669.088</u>	<u>7.470.911</u>	
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		13.282.605	8.194.914	6.754.568	Owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	3b,23	2.931.633	2.428.583	716.343	Non-controlling interests
		<u>16.214.238</u>	<u>10.623.497</u>	<u>7.470.911</u>	
Laba per saham dasar (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)	3r,24	<u>0,00099</u>	<u>0,00061</u>	<u>0,00050</u>	Basic earnings per share (expressed in US Dollar full amount per share)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/
Equity attributable to owners of the parent entity

	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Komponen Ekuitas lain/ Other equity component	Selisih kurs/ Foreign exchange translation	Saldo laba/Retained earnings		Total/ Total	Kepentingan non pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo 31 Desember 2017	243.009	(2.237.753)	(30.353)	675.000	(240.395)	-	18.650.059	17.059.567	13.669.899	30.729.466	Balance at December 31, 2017
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	6.754.568	6.754.568	716.343	7.470.911	Profit for the year
Konversi surat hutang	-	-	-	(675.000)	-	-	-	(675.000)	675.000	-	Conversion of notes payable
Dividen didistribusikan entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(280.000)	(280.000)	Dividend distributed by subsidiaries
Saldo 31 Desember 2018	243.009	(2.237.753)	(30.353)	-	(240.395)	-	25.404.627	23.139.135	14.781.242	37.920.377	Balance at December 31, 2018

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity										
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali/ Difference in value of transactions with non-controlling interest	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Selisih kurs/ Foreign exchange translation	Saldo laba/Retained earnings		Total/Total	Kepentingan non pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo 31 Desember 2018	243.009	(2.237.753)	-	(30.353)	(240.395)	-	25.404.627	23.139.135	14.781.242	37.920.377
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	8.240.505	8.240.505	2.428.583	10.669.088
Kenaikan kepemilikan pada entitas anak	-	-	308.306	-	-	-	-	308.306	(308.306)	-
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(45.591)	-	-	-	(45.591)	-	(45.591)
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.031.400)	(2.031.400)
Saldo 31 Desember 2019	243.009	(2.237.753)	308.306	(75.944)	(240.395)	-	33.645.132	31.642.355	14.870.119	46.512.474

Balance at December 31, 2018

Profit for the year

Increase of ownership in a subsidiary

Other comprehensive loss

Dividend distributed by subsidiaries

Balance at December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity										
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi dengan pihak Non-pengendali/ Difference in value of transactions with non-controlling interest	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Selisih kurs/ Foreign exchange translation	Saldo laba/Retained earnings		Total/Total	Kepentingan non pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo 31 Desember 2019	243.009	(2.237.753)	308.306	(75.944)	(240.395)	-	33.645.132	31.642.355	14.870.119	46.512.474
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	13.282.605	13.282.605	2.931.633	16.214.238
Dividen didistribusikan oleh Perusahaan	-	-	-	-	-	-	(180.160)	(180.160)	-	(180.160)
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.276.400)	(2.276.400)
Saldo 31 Desember 2020	243.009	(2.237.753)	308.306	(75.944)	(240.395)	-	46.747.577	44.744.800	15.525.352	60.270.152

Balance at December 31, 2019

Profit for the year

Dividend distributed by the Company

Dividend distributed by subsidiaries

Balance at December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019, dan 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019, and 2018
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan		26.722.702	27.791.109	30.905.704	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(14.419.131)	(12.555.315)	(12.832.195)	Cash paid to suppliers
Penerimaan bunga		289.069	193.273	77.403	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya		(466.766)	(447.293)	(421.743)	Income taxes and other taxes paid
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		12.125.874	14.981.774	17.729.169	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Perolehan aset tetap		(885.038)	(349.446)	(10.038.885)	Acquisition of fixed assets
Uang muka pengedokan		(1.024.545)	(196.151)	-	Advances for docking
Pinjaman kepada pihak berelasi		(1.420.984)	(19.297.000)	-	Loan to related parties
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(3.330.567)	(19.842.597)	(10.038.885)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi		(2.494.993)	(7.808.030)	(9.204.024)	Payments of loan from a related party
Pembayaran dividen		(1.700.400)	(2.269.401)	(160.876)	Payment of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	20, 37	(3.538)	(5.009)	(4.553)	Payments of lease liabilities
Pembayaran beban keuangan		(89)	(2.638)	(291.381)	Payments of finance cost
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		-	(235.237)	(460.032)	Payments of loan from third parties
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	21, 36, 37	-	19.442.397	-	Proceed of loan from third parties
Arus kas neto yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		(4.199.020)	9.122.082	(10.120.866)	Net cash flows (used in)/ provided by financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		1.247	(1.252)	987	Effect from changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		4.597.534	4.260.007	(2.429.595)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	11.010.175	6.750.168	9.179.763	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	15.607.709	11.010.175	6.750.168	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT GTS Internasional ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Martina, S.H., No. 32 tanggal 29 Juni 2012. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. AHU-40582.AH.01.01 tanggal 26 Juli 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Arry Supratno, S.H., No. 34 tanggal 22 Oktober 2018, sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0258674 tanggal 30 Oktober 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut. Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. AL.001/134/SP-SIUPAL/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019. Perusahaan memulai operasi komersialnya sejak Agustus 2019.

Perusahaan berdomisili di Jakarta.

Kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya ("Grup") terutama mencakup pengiriman gas alam cair ("LNG"). Grup juga menyediakan jasa manajemen kapal kepada pemilik-pemilik kapal.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Hateka Trans Internasional dan entitas induk terakhir adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT GTS Internasional (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 32 dated June 29, 2012 of Martina, S.H. The Articles of Association were approved by the Minister of Justice through his Decree No. AHU-40582.AH.01.01 dated July 26, 2012.

The Company's Articles of Association have been amended several times with the latest amendment being made based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 34 dated October 22, 2018, in order to change the composition of Company's Board of Commissioners and Directors. This amendment has been acknowledged by Minister of Justice and Human Rights through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0258674 dated October 30, 2018.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in sea transportation and other activities relating to sea transportation. The Company has obtained Authorization as a Sea Transportation Company ("SIUPAL") No. AL.001/134/SP-SIUPAL/XII/2019 dated December 18, 2019. The Company started its commercial operations in August 2019.

The Company is domiciled in Jakarta.

The activities of the Company and its subsidiaries (the "Group") mainly involve transporting liquefied natural gas ("LNG"). The Group also provides ship management services to vessel owners.

The Company's parent entity is PT Hateka Trans Internasional and ultimate parent entity is PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	2020
Komisaris Utama	Budi Haryono
Komisaris	Theo Lekatompessy
Komisaris	-
Direktur Utama	Hendra Michael Roy Sembel
Direktur	Sutiyarso

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, karyawan Perseroan merupakan karyawan dari pihak berelasi oleh karena itu, pengungkapan yang diperlukan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak Berelasi", termasuk dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

c. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 7 Juli 2021.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the composition of the Boards of Commissioners and Directors are as follows:

	2019	2018
Budi Haryono	Theo Lekatompessy	Theo Lekatompessy
Theo Lekatompessy	-	Justinus Tangkelangi
-	Hendra Michael Roy Sembel	Budi Haryono
Hendra Michael Roy Sembel	Sutiyarso	Taufik Agustono
Sutiyarso	-	Sutiyarso

As of December 31, 2020, 2019 dan 2018, the employees of the Company are also employees of the Company's related parties. Therefore, the necessary disclosures required by PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", are included in the financial statements of those company.

c. Completion of consolidated financial statements

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on July 7, 2021.

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK

Perincian dari penyertaan dan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak adalah sebagai berikut:

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES

The details of the Company's ownership interests in subsidiaries are as follows:

Entitas dan Kegiatan Usaha/ Entity and Nature of Business	Mulai Secara Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership			Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination		
		31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB") Indonesia Jasa sewa kapal/ Vessel charter service	2014	95%	95%	95%	AS\$45.226.486	AS\$39.498.912	AS\$46.098.342
PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS") Indonesia Jasa sewa kapal/ Vessel charter service	2016	51%	51%	51%	AS\$29.794.200	AS\$28.568.814	AS\$30.522.752
PT Humolco LNG Indonesia ("HLI") Indonesia Jasa sewa kapal/ Vessel charter service	2016	99,96%	99,96%	60%	AS\$1.963.883	AS\$1.160.074	AS\$1.403.345
PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR") Indonesia Jasa sewa kapal/ Vessel charter service	2018	99,99%	99,99%	99,99%	AS\$22.242.486	AS\$19.771.260	AS\$50.657

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

a. Akuisisi

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")

Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di HLI dengan membeli 40% kepemilikan saham atau setara dengan 1.000 saham HLI pada nilai pengalihan sebesar RpNihil dari Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), pihak ketiga. Transaksi pembelian saham ini efektif sejak 25 Juli 2019 (tanggal akuisisi).

	Nilai buku/ Book value
ASET	
Total aset lancar	1.007.163
Total aset tidak lancar	185.310
TOTAL ASET	1.192.473
TOTAL LIABILITAS	421.707
JUMLAH ASET NETO	770.766
Dikurangi:	
Imbalan yang dialihkan untuk memperoleh tambahan investasi sebesar 40%	-
Nilai tercatat investasi awal pada asosiasi sebesar 60%	462.460
Selisih nilai transaksi pemegang saham non-pengendali	308.306

Selisih neto sebesar US\$308.306 antara nilai akuisisi dan proporsional saham sebesar 40% dari nilai buku neto aset HLI yang merupakan nilai yang tercatat pada buku Perusahaan, dicatat sebagai "Selisih transaksi pemegang saham non-pengendali" dan disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Entitas anak

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")

PT Hikmah Sarana Bahari didirikan pada 20 Agustus 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 01 of Beby P. Perwita Sari, S.H., MKn. Akta pendirian Perseroan telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-44288.AH.01.01. Tahun 2010.

Berdasarkan Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2019. Para pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan yang terdiri dari 20.000 lembar saham dengan total Rp20.000.000 atau setara dengan AS\$1.418.239. Pembelian kembali saham ini dicatat di akun saham tresuri di bagian ekuitas pemegang saham. Aktivitas perusahaan melibatkan transportasi gas alam cair (LNG) melalui sewa kapal Ekaputra.

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES (continued)

a. Acquisition

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")

The Company increased its ownership in HLI by purchasing of 40% share ownership or representing 1,000 shares of HLI at the transfer price of RpNil from Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), a third party. This transaction was effective on July 25, 2019 (acquisition date).

ASSETS	
Total current assets	
Total non-current assets	
TOTAL ASSETS	
TOTAL LIABILITIES	
TOTAL NET ASSETS	
Less:	
Consideration transferred for acquiring 40% additional investment	
Carrying value of initial investment in associate of 60%	
Difference in the value of transaction with non-controlling interest	

Net difference of US\$308,306 between the acquisition price and proportionate share of 40% in the book value of the net assets of HLI as carried in the books of the Company is recorded as "Difference in value of transaction with non-controlling interest" and presented as part of equity in capital account in the consolidated statement of financial position.

b. The Subsidiaries

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")

PT Hikmah Sarana Bahari was established on August 20, 2010, based on Notarial Deed No. 01 of Beby P. Perwita Sari, S.H., MKn. The deed of establishment was ratified by the Minister Laws and Human Rights under decree No. AHU-44288.AH.01.01. Tahun 2010.

Based on Notarial deed No. 76 dated October 25, 2019, the Shareholder approved the repurchase of the Company's issued shares of 20,000 shares with total cost of Rp20,000,000 or equivalent to US\$1,418,239. This repurchase of shares is recorded at "Treasury shares" account under shareholders' equity section. The Company's activity involve transporting liquefied natural gas (LNG) through vessel rent of Ekaputra.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS")

PT Bhaskara Inti Samudera didirikan pada 21 November 2013, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 153. Akta pendirian Perseroan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-0116001.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2013.

Aktivitas perusahaan melibatkan transportasi gas alam cair (LNG) melalui sewa kapal Triputra.

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")

PT Humolco LNG Indonesia adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 17 tertanggal March 4, 2014., Notaris di Jakarta. Artikel asosiasi Perseroan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-10957.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 12 Maret 2014.

Berdasarkan Akta Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.kn., No. 102 Notaris di Bogor, tertanggal 25 Juli 2019, Perusahaan meningkatkan kepemilikan di HLI dengan membeli 40% kepemilikan saham atau senilai 1,000 saham HLI dari Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), pihak ketiga. Transaksi ini efektif pada 25 Juli 2019. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0043355.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019.

Aktivitas perusahaan melibatkan jasa manajemen kapal.

PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")

PT Permata Khatulistiwa Regas adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 117 tertanggal 23 Maret 2018. Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-0017586.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 3 April 2018.

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES (continued)

b. The Subsidiaries (continued)

PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS")

PT Bhaskara Inti Samudera was established on November 21, 2013, based on Notarial Deed No. 153 of Arry Supratno, S.H. The deed of establishment was ratified by the Minister Laws and Human Rights under decree No. AHU-0116001.AH.01.09.Tahun 2013 dated December 4, 2013.

The Company's activity involve transporting liquefied natural gas (LNG) through vessel rent of Triputra.

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")

PT Humolco LNG Indonesia is a limited liability Company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 17 dated March 4, 2014 of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta. The Company's Articles of Association was approved by the Minister of Justice and Human Rights in letter No. AHU-10957.AH.01.01.Tahun 2014 dated March 12, 2014.

Based on Notarial Deed No. 102 of Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.kn., Notary in Bogor, dated July 25, 2019, The Company increased its ownership in HLI by purchasing of 40% share ownership or representing 1,000 shares of HLI at from Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), a third party. This transaction was effective on July 25, 2019. The changes have been approved by Minister of Laws and Human Rights through his Decision Letter No. AHU-0043355.AH.01.02 Tahun 2019 dated July 29, 2019.

The Company's activity involve ship management service.

PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")

PT Permata Khatulistiwa Regas is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 117 dated March 23, 2018 of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta. The Company's Articles of Association was approved by the Minister of Justice and Human Rights in letter No. AHU-0017586.AH.01.01.Tahun 2018 dated April 3, 2018.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

**PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 40 Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 12 Maret 2019, Perusahaan menerbitkan 2.729.295 lembar saham dengan total Rp272.979.500.000 atau setara dengan AS\$19.389.125,65 kepada PT GTS Internasional dan menerbitkan 25 lembar saham dengan total Rp2.500.000 atau setara dengan AS\$177,57 kepada Koperasi Karyawan Bhakti Samudra. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0152823 Tahun 2019 tertanggal 18 Maret 2019.

Aktivitas perusahaan melibatkan jasa pengolahan gas alam cair (LNG) melalui anak perusahaan.

Tidak ada pembatasan pada entitas anak untuk melakukan pengalihan dana kepada Perseroan sebagai entitas induk

**2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES
(continued)**

b. The Subsidiaries (continued)

**PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")
(continued)**

Based on Notarial Deed No. 40 of Humbert Lie, S.H., S.E., Notary in Jakarta Utara, dated March 12, 2019, The Company issued 2,729,295 shares with total cost US\$272,979,500,000 or equivalent to US\$19,389,125.65 to PT GTS Internasional and issued 25 shares with total cost Rp2,500,000 or equivalent to US\$177.57 to Koperasi Karyawan Bhakti Samudra. The changes have been approved by Minister of Laws and Human Rights through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0152823 Tahun 2019 dated March 18, 2019.

The Company's activity is liquefied gas processing services through subsidiaries.

There is no limitation in the subsidiaries to make transfer of fund to the Company as parent entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK"), and Rule of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 Attachment of Chairman of BAPEPAM's decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"/"AS\$"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Entitas anak merupakan entitas dimana Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Secara spesifik, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements are presented in United States Dollar ("US Dollar"/"US\$"), which is the Group's functional and presentation currency.

The financial reporting period of the Group is January 1 - December 31.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as of December 31, 2020, and for the year then ended.

Subsidiaries are entity which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has ability to affect the returns through its power over the entity.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intragrup berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Semua saldo dan transaksi antar anggota Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the consolidated financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

All material between members of the Group accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as one business entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly or indirectly to the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

Losses of a non-wholly owned subsidiaries are attributed to the NCI even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

A change in the ownership interest of a subsidiaries, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

In case of loss of control over a subsidiaries, the Company:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries;
- derecognizes the carrying amount of any NCI;
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan: (lanjutan)

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

c. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup menentukan dan mengklasifikasikan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Kelompok Usaha mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

In case of loss of control over a subsidiaries, the Company: (continued)

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

c. Business combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquire a business, it assesses and classifies the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan PSAK No. 71. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur berdasarkan harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepas tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business combination (lanjutan)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability, will be recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in accordance with PSAK No. 71. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be re-measured until it is finally settled within equity.

The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognized and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiaries acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the consolidated income statement.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiaries acquired, the difference is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of cash-generating units ("CGU") of the Group that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali, termasuk pembelian atau penjualan aset, liabilitas, saham dan instrumen ekuitas lainnya dibukukan sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dicatat sebagai "tambahan modal disetor", yang merupakan bagian dari ekuitas.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup dijabarkan ke Dolar AS dengan menggunakan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan oleh penjabaran tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berjalan. Perbedaan nilai tukar yang timbul atas aset atau liabilitas moneter intragrup, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang tidak dapat dieliminasi satu sama lainnya, diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
AS\$1/Rupiah	14.105,01	13.901,00
AS\$1/KRW	1.087,93	1.157,93
AS\$1/JP¥	103,36	110,44
AS\$1/SG\$	1,33	1,34
AS\$1/EUR	0,81	0,89

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties

The Group have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

Restructuring transactions with entities under common control, including the purchase or sale of assets, liabilities, shares and other equity instruments are accounted for in accordance with the PSAK No. 38, "Business Combination of Entities under Common Control". The difference between the consideration and book value of restructuring transactions between entities under common control is recorded as "additional paid-in capital" account in the equity.

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements.

e. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time of the transactions. At end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies of the Group are translated into US Dollar at the middle rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year as published by Bank Indonesia. The resulting exchange gains or losses arising from the translation are recognized in the current period's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The exchange differences arising on intra-group monetary items, whether short-term or long-term, which cannot be eliminated against a corresponding amount are recognized as an income or an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The rates of exchange used are as follows:

	2018	
	14.481,00	US\$1/Rupiah
	1.111,36	US\$1/KRW
	110,44	US\$1/JP¥
	1,37	US\$1/SG\$
	0,87	US\$1/EUR

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari "aset keuangan lancar lainnya".

g. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan mencakup harga pembelian dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode pelaporan.

h. Investasi pada entitas asosiasi

Grup menerapkan PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". PSAK ini mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi. Penerapan PSAK ini tidak memberikan dampak kepada Grup karena tidak memiliki investasi pada ventura bersama.

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali, biasanya melalui kepemilikan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 20% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi Grup pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi, dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca-akuisisi, diakui didalam penghasilan komprehensif lain. Mutasi penghasilan komprehensif lain pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not exceeding 1 (one) year at the time of placement are presented as part of "other current financial assets".

g. Inventories

Inventories are valued at cost. Cost is determined using the weighted average method and includes purchase cost and other costs to bring the inventories to their present location and usable condition.

Allowance for inventories obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the reporting dates.

h. Investments in associated companies

The Group applied PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures". This PSAK prescribes the application of the equity method to investments in joint ventures in addition to associated company. The adoption of this PSAK has no significant impact since the Group has no investment in joint ventures.

Associates are all entities over which the Group have significant influence but not control, generally accompanying a direct or indirect shareholding more than 20% of the voting rights. Investments in associated entities are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investments in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

The Group's share of their associates post-acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and their share of post-acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investasi dilaporkan nihil.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasinya dieliminasi sebesar kepentingan Grup pada entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang dialihkan.

i. Aset tetap dan penyusutan

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika terjadi.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap dua hingga dua setengah tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Investments in associated companies
(continued)**

When the Group's share of losses in an associate exceed its interest in the associates, the investment is reported at zero value.

Dilution gains and losses arising on investments in associates are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Unrealized gains on transactions between the Group and their associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates. Unrealized losses, if any, are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

i. Fixed assets and depreciation

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied.

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

The Group's vessels are dry-docked in general every two up to two and a half years periodically and the costs are capitalized to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Percentase Depresiasi/ Percentage of Depreciation	
Kapal, dan kapal tunda	5 - 40	20% - 2,5%	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	4	25%	Office furniture and equipment
Kendaraan	8	12,5%	Vehicles

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, dan disesuaikan secara prospektif, jika relevan. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup atas nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset, tidak terdapat perubahan atas estimasi nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets and depreciation (continued)

The capitalized costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred dry-docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortized over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous dry-docking is derecognized, and charged to current period consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period which the asset is derecognized.

The costs of the construction of vessels are capitalized as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end. Based on review of the Group's management on the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets, no changes made on the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets as of December 31, 2020.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Uang muka pengedokan kapal merupakan pembayaran ke galangan kapal sehubungan dengan pengedokan kapal yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Aset yang dimiliki untuk dijual diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai buku atau nilai wajar.

j. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap digunakan.

k. Sewa

Sesudah 1 Januari 2020

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 73, yang mengatur persyaratan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang dibuat atau diubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

Grup sebagai lessee:

Pada tanggal dimulainya atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets and depreciation (continued)

Advances for docking represent payments to shipyards in relation to the docking of vessels which has not been completed yet at the date of consolidated statement of financial position.

Fixed assets which use is discontinued and is held for sale ceased of being depreciated and reclassified as assets held for sale. Assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

j. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the cost of those assets. Capitalization of borrowing costs ceases when the qualifying assets are complete and ready for service.

k. Leases

After January 1, 2020

From January 1, 2020, the Group has adopted PSAK No. 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or, after January 1, 2020.

The Group as lessee:

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah diakui dengan dasar garis lurus sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu sewa hingga 12 bulan.

Grup sebagai lessors:

Sewa di mana Grup tidak mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan di laporan laba rugi konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Leases (continued)

After January 1, 2020 (continued)

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the statements of profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term up to 12 months.

The Group as lessors:

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sewa pembiayaan - sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa pakai aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa operasi - sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

Before January 1, 2020

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

Finance lease - as lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of the minimum lease payments.

Minimum lease payments are apportioned between the financial charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Financial charges are charged directly to profit or loss.

If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, then, the leased assets are depreciated over their estimated useful lives. If not, then the capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the useful lives of the assets or the lease term. Gain or loss on a sale and finance leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

Operating lease - as lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Penurunan nilai aset non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Impairment of non-financial assets

The Group assess at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group make an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generated Unit ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**I. Penurunan nilai aset non keuangan
(lanjutan)**

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**I. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

m. Pendapatan ditangguhkan

Pendapatan untuk periode buku mendatang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian periode berjalan dan diamortisasi ketika pendapatan telah layak untuk diakui atau dapat direalisasi.

n. Perpajakan

Grup menerapkan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan". Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final yang sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan, telah dipisahkan menjadi pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak Final

Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan domestik dan jasa keruk yang diberikan kepada perusahaan Indonesia dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan jasa perkapalan sebagai pos tersendiri.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of non-financial assets (continued)

Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

m. Deferred income

Income relating to future financial periods is accounted for as deferred income in the current period's consolidated statement of financial position and amortized as earned or realized.

n. Taxation

The Group applied PSAK No. 46, "Income taxes". Tax expense on revenue subject to final tax which was previously included as part of income tax expense, has been separated into a separate item in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final Tax

The Group's domestic vessel charter income and dredging services provided to Indonesian companies is subject to a final tax at rates of 1.20% under the Taxation Laws of Indonesia.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Group have decided to present all of the final tax arising from vessel charter income as separate line item.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final (lanjutan)

Untuk pendapatan selain dari jasa perkapalan, beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena penghasilan kena pajak tidak termasuk pos-pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan. Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation (continued)

Final Tax (continued)

For income other than vessel charter income, current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current corporate income tax is calculated using tax rates based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendment to taxation obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time of making such appeal, or (2) at the time based on knowledge of developments in similar cases involving matters appealed, based on rulings by the Tax Court or the Supreme Court, that a positive appeal outcome is adjudged to be significantly uncertain, in which event the impact of an amendment of tax obligations based on an assessment is recognized.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan sejauh tidak lagi terdapat kemungkinan jumlah laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua dari aset pajak tangguhan untuk direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Grup menyajikan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Kini (Beban)/Manfaat" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Sesudah 1 Januari 2020

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry-forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry-forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at consolidated statement financial position date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/(Expense), Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Group present adjustments of income tax from previous years, if any, as part of "Current Tax (Expense)/Benefit" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

o. Revenue and expense recognition

After January 1, 2020

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. Identify contract (s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Sesudah 1 Januari 2020

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut (lanjutan):

3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari jasa sewa kapal dan jasa pengelolaan kapal diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Jika pendapatan dari sewa kapal berbasis waktu (*vessel time charter*) mencakup lebih dari satu periode akuntansi maka pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan periode yang dicakup.

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenue and expense recognition

After January 1, 2020

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows (continued):

3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Revenue on vessel charter and ship management service are recognized when services are rendered to the customers. If the vessel time charter revenue covers more than one accounting period, then revenue is recognized proportionally over the period covered.

Revenues from an agency relationship are recorded based on the gross amount billed to the customers when the Group acts as principal in the sale of goods and services. Revenues are recorded based on the net amount retained (the amount paid by the customer less amount paid to the suppliers) when, in substance, the Group has acted as agent and earned commission from the suppliers of the goods and services sold.

Expenses are recognized as incurred.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**o. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup serta jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari jasa sewa kapal dan jasa pengelolaan kapal diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Jika pendapatan dari sewa kapal berbasis waktu (*vessel time charter*) mencakup lebih dari satu periode akuntansi maka pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan periode yang dicakup.

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui ketika terjadi (basis akrual).

p. Instrumen keuangan

Sesudah 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Revenue and expense recognition
(continued)**

Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, excluding discounts and Value Added Taxes ("VAT").

Revenue on vessel charter and ship management service are recognized when services are rendered to the customers. If the vessel time charter revenue covers more than one accounting period, then revenue is recognized proportionally over the period covered.

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortized cost is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR") method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses are recognized as incurred (accrual basis).

p. Financial instruments

After January 1, 2020

The Group classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. The Group adopted PSAK 71 as at January 1, 2020.

Financial assets

Initial recognition and measurement financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal aset
keuangan (lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement financial
assets (continued)

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman kepada pihak berelasi dan aset derivatif.

ii. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang).

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement financial assets (continued)

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, trade and other receivables, loan to related parties and derivative asset.

ii. Financial assets at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

The Group measures debt instruments at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal aset
keuangan (lanjutan)

- ii. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang) (lanjutan).

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi konsolidasian dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 31 Desember 2020.

- iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement financial
assets (continued)

- ii. Financial assets at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) (continued).

For debt instruments at fair value through other comprehensive income, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the consolidated statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in other comprehensive income is recycled to profit or loss.

The Group has no debt instruments classified at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative gains and losses as of December 31, 2020.

- iii. Financial assets designated at fair value through other comprehensive income with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through other comprehensive income when they meet the definition of equity under PSAK 71 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis. Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in other comprehensive income.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan (lanjutan)

- iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas) (lanjutan).

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 31 Desember 2020.

- iv. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI testing diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya.

Derivatif yang melekat pada kontrak hybrid, dengan aset finansial atau host non-finansial, dipisahkan dari host dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak terkait erat dengan host; instrumen terpisah dengan ketentuan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hybrid tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement financial assets (continued)

- iii. Financial assets designated at fair value through other comprehensive income with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued).

Equity instruments designated at fair value through other comprehensive income are not subject to impairment assessment. There were no equity investments elected under this category as of December 31, 2020.

- iv. Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not fulfilled with solely payments of principal and interest (SPPI) testing are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial asset or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at fair value through profit or loss. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal aset
keuangan (lanjutan)

- iv. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Penilaian kembali hanya terjadi jika ada perubahan dalam syarat-syarat kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan atau reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui kategori laba atau rugi.

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan konsolidasian diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Tidak ada aset keuangan kategori ini per tanggal 31 Desember 2020.

Kerugian Kredit Ekspektasian

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement financial
assets (continued)

- iv. Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the fair value through profit or loss category.

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through consolidated profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss. There were no financial assets under this category as of December 31, 2020.

Expected credit losses

The Group recognizes an allowance for expected credit losses for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. expected credit losses are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Expected credit losses (continued)

Expected credit losses are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, expected credit losses are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month expected credit losses). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime expected credit losses).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating expected credit losses. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at fair value through other comprehensive income, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Expected credit losses (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement of financial liabilities

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group classifies its financial liabilities as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities measured at amortized cost.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal liabilitas
keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, dan pinjaman.

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindungnilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement of
financial liabilities (continued)

The Group's financial liabilities include trade and other payables, dividends payable, accrued expenses, and loan.

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

i. Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at fair value through profit or loss.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal liabilitas keuangan (lanjutan)

- ii. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- i. situasi bisnis yang normal;
- ii. peristiwa default; dan
- iii. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Initial recognition and measurement of financial liabilities (continued)

- ii. Financial liabilities measured at amortized cost

This is the category most relevant to the Group. After initial recognition, interest-bearing loans and other borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle them on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The right of set-off must not be contingent on a future event and must be legally enforceable in all of the following circumstances:

- i. the normal course of business;
- ii. the event of default; and
- iii. the event of insolvency or bankruptcy of the Group and all of the counterparties.

Derecognition of financial instruments

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset. The Group derecognizes a financial liability when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

1. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan, yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dan keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, atau melalui proses amortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020

1. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets within the scope of PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each end of reporting period.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and loan to related parties which fall under the loans and receivables category.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 requires such assets to be carried at amortized cost using the effective interest ("EIR") method, and the related gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Penurunan nilai aset keuangan

Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berpengaruh pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

1. Financial assets (continued)

Derecognition

The Group derecognizes a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Impairment of financial assets

The Group assesses at reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Financial assets carried at amortized cost.

The Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Grup mengevaluasi bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi menggunakan pos penyisihan penurunan nilai. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke pos penyisihan penurunan nilai, jumlah tersebut dihapusbukkan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

1. Financial assets (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

The Group assesses whether objective evidence of impairment exists collectively. If there is objective evidence that an impairment loss on financial assets carried at amortized cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for decline in value account. The impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of impaired financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance for decline in value account, the amounts charged to the allowance for decline in value account are written-off against the carrying value of the financial asset.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Untuk menentukan adanya bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, Grup mempertimbangkan faktor-faktor misalnya probabilitas kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur dan gagal bayar atau keterlambatan pembayaran yang signifikan.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan sepanjang pemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

1. Financial assets (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

To determine whether there is objective evidence that an impairment loss on financial assets has been incurred; the Group considers factors such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor and default or significant delay in payments.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date. The amount of reversal is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as financial liabilities measured at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali untuk derivatif, yang diukur pada nilai wajar, kecuali efek diskonto akan material, dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

3. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak legal untuk saling hapus jumlah yang diakui dan ada intensi untuk menyelesaikan pada jumlah neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas pada saat yang sama.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Financial liabilities in the form of financial liabilities measured at amortized cost are initially recognized at their fair values plus directly attributable transaction costs.

Subsequent to initial recognition, all financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method, except for derivatives, which are measured at fair value, unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost.

Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized and through the amortization process.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

4. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

q. Segmen usaha

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Segmen pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas termasuk komponen-komponen yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Informasi pelaporan segmen usaha disajikan di Catatan 31 untuk menunjukkan aset dan hasil usaha Grup yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha.

r. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, tidak termasuk saham treasury, pada periode yang bersangkutan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

4. Fair value of financial instruments (continued)

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

q. Business segments

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those in other segments.

Revenue, expenses, results, assets and liabilities segment include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before balances and transactions between the Group, are eliminated as part of the consolidation process.

Information on business segments is presented in Note 31 disclosing the Group's assets and results arising from segments which are based on business activities.

r. Basic earnings per share

Earnings per share are computed by dividing profit attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding, excluding treasury shares, during the period.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Laba per saham dasar (lanjutan)

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut dan untuk seluruh periode sajian disesuaikan untuk peristiwa, selain konversi instrumen berpotensi saham biasa, yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar tanpa disertai perubahan sumber daya.

Dalam kapitalisasi laba, penerbitan saham bonus, atau pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah 13.419.142.767 saham (Catatan 24).

s. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

t. Perubahan dalam kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Basic earnings per share (continued)

The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented shall be adjusted for events, other than the conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding without a corresponding change in resources.

In a capitalisation or bonus issue or a share split, ordinary shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources. The number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

The weighted average number of shares outstanding for the year ended December 31, 2020, 2019, and 2018 are 13,419,142,767 shares, respectively (Note 24).

s. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Changes in accounting principles

On January 1, 2020, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Perubahan dalam kebijakan akuntansi

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- PSAK No. 1 (Penyesuaian dan Amandemen 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 25 (Amandemen 2019) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material".
- PSAK No. 71 tentang "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK No. 73 tentang "Sewa".

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

1 Januari/January 1, 2020

	Saldo sebelum penerapan PSAK 73/ <i>Balance before PSAK 73 implementation</i>	Penerapan PSAK 73/ <i>Implementation of PSAK 73</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 73/ <i>Balance after PSAK 73 implementation</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Aset tetap	55.371.801	(14.697)	55.357.104	Fixed assets
Aset hak-guna, neto	-	14.697	14.697	Right-of-use, net

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Changes in accounting principles

The adoption of the new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Group accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- PSAK No. 1 (2019 Adjustments and Amendments) "Presentation of Financial Statements".
- PSAK No. 15 (2017 Amendments) "Investments in Associates and Joint Ventures".
- PSAK No. 25 (2019 Amendments) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors in Material Definitions".
- PSAK No. 71 "Financial Instruments".
- PSAK No. 72 "Revenue from Contracts with Customers".
- PSAK No. 73 "Leases".

PSAK 73

The following table presents the impact on the application of PSAK 73 on January 1, 2020:

4. JUDGMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan oleh Grup dengan mempertimbangan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 3p.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Dolar AS.

Cadangan Keusangan dan Penurunan Nilai Persediaan

Cadangan keusangan dan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi total yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi

Grup mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasi disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

4. JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Financial Assets and Liabilities Classifications

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if the Group meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 3p.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is US Dollar.

Allowance for Obsolescence and Decline in Value of Inventories

Allowance for obsolescence and decline in values of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

Estimation and assumptions

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan nilai sisa

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Depresiasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat kapal yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nilai sisa kapal juga sulit diestimasi karena lamanya masa manfaat kapal dan ketidakpastian akan kondisi ekonomi. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi terakhir kapal tersebut.

Jika estimasi masa manfaat dan nilai sisa harus direvisi, tambahan beban depresiasi dapat terjadi di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 3i dan 11.

Provisi pajak

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3n dan 22.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3n dan 22.

4. JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets and residual value

Management determines the estimated useful lives and depreciation of fixed assets. Depreciation is calculated based on the various components of the cost of fixed assets less the residual value. The main estimate includes the estimated useful life of the vessel which could be significantly different from the actual useful life. Actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technology development, etc. Residual value of the vessel is also difficult to estimate because of the length of the useful life of the vessel and the uncertainty of economic conditions. The residual value is estimated annually based on the latest condition of the vessel.

If the estimated useful lives and residual values should be revised, additional depreciation expense may occur in the future. Further details are disclosed in Notes 3i and 11.

Provision for tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax expense should be recognized.

The Group recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 3n and 22.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 3n and 22.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 3p dan 37.

Penurunan nilai aset non keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak mencakup aktivitas restrukturisasi yang belum ada komitmennya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan.

4. JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Financial instruments

The Group carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Group utilize a different valuation methodology. Any changes in the fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Group's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 3p and 37.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection is for a period of ten years and does not include restructuring activities not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. Management believes that no impairment loss is required at reporting dates.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Kas			
Dolar AS	100.160	79.292	47.326
Total kas	100.160	79.292	47.326
<u>US Dollar</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	8.821.766	907.055	2.580.185
PT Bank Bukopin (Persero)	600	42.613	1.030.540
Mizuho Corporate Bank Ltd.	179	193	1.200
Sub-total	8.822.545	949.861	3.611.925
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2020: Rp37.917 juta; 2019: Rp38.545 juta; 2018: Rp26.002 juta)	2.727.656	2.772.793	1.795.564
PT Bank Bukopin (2020: Rp3 juta; 2019: Rp3.477 juta; 2018: Rp3.436 juta)	217	250.111	237.260
Sub-total	2.727.873	3.022.904	2.032.824
Total kas di bank	11.550.418	3.972.765	5.644.749
Deposito berjangka - tiga bulan atau kurang			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2020: Rp55.815 juta 2019: Rp30.000 juta 2018: Rp15.322 juta)	3.957.131	2.158.118	1.058.093
<u>Dolar AS</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	-	4.800.000	-
Total deposito berjangka	3.957.131	6.958.118	1.058.093
Total kas dan setara kas	15.607.709	11.010.175	6.750.168

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun berkisar antara:

	2020	2019	2018
Rupiah	5,25% - 6,00%	5,00% - 6,00%	5,00% - 6,00%
Dolar AS	-	2,00%	-

Pada tanggal 31 Desember 2020, deposito berjangka yang ditempatkan telah jatuh tempo di Januari dan Maret 2021.

Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The details of cash and cash equivalents based on currency and banks are as follows:

Cash on hand US Dollar
Total cash on hand
<u>US Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Bukopin (Persero)
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Sub-total
<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2020: Rp37,917 million; 2019: Rp38,545 million; 2018: Rp26,002 million)
PT Bank Bukopin (2020: Rp3 million; 2019: Rp3,477 million; 2018: Rp3,436 million)
Sub-total
Total cash in banks
Time deposits - three months or less
<u>US Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2020: Rp55,815 million 2019: Rp30,000 million 2018: Rp15,322 million)
<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Total time deposits
Total cash and cash equivalents

The range of the interest rates per annum for time deposits as follows:

Rupiah
US Dollar

As of December 31, 2020, all time deposits has been mature between January and March, 2021.

All bank accounts and time deposits are placed in third-party banks.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN

a. Piutang usaha

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga:			
PT Pertamina Hulu Mahakam	-	505.675	-
PT Hanochem Shipping	-	50.000	-
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	-	-	87.170
MCGC International Ltd.	-	-	43.386
Sub jumlah - pihak-pihak ketiga	-	555.675	130.556
Pihak berelasi: (Catatan 28)			
PT Humpuss Transportasi Curah	15.838	-	-
PT Humpuss Transportasi Kimia	2.966.811	-	-
Sub jumlah - pihak berelasi	2.982.649	-	-
Piutang usaha	2.982.649	555.675	130.556

Piutang usaha terutama merupakan piutang dari pemberian jasa sewa kapal dan jasa manajemen kapal.

Total piutang usaha berdasarkan umur sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Belum jatuh tempo	-	555.675	130.556
Lewat jatuh tempo:			
- 1 hingga 30 hari	2.982.649	-	-
Piutang usaha	2.982.649	555.675	130.556

Saldo piutang tersebut di atas terdiri atas piutang dalam Dolar AS dan Rupiah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
- Dolar AS	2.966.811	555.675	130.556
- Rupiah (2020: Rp223 juta)	15.838	-	-
Piutang usaha	2.982.649	555.675	130.556

Saldo piutang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk piutang usaha.

6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

a. Trade receivables

The details of trade receivables based on customers are as follows:

	2020	2019	2018
Third parties:			
PT Pertamina Hulu Mahakam	-	505.675	-
PT Hanochem Shipping	-	50.000	-
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	-	-	87.170
MCGC International Ltd.	-	-	43.386
Sub total - third parties	-	555.675	130.556
Related parties: (Note 28)			
PT Humpuss Transportasi Curah	15.838	-	-
PT Humpuss Transportasi Kimia	2.966.811	-	-
Sub total - related parties	2.982.649	-	-
Trade receivables	2.982.649	555.675	130.556

The trade receivables mainly represents the vessel charter services and ship management.

Aging of trade receivables is as follows:

	2020	2019	2018
Current	-	555.675	130.556
Overdue: 1 to 30 days -	2.982.649	-	-
Trade receivables	2.982.649	555.675	130.556

Trade receivables in US Dollar and Rupiah currencies are as follows:

	2020	2019	2018
US Dollar -	2.966.811	555.675	130.556
Rupiah - (2020: Rp223 million)	15.838	-	-
Trade receivables	2.982.649	555.675	130.556

Outstanding balances of trade receivables at year-end are unsecured. There have been no guarantees provided or received for any trade receivables.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Berdasarkan penilaian atas kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang usaha pada akhir tahun, tidak terdapat jumlah penurunan nilai piutang usaha yang signifikan. Oleh karena itu Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

b. Piutang lain-lain

	2020	2019	2018
Aset lancar:			
Pihak-pihak ketiga	28.512	88.540	11.803
Aset tidak lancar:			
Pihak berelasi (Catatan 28)	3.455.091	971.853	209.617
	3.483.603	1.060.393	221.420

Berdasarkan penilaian atas kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang lain-lain pada akhir tahun, tidak terdapat jumlah penurunan nilai piutang usaha yang signifikan. Oleh karena itu Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES (continued)

a. Trade receivables (continued)

Based on the assessment of expected credit losses on trade receivables at the end of the year, there is no significant decrease in the value of trade receivables. Therefore, management believes that an allowance for impairment of trade receivables is not considered necessary.

As of December 31, 2020, 2019, and 2018, there is no trade receivables used as collateral.

b. Other receivables

Current assets:
Third parties
Non-current assets:
Related parties (Note 28)

Based on the assessment of expected credit losses on other receivables at the end of the year, there is no significant decrease in the value of trade receivables. Therefore, management believes that an allowance for impairment of other receivables is not considered necessary.

7. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	2020	2019	2018
Suku cadang, perlengkapan kapal, minyak pelumas dan bahan bakar	1.857.451	135.000	135.000

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan atau keusangan persediaan tidak diperlukan, mengingat semua persediaan dapat digunakan.

Grup tidak mengasuransikan persediaan mengingat jenis, sifat dan risiko masing-masing persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

7. INVENTORIES

Inventories consist of:

Supplies vessel, vessel spare part, lubricating oils and fuel

Management believes that allowance for decline in value or obsolescence of inventories is not required, as all inventories are usable.

The Group does not insure the inventories considering the type, nature and risks of the inventories.

As of December 31, 2020, 2019, and 2018, there is no inventory used as collateral.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

8. ASET LANCAR LAINNYA

Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	2020	2019	2018
Asuransi dibayar dimuka	86.326	85.386	11.673
Uang muka	11.928	8.434	8.861
Sewa	313	3.779	2.737
Lain-lain	62.272	3.388	32.982
	160.839	100.987	56.253

Uang muka merupakan uang muka pembelian suku cadang dan operasional kapal.

8. OTHER CURRENT ASSETS

Prepaid expenses consist of:

	2020	2019	2018
Asuransi dibayar dimuka	86.326	85.386	11.673
Uang muka	11.928	8.434	8.861
Sewa	313	3.779	2.737
Lain-lain	62.272	3.388	32.982
	160.839	100.987	56.253

Prepaid insurance
Advance
Rental
Others

Advances represent advances for purchase of spare parts and vessels operations.

9. ASET DERIVATIF

Pada tanggal 23 November 2018, PKR, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Jawa Satu Regas ("JSR"). Berdasarkan perjanjian ini, PKR setuju untuk memberikan pinjaman sebesar AS\$19.297.000 yang akan digunakan oleh JSR untuk membangun terminal FSRU. Pinjaman ini wajib dikonversi ke ekuitas paling sedikit 50% dari total pinjaman selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2021 (Catatan 36d).

Fitur konversi ekuitas pinjaman dipisahkan sebagai aset derivatif.

Pada saat dimulainya perjanjian pinjaman, manajemen mengklasifikasikan porsi konversi ekuitas dari pinjaman sebagai aset derivatif.

9. DERIVATIVE ASSET

On November 23, 2018, PKR, a subsidiary, entered into a loan agreement with PT Jawa Satu Regas ("JSR"). Under this agreement, PKR agreed to provide loan amounting to US\$19,297,000 which will be used by JSR to construct FSRU terminal. The loan is mandatorily converted to equity at least 50% of total loan no later than December 17, 2021 (Note 36d).

The loan equity conversion feature are required to be separated as derivative asset.

At inception of loan agreement, management classified the portion of equity conversion feature of loan as derivative assets.

	2020	2019	
Jumlah nosional Porsi pinjaman	19.297.000 (14.998.890)	19.297.000 (14.998.890)	Notional amount Loan portion
Aset derivatif dari konversi ekuitas	4.298.110	4.298.110	Derivative asset from equity conversion
Kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset derivatif tahun sebelumnya	(206.705)	-	Loss arising from changes in fair value of derivative asset from prior year
Nilai wajar tahun sebelumnya Laba/(rugi) perubahan nilai wajar aset derivatif tahun berjalan (Catatan 34a dan 34b)	4.091.405 1.650.510	4.298.110 (206.705)	Fair value from prior year Gain/(loss) arising from changes in fair value in current year (Notes 34a and 34b)
	5.741.915	4.091.405	

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

10. PENYERTAAN SAHAM

10. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

2020						
	% kepemilikan/ of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2019/ Carrying amount Jan 1, 2019	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition/ (Deduction)	Bagian rugil/ Share of loss	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Nilai tercatat 31 Des. 2020/ Carrying amount Dec 31, 2020
Perusahaan asosiasi/ Associated company						
Metode ekuitas/Equity method						
PT Jawa Satu Regas	25%	-	-	-	-	-
Total/Total		-	-	-	-	-
2019						
	% kepemilikan/ of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2019/ Carrying amount Jan 1, 2019	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition/ (Deduction)	Bagian rugil/ Share of loss	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Nilai tercatat 31 Des. 2019/ Carrying amount Dec 31, 2019
Perusahaan asosiasi/ Associated company						
Metode ekuitas/Equity method						
PT Jawa Satu Regas	25%	-	145.000	(99.409)	(45.591)	-
Total/Total		-	145.000	(99.409)	(45.591)	-
2018						
	% kepemilikan/ of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2018/ Carrying amount Jan 1, 2018	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition/ (Deduction)	Bagian rugil/ Share of loss	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Nilai tercatat 31 Des. 2018/ Carrying amount Dec 31, 2018
Perusahaan asosiasi/ Associated company						
Metode ekuitas/Equity method						
PT Jawa Satu Regas	25%	-	50.000	(50.000)	-	-
Total/Total		-	50.000	(50.000)	-	-

Tabel berikut menyajikan informasi keuangan atas entitas asosiasi:

The following table illustrates summarized financial information of an associated company:

	2020	2019	2018	
PT Jawa Satu Regas				PT Jawa Satu Regas
Total aset	267.125.211	137.691.114	17.576.420	Total assets
Total liabilitas	288.325.121	143.925.944	18.872.752	Total liabilities
Rugi	14.965.080	15.166.998	1.496.332	Loss

Investasi pada PT Jawa Satu Regas ("JSR"), entitas asosiasi, merupakan investasi PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), entitas anak, dengan persentase kepemilikan sebesar 25%. Penyertaan pada entitas asosiasi ini dicatat menggunakan metode ekuitas.

Investment in PT Jawa Satu Regas ("JSR"), an associated company, represents the investment of PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), a subsidiary, involving an ownership interest of 25%. This investment is recorded using equity method.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

2020

	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions ¹	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balances	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	80.122.333	5.947.979	(11.425.191)	(5.419.487)	69.225.634	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	31.886	14.918	-	-	46.804	Office furniture and equipment
	80.154.219	5.962.897	(11.425.191)	(5.419.487)	69.272.438	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	21.055	-	-	(21.055)	-	Vehicles
	80.175.274	5.962.897	(11.425.191)	(5.440.542)	69.272.438	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	24.780.259	6.568.943	(11.425.191)	(5.419.487)	14.504.524	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	16.855	9.723	-	-	26.578	Office furniture and equipment
	24.797.114	6.578.666	(11.425.191)	(5.419.487)	14.531.102	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	6.359	-	-	(6.359)	-	Vehicles
	24.803.473	6.578.666	(11.425.191)	(5.425.846)	14.531.102	
	55.371.801				54.741.336	

2019

	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions ¹	Pengurangan / Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balances	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	81.164.666	515.408	(1.557.741)	-	80.122.333	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	26.134	5.752	-	-	31.886	Office furniture and equipment
	81.190.800	521.160	(1.557.741)	-	80.154.219	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	21.055	-	-	-	21.055	Vehicles
	365.229.171	521.160	(1.557.741)	-	80.175.274	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	17.013.879	7.766.380	-	-	24.780.259	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	9.755	7.100	-	-	16.855	Office furniture and equipment
	17.023.634	7.773.480	-	-	24.797.114	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	3.727	2.632	-	-	6.359	Vehicles
	17.027.361	7.776.112	-	-	24.803.473	
	64.184.494				55.371.801	

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions ¹	Pengurangan / Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balances	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	69.281.734	12.982.932	(1.100.000)	-	81.164.666	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	18.363	7.771	-	-	26.134	Office furniture and equipment
	69.300.097	12.990.703	(1.100.000)	-	81.190.800	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	21.055	-	-	-	21.055	Vehicles
	69.321.152	12.990.703	(1.100.000)	-	365.229.171	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kapal dan kapal tunda	11.850.591	6.263.288	(1.100.000)	-	17.013.879	Vessels and tugs
Perabotan dan perlengkapan kantor	4.487	5.268	-	-	9.755	Office furniture and equipment
	11.855.078	6.268.556	(1.100.000)	-	17.023.634	
<u>Aset sewa</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	1.096	2.631	-	-	3.727	Vehicles
	11.856.174	6.271.187	(1.100.000)	-	17.027.361	
	57.464.978				64.184.494	

Penambahan beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Addition of depreciation expense is allocated to the following:

	2020	2019	2018	
Beban pokok usaha (Catatan 32)	6.568.943	7.766.380	6.263.288	Cost of revenue (Note 32)
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	9.723	9.732	7.899	General and administrative (Note 33)
	6.578.666	7.776.112	6.271.187	

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi kepada nilai perolehan aset tetap oleh Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, and 2018.

No borrowing costs are capitalized to the acquisition cost of fixed assets by the Group for the years ended December 31, 2020, 2019, and 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup terdiri dari:

As of December 31, 2020, vessels owned by the Group consist of:

Jenis Kapal/ Vessel Type	Nama kapal/ Vessel Name	Nilai Buku Neto 31 Desember 2020/ Net Book Value December 31, 2020
Kapal gas alam cair ("LNG")/ Vessel liquefied natural gas ("LNG")	1 Ekaputra 1	38.292.280
	2 Triputra	16.061.500
Kapal tunda/Tug boats	1 Semar 15	145.313
	2 Semar 17	222.017
Total		54.721.110

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$114.030.941 yang meliputi penutupan kerugian atas kerusakan rangka dan mesin-mesin kapal. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk aset tetap kapal tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Tidak terdapat aset tetap yang dijual, tidak digunakan sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan berasal dari hibah serta tidak diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, pengurangan dan reklasifikasi berasal dari pengedokan kapal yang telah disusutkan penuh dan penyesuaian lainnya.

11. FIXED ASSETS (continued)

The owned vessels have been insured for US\$114,030,941 to cover losses from hull and machineries vessel damage. The Group's management believes that the insurance coverage for these vessels is adequate to cover the risk of potential loss of the insured assets.

There are no fixed assets which are sold, temporarily not in use, suspended from active use and obtained from grants, not classified as asset ready for sale.

As of December 31, 2020, 2019, and 2018, disposal and reclassification were derived from docking of vessels which have been fully depreciated and other adjustment.

12. ASET HAK GUNA - NETO

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2020					
	1/1/2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2020	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Kendaraan	21.056	-	-	-	21.056	Vehicle
Akumulasi depresiasi						Accumulated depreciation
Kendaraan	(6.359)	(2.634)	-	-	(8.993)	Vehicle
Nilai buku neto	14.697				12.063	Net book value
Beban depresiasi yang dibebankan ke beban umum dan administrasi (Catatan 33)						
Depreciation expenses were charged to general and administrative expenses (Note 33)						
		2020	2019			
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)		2.634	-			General and administrative expenses (Note 33)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS

This account consists of:

	2020	2019	2018	
Uang muka pengedokan	1.220.696	196.151	-	Advances for docking
Lainnya	115.761	36.390	47.261	Others
	1.336.457	232.541	47.261	

Pada tanggal 31 Desember 2020, uang muka pengedokan merupakan uang muka pengedokan untuk kapal Triputra yang dimiliki oleh BIS, entitas anak.

As of December 31, 2020, advances for docking are advances for docking of Triputra vessel owned by BIS, a subsidiary.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

14. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan utang usaha kepada pihak ketiga sehubungan dengan, antara lain: (i) pembelian persediaan dan suku cadang yang digunakan untuk keperluan kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup; (ii) utang atas biaya pengedokan kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup.

	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga:			
- Rupiah (2020: Rp129 juta; 2019: Rp396 juta)	9.177	28.489	-
- Dolar AS	93.740	69.299	317.987
- Dolar Singapura (2020: SGD15.642; 2019: SGD1.682)	11.761	1.255	-
- Yen Jepang (2020: JP¥47 juta; 2019: JP¥22 juta)	457.676	198.103	-
	572.354	297.146	317.987

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha. Untuk penjelasan tentang manajemen risiko likuiditas Grup, lihat Catatan 38.

14. TRADE PAYABLES

Trade payables represent payables to third parties involving, among others: (i) purchases of inventories and consumables for vessels owned by the Group; and (ii) docking expenses payable for vessels owned by the Group.

Third parties:
Rupiah -
(2020: Rp129 million;
2019: Rp396 million)
US Dollar -
Singapore Dollar -
(2020: SGD15,642;
2019: SGD1,682)
Japanese Yen -
(2020: JP¥47 million;
2019: JP¥22 million)

Outstanding balances of trade payables at year-end are unsecured. There have been no guarantees provided or received for any trade payables. For explanation on the Group's liquidity risk management processes, refer to Note 38.

15. UTANG DIVIDEN

	2020	2019	2018
Pihak ketiga: Mitsui O.S.K Lines Ltd.	576.000	316.400	238.000
Pihak-pihak berelasi: PT Hateka Trans Internasional. Koperasi Karyawan Bhakti Samudera.	180.269 72	- -	- -
	756.341	316.400	238.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang dividen kepada pemegang saham PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS"), entitas anak, tanggal 7 Desember 2020 yang berasal dari distribusi interim dividen periode 2020 sebesar AS\$576,000 kepada pihak non-pengendali, yaitu Mitsui O.S.K Lines Ltd., dan kepada pemegang saham Perusahaan, tanggal 20 Mei 2020 sebesar AS\$180.269 kepada pihak pengendali, yaitu PT Hateka Trans Internasional dan AS\$72 kepada pihak non-pengendali yaitu Koperasi Karyawan Bhakti Samudera, yang belum dibayarkan di tahun 2020

Pada tanggal 31 Desember 2019, utang dividen kepada pemegang saham PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB"), entitas anak, tanggal 7 November 2019 yang berasal dari distribusi interim dividen periode 2019 sebesar AS\$316.400 kepada pihak non-pengendali, yaitu Mitsui O.S.K Lines Ltd., yang belum dibayarkan di tahun 2019.

15. DIVIDENDS PAYABLE

Third party:
Mitsui O.S.K Lines Ltd

Related parties:
PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan
Bhakti Samudera

As of December 31, 2020, the dividend payable to other shareholder PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS"), a subsidiary, dated December 7, 2020 represents interim dividend distribution for period 2020 amounting to US\$576,000 to non-controlling interests, Mitsui O.S.K Lines Ltd., and Company's shareholder, dated May 20, 2020 amounting US\$180,269 to controlling interest, PT Hateka Trans Internasional and US\$72 to non-controlling interest, Koperasi Karyawan Bhakti Samudera, which has not been paid in 2020.

As of December 31, 2019, the dividend payable to other shareholder PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB"), a subsidiary, dated November 7, 2019 represents interim dividend distribution for period 2019 amounting to US\$316,400 to non-controlling interests, Mitsui O.S.K Lines Ltd., which has not been paid in 2019.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

15. UTANG DIVIDEN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, utang dividen kepada pemegang saham PT Humolco LNG Indonesia ("HLI"), entitas anak, tanggal 30 April 2018 yang berasal dari distribusi interim dividen periode 2018 sebesar AS\$238.000 kepada pihak non-pengendali, yaitu Mitsui O.S.K Lines Ltd., yang belum dibayarkan di tahun 2018.

15. DIVIDENDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2018, the dividend payable to other shareholder PT Humolco LNG Indonesia ("HLI"), a subsidiary, dated April 30, 2018 represents interim dividend distribution for period 2018 amounting to US\$238,000 to non-controlling interests, Mitsui O.S.K Lines Ltd., which has not been paid in 2018.

16. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari:

16. OTHER PAYABLES

Other payables consists of:

	2020	2019	2018	
Pihak-pihak ketiga:				Third parties:
- PT Pertamina Hulu Mahakam	167.385	-	824.288	PT Pertamina Hulu Mahakam -
- Lain-lain				Others -
(kurang dari AS\$50.000)	7.254	26.243	135.394	(less than US\$50,000)
	174.639	26.243	959.682	
Pihak berelasi: (Catatan 28)				Related parties: (Note 28)
PT Humpuss Transportasi Kimia	7.862.546	8.681.673	8.612.664	PT Humpuss Transportasi Kimia
PT Humpuss Transportasi Curah	44.047	175.143	-	PT Humpuss Transportasi Curah
	7.906.593	8.856.816	8.612.664	
	8.081.232	8.883.059	9.572.346	

Pada tahun 2020, hutang kepada PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM") merupakan kekurangan pembayaran yang dibayarkan atas uang muka yang diterima dari PHM untuk pengawakan, pengedokan dan biaya operasional lainnya yang timbul di kapal, yang dapat ditagih dari PHM, yang tidak ada historis gagal bayar.

In 2020, payables to PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM") represent the shortage of actual cash paid over advance received from PHM for manning, dry-docking and other operating costs incurred on the vessel, which are recoverable from PHM, which there was no recent history of default.

Pada 2018, utang kepada PHM, pihak ketiga, merupakan utang pembayaran perbaikan kerusakan boiler pada kapal Ekaputra.

In 2018, payables to PHM, a third party represents repairment boiler cost for Ekaputra vessel.

17. UANG MUKA DARI PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

17. ADVANCED RECEIVED FROM A THIRD PARTY

This account consists of:

	2020	2019	2018	
PT MOL Indonesia	907.216	-	-	PT MOL Indonesia

Pada 2020, uang muka diterima dari PT MOL Indonesia, pihak ketiga, merupakan uang muka yang diterima untuk pembayaran biaya kapal Jawa Satu oleh HLI, entitas anak, sebagai manajemen kapal Jawa Satu.

In 2020, advanced receive from PT MOL Indonesia, third party, is advanced receive for Jawa Satu vessel expense by HLI, a subsidiary, as Jawa Satu ship management.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

18. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019	2018
Pengedokan	2.472.167	-	2.563.160
Bunga	2.180.613	1.174.351	187.790
Bahan bakar	1.722.451	-	-
Operasi kapal	467.400	274.634	217.742
Jasa profesional	42.378	41.537	69.453
Lain-lain	1.571.540	1.035.343	769.351
	8.456.549	2.525.865	3.807.496

*Docking
Interest
Bunkers
Vessel operations
Professional fees
Others*

Beban yang masih harus dibayar - lain-lain terdiri dari pencadangan atas beban penyewaan kapal dan biaya legal.

Accrued expense - others mainly represent provision for vessel charter expense and legal fee.

19. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Rincian pendapatan tangguhan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Saldo awal			
- Pengedokan	2.970.629	5.030.475	1.148.021
- Asuransi	116.026	11.814	60.523
Penambahan:			
- Pengedokan	3.347.392	520.803	5.814.633
- Asuransi	353.712	530.854	289.006
Dikurangi:			
- Pengedokan	(5.316.674)	(2.580.648)	(1.932.716)
- Asuransi	(1.471.085)	(426.643)	(337.178)
Saldo pendapatan ditangguhkan	-	3.086.655	5.042.289
Dikurangi: bagian yang dimanfaatkan dalam waktu satu tahun	-	(1.929.023)	(2.576.955)
Bagian jangka panjang	-	1.157.632	2.465.334

*Beginning balance
Drydocking -
Insurance -
Add:
Drydocking -
Insurance -
Less:
Drydocking -
Insurance -*

*Total deferred income
Less: portion
to be utilized
within one year*

Long-term portion

Pendapatan ditangguhkan merupakan tagihan pendapatan kontrak sewa kapal dari PT Pertamina dan penyewa lainnya untuk tahun buku berikutnya dan penerimaan dimuka yang akan dicatat sebagai pendapatan pada saat biaya yang terkait dengan penerimaan tersebut dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

Deferred income represents time charter income invoiced to PT Pertamina and other charterers relating to the following financial year and advance billings which will be recognized as income when the related expenses are recorded in the consolidated financial statements.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

20. LIABILITAS SEWA

BIS, entitas anak melakukan perjanjian sewa pembiayaan dalam mata uang Rupiah untuk pengadaan kendaraan.

Rincian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Kreditur/ Creditors	Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity date	Peruntukkan/ Purpose
PT Astra Sedaya Finance	Fasilitas kredit pembelian mobil/ Car ownership credit facility	Jangka waktu pembiayaan 36 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas tersebut/Repayable 36 months, from the date of withdrawal of the facility.	Tingkat bunga 9,74% per tahun/ Interest at rates 9.74% per annum.	Jatuh tempo pada bulan Juni 2020/Will be due in June 2020.	Fasilitas kredit untuk pembelian mobil/Car ownership credit facility.

Pembayaran sewa minimum masa datang atas liabilitas sewa dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Dalam satu tahun	-	3.538	5.009	Within one year
Lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun	-	-	3.538	After one year but not more than five years
Minimum pembayaran sewa	-	3.538	8.547	Minimum lease payments
Bagian jangka pendek	-	(3.538)	(5.009)	Current portion
Bagian jangka panjang	-	-	3.538	Long-term portion

Liabilitas sewa dijamin oleh kendaraan yang diperoleh melalui liabilitas sewa.

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of net minimum lease payments are as follows:

Lease liability are secured by vehicles acquired through lease liability.

21. PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
<u>Jangka pendek</u> Mitsui O.S.K Lines Ltd.	-	-	235.237
<u>Jangka panjang</u> Bamboo Mountain Power B.V	19.442.397	19.442.397	-

Pada tahun 2020 dan 2019, pinjaman dari pihak ketiga merupakan pinjaman di Perusahaan, dari Bamboo Mountain Power BV sebesar AS\$ 19.442.397 terkait dengan proyek Floating Storage Regasification Unit ("FSRU") Java 1 yang akan dimulai pada tahun 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga pada tingkat 6,08% per tahun sampai dengan tanggal operasi komersial yang dijadwalkan untuk konstruksi FSRU dan pada tingkat 8,93% per tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Februari 2047. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan saham Perusahaan dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PKR. Pinjaman ini dapat dilunasi mulai Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir pada Februari 2047 (Catatan 36c).

21. LOAN FROM THIRD PARTIES

<u>Short-term</u> Mitsui O.S.K Lines Ltd	235.237
<u>Long-term</u> Bamboo Mountain Power B.V.	-

In 2020 and 2019, loan from third parties represent loan in the Company, from Bamboo Mountain Power B.V amounting to US\$19,442,397 related to the Floating Storage Regasification Unit ("FSRU") Java 1 project that will start in 2021. The loan is subject to interest at the rate of 6.08% per annum until scheduled commercial operation date of FSRU construction and at the rate of 8.93% per annum thereafter until final maturity date in February 2047. This loan is secured with share pledge of the Company and Koperasi Karyawan Bhakti Samudra in PKR. The loan is subject to be repaid from May 2022 until final maturity date in February 2047 (Note 36c).

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA (lanjutan)

Pada tahun 2018, pinjaman dari pihak ketiga - jangka pendek merupakan pinjaman di HSB yang diperoleh dari Mitsui O.S.K Lines Ltd. ("MOL") terkait pembelian kapal Ekaputra 1 di tahun 2015 sebesar AS\$2.250.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun.

Pinjaman dari Bamboo Mountain Power BV dan Mitsui O.S.K Lines Ltd. merupakan pinjaman tanpa syarat dan pembatasan tertentu.

21. LOAN FROM THIRD PARTIES (continued)

In 2018, short term loan from third parties represent loan in HSB which obtained from Mitsui O.S.K Lines Ltd. ("MOL") related to purchasing of Ekaputra 1 vessel in 2015 amounted to US\$2,250,000. The loan is unsecured and subject to interest at rate of 3% per annum.

Loans from Bamboo Mountain Power BV and Mitsui O.S.K Lines Ltd. are loans without any specific requirements and covenants.

22. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2020	2019	2018
Entitas anak:			
Pajak pertambahan nilai	298.654	180.754	32.542
Pajak penghasilan jasa perkapalan	-	23.825	60.570
	298.654	204.579	93.112

Subsidiaries:
Value added tax

Shipping services income tax

b. Estimasi tagihan pajak

	2020	2019	2018
Entitas anak:			
Pajak pertambahan nilai - 2018	41.518	-	-

Subsidiary:
value added tax - 2018

Pada tanggal 31 Agustus 2020, HSB mengajukan restitusi atas PPN untuk periode Juli - Desember 2018 kepada kantor pajak. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, HSB belum menerima hasil keputusan restitusi tersebut.

On August 31, 2020, HSB submitted a restitution request of VAT from periods July 2018 to December 2018 to the tax office. As of the completion date of the consolidated financial statements, no result of tax restitutions has been communicated to HSB.

c. Utang pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan dan perhitungan beban pajak penghasilan serta utang pajak penghasilan badan Grup dalam AS Dollar adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - konsolidasian	16.699.643	11.104.355	7.874.693
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - entitas anak	18.315.004	12.889.179	8.583.380
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi dan konsolidasian	(8.251.528)	(8.299.868)	(420.000)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	6.636.166	6.515.044	(288.687)

Consolidated profit before final and income tax - consolidated
Profit before final and income tax - subsidiary

Consolidation and elimination entries

Profit before final and income tax - the Company

c. Taxes payable

The reconciliations between profit before final and income tax, tax expense, and the corporate income tax payable position of the Group in US Dollar are as follows:

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Utang pajak (lanjutan)

c. Taxes payable (continued)

	2020	2019	2018	
Beda tetap:				Permanent differences:
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	(8.251.528)	(8.246.428)	(420.000)	Dividend distributed by subsidiaries
Biaya-biaya yang tidak bisa dikurangkan	98.938	206.763	244.310	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(1.945)	(3.572)	(1.379)	Income subject to final income tax
	(8.154.535)	(8.043.237)	(177.069)	
Estimasi rugi kena pajak Perusahaan	(1.518.369)	(1.528.193)	(465.756)	Estimated taxable loss of the Company
Rugi fiskal awal tahun	(1.287.671)	(897.810)	(650.332)	Tax losses at the beginning of the year
Rugi fiskal akhir tahun	(2.806.040)	(2.426.003)	(1.116.088)	Tax losses at the end of the year
Beban pajak kini:				Current tax expense:
Beban pajak penghasilan Perusahaan	-	-	-	Income tax expense
Entitas anak	115.758	86.876	83.632	The Company
	115.758	86.876	83.632	Subsidiary
Dikurangi:				Less:
Entitas anak				Subsidiary
Pajak penghasilan yang dibayar selama tahun berjalan:	(98.749)	(86.621)	(79.084)	Corporate income tax paid during the year:
Estimasi utang pajak penghasilan badan Grup	17.009	255	4.548	Estimated corporate income tax payable of the Group
	2020	2019	2018	
Perusahaan:				The Company:
Pajak penghasilan - Pasal 23	665	-	-	Withholding income tax - Article 23
	665	-	-	
Entitas anak:				Subsidiaries:
Pajak penghasilan - Pasal 26	98.079	122.000	69	Withholding income tax - Article 26
Pajak penghasilan - Pasal 29	17.009	255	4.548	Withholding income tax - Article 29
Pajak penghasilan - Pasal 23	5.360	5.406	3.683	Withholding income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 4(2)	247	-	-	Withholding income tax - Article 4(2)
Pajak penghasilan jasa perkapalan	-	-	20	Shipping services income tax
Pajak pertambahan nilai	3.324	-	85.651	Value added tax
	124.019	127.661	93.971	
	124.684	127.661	93.971	

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anaknya sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax) on an annual basis..

The taxable income resulting from the reconciliation is the basis for filling of Annual Tax Return (SPT).

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

d. Analisa beban pajak penghasilan

d. Analysis of corporate income tax expense

	2020	2019	2018	
Pajak final: Entitas anak	<u>367.762</u>	<u>356.124</u>	<u>320.150</u>	Final tax: Subsidiaries
Pajak penghasilan badan: Perusahaan: Pendapatan pajak tangguhan	-	(3.469)	-	Corporate income tax The Company: Deferred tax benefit
Entitas anak: Pajak kini (Pendapatan)/beban pajak tangguhan	115.758 1.885	86.876 (4.264)	83.632 -	Subsidiary: Current tax expense Deferred tax (benefit)/ expense
Total	<u>117.643</u>	<u>79.143</u>	<u>83.632</u>	Total

e. Aset pajak tangguhan, neto

e. Deferred tax assets, net

Mutasi tahun 2020

Movement in 2020

	31 Desember/ December 31, 2019	Pengaruh ke laba rugi/ Effect to profit or loss	Pengaruh ke Posisi keuangan atau ekuitas/ Effect to financial position or equity	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2020	
Perusahaan						The Company
Aset tetap	3.469	(3.469)	-	-	-	Fixed assets
Aset pajak tangguhan neto - Perusahaan	3.469	(3.469)	-	-	-	Deferred tax assets net - the Company
Entitas anak						Subsidiary
Aset tetap	4.264	1.584	-	-	5.848	Fixed assets
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	4.264	1.584	-	-	5.848	Deferred tax assets net - subsidiary
Total	<u>7.733</u>	<u>(1.885)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.848</u>	Total

Mutasi tahun 2019

Movement in 2019

	31 Desember/ December 31, 2018	Pengaruh ke laba rugi/ Effect to profit or loss	Pengaruh ke Posisi keuangan atau ekuitas/ Effect to financial position or equity	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2019	
Perusahaan						The Company
Aset tetap	-	3.469	-	-	3.469	Fixed assets
Aset pajak tangguhan neto - Perusahaan	-	3.469	-	-	-	Deferred tax assets net - the Company
Entitas anak						Subsidiary
Aset tetap	-	4.264	-	-	4.264	Fixed assets
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	-	4.264	-	-	4.264	Deferred tax assets net - subsidiary
Total	<u>-</u>	<u>7.733</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.733</u>	Total

Penggunaan aset pajak tangguhan yang diakui Grup tergantung pada kelebihan laba fiskal pada masa mendatang atas penghasilan yang timbul dari pemulihan perbedaan temporer kena pajak yang ada. Pajak tangguhan yang tidak diakui sehubungan dengan rugi fiskal yang dapat dikompensasi karena realisasi aset pajak tangguhan tersebut pada saat ini belum dapat dipastikan.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Group is dependent upon future taxable income in excess of income arising from the reversal of existing taxable temporary differences. Deferred tax assets relating to tax losses carried forward is unrecognized as realization of these deferred tax assets are presently not assured beyond reasonable doubt.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rekonsiliasi beban pajak penghasilan Grup

Rekonsiliasi antara taksiran beban pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum yang berlaku di Indonesia dari laba sebelum pajak penghasilan badan dengan beban pajak penghasilan badan Grup seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - konsolidasian	16.699.643	11.104.355	7.874.693	Profit before final and income tax - consolidated
Manfaat pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 22% (2019: 25%; 2018: 25%)	3.673.921	2.776.089	1.968.673	Tax benefit at the Indonesian statutory rate of 22% (2019: 25%; 2018: 25%)
Pengaruh pajak atas beda tetap:				Tax effect of permanent differences:
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	(1.815.336)	(2.061.607)	(105.000)	Dividend distributed by subsidiaries
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dan beda permanen lain	(1.740.514)	(634.446)	(1.779.696)	Non-deductible expenses and other permanent differences
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final	(428)	(893)	(345)	Interest income subject to final income tax
Total beban pajak penghasilan, neto	117.643	79.143	83.632	Total corporate income tax expense, net

g. Akumulasi rugi fiskal

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal sebagai berikut:

	Akumulasi rugi fiskal/ Accumulated tax losses
Tahun yang berakhir pada:	
- 31 Desember 2016	181.201
- 31 Desember 2017	469.131
- 31 Desember 2018	247.478
- 31 Desember 2019	389.861
- 31 Desember 2020	1.518.369
	2.806.040

h. Lainnya

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

22. TAXATION (continued)

f. Reconciliation of corporate income tax expense

The reconciliation between corporate income tax expense calculated using the maximum Indonesian tax rate of profit before corporate income tax and corporate income tax expense of the Group as shown in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income for years ended December 31, 2020, 2019, and 2018 are presented below:

g. Accumulated tax losses

As of December 31, 2020, the Company has cumulative tax losses as follows:

	Year ended:
	December 31, 2016 -
	December 31, 2017 -
	December 31, 2018 -
	December 31, 2019 -
	December 31, 2020 -

h. Other

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self assessment. Based on taxation laws, which are applicable starting in year 2008, the Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

22. TAXATION (continued)

h. Other (continued)

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates are used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

23. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember/December 31, 2020					
	BIS	HSB	HLI	Total	
Saldo awal	13.722.123	1.147.996	-	14.870.119	Beginning balance
Bagian atas laba, neto	2.426.662	504.971	-	2.931.633	Share in net profit, net
Dividen didistribusikan	(1.960.000)	(316.400)	-	(2.276.400)	Dividend distributed
Saldo akhir	14.188.785	1.336.567	-	15.525.352	Ending balance
31 Desember/December 31, 2019					
	BIS	HSB	HLI	Total	
Saldo awal	13.510.820	1.046.285	224.137	14.781.242	Beginning balance
Bagian atas laba, neto	1.926.303	418.111	84.169	2.428.583	Share in net profit, net
Dividen didistribusikan	(1.715.000)	(316.400)	-	(2.031.400)	Dividend distributed
Akuisisi	-	-	(308.306)	(308.306)	Acquisition
Saldo akhir	13.722.123	1.147.996	-	14.870.119	Ending balance
31 Desember/December 31, 2018					
	BIS	HSB	HLI	Total	
Saldo awal	13.273.977	-	395.922	13.669.899	Beginning balance
Bagian atas laba, neto	236.843	371.285	108.215	716.343	Share in net profit, net
Bagian atas laba MOL, neto	-	675.000	-	675.000	Share in net profit MOL, net
Dividen didistribusikan	-	-	(280.000)	(280.000)	Dividend distributed
Saldo akhir	13.510.820	1.046.285	224.137	14.781.242	Ending balance

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

24. LABA PER SAHAM DASAR

	2020	2019	2018
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba neto per saham dasar	13.282.605	8.240.505	6.754.568
Total rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	13.419.142.767	13.419.142.767	13.419.142.767
Laba per saham dasar	0,00099	0,00061	0,00050

Net profit attributable to the equity holders of parent entity for computation of basic earnings per share

Weighted average numbers of shares outstanding (shares)

Basic earnings per share

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan lain konsolidasian.

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 tertanggal 10 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 menjadi Rp50 dan meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp11.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.750.000.000 menjadi Rp670.957.138.350.

Perseroan menerbitkan saham baru sebanyak 13.364.142.767 saham yang berasal dari dividen saham berdasarkan Akta Notaris No. 35 tertanggal 7 Juni 2021, sehingga jumlah saham beredar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 menjadi 13.419.142.767 saham (Catatan 41).

24. BASIC EARNINGS PER SHARE

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020, 2019, and 2018, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on Notarial Deed No. 81 dated June 10, 2021, the shareholders of the Company decided and agreed to change the par value of the Company's shares from Rp1,000,000 to Rp50 and increase the authorized capital of the Company from Rp11,000,000,000 to Rp1,500,000,000,000 with issued and paid-up capital of Rp2,750,000,000 to Rp.670,957,138,350.

The Company issued 13,364,142,767 new shares derived from share dividends based on Notarial Deed. 35 dated 7 June 2021, bringing the Company's outstanding shares as of 31 December 2020, 2019 and 2018 to 13,419,142,767 shares (Note 41).

25. MODAL SAHAM

Rincian modal disetor Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

31 Desember 2020

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership
<u>Non manajemen:</u>			
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000	99.96%
Koperasi Karyawan Bhakti	1	1.000	0.04%
	2.750	2.750.000	100%
Setara dalam dolar AS		243.009	

25. SHARE CAPITAL

Details of the Company's paid up capital of par value of Rp1.000.000 (full amount) per share as at December 31, 2020, 2019, and 2018.

December 31, 2020

Shareholders
<u>Non-management:</u>
PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan Bhakti

Equivalent in US Dollar

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

31 Desember 2019

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership
<u>Non manajemen:</u>			
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000	99.96%
Koperasi Karyawan Bhakti	1	1.000	0.04%
	2.750	2.750.000	100%
Setara dalam dolar AS		243.009	

25. SHARE CAPITAL (continued)

December 31, 2019

Shareholders
<u>Non-management:</u>
PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan Bhakti
Equivalent in US Dollar

31 Desember 2018

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership
<u>Non manajemen:</u>			
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000	99.96%
Koperasi Karyawan Bhakti	1	1.000	0.04%
	2.750	2.750.000	100%
Setara dalam dolar AS		243.009	

December 31, 2018

Shareholders
<u>Non-management:</u>
PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan Bhakti
Equivalent in US Dollar

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)

26. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

The details of additional paid-in capital are as follows:

Difference in the value of restructuring transactions between entities under common control

Akun ini merupakan selisih antara harga pembelian dan nilai buku Kapal ST Eka Putra pada tanggal efektif transaksi jual beli dengan Cometco Shipping Inc. ("CSI"), yang sebelumnya merupakan entitas sepengendali, sebesar AS\$2.237.753. Penjualan dan pembelian ini dicatat dengan metode *pooling interest*. Dengan demikian, selisih harga jual dan nilai buku Kapal ST Eka Putra dicatat sebagai tambahan modal disetor pada bagian ekuitas.

This account represents the difference between purchase consideration and book value of ST Eka Putra Vessel at the effective date of the sale and purchase transaction with Cometco Shipping Inc. ("CSI"), previously an under common control entity, amounted to US\$2,237,753. This sales and purchased are accounted for under pooling interest method. Therefore, the difference between the selling price and the book value of ST Eka Putra Vessel are recorded as additional paid-in capital under equity section.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

27. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	2020
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi:	
PT Jawa Satu Regas	-

27. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	2019	2018
Equity in other comprehensive income of associated company		
PT Jawa Satu Regas	(45.591)	-

28. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Grup merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, dan sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati masing-masing pihak.

• Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group is part of a business group, as explained below, and enters into transactions with related parties in its operations.

Transactions with related parties are entered under normal term and condition agreed by each parties.

• Nature of transactions and relationships with related parties

Sifat Hubungan/Relationship	Pihak-pihak berelasi/Related parties	Transaksi/Transactions
Entitas induk/Ultimate parent	- PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk ("HIT")	Pembayaran biaya operasional atas nama Perusahaan/Payments of operational expenses on behalf of the Company
Entitas dibawah pengendalian HIT /Entity under common control HIT	- PT Humpuss Transportasi Kimia	Pembayaran biaya operasional atas nama Grup, jasa transportasi kimia, pinjaman, dan beban bunga/Payments of operational expenses on behalf of the Group, chemicals cargo transportation, loan, and interest expense.
	- PT Humpuss Transportasi Curah	Pembayaran biaya operasional atas nama Grup/Payments of operational expenses on behalf of the Group
	- PT Hateka Trans Internasional	Pembayaran biaya operasional atas nama Perusahaan/Payments of operational expenses on behalf of the Company
	- PT OTS Internasional	Pembayaran biaya operasional atas nama Perusahaan/Payments of operational expenses on behalf of the Company
	- PT Sulawesi Regas Satu	Pinjaman dan pendapatan bunga/Loan and interest income
Pihak berelasi lainnya/Other related party	- Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	Pembayaran biaya operasional atas nama Grup/Payments of operational expenses on behalf of the Group
Entitas asosiasi/Associate entity	- PT Jawa Satu Regas	Pinjaman dan pendapatan bunga/Loan and interest income

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

- Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)
- Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi

	2020	2019	2018
Pendapatan usaha (Catatan 30) <u>Entitas dibawah pengendalian HIT:</u>			
PT Humpuss Transportasi Kimia	10.548.240	10.518.600	9.270.653
PT Humpuss Transportasi Curah	103.611	47.665	-
Total	10.651.851	10.566.265	9.270.653

Sebagai persentase terhadap total pendapatan usaha konsolidasian 34% 35,02% 34,10%

	2020	2019	2018
Pendapatan bunga <u>Entitas asosiasi:</u>			
PT Jawa Satu Regas	829.771	670.732	-
Sebagai persentase terhadap total pendapatan usaha konsolidasian	2,65%	2,22%	0,00%

Revenue (Note 30)
Entity under common control HIT
PT Humpuss Transportasi Kimia
PT Humpuss Transportasi Curah

Total

As percentage of total consolidated revenue

Interest income
Associated entity:
PT Jawa Satu Regas

As percentage of total consolidated revenue

• **Saldo dengan pihak-pihak berelasi**

	2020	2019	2018
Piutang usaha (Catatan 6) <u>Entitas dibawah pengendalian HIT</u>			
PT Humpuss Transportasi Curah	15.838	-	-
PT Humpuss Transportasi Kimia	2.966.811	-	-
2.982.649	-	-	-
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	2,90%	0,00%	0,00%

	2020	2019	2018
Piutang lainnya <u>Entitas induk</u>			
PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk	267.173	194.877	135.098
<u>Entitas dibawah pengendalian HIT</u>			
PT OTS Internasional	1.612.844	31.673	-
PT Hateka Trans Internasional	74.519	74.519	74.519
<u>Entitas berelasi lainnya:</u>			
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	52	52	-
<u>Entitas asosiasi:</u>			
PT Jawa Satu Regas	1.500.503	670.732	-
3.455.091	971.853	209.617	
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	3,36%	1,11%	0,29%

Trade receivables (Note 6)
Entity under common control HIT
PT Humpuss Transportasi Curah
PT Humpuss Transportasi Kimia

As percentage of total consolidated assets

Other receivables
Ultimate parent entity
PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk

Entity under common control HIT
PT OTS Internasional
PT Hateka Trans Internasional

Other related party:
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra

Associated entity:
PT Jawa Satu Regas

As percentage of total consolidated assets

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

28. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

• **Saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

	2020	2019	2018
Utang lain-lain-pihak berelasi (Catatan 16)			
<u>Entitas dibawah pengendalian HIT</u>			
PT Humpuss Transportasi Kimia	7.862.546	8.681.673	8.612.664
PT Humpuss Transportasi Curah	44.047	175.143	-
	<u>7.906.593</u>	<u>8.856.816</u>	<u>8.612.664</u>
Sebagai persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>18,64%</u>	<u>21,47%</u>	<u>25,56%</u>
	2020	2019	2018
Pinjaman dari pihak berelasi <u>Entitas dibawah pengendalian HIT</u>			
PT Humpuss Transportasi Kimia	4.078.991	6.573.984	14.382.014
Sebagai persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>9,62%</u>	<u>15,93%</u>	<u>42,68%</u>

Other payables-related parties
(Note 16)
Entity under common control HIT
PT Humpuss Transportasi Kimia
PT Humpuss Transportasi Curah

As percentage of total
consolidated liabilities

Loan from a related party
Entity under common control HIT
PT Humpuss Transportasi Kimia

As percentage of total
consolidated liabilities

Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Pinjaman ini tanpa jaminan, dalam mata uang Dolar AS dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tersebut diangsur setiap bulan mulai Juli 2017 hingga Juli 2023.

Loans from a related party represent loans from PT Humpuss Transportasi Kimia. This loan is unsecured, denominated in US Dollar and subject to interest at the rate of 3% per annum. The loan is repayable by monthly installments started July 2017 until July 2023.

	2020	2019	2018
Pinjaman kepada pihak berelasi <u>Jangka pendek</u> <u>Entitas dibawah pengendalian HIT:</u>			
PT Sulawesi Regas Satu	1.420.984	-	-
<u>Jangka panjang</u> <u>Entitas asosiasi:</u>			
PT Jawa Satu Regas	14.998.890	14.998.890	-
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>15,99%</u>	<u>17,09%</u>	<u>0,00%</u>

Loan to related parties
Short-term
Entity under common control HIT:
PT Sulawesi Regas Satu

Long-term
Associated entity:
PT Jawa Satu Regas

As percentage of total
consolidated assets

Pinjaman kepada PT Jawa Satu Regas dikenakan bunga sebesar 4,3% per tahun sampai tanggal operasi komersial dari konstruksi FSRU, dan bunga sebesar 11% per tahun setelah itu. Pinjaman akan dibayar kembali dengan angsuran bulanan mulai Mei 2022 dan akan jatuh tempo pada Oktober 2039 (Catatan 36d).

The loan to PT Jawa Satu Regas has interest at the rate of 4.3% per annum in arrears until scheduled commercial operation date of FSRU construction, and at the rate of 11% per annum thereafter. The loan is subject to be repaid from May 2022 until final maturity date in October 2039 (Note 36d).

Pinjaman kepada PT Sulawesi Regas Satu dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tidak memiliki jaminan dan tidak memiliki jadwal pembayaran tetap.

The loan to PT Sulawesi Regas Satu has interest at the rate of 3% per annum. The loan is unsecured and have no fixed repayment schedule.

Pinjaman kepada PT Sulawesi Regas Satu merupakan pinjaman tanpa syarat dan pembatasan tertentu.

Loan to PT Sulawesi Regas Satu is loan without any specific requirements and covenants.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

• **Kompensasi manajemen kunci**

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen kunci Perseroan merupakan karyawan dari pihak berelasi. Kompensasi karyawan tersebut dibayar oleh pihak berelasi dan oleh karena itu, pengungkapan yang diperlukan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak Berelasi", termasuk dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

**28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

• **Compensation of key management personnel**

As of December 31, 2020, 2019 dan 2018, the key management personnel of the Company are also employees of the Company's related parties. The compensation of the said employees is paid by the related parties and as such, the necessary disclosures required by PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", are included in the financial statements of those company.

**29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**29. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES**

	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies		Setara dengan/ Equivalent to Dolar AS/ US Dollar	
<u>31 Desember 2020</u>				<u>December 31, 2020</u>
Aset				Assets
Kas dan setara kas	Rp(*)	94.291.981	6.685.004	Cash and cash equivalents
	JP¥	3.478.882	33.660	
	KRW	2.967.972	2.728	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha:				Trade payables:
- pihak berelasi	Rp(*)	129.442	9.177	related parties -
	SGD	15.585	11.761	
	JP¥	47.303.080	457.676	
<u>31 Desember 2019</u>				<u>December 31, 2019</u>
Aset				Assets
Kas dan setara kas	Rp(*)	72.021.388	5.181.022	Cash and cash equivalents
	JP¥	4.725.732	43.503	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha:				Trade payables:
- pihak berelasi	Rp(*)	396.021	28.489	related parties -
	SGD	1.691	1.255	
	JP¥	21.520.029	198.104	
<u>31 Desember 2018</u>				<u>December 31, 2018</u>
Aset				Assets
Kas dan setara kas	Rp(*)	44.716.861	3.087.968	Cash and cash equivalents
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas sewa	Rp(*)	123.769	8.547	Lease liability

* Dalam ribuan Rupiah

* In thousands of Rupiah

Apabila nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2020, digunakan untuk menyajikan kembali saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 April 2021, aset neto di atas akan naik sekitar AS\$65.519.

If the exchange rate on December 31, 2020 been used to restate the balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies as of April 30, 2021, the above foreign currency denominated net assets would have increased by approximately US\$65,519.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

30. PENDAPATAN USAHA

Rincian pendapatan usaha menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga:			
PT Pertamina Hulu Mahakam	20.098.597	19.158.597	6.197.356
PT Hanochem Shipping	300.000	300.000	300.000
PT MOL Indonesia	166.667	-	-
MCGC International Ltd.	100.000	100.000	100.000
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	12.000	12.000	12.000
Pacific LNG Transport Ltd.	-	35.000	93.334
PT Pertamina (Persero)	-	-	11.211.167
	20.677.264	19.605.597	17.913.857
Pihak berelasi (Catatan 28):			
PT Humpuss Transportasi Kimia	10.548.240	10.518.600	9.270.653
PT Humpuss Transportasi Curah	103.611	47.665	-
	10.651.851	10.566.265	9.270.653
Total pendapatan usaha	31.329.115	30.171.862	27.184.510

Third parties:
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Hanochem Shipping
PT MOL Indonesia
MCGC International Ltd.
Mitsui O.S.K Lines Ltd.
Pacific LNG Transport Ltd.
PT Pertamina (Persero)

Related parties (Note 28):
PT Humpuss Transportasi Kimia
PT Humpuss Transportasi Curah

Total revenue

Pendapatan usaha menurut jenis jasa yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Jasa sewa kapal:			
- Gas alam cair	30.646.837	29.677.198	26.679.176
- Tunda dan tambat	103.611	47.664	-
	30.750.448	29.724.862	26.679.176
Jasa pengelolaan kapal	578.667	447.000	505.333
Total pendapatan usaha	31.329.115	30.171.862	27.184.509

Chartered vessel services:
Liquefied natural gas -
Tug and mooring -

Ship management services

Total revenue

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

The details of customers which represent more than 10% of the total revenues are as follows:

31 Desember/December 31,						
	Pendapatan/Revenue			Persentase dari total pendapatan/ Percentage of total revenue		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga:						
PT Pertamina Hulu Mahakam	20.098.597	19.158.597	6.197.356	64%	63%	23%
PT Pertamina (Persero)	-	-	11.211.167	-	-	41%
Pihak berelasi:						
PT Humpuss Transportasi Kimia	10.548.240	10.518.600	9.270.653	34%	35%	34%
	30.646.837	29.677.197	26.679.176	98%	98%	98%

Third parties:
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina (Persero)

Related party:
PT Humpuss Transportasi Kimia

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

31. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Grup dikelola dan dikelompokkan dalam divisi usaha yang terdiri dari jasa sewa kapal dan jasa anak buah kapal dan pengelolaan kapal. Divisi usaha ini digunakan sebagai dasar pelaporan informasi segmen. Penetapan harga antar segmen didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak.

Seluruh aset produktif Grup berada dan beroperasi di Indonesia.

Informasi segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

	Jasa Sewa Kapal/ Chartered Vessel Services	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ Crews and Vessel Management Services and Other Services	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Pendapatan usaha	30.646.836	882.279	(200.000)	31.329.115	Revenue
Beban pokok Pendapatan usaha	(13.855.248)	(103.082)	-	(13.958.330)	Cost of revenue
Hasil Segmen	16.791.588	779.197	(200.000)	17.370.785	Segmented Result
Beban usaha	(1.654.894)	1.037.963	200.000	(416.931)	Operating expenses
Pendapatan keuangan	282.941	835.899	-	1.118.840	Finance income
Biaya keuangan	(89)	(1.372.962)	-	(1.373.051)	Finance costs
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	15.419.546	1.280.097	-	16.699.643	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	(367.762)	-	-	(367.762)	Final tax expense
Beban pajak penghasilan, neto	-	(117.643)	-	(117.643)	Income tax expense, net
Laba segmen	15.051.784	1.162.454	-	16.214.238	Segment profit
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Total aset	75.020.689	74.341.165	(46.671.938)	102.689.916	CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Total assets
Total liabilitas	6.810.337	36.815.199	(1.205.777)	42.419.759	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA					
Pengeluaran barang	-	14.918	-	14.918	OTHER INFORMATION Capital expenditure
Penyusutan	6.465.862	112.804	-	6.578.666	Depreciation

31. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Group is managed and categorized in business divisions which consist of chartered vessels and vessel crew and management services. These business divisions are used as the segment reporting basis. Pricing determination between segments is based on agreements between the parties.

All of the Group's productive assets are located and operating in Indonesia.

Operating segment information of the Group is as follows:

For the Year Ended December 31, 2020

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen operasi Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019**

31. OPERATING SEGMENT (continued)

Operating segment information of the Group is as follows (continued):

For the Year Ended December 31, 2019

	Jasa Sewa Kapal/ Chartered Vessel Services	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ Crews and Vessel Management Services and Other Services	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Pendapatan usaha	29.677.198	694.664	(200.000)	30.171.862	Revenue
Beban pokok Pendapatan usaha	(15.508.161)	(44.993)	-	(15.553.154)	Cost of revenue
Hasil Segmen	14.169.037	649.671	(200.000)	14.618.708	Segmented Result
Beban usaha	(1.958.296)	(1.106.349)	-	(3.064.645)	Operating expenses
Pendapatan keuangan	685.570	178.440	-	864.011	Finance income
Biaya keuangan	(39.959)	(1.174.351)	-	(1.214.310)	Finance costs
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	-	(99.409)	-	(99.409)	Net loss of associates
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	12.856.353	(1.551.998)	(200.000)	11.104.355	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	(356.124)	-	-	(356.124)	Final tax expense
Beban pajak penghasilan, neto	-	(79.143)	-	(79.143)	Income tax expense, net
Laba segmen	12.500.229	(1.631.141)	(200.000)	10.669.088	Segment profit
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI					CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Total aset	68.071.640	68.465.835	(48.768.296)	87.769.179	Total assets
Total liabilitas	4.585.075	39.973.506	(3.301.876)	41.256.705	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Pengeluaran barang	-	521.160	-	521.160	Capital expenditure
Penyusutan	7.724.018	52.094	-	7.776.112	Depreciation

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen operasi Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018**

	Jasa Sewa Kapal/ Chartered Vessel Services	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ Crews and Vessel Management Services and Other Services	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Pendapatan usaha	26.679.176	705.334	(200.000)	27.184.510	Revenue
Beban pokok Pendapatan usaha	(14.785.624)	-	-	(14.785.624)	Cost of revenue
Hasil Segmen	11.893.552	705.334	(200.000)	12.398.886	Segmented Result
Beban usaha	(2.910.951)	(703.120)	(420.000)	(4.034.071)	Operating expenses
Pendapatan keuangan	70.635	6.768	-	77.403	Finance income
Biaya keuangan	(291.392)	(276.133)	-	(567.525)	Finance costs
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	-	-	-	-	Net loss of associates
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	8.761.844	(267.151)	(620.000)	7.874.693	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	(320.150)	-	-	(320.150)	Final tax expense
Beban pajak penghasilan, neto	-	(83.632)	-	(83.632)	Income tax expense, net
Laba segmen	8.441.694	(350.783)	(620.000)	7.470.911	Segment profit
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI					CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Total aset	76.621.096	29.111.263	(34.114.095)	71.618.264	Total assets
Total liabilitas	14.181.726	26.205.569	(6.689.408)	33.697.887	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Pengeluaran barang	12.982.932	7.770	-	12.990.702	Capital expenditure
Penyusutan	5.935.919	335.268	-	6.271.187	Depreciation

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN

32. COST OF REVENUE

	2020	2019	2018	
Biaya penyusutan (Catatan 11)	6.568.943	7.766.380	6.263.288	Depreciation expense (Note 11)
Biaya anak buah kapal	4.076.844	4.182.499	4.178.844	Crew expense
Perbaikan dan perawatan	1.019.345	2.032.971	1.140.183	Repairs and maintenance
Biaya asuransi kapal	480.922	574.837	474.242	Vessel insurance costs
Perlengkapan kapal	458.231	281.382	422.559	Stores
Biaya pelabuhan	291.916	82.522	54.009	Port charges
Biaya persediaan kapal	64.330	85.234	40.397	Vessel supplies expense
Biaya sewa kapal	411	750	500.856	Vessel lease charges
Lain-lain	997.388	546.579	1.711.246	Others
Total beban pokok pendapatan	13.958.330	15.553.154	14.785.624	Total cost of revenue

Tidak ada pemasok dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total pendapatan Grup.

There is no supplier involving net purchases more than 10% of total revenues of the Group.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

33. UMUM DAN ADMINISTRASI

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE

	2020	2019	2018	
Beban tenaga kerja	1.058.544	1.058.544	1.058.902	Employee costs
Jasa profesional	370.400	775.080	494.472	Professional fees
Beban kantor	289.818	357.588	99.098	Office expenses
Perjalanan dinas	145.862	357.118	512.247	Business travel
Sewa kantor	41.688	24.827	23.907	Office rent
Biaya penyusutan (Catatan 11 dan 12)	12.357	9.732	7.899	Depreciation expense (Notes 11 and 12)
Jasa pengadaan staf	12.069	34.060	24.031	Staff provision fees
Promosi	7.619	10.911	15.067	Promotion
Lain-lain	252.028	460.168	1.276.884	Others
	2.190.385	3.088.028	3.512.507	

34. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA

34. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

a. Pendapatan operasi lainnya

a. Other operating income

	2020	2019	2018	
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivatif (Catatan 9)	1.650.510	-	-	Gains arising from changes in fair value of derivative asset (Note 9)
Lain-lain	431.644	288.813	-	Others
	2.082.154	288.813	-	

b. Beban operasi lainnya

b. Other operating expenses

	2020	2019	2018	
Rugi atas perubahan nilai wajar aset derivatif (Catatan 9)	-	206.705	-	Loss arising from changes in fair value of derivative asset (Note 9)
Lain-lain	308.700	58.725	521.564	Others
	308.700	265.430	521.564	

35. PENDAPATAN DAN BIAYA KEUANGAN

35. FINANCE INCOME AND COSTS

a. Pendapatan keuangan

a. Finance income

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan keuangan terutama merupakan bunga dari pinjaman kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2020, finance income mainly represents interest income from loan to related parties.

b. Biaya keuangan

a. Finance costs

	2020	2019	2018	
Beban bunga dari pinjaman dari pihak ketiga	1.200.000	949.000	-	Interest expense from loan from third parties
Beban bunga dari pinjaman pihak berelasi	172.962	264.735	566.712	Interest expense from loan from related parties
Beban bunga liabilitas sewa	89	575	813	Interest expense from lease liability
	1.373.051	1.214.310	567.525	

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup telah mengadakan kontrak-kontrak sewa kapal jangka panjang dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (*Time Charter Party Agreement*) tertanggal 31 Desember 2010 antara CSI, (dahulu entitas anak), dengan Pertamina, dimana kapal Eka Putra disewakan dalam jangka panjang kepada Pertamina untuk pengangkutan gas alam cair selama 5 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sejak 1 Oktober 2015, kontrak tersebut dialihkan dari CSI kepada HSB. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mencatat pendapatan sebesar AS\$20.098.597.
- b. Berdasarkan *Time Charter Party Agreement* (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara HTK, BIS, entitas anak, dengan PT Pelindo Energi Logistik, kapal milik BIS disewakan kepada PT Pelindo Energi Logistik untuk pengangkutan LNG selama 7 tahun sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mencatat pendapatan sebesar AS\$10.548.240.
- c. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), dan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL") telah menandatangani perjanjian pinjaman dimana PKR telah memperoleh fasilitas pinjaman dari MOL sebesar AS\$19.442.397 dengan tingkat bunga 6,08% per tahun untuk periode sebelum tanggal operasi komersial dan 8,93% per tahun untuk periode selanjutnya. Pinjaman ini dijamin dengan saham Perusahaan dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PKR. Tujuan pinjaman adalah untuk membiayai partisipasi PKR pada proyek FSRU di PT Jawa Satu Regas ("JSR"), entitas asosiasi. Pinjaman ini dibayar kembali mulai dari Mei 2022 sampai dengan jatuh tempo terakhir pada bulan Februari 2047.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Group has engaged in long-term rental contracts with several parties as follows:

- a. Based on *Time Charter Party Agreements* dated 31 December 2010 entered into between CSI, (previously a subsidiary), and Pertamina, whereby Eka Putra vessel is chartered on a long-term basis by Pertamina for transporting liquefied natural gas for 5 years until December 31, 2020. Since October 1, 2015, such agreements have been transferred from CSI to HSB. For the year ended December 31, 2020, the Group recorded revenue of US\$20,098,597.
- b. Based on *Time Charter Party Agreements* entered into between HTK, BIS, a subsidiary, and PT Pelindo Energi Logistik, BIS's vessel is chartered by PT Pelindo Energi Logistik, for transporting LNG for 7 years until March 31, 2023. For the year ended December 31, 2020, the Group recorded revenue of US\$10,548,240.
- c. On December 31, 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), and Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL") have signed loan agreement where PKR has obtained a loan facility from MOL amounting to US\$19,442,397 with an interest rate of 6.08% per annum for the period before commercial operation date and 8.93% per annum for the period thereafter. This loan is secured with share pledge of the Company and Koperasi Karyawan Bhakti Samudra in PKR. The loan purpose is to finance the PKR participation of FSRU project in PT Jawa Satu Regas ("JSR"), an associated entity. The loan is subject to be repaid from May 2022 until final maturity date in February 2047.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- d. Pada tanggal 23 November, 2018, PKR dan JSR telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi ("SLA") di mana berdasarkan SLA, PKR telah mensubordinasi fasilitas pinjaman sebesar AS\$19.297.000 ke JSR dengan tingkat bunga 4,3% per tahun hingga dijadwalkan tanggal operasi komersial konstruksi FSRU, dan pada tingkat 11% per tahun sesudahnya. Pinjaman ini wajib dikonversi ke ekuitas setidaknya 50% dari total pinjaman pada tanggal operasi komersial yang tidak lebih dari 17 Desember 2021. Jumlah pinjaman yang tersisa harus dibayar kembali dari Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir pada Oktober 2039.

Pada 8 Maret 2019, MOL dan PKR sepakat untuk amendemen perjanjian mengubah pemberi pinjaman dari MOL menjadi Bamboo Mountain Power B.V ("Bamboo") dan peminjam dari PKR ke Perusahaan. Pinjaman dari Perusahaan di konversi menjadi kontribusi modal saham kepada PKR sebesar AS\$19.442.397.

Grup menyewakan kapal berdasarkan perjanjian sewa operasi dengan kontrak sewa untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun hingga 10 tahun. Pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Grup mempunyai total sewa minimum yang tidak didiskontokan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dalam waktu satu tahun	6.570.000	17.570.000	17.570.000
Diantara dua hingga lima tahun	8.316.000	14.886.000	32.456.000
	14.886.000	32.456.000	50.026.000

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- d. On November 23, 2018, PKR and JSR have signed Subordinated Loan Agreement ("SLA") where based on the SLA, PKR has subordinated the loan facility amounting to US\$19,297,000 to JSR with the interest rate of 4.3% per annum in arrears until scheduled commercial operation date of FSRU construction, and at the rate of 11% per annum thereafter. The loan is mandatorily converted to equity at least 50% of total loan at commercial operation date which no later than December 17, 2021. The remaining amount of loan is subject to be repaid from May 2022 until final maturity date in October 2039.

On March 8, 2019, MOL and PKR agreed to amend the agreement to change the lender from MOL to Bamboo Mountain Power B.V ("Bamboo") and the borrower from PKR to the Company. The loan from the Company was converted into share capital contribution to PKR of US\$19,442,397.

Group leases its vessels under an operating lease arrangements, with the lease negotiated for a term of between less than 1 year and 10 years. At December 31, 2020, 2019, and 2018, the Group had total undiscounted future minimum lease falling due as follows:

Within one year
Between two and five years

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The following table presents financial assets and financial liabilities of the Group:

	<u>Nilai Tercatat/ Carrying Value</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>	
31 Desember 2020			December 31, 2020
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	15.607.709	15.607.709	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak berelasi	2.982.649	2.982.649	Trade receivables - related parties
Piutang lainnya - pihak-pihak ketiga	28.512	28.512	Other receivables - third parties
Piutang lainnya - pihak berelasi	4.876.075	4.876.075	Other receivables - related parties
Pinjaman kepada pihak berelasi	16.419.874	16.419.874	Loan to related parties
Aset derivatif	5.741.915	5.741.915	Derivative asset
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha - pihak-pihak ketiga	572.354	572.354	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	7.906.593	7.906.593	Other payables - related parties
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	174.639	174.639	Other payables - third parties
Utang dividen	756.341	756.341	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549	8.456.549	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	Loans from third parties
Pinjaman dari pihak berelasi	4.078.991	4.078.991	Loan from a related party
31 Desember 2019			December 31, 2019
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	11.010.175	11.010.175	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak-pihak ketiga	555.675	555.675	Trade receivables - third parties
Piutang lainnya - pihak berelasi	971.853	971.853	Other receivables - related parties
Piutang lainnya - pihak-pihak ketiga	88.540	88.540	Other receivables - third parties
Pinjaman kepada pihak berelasi	14.998.890	14.998.890	Loan to related parties
Aset derivatif	4.091.405	4.091.405	Derivative asset
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha - pihak-pihak ketiga	297.146	297.146	Trade payables - third parties
Utang dividen	316.400	316.400	Dividends payable
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	26.243	26.243	Other payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	8.856.816	8.856.816	Other payables - related parties
Beban yang masih harus dibayar	2.525.865	2.525.865	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	Loans from third parties
Liabilitas sewa	3.538	3.538	Lease liability
Pinjaman dari pihak berelasi	6.573.984	6.573.984	Loan from a related party

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
31 Desember 2018			December 31, 2018
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	6.750.168	6.750.168	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak-pihak ketiga	130.556	130.556	Trade receivables - third parties
Piutang usaha - pihak berelasi	209.617	209.617	Trade receivables - related parties
Piutang lainnya - pihak-pihak ketiga	11.803	11.803	Other receivables - third parties
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha - pihak-pihak ketiga	317.987	317.987	Trade payables - third parties
Utang usaha - pihak berelasi	8.612.664	8.612.664	Trade payables - related parties
Utang dividen	238.000	238.000	Dividends payable
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	959.682	959.682	Other payables - third parties
Beban yang masih harus dibayar	3.807.496	3.807.496	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	14.382.014	14.382.014	Loan from a related party
Pinjaman dari pihak ketiga	235.237	235.237	Loan from third parties

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

The fair values of the financial assets and liabilities are determined based on the amounts at which the instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar untuk setiap instrumen keuangan:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of the financial instruments:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha - pihak-pihak ketiga, piutang usaha - pihak berelasi, piutang lainnya - pihak-pihak ketiga, piutang lainnya - pihak berelasi, pinjaman kepada pihak berelasi mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar dari liabilitas utang usaha - pihak-pihak ketiga, utang usaha - pihak berelasi, utang dividen, utang lain-lain - pihak berelasi, utang lain-lain - pihak-pihak ketiga, utang lain-lain - pihak berelasi, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dari pihak berelasi dan pinjaman dari pihak ketiga dengan suku mengambang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.
- Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mempunyai instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar yaitu derivatif aset. Instrumen keuangan tersebut diukur berdasarkan hirarki tingkat 2.

- Fair value of cash and cash equivalents, trade receivables - third parties, trade receivables - related parties, other receivables - third parties, other receivables - related parties, loan to related parties approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.
- Fair value of trade payables - third parties, trade payables - related parties, dividends payable, other payables - related parties, other payables - third parties, other payables - related parties, accrued expenses, loan from a related party and loan from third parties with floating interest rates approximate their fair values as they are re-assessed frequently.
- As of December 31, 2020 and 2019, the Group has financial instrument recognized at fair value which are other derivative asset. Those financial instruments are measured at hierarchy level 2.

Selain aset dan liabilitas keuangan diatas, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar. Sehingga tidak ada pengungkapan nilai wajar yang berdasarkan hirarki nilai wajar.

Other than above mentioned financial assets and liabilities, there are no financial assets and liabilities measured at fair value. Therefore, there is no disclosure on fair value based on fair value hierarchy.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, liabilitas sewa, pinjaman dari pihak ketiga, dan pinjaman dari pihak berelasi yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/tinggi sebesar AS\$77.537 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

• **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas dan setara kas.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, lease liability, loan from third parties and loan from a related party.

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at December 31, 2020, had the interest rates of the loans and borrowings been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit before final and corporate income tax for the year ended December 31, 2020, would have been US\$77,537 lower/higher, accordingly, mainly as a result of, higher/lower interest charge on the loans and borrowings with floating interest rates.

• **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from Rupiah denominated cash and cash equivalents.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika nilai tukar AS Dolar terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih tinggi/rendah sebesar AS\$67.214.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai serta piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

	2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	-	555.675	130.556	Neither past due nor impaired
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.982.649	-	-	Past due but not impaired
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	Impaired
	2.982.649	555.675	130.556	

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Market risk (continued)

• **Foreign exchange rate risk (continued)**

As of December 31, 2020, had the exchange rate of the US Dollar against the foreign currency depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended December 31, 2020, would have been US\$67,214 higher/lower.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from their customers or counterparties' failure to fulfill their contractual obligations. The Group manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for individual customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

At the reporting date, the Group maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired:

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicate that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Liquidity risk (continued)

The Group's liquidity requirements mainly come from payment of vessel operating cost and repayments of long-term loans. The source of fund come from short, medium and long-term vessel charter contracts and obtained through long-term loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
31 Desember 2020						December 31, 2020
Utang usaha						Trade payables
- Pihak-pihak ketiga	572.354	-	-	-	572.354	Third parties -
Utang dividen	756.341	-	-	-	756.341	Dividends payable
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak-pihak ketiga	174.639	-	-	-	174.639	Third parties -
- Pihak berelasi	7.906.593	-	-	-	7.906.593	Related parties -
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549	-	-	-	8.456.549	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	2.799.973	-	-	4.078.991	Loan from related parties
	19.145.494	2.799.973	-	-	21.945.467	
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
31 Desember 2019						December 31, 2019
Utang usaha						Trade payables
- Pihak-pihak ketiga	297.146	-	-	-	297.146	Third parties -
Utang dividen	316.400	-	-	-	316.400	Dividends payable
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak-pihak ketiga	26.243	-	-	-	26.243	third parties -
- Pihak berelasi	8.856.816	-	-	-	8.856.816	related parties -
Beban yang masih harus dibayar	2.525.865	-	-	-	2.525.865	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	1.773.772	4.800.212	-	-	6.573.984	Loan from related parties
	13.796.242	4.800.212	-	-	18.596.454	
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
31 Desember 2018						December 31, 2018
Utang usaha						Trade payables
- Pihak-pihak ketiga	317.987	-	-	-	317.987	Third parties -
Utang dividen	238.000	-	-	-	238.000	Dividends payable
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak-pihak ketiga	959.682	-	-	-	959.682	third parties -
- Pihak berelasi	8.612.664	-	-	-	8.612.664	related parties -
Beban yang masih harus dibayar	3.807.496	-	-	-	3.807.496	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	6.086.612	8.295.402	-	-	14.382.014	Loan from a related party
Pinjaman dari pihak ketiga	235.237	-	-	-	235.237	Loan from a related party
	20.257.678	8.295.402	-	-	28.553.080	

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pengelolaan modal selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perusahaan mengawasi modal menggunakan rasio utang terhadap ekuitas, yang merupakan nilai utang dibagi dengan total ekuitas.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Capital management

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manage their capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes of capital management during years ended December 31, 2020.

The Company monitors capital using debt to equity ratio, which is debt divided by total capital.

39. TRANSAKSI NON KAS

Transaksi non kas Grup adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Penambahan aset tetap yang masih belum dibayar	5.077.859	171.714	2.564.787	Addition of fixed assets which have not been paid
Penambahan aset tetap melalui uang muka pengedokan	-	-	387.031	Addition of fixed assets through advances for docking

Informasi tambahan kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

39. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Group are as follow:

Supplementary cash flow information

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statements are as follows:

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Penambahan/ Addition	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pinjaman dari pihak berelasi	6.573.984	(2.494.993)	-	4.078.991	Loans from related parties
Liabilitas sewa	3.538	(3.538)	-	-	Lease liability
Utang dividen	316.400	(1.700.400)	2.140.341	756.341	Dividend payable
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Penambahan/ Addition	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman dari pihak ketiga	235.237	19.207.160	-	19.442.397	Loan from third parties
Pinjaman dari pihak berelasi	14.382.014	(7.808.030)	-	6.573.984	Loans from related parties
Liabilitas sewa	8.547	(5.009)	-	3.538	Lease liability
Utang dividen	238.000	(2.269.401)	2.347.801	316.400	Dividend payable

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

39. TRANSAKSI NON KAS (lanjutan)

Informasi tambahan kas (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flow	Penambahan/ Addition	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pinjaman dari pihak ketiga	695.269	(460.032)	-	235.237	Loan from third parties
Pinjaman dari pihak berelasi	23.586.038	(9.204.024)	-	14.382.014	Loans from related parties
Liabilitas sewa	13.100	(4.553)	-	8.547	Lease liability
Utang dividen	160.876	(160.876)	238.000	238.000	Dividend payable

40. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal:

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2021:

- Amendemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis, yang berlaku efektif 1 Januari 2021
- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Perbaikan Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang efektif 1 Januari 2023, dan penerapan lebih awal diizinkan

39. NON-CASH TRANSACTIONS (continued)

Supplementary cash flow information (continued)

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statements are as follows: (continued)

40. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Group and its subsidiary and will be effective for reporting periods beginning on or after:

Effective on or after the date of January 1, 2021:

- Amendment to PSAK No. 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021
- Amendments to PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement
- Amendments to PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures
- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments
- Amendments to PSAK No. 73: Leases on Interest Rate Reference Reform Stage 2

Effective on or after the date of January 1, 2022:

- Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks
- 2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments - Fees in the '10 per cent' test for derecognition of financial liabilities

Effective on or after the date of January 1, 2023:

- Amendments to PSAK 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current, effective January 1, 2023, and earlier application is permitted

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

40. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

40. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris No. 36 tertanggal 7 Juni 2021, komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Direktur Utama
Direktur

Budi Haryono
Hari Purnomo
Kemal Imam Santoso
Dandun Widodo

President Commissioner
Independent Commissioner
President Director
Director

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021, Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Hari Purnomo
Okty Saptarini M.
Lisda Y. Satria

Chairman
Member
Member

Pengangkatan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021, Perusahaan mengangkat Komite Audit, sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Hari Purnomo
Hendra Michael Roy Sembel
Tammy Meidharma Sumarna

Chairman
Member
Member

Pengangkatan Sekretasi Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021, Perusahaan mengangkat Tuan Dandun Widodo sebagai Sekretaris Perusahaan.

41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Changes in the composition of Company's Boards of Commissioners and Directors

Based on the Notarial Deed No. 36 dated June 7, 2021, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors have been changed. The composition is as follows:

Appointment of the Nomination and Remuneration Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 dated June 11, 2021, the Company appointed the Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Appointment of Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 005/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 dated June 11, 2021, the Company appointed the Audit Committee, as follows:

Appointment of Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors No. 009/SK/DEKOM-GTSl/VI/2021 dated June 11, 2021, the Company appointed Mr. Dandun Widodo as a Corporate Secretary.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Pengangkatan Pengawas Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021, Perusahaan mengangkat Tuan Dharma Gemiardi sebagai Kepala Pengawas Internal .

Perubahan alamat Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 08 tertanggal 14 April 2021, alamat Perusahaan mengalami perubahan menjadi Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 1, Jakarta Selatan 12930 dari semula beralamat di Gedung GRANADI Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 8-9, Jakarta 12950.

Pernyataan keputusan para pemegang saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 105 tertanggal 14 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- i) Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.860.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.
- ii) Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT GTS Internasional Tbk.
- iii) Mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada Bursa Efek Indonesia dan mendaftarkannya pada penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Appointment of Internal Audit

Based on the Decree of the Board of Directors No. 010/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 dated June 11, 2021, the Company appointed Mr. Dharma Gemiardi as the Head of Internal Supervisor.

Changes in the Company's address

Based on the Notarial Deed No. 08 dated April 14, 2021, the Company's address has changed to Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 1, Jakarta Selatan 12930 from its previous address at Gedung GRANADI Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 8-9, Jakarta 12950.

Statement of shareholders' decision

Based on the Notarial Deed No. 105 dated June 14, 2021, the Company shareholder's approved and decided among others as follows:

- i) The Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public with a maximum amount of 2,860,000,000 new shares with a nominal value of Rp50 per share.
- ii) Change the Company's status from Limited Company to Public Company and change of the Company's name to PT GTS Internasional Tbk.
- iii) List all shares of the Company, after the Public Offering on the Indonesia Stock Exchange and register them in collective custody in accordance with applicable regulations.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Pernyataan keputusan para pemegang saham
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 105 tertanggal 14 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut (lanjutan):

- iv) Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar Perusahaan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik, dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tertanggal 7 Juni 2021, Para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui:

- i) Laporan Keuangan Perusahaan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young.
- ii) Menerima laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- iii) Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan sebesar Rp142.970.000 atau ekuivalent AS\$10.000 sebagai dana cadangan wajib Perusahaan.

**41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

**Statement of shareholders' decision
(continued)**

Based on the Notarial Deed No. 105 dated June 14, 2021, the Company shareholder's approved and decided among others as follows:
(continued)

- iv) Amendment to the Company's Articles of Association to be adjusted to the Bapepam LK Regulation Number IX.J.1 regarding the articles of association of companies conducting public offerings of equity securities and public companies, OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding planning and holding a general meeting of shareholders of a public company, OJK regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or public companies, and OJK regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the implementation of the general meeting of shareholders by electronic, including changing the objectives as well as the Company's business activities so as to reflect the existence of the Company's main business activities and supporting business activities.

Based on Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2021, the Shareholders of the Company agreed:

- i) The approval of Company's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2020, which were audited by the KAP Purwanto, Sungkoro and Surja, Ernst & Young.
- ii) Received the annual report of the Board of Directors regarding the Company's business activities for the financial year ending December 31, 2020.
- iii) Approved the use of the Company's net profit of Rp142,970,000 or equivalent to US\$10,000 as the Company's mandatory reserve fund.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Pernyataan keputusan para pemegang saham
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tertanggal 7 Juni 2021, Para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui (lanjutan):

- iv) Pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp668.207.138.350 dengan ketentuan:
 - a. Berasal dari rekapitulasi laba ditahan Perusahaan sebesar AS\$46.737.577 atau sebesar Rp668.207.138.350.
 - b. Selisih pembulatan sebesar Rp19 tetap dibukukan sebagai laba Perusahaan.
 - c. Dibagi sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing.
- v) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young atau penggantinya bila ada untuk memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2021.
- vi) Memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perusahaan (PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.) untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan kepada anggota direksi dan dewan komisaris.

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 tertanggal 10 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- i) Pengubahan nilai nominal saham dalam Perusahaan dari Rp1.000.000 menjadi Rp50.
- ii) Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula Rp11.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.750.000.000 menjadi Rp670.957.138.350.

**41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

**Statement of shareholders' decision
(continued)**

Based on Notarial Deed No. 35 dated 7 June 2021, the Shareholders of the Company agreed (continued):

- iv) Distribution of share dividends to the shareholders in the amount of Rp668,207,138,350 with the following conditions:
 - a. Derived from the recapitulation of the Company's retained earnings of US\$46,737,577 or Rp668,207,138,350.
 - b. The rounded difference of Rp19 is still recorded as the Company's profit.
 - c. Divided according to their respective share ownership.
- v) Re-appoint KAP Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young or their successors if any to examine the Company's financial statements for 2021.
- vi) Granting power and authority to the controlling shareholder of the Company (PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.) to determine the amount of salary and/or honorarium and allowances to members of the board of directors and board of commissioners.

Based on the Notarial Deed No. 81 dated June 10, 2021, the Company shareholder's approved and decided among others as follows:

- i) Change the nominal value of shares in the Company from Rp1,000,000 to Rp50.
- ii) Increase the authorized capital of the Company from Rp11,000,000,000 to Rp1,500,000,000,000 with issued and paid-up capital from Rp2,750,000,000 to Rp670,957,138,350.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Pernyataan keputusan para pemegang saham
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 tertanggal 10 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut (lanjutan):

- iii) Menerbitkan sebanyak 13.364.142.767 saham baru dengan nilai nominal persaham Rp50, dengan total nilai nominal Rp668.207.138.350, maka susunan pemegang Saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah
<u>Non manajemen:</u>		
PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.154
Koperasi Karyawan Bhakti	4.879.688	243.984
	<u>13.419.142.767</u>	<u>670.957.138</u>

- iv) Pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan pengubahan nilai nominal dalam keputusan i dan keputusan ii.
- v) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau Tuan Dandun Widodo untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini.

Berdasarkan Sirkuler Resolusi Pemegang Saham tertanggal 1 Juli 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- i) Mengkorvensi pinjaman kepada PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) menjadi setoran saham dalam ANOA sebesar Rp20.605.000.000, di mana saham baru yang diterbitkan oleh ANOA akan dibeli seluruhnya oleh Perusahaan sebanyak 20.605 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000.
- ii) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini.

**41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

**Statement of shareholders' decision
(continued)**

Based on the Notarial Deed No. 81 dated June 10, 2021, the Company shareholder's approved and decided among others as follows (continued):

- iii) Issuance of 13,364,142,767 new shares with nominal value per share of Rp50, with total nominal value of Rp668,207,138,350, therefore the composition of the Company's shareholders is as follows:

Shareholders	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership
<u>Non-management:</u>	
PT Hateka Trans Internasional	99.96%
Koperasi Karyawan Bhakti	0.04%
	<u>100%</u>

- iv) Amendment to Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association in connection with changes to the nominal value in decision i and decision ii.
- vi) Granting authority and power to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Dandun Widodo to take any necessary actions in connection with this decision.

Based on the Shareholder's circular resolution dated July 1, 2021, the Company shareholder's approved and decided among others as follows:

- i) Convert the loan to PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) into paid-in capital in ANOA amounting to Rp20,605,000,000, of which the new shares issued by ANOA will be purchased entirely by the Company for 20,605 shares with a nominal value of each share of Rp1.000.000
- ii) Granting authority and power to the Board of Directors of the Company to take any necessary actions in connection with this decision.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

42. HAL LAINNYA

Operasi Grup telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus *Covid-19*. Dampak virus *Covid-19* terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan resiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing, dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus *Covid-19* terhadap Indonesia dan Grup masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi *Covid-19* yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Grup.

Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Grup berpendapat bahwa sampai saat ini wabah *Covid-19* tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi Grup.

43. TUJUAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan: (i) di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("Penawaran Indonesia"), disebut sebagai "Penawaran Umum Perdana".

Grup sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. 01491/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VI/2021 dan No. 01492/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1a, 2b, 11, 18, 21, 22c, 24, 28, dan 31 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

42. OTHER MATTER

The Group's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 virus. The effects of Covid-19 virus to the global and Indonesia economy include effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation in foreign exchange rates, and disruption of business operation. The future effects of Covid-19 virus to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group.

Nevertheless, after the consolidated financial statements date, management of the Group has opinion that the outbreak of Covid-19 has no significant impact to the Group operational activities.

43. PURPOSE AND REISSUED OF THE FINANCIAL STATEMENT

The consolidated financial statements have been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company: (i) in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") (the "Indonesian Offering"), referred to as the "Initial Public Offering".

The Group previously has issued its consolidated financial statements as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and for the years then ended, which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Reports No. 01491/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/VI/2021 and No. 01492/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VI/2021 dated June 15, 2021.

In connection with the proposed Initial Public Offering, the Group reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2020, 2019, and 2018 and for the years then ended, with several changes and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cashflows, Notes 1a, 2b, 11, 18, 21, 22c, 24, 28, and 31 to the Consolidated Financial Statements.

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GTS INTERNASIONAL TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019, and 2018
and for the Years then Ended
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)**

43. TUJUAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Adapun perubahan dan tambahan pengungkapan pada masing-masing laporan dan Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian: Perubahan penyajian utang lain-lain - pihak berelasi.
- Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian: Perubahan penyajian laba per saham dasar.
- Laporan arus kas konsolidasian: Penambahan pengungkapan terkait catatan referensi.
- Catatan 1a: Penambahan pengungkapan terkait entitas induk Perusahaan.
- Catatan 2b: Penambahan pengungkapan terkait entitas anak.
- Catatan 11: Penambahan pengungkapan terkait pengurangan dan reklasifikasi aset tetap selama periode penyajian.
- Catatan 18: Penambahan pengungkapan terkait beban yang masih harus dibayar - lain-lain.
- Catatan 21: Penambahan pengungkapan terkait syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.
- Catatan 22c: Penambahan pengungkapan terkait perhitungan pajak perhitungan badan.
- Catatan 24: Perubahan basis perhitungan laba per saham dasar.
- Catatan 28: Penambahan pengungkapan terkait kompensasi manajemen kunci.
- Catatan 31: Perubahan terkait istilah segment usaha menjadi segment operasi.

43. PURPOSE AND REISSUED OF THE FINANCIAL STATEMENT (continued)

Several changes and additional disclosures in the above-mentioned statements and Notes are as follows:

- Consolidated statement of financial position: Changes related to other payables - related parties.
- Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income: Changes related to basic earnings per share.
- Consolidated statement of cash flows: Additional disclosure regarding reference.
- Note 1a: Additional disclosure regarding to Company's parent entity.
- Note 2b: Additional disclosure regarding to the subsidiaries.
- Note 11: Additional disclosures regarding the reduction and reclassification of fixed asset during the presentation period.
- Note 18: Additional disclosure regarding accrued expenses - others.
- Note 21: Additional disclosure regarding the terms and restrictions on loan facilities from third parties.
- Note 22c: Additional disclosure related to corporate calculation tax calculations.
- Note 24: Changes in the basis of calculation of basic earnings per share.
- Note 28: Additional disclosures regarding key management compensation.
- Note 31: Changes related to the term business segment to operating segment

XIX. LAPORAN PENILAI

**LAPORAN ANALISA KEGIATAN OPERASI
DAN
KELANGSUNGAN USAHA
No. 00142/2.0110-00/BS/02/0113/1/VII/2021
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK
DAN
PT GTS INTERNASIONAL TBK**

**TANGGAL PENILAIAN
31 Desember 2020**



Ref. No. 00142/2.0110-00/BS/02/0113/1/VII/2021

Jakarta, 9 Juli 2021

Kepada Yth,
Direksi
PT GTS Internasional Tbk
Mangkuluhur City Tower 1, Lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930

Perihal: **Analisa Kegiatan Operasi dan Kelangsungan Usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan PT GTS Internasional Tbk**

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh PT GTS Internasional Tbk ("GTSI") kepada KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R"), melalui dengan Surat Penugasan No.010/VI/IDX/21/KJPPID&R tertanggal 16 Juni 2021, kami selaku perusahaan penilai independen berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012, telah melakukan analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha;

**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HITS")
dan
PT GTS Internasional Tbk ("GTSI")**

Identitas Pemberi Tugas

Nama : PT GTS Internasional Tbk
Bidang usaha : logistik, penyimpanan, pengolahan, dan infrastruktur gas
Alamat : Mangkuluhur City Tower 1, Lantai 26, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 509 33163
Faksimili : (62-21) 509 33163
Web site : <http://gtsi.co.id/>

Identitas Pengguna Laporan

Pengguna laporan ini mencakup GTSI, Instansi Pemerintah dan Masyarakat.

Lingkup Penugasan

Penugasan ini mencakup analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham / *Initial Public Offering* (IPO) GTSI.

Maksud dan Tujuan Penugasan

Maksud penugasan adalah untuk penyusunan analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI terkait rencana IPO GTSI. Tujuan penugasan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan di Pasar Modal serta peraturan perundangan di Indonesia, khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1.3.1 jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing Perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai. Penugasan dilakukan untuk mengevaluasi signifikan atau tidaknya kinerja operasi dan keuangan GTSI dalam hal kontribusinya terhadap kinerja HITS secara konsolidasi, dan dampak dari rencana penawaran saham umum GTSI kepada publik dalam hal kelangsungan usaha HITS setelahnya. Analisa kami lakukan atas kondisi jika terjadi putus hubungan afiliasi antara HITS dan GTSI, dimana meskipun HITS tidak mengkonsolidasi GTSI lagi namun masing masing akan tetap bisa hidup dan bertahan (tidak ada *issue going concern*) selama tercatat di Bursa.

Tanggal Penugasan

Tanggal pisah batas (*cut off date*) penilaian adalah per 31 Desember 2020, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penugasan.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI, kami dapat simpulkan bahwa jika HITS dan GTSI terjadi putus hubungan afiliasi maka masing masing perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatan operasi secara memadai. Masing-masing perusahaan akan tetap memiliki sumber pendapatan operasional yang memadai, dan HITS akan tetap mampu memenuhi syarat pencatatan.

Hormat kami,
KJPP Ihot Dollar & Raymond



KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
IHOT DOLLAR & RAYMOND
CERTIFIED BUSINESS AND ASSET APPRAISERS

Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)

Senior Partner

Ijin Penilai : B-1.09.00113
MAPPI : 03-S-01751
STTD OJK : STTD.PB-13/PM.2/2018

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Berdasarkan pengetahuan kami atas penugasan penilaian, dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Seluruh pendapat yang kami nyatakan dalam laporan ini, baik mengenai analisis, kesimpulan atau pendapat, adalah benar;
- Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan;
- Penugasan telah dilakukan terhadap obyek penugasan pada tanggal penugasan (*cut off date*);
- Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;
- Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan;
- Kesimpulan telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
- Data ekonomi serta data industri dalam Laporan ini diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini Penilai dapat dipertanggungjawabkan;
- Hasil analisis, kesimpulan dan pendapat yang kami nyatakan pada laporan ini terbatas pada kontinjensi, keterbatasan dan asumsi, yang merupakan pemahaman secara menyeluruh, didasarkan analisis profesional serta pendapat dan kesimpulan kami;
- Pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, kami tidak memiliki kepentingan terhadap HITS dan GTSI;
- Kami tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap HITS dan GTSI dan pihak yang terlibat dan terkait di dalamnya;
- Imbalan jasa penugasan tidak berkaitan dengan hasil yang dilaporkan;
- Penugasan dilakukan dengan memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pasar modal;
- Penugasan secara profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
- Kami melakukan penugasan ini secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INDEPENDENSI	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN	1
1.2 TANGGAL PENUGASAN	1
1.3 GAMBARAN UMUM.....	1
1.4 GAMBARAN INDUSTRI	2
1.5 ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS	3
1.6 DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH.....	4
1.7 KESIMPULAN	5
2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 PENDIRIAN DAN INFORMASI UMUM	6
2.2 STRUKTUR ENTITAS ANAK	9
2.3 KEGIATAN USAHA.....	9
2.4 POSISI KEUANGAN HISTORIS	12
3 TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA	18
3.1 EKONOMI SECARA UMUM	18
3.2 INDUSTRI PELAYARAN DI INDONESIA.....	20
3.3 INDUSTRI LNG DI DUNIA DAN INDONESIA	22
3.4 ANALISA SWOT	26
3.5 RISIKO USAHA.....	27
4 ANALISA KEGIATAN OPERASI DAN KELANGSUNGAN USAHA	29
4.1 PROFORMA	29
4.2 PROYEKSI KEUANGAN	32
4.3 ANALISIS INKREMENTAL DAN PROFITABILITAS	35

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R") ditunjuk oleh PT GTS Internasional Tbk ("GTSI") berdasarkan Surat Penugasan No.010/VI/IDX/21/KJPPID&R tertanggal 16 Juni 2021, dengan maksud untuk melakukan analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI.

Maksud penugasan adalah untuk penyusunan analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI terkait rencana IPO GTSI. Tujuan penugasan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan di Pasar Modal serta peraturan perundangan di Indonesia, khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1.3.1 jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing Perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai. Penugasan dilakukan untuk mengevaluasi signifikan atau tidaknya kinerja operasi dan keuangan GTSI dalam hal kontribusinya terhadap kinerja HITS secara konsolidasi, dan dampak dari rencana penawaran saham umum GTSI kepada publik dalam hal kelangsungan usaha HITS setelahnya. Analisa kami lakukan atas kondisi jika terjadi putus hubungan afiliasi antara HITS dan GTSI, dimana meskipun HITS tidak mengkonsolidasi GTSI lagi namun masing masing akan tetap bisa hidup dan bertahan (tidak ada *issue going concern*) selama tercatat di Bursa.

Laporan ini disiapkan secara obyektif dan karenanya tidak sah di bawah kondisi lainnya, dan tidak dapat digunakan maupun dikutip untuk tujuan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari ID&R.

1.2 TANGGAL PENUGASAN

Tanggal pisah batas (*cut off date*) penilaian adalah per 31 Desember 2020, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penugasan.

1.3 GAMBARAN UMUM

HITS

HITS didirikan pada tahun 1992 yang merupakan Perusahaan Terbuka dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut. HITS sebelum berdiri menjadi perseroan, HITS merupakan sebuah divisi gas alam cair / *liquefied natural gas* (LNG) di PT Humpuss. Seiring dengan perkembangan usaha dan pengelolaan operasional yang baik, HITS melakukan penawaran saham perdana di BEI dan menjadi Perusahaan Terbuka pada tahun 1997.

HITS melanjutkan proses transformasi dan memantapkan peran strategis sebagai penyedia transportasi laut, dimana operasional HITS ditopang oleh 8 segmen usaha, yaitu angkutan LNG, angkutan petrokimia dan minyak, kapal penunjang kegiatan lepas pantai, *marine support*, pengerukan, manajemen pengelolaan kapal serta jasa pengelolaan dan pengembangan kru kapal.

Operasional HITS tidak hanya sebagai perusahaan transportasi laut saja, tetapi HITS telah menjadi perusahaan distribusi energi yang menyalurkan energi untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan distribusi energi ini telah didukung oleh 34 kapal milik sendiri.

GTSI

Embrio bisnis GTSI telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG) setelah ditandatanganinya *new venture* antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikan nya HITS pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker LNG dan minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan argo dan keagenan kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Perkembangan terkini dari lini bisnis GTSI adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangka penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

1.4 GAMBARAN INDUSTRI

Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengungkapkan pada tahun 2021 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan industri pelayaran pasca pandemi Covid-19. Dalam proyeksi INSA, pelayaran nasional masih memiliki sejumlah peluang makro yang bisa diperoleh dan mengoptimalkan kinerja perusahaan pelayaran. Setidaknya terdapat 5 peluang utama yakni kebijakan *beyond cabotage*, angkutan fame setelah pemerintah menetapkan B40, wisata bahari, pemindahan Ibu Kota negara dan pengiriman material mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejumlah peluang tersebut perlu untuk ditangkap para pengusaha pelayaran nasional. Tren pemulihan dipastikan terjadi pada tahun 2021 dan terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang dari *beyond cabotage* masih terbuka, dimana pemerintah memberdayakan pelayaran untuk angkutan ekspor untuk mengurangi defisit transaksi jasa. Selain itu, berdasarkan Permendag No.65/2020 saat ini diwajibkan ekspor menggunakan pelayaran nasional dengan kapasitas angkutan 10.000 DT. Angka tersebut masih dapat berkembang tergantung kesiapan perusahaan pelayaran, kemauan pemilik kargo dan keseriusan pemerintah dalam program pemberdayaan pelayaran.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan kondisi pasar LNG akan semakin ketat pada tahun 2021. Pada tahun 2021, akan banyak pemasok untuk pasar LNG dan kompetisi harga LNG diproyeksikan semakin ketat dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, SKK Migas memproyeksikan produksi LNG sebesar 200,7 kargo atau menurun dibandingkan produksi pada tahun 2020 yang sebesar 206,9 kargo.

Jumlah proyeksi 2021 tersebut terdiri dari dua kilang LNG utama Indonesia yakni kilang Bontang di Kalimantan Timur dan kilang LNG Tangguh di Papua mencapai 200,74 kargo LNG. Untuk produksi Kilang Bontang pada tahun 2021 berkisar 77,74 kargo, dimana sebanyak 18,7 kargo untuk kebutuhan domestik dan sisanya 59,04 kargo untuk kebutuhan ekspor. Untuk produksi Kilang Tangguh pada tahun 2021 ditargetkan 123 kargo, dimana sebanyak 35 kargo untuk kebutuhan domestik dan 88 kargo untuk kebutuhan diekspor. Strategi pemasaran LNG pada tahun 2021 adalah dengan meminimalisir kargo yang tidak terkontrak yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga. Jika, kargo-kargo LNG dijual dengan harga yang murah maka akan berdampak kepada penerimaan negara yang lebih sedikit.

Sepanjang tahun 2020, realisasi *lifting* dari Kilang LNG Bontang mencapai 84,9 kargo dari target sebesar 84,8 kargo. Realisasi *lifting* dari Kilang LNG Tangguh sebesar 122 kargo dari target 121 kargo. Sedangkan, penerimaan negara sepanjang tahun 2020 tercatat senilai USD 8,24 miliar dari target senilai USD 5,86 miliar atau 141% dari target tahun 2019.

SKK Migas mencatat, selama kuartal I/2021 produksi LNG nasional dari dua kilang yakni Kilang Bontang, Kalimantan Timur dan Kilang Tangguh di Papua Barat, mencapai 46,2 standard kargo. Produksi LNG tersebut berasal dari Kilang LNG Bontang sebanyak 16,2 kargo dan Kilang Tangguh 30 kargo. Dari total produksi LNG di kuartal I/2021, penjualan ke domestik mencapai 16,9 kargo dan ekspor lebih besar yakni 29,3 kargo. Dari produksi 16,2 kargo di Kilang Bontang, penjualan ke domestik sebesar 9,6 kargo dan ekspor sebesar 6,6 kargo. Sementara dari produksi 30 LNG di Kilang Tangguh, sebanyak 7,3 kargo dijual ke domestik dan 22,7 kargo diekspor.

1.5 ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

- Bahwa mulai dari *cut off date* atas data yang kami terima hingga tanggal penugasan, tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam kinerja usaha HITS dan GTSI yang dapat mempengaruhi kesimpulan yang dihasilkan.
- Seluruh data yang diberikan dan persetujuan penggunaan laporan keuangan, merupakan tanggung jawab manajemen HITS dan GTSI, dan membebaskan ID&R dan para pegawainya dari tanggung jawab akibat kesalahan informasi.
- Kami telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penugasan yang disiapkan oleh manajemen HITS dan GTSI.
- Kami telah melakukan penelaahan atas legalitas HITS dan GTSI yang disediakan oleh manajemen HITS dan GTSI, namun tidak termasuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kepemilikan aset HITS dan GTSI.
- Laporan penugasan ini digunakan sebagaimana tujuan penugasan kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional HITS dan GTSI, serta tidak dimaksudkan untuk memberikan opini atau rekomendasi, selain untuk kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya.
- Menghasilkan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis yang menjadi subyek dari penugasan ini, baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- Kompensasi yang kami terima dari penugasan ini tidak dikaitkan dengan kesimpulan yang dilaporkan ataupun didasarkan pada hasil kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya.

- Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pasar modal.
- Penugasan disusun berdasarkan kondisi pasar saat ini. Kejadian dimasa mendatang merupakan suatu hal yang sulit diprediksi, sehingga perubahan kondisi pasar di kemudian hari mungkin dapat mempengaruhi kesimpulan yang ditentukan saat ini.
- Data dan informasi yang kami peroleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Tanda tangan pimpinan dan cap yang resmi merupakan syarat mutlak sah nya *Certificate of Appraisal* ini dan Laporan yang terlampir.
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan, laporan penugasan, dan kesimpulan dari penugasan yang dilakukan.

1.6 DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH

Dalam penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain sebagai berikut:

- Laporan keuangan HITS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 - 2020 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan keuangan GTSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 - 2020 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan Proforma Informasi Keuangan Konsolidasian HITS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diterbitkan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
- Data legalitas HITS dan GTSI antara lain akta pendirian, akta perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Data mengenai kegiatan dan legalitas HITS dan GTSI.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh HITS dan GTSI atau yang tersedia secara umum. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen HITS dan GTSI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penugasan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk HITS dan GTSI.

1.7 KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI, kami dapat simpulkan bahwa jika HITS dan GTSI terjadi putus hubungan afiliasi maka masing masing perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatan operasi secara memadai. Masing-masing perusahaan akan tetap memiliki sumber pendapatan operasional yang memadai, dan HITS akan tetap mampu memenuhi syarat pencatatan.

VARIABEL LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESIMPULAN

- Jika terdapat perubahan rencana usaha yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi usaha secara signifikan. Tidak terdapat kejadian penting (*subsequent event*) yang mempengaruhi penugasan dari tanggal penilaian per 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan ini. Jika ada, maka diperlukan penugasan kembali berdasarkan dampak dari *subsequent event* tersebut.

2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 PENDIRIAN DAN INFORMASI UMUM

HITS

HITS (dahulu bernama PT Humpus Sea Transport) didirikan berdasarkan Akta No. 464 tanggal 21 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Kemas Abdullah, S.H., pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1015 HT.01.01.Th.93 tanggal 16 Februari 1993.

Anggaran Dasar HITS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 82 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, mengenai penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan perubahan susunan pengurus HITS. Akta perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006600.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 24 Januari 2020.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan HITS adalah bergerak dalam bidang angkutan perairan khususnya transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut. HITS mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. HITS berkantor pusat di Mangkuluhur City Tower 1, Lantai 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta 12930.

Dalam memulai kegiatan usahanya, HITS telah memperoleh perijinan-perijinan dari instansi berwenang. Perijinan yang dimiliki HITS antara lain:

- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. BXXV-155/AL.58 tanggal 23 Januari 1993, yang telah diperbaharui dengan SIUPAL No. BXXV-70/AL.58/25 tanggal 12 Juli 2018;
- Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120210141849 yang diterbitkan tanggal 14 November 2018 dan perubahan ke-3 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Surat Keterangan Domisili No. 020/BM-MLC/SKD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Building Management Mangkuluhur City Office Tower One;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.601.645.3-054.000 tanggal 30 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Modal dasar HITS adalah sebesar Rp932.236.730.800, yang terdiri dari 18.644.734.616 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp355.054.240.050 atau sebanyak 7.101.084.801 saham, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	18.644.734.616	932.236.730.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Humpuss	3.232.699.113	161.634.955.650	45,52402
PT Menara Cakra Buana	2.331.552.091	116.577.604.550	32,83375
Hutomo Mandala Putra S.H.	738.692.651	36.934.632.550	10,40253
Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	534.646.571	26.732.328.550	7,52908
Ditambah : Saham Treasuri	263.494.375	13.174.718.750	3,71062
Jumlah	7.101.084.801	355.054.240.050	100,00000

Berdasarkan Akta No. 82 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HTS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theo Lekatompessy
 Komisaris dan Komisaris Independen : Arief Rudianto

Direksi

Direktur Utama : Budi Haryono
 Direktur : Sutyarso

GTSI

GTSI didirikan berdasarkan Akta No. 32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

Anggaran Dasar GTSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 14 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, mengenai perubahan pasal 10, pasal 13 dan pasal 16. Akta perubahan ini dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0254143 tertanggal 19 Juni 2020.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan GTSI adalah berusaha dalam bidang logistik, penyimpanan, pengolahan, dan infrastruktur gas. GTSI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2019. GTSI beralamat di Mangkuluhur City Lantai 26, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930.

Dalam memulai kegiatan usahanya, GTSI telah memperoleh perijinan-perijinan dari instansi berwenang. Perijinan yang dimiliki GTSI antara lain:

- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. AL.001/134/SP_SIUPAL/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan berlaku sampai 18 Desember 2021;
- Surat Izin Usaha Angkutan Laut dengan NIB 8120014171125 yang diterbitkan tanggal 15 November 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 17 Juni 2021;
- Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120014171125 yang diterbitkan tanggal

12 November 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Surat Izin Lokasi dengan NIB 8120014171125 diterbitkan tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan NIB 8120014171125 yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2021 dengan perubahan ke-4 tanggal 17 Juni 2021;
- Surat Keterangan Domisili No. 027/BM-MLC/SKD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Building Management Mangkuluhur City Office Tower One;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.255.267.1-063.000 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum IPO

Modal dasar GTSI adalah sebesar Rp1.500.000.000.000, yang terdiri dari 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp670.957.138.350 atau sebanyak 13.419.142.767 saham, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Jumlah	13.419.142.767	670.957.138.350	100,00

Sesudah IPO

Modal dasar GTSI adalah sebesar Rp1.500.000.000.000, yang terdiri dari 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp813.957.138.350 atau sebanyak 16.279.142.767 saham, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	82,402
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,030
Masyarakat	2.860.000.000	143.000.000.000	17,568
Jumlah	16.279.142.767	813.957.138.350	100,000

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
 Komisaris Independen : Hari Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Kemal Imam Santoso

Direktur : Dandun Widodo

2.2 STRUKTUR ENTITAS ANAK

HITS

Berikut struktur entitas anak berdasarkan persentase kepemilikan:

No.	Anak Perusahaan	Tahun Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan	Bidang Usaha
Kepemilikan Langsung				
1.	PT Humpuss Transportasi Kimia ("HTK")	2004	100%	Jasa sewa kapal
2.	PT MISI Utama Internasional ("MISI")	2016	100%	Jasa manajemen awak kapal
Kepemilikan tidak langsung melalui HTK				
1.	PT Baraka Alam Sari ("BAS")	2012	99%	Jasa sewa kapal
2.	PT Hateka Trans Internasional ("HTI")	2013	99%	Jasa sewa kapal
3.	PT PCS Internasional ("PCSI")	2013	99%	Jasa sewa kapal
4.	PT OTS Internasional ("OTSI")	2013	99%	Jasa sewa kapal
5.	PT GTS Internasional Tbk ("GTSI")	2013	99%	Jasa sewa kapal
6.	PT Utama Trans Kencana ("HTK2")	2013	99%	Jasa sewa kapal
7.	PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")	2015	95%	Jasa sewa kapal
8.	PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS")	2016	51%	Jasa sewa kapal
9.	PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")	2016	99%	Jasa manajemen kapal
10.	PT Utama Trans Kontinental ("HTK3")	2016	100%	Jasa sewa kapal
11.	PT Hummingbird Trans Ocean ("HTO")	2017	100%	Jasa sewa kapal
12.	PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")	2018	99%	Perdagangan
13.	PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOAA")	2020	100%	Perusahaan investasi
14.	PT Sulawesi Regas Satu ("SRGS")	2020	100%	Jasa unit penyimpanan dan regasifikasi Terapung
Kepemilikan tidak langsung melalui MISI				
1.	PT MCS Internasional ("MCSI")	2016	100%	Jasa manajemen kapal
2.	PT ETSI Utama Maritim ("ETSI")	2016	100%	Jasa pelatihan awak kapal
3.	PT LIS Internasional ("LISI")	2017	100%	Jasa sewa kapal
4.	PT Humpuss Transportasi Curah ("HTC")	2017	100%	Jasa sewa kapal

GTSI

Berikut struktur entitas anak berdasarkan persentase kepemilikan:

No.	Anak Perusahaan	Tahun Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan	Bidang Usaha
1.	PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")	2004	95%	Jasa sewa kapal
2.	PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS")	2016	51%	Jasa sewa kapal
3.	PT Humolco LNG Indonesia ("HLI")	2016	99,96%	Jasa manajemen kapal
4.	PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR")	2018	99,99%	Jasa manajemen kapal

2.3 KEGIATAN USAHA

HITS

HITS didirikan pada tahun 1992 yang merupakan Perusahaan Terbuka dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan

dengan transportasi laut. HITS sebelum berdiri menjadi perseroan, HITS merupakan sebuah divisi LNG di PT Humpuss. Seiring dengan perkembangan usaha dan pengelolaan operasional yang baik, HITS melakukan penawaran saham perdana di BEI dan menjadi Perusahaan Terbuka pada tahun 1997.

HITS melanjutkan proses transformasi dan memantapkan peran strategis sebagai penyedia transportasi laut, dimana operasional HITS ditopang oleh 8 segmen usaha, yaitu angkutan LNG, angkutan petrokimia dan minyak, kapal penunjang kegiatan lepas pantai, *marine support*, pengerukan, manajemen pengelolaan kapal serta jasa pengelolaan dan pengembangan kru kapal.

Operasional HITS tidak hanya sebagai perusahaan transportasi laut saja, tetapi HITS telah menjadi perusahaan distribusi energi yang menyalurkan energi untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan distribusi energi ini telah didukung oleh 34 kapal milik sendiri.

Berikut merupakan kapal-kapal yang dimiliki HITS berdasarkan segmen usaha:

Keterangan	Nama Kapal	Kapasitas	Tahun Pembuatan
Angkutan LNG	LNGC Ekaputra 1	136.000 CBM	1990
	LNGC Triputra	22.000 CBM	2000
Angkutan Petrokimia	LPG/C Ghina Energy	16.137 DWT	1990
	MT Griya Melayu	4.990 DWT	1994
	MT Jabbar Energy	3.847 DWT	2000
Angkutan Bahan Bakar Minyak	MT Griya Ambon	18.144 DWT	1999
	MT Griya Cirebon	44.995 DWT	2002
	MT Griya Jawa	18.118 DWT	2000
	MT Griya Gayo	17.500 DWT	2001
	MT Griya Enim	17.500 DWT	2000
Pengerukan	Dewi Arimbi (<i>Clamp Shell</i>)	23 m3	2004
	Baruna Antasena 1 (<i>Hopper Barge</i>)	3.000 m3	2004
	Baruna Antasena 2 (<i>Hopper Barge</i>)	3.000 m3	2005
Kapal Penunjang Kegiatan Lepas Pantai	Nama Kapal	Power	Tahun Pembuatan
	TB Semar 81	4.400 HP	2012
	TB Semar 82	4.400 HP	2012
	TB Semar 83	4.400 HP	2012
	MB Raja Pandita	500 HP	2012
	TB Semar Empat	2.060 HP	2005
	TB Semar Tujuh	2.060 HP	2004
	TB Semar Limabelas	2.060 HP	2004
	TB Semar Tujuhbelas	2.060 HP	2005
	TB Semar Delapanbelas	2.060 HP	2010
	TB Semar Sembilanbelas	2.060 HP	2011
	TB Semar Duapuluh	2.060 HP	2011
	TB Semar Duapuluh tiga	2.060 HP	2013
<i>Marine Support</i>	TUG		
	Nama Kapal	Power	Tahun Pembuatan
	TB Semar Delapan	1.658 HP	2005
	TB Semar Sembilan	1.658 HP	2005
	TB Semar Enambelas	1.658 HP	2005
	TB Semar Duapuluh satu	1.658 HP	2012
	TB Semar Duapuluh dua	1.658 HP	2012
	BARGE		

	Nama Kapal	Kaki	Tahun Pembuatan
	BG Box Tujuhbelas	300 ft	2005
	BG Box Delapanbelas	300 ft	2010
	BG Box Sembilanbelas	300 ft	2012
	BG Box Duapuluh	300 ft	2012

Dalam segmen pengelolaan kapal, Perseroan memiliki SDM yang profesional dalam pengelolaan dan pengoperasian berbagai jenis kapal dan angkutan laut, khususnya kapal pengangkut energi migas. Selain mengelola dan mengoperasikan kapal milik sendiri, HITS juga membuka peluang bagi setiap korporasi yang ingin menggunakan jasa pelayanan pengelolaan dan pengoperasian kapal dengan berbagai tipe. Saat ini, selain mengelola dan mengoperasikan kapal LNG milik sendiri, HITS juga mengelola dan mengoperasikan 2 kapal LNG dan 1 kapal FSRU yang merupakan kepercayaan dari Prinsipal yang bermitra dengan HITS.

Untuk segmen pengelolaan dan pengembangan kru kapal, HITS memberikan pelayanan untuk penyiapan ketersediaan kru kapal baik untuk internal maupun pihak eksternal. Hingga akhir Desember 2020, jumlah kapal dan jumlah kru yang dikelola yaitu sebanyak 137 kapal dari 11 Prinsipal dengan 1.659 kru yang terdiri dari berbagai jenis kapal, antara lain FSRU, LNG, minyak, petrokimia, LPG, *harbour tug*, *tug & barge*, *pilot boat*, *mooring boat* dan pengerukan.

Para kru dilatih secara profesional oleh para pengajar bersertifikasi di Universitas Trilogi, di bawah kontrol Humpuss Trilogi Maritime Training Center (HTMTC). HTMTC mengelola 11 program pelatihan bersertifikasi yang dipersyaratkan dalam IMO *Model Course* dan *Seafarer Training and Certification of Watchkeeping* yang diberikan lisensi oleh Kementerian Perhubungan Laut, serta pelatihan-pelatihan non-STCW lainnya untuk meningkatkan kemampuan kru dan juga *superintendent* perusahaan.

Visi HITS adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam bidang infrastruktur dan distribusi energi. Misi HITS adalah memberikan yang terbaik untuk pelanggan dalam keunggulan operasional, kesehatan, keselamatan yang berstandar internasional, lingkungan dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

GTSI

Embrio bisnis GTSI telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG) setelah ditandatanganinya *new venture* antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikan nya HITS pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker LNG dan minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan argo dan keagenan kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik PLN.

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136.000 m³. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus

menambah kapasitas angkut hingga mencapai jumlah keseluruhan sekitar 328,500 m³ khusus untuk kapal yang dimiliki khusus sedangkan untuk keseluruhan kapal yang dioperasikan mencapai 472.500 m³. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu GTSI, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Liberia dengan fokus usaha penyediaan jasa manajemen kapal yang memprioritaskan untuk kebutuhan group Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya operasional armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

Perkembangan terkini dari lini bisnis GTSI adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangka penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya penawaran umum ini, GTSI memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR sebagai pemilik dan operator FSRU; dan HLI sebagai penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian GTSI berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

2.4 POSISI KEUANGAN HISTORIS

HITS

Berikut ini merupakan tabel Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas HITS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 - 2020 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja; seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang disajikan sebagai berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Audited 2018	Audited 2019	Audited 2020
Operating Highlight			
Pendapatan	81.808.444	86.257.558	90.254.915

Keterangan	Audited 2018	Audited 2019	Audited 2020
Laba Bruto	29.421.305	29.212.860	28.711.967
Laba Usaha	19.116.394	19.800.612	12.834.665
EBITDA	35.080.077	38.357.503	41.228.636
Laba Tahun Berjalan	12.541.802	13.142.178	7.311.782
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.169.931	13.065.736	7.349.304
Financial Position			
Aset	197.358.939	203.847.778	222.976.008
Aset Lancar	37.917.105	33.101.644	39.364.337
Aset Tidak Lancar	159.441.834	170.746.134	183.611.671
Liabilitas	144.011.506	140.910.569	154.965.895
Liabilitas Jangka Pendek	44.691.188	45.702.624	67.742.958
Liabilitas Jangka Panjang	99.320.318	95.207.945	87.222.937
Ekuitas	53.347.433	62.937.209	68.010.113
Key Performance Ratio			
Marjin Laba Bruto	35,96%	33,87%	31,81%
Marjin Laba Usaha	23,37%	22,96%	14,22%
Marjin Laba Tahun Berjalan	15,33%	15,24%	8,10%
Marjin EBITDA	42,88%	44,47%	48,01%
Return on Assets (ROA)	6,35%	6,45%	3,28%
Return on Equity (ROE)	23,51%	20,88%	10,75%
Current Ratio	0,85	0,72	0,58
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,73	0,69	0,69
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,70	2,24	2,28

Aset

Total aset di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 9,38% atau sebesar USD19.128.230 dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun aset hak guna-bersih sebesar USD19.419.033 dan penurunan pada akun aset keuangan lancar lainnya sebesar USD318.216.

Total aset di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sekitar 3,29% atau sebesar USD6.488.839 dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun pinjaman kepada pihak berelasi sebesar USD14.998.890 dan piutang kepada pihak berelasi sebesar USD670.731 serta penurunan pada akun aset tetap-bersih sebesar USD7.894.024, piutang usaha sebesar USD975.841 dan persediaan sebesar USD361.152.

Liabilitas

Total liabilitas di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 9,97% atau sebesar USD14.055.326 dibandingkan dengan total liabilitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun beban yang masih harus dibayar sebesar USD7.003.251, utang usaha sebesar USD5.356.642, utang kepada pihak-pihak berelasi sebesar USD1.498.545, uang muka dari pihak-pihak ketiga sebesar USD1.433.921 dan utang pajak sebesar USD534.971 serta penurunan akun pinjaman bank jangka pendek sebesar USD1.475.112.

Total liabilitas di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2019, mengalami penurunan sekitar 2,15% atau sebesar USD3.100.937 dibandingkan dengan total liabilitas per

31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada akun beban yang masih harus dibayar sebesar USD1.571.928, pendapatan ditangguhkan sebesar USD1.307.702 dan uang muka dari pihak-pihak ketiga sebesar USD180.901.

Ekuitas

Total ekuitas di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 8,06%, yaitu sebesar USD5.072.904 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun saldo laba, penghasilan komprehensif lain dan kepentingan non pengendali.

Total ekuitas di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sekitar 17,98%, yaitu sebesar USD9.589.776 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun saldo laba dan kepentingan non pengendali serta penurunan pada akun selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali dan penghasilan komprehensif lain.

Berikut adalah Arus Kas HITS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 – 2020:

(dalam USD)

Keterangan	31-Des-18	31-Des-19	31-Des-20
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	82.407.109	88.870.676	86.401.316
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(30.320.634)	(54.981.559)	(43.590.726)
Penerimaan bunga	(5.904.863)	(4.780.999)	(3.946.383)
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(1.635.918)	(2.173.355)	(2.110.596)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	44.545.694	26.934.763	36.753.611
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Perolehan aset tetap	(33.067.044)	(12.752.338)	(14.335.376)
Penerimaan penjualan aset tetap	-	2.944.015	1.282.051
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	(19.090.295)	-
Penerimaan pendapatan bunga	155.410	292.748	369.004
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	(41.518)
Uang muka pengedokan	(660.000)	(196.151)	(1.024.546)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(33.571.634)	(28.802.021)	(13.750.385)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pinjaman bank jangka pendek: (Pembayaran)/penerimaan	898.958	2.491.066	(1.475.112)
Pinjaman bank jangka panjang: Penerimaan	18.564.493	1.106.463	1.320.642
Pembayaran	(20.981.262)	(22.708.645)	(20.736.448)
Pembayaran biaya pinjaman	(580.320)	(304.807)	(109.232)
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	-	19.442.397	462.747
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga	(460.034)	(235.235)	-
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(889.983)	180.031	1.739.513
Pembayaran dividen yang didistribusikan oleh Perseroan kepada pemegang saham	(1.461.649)	(1.444.561)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(95.149)	(59.210)	(2.173.813)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(13.778)	(32.038)	(16.951)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(5.018.724)	(1.564.539)	(20.988.654)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(528.437)	(524.697)	381.377
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	5.426.899	(3.956.494)	2.395.949
Kas dan setara kas dari:			
Entitas anak yang dikonsolidasikan	29.191	-	-
Entitas anak yang dilikuidasi	(400)	-	-
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	18.033.158	23.488.848	19.532.354
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	23.488.848	19.532.354	21.928.303

Kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar USD2.395.949 atau naik sekitar 12,27% dibandingkan dengan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar USD36.753.611 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, penurunan arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar USD20.988.654 yang terutama berasal dari pembayaran pinjaman jangka panjang serta penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD13.750.385 yang terutama berasal dari perolehan aset tetap.

Kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar USD3.956.494 atau turun sekitar 16,84% dibandingkan dengan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD28.802.021 yang terutama berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi, penurunan arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar USD1.564.539 yang terutama berasal dari pembayaran pinjaman jangka panjang serta peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar USD26.934.763 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

GTSI

Berikut ini merupakan tabel Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas GTSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 - 2020 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja; seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang disajikan sebagai berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Audited 2018	Audited 2019	Audited 2020
Operating Highlight			
Pendapatan	27.184.510	30.171.862	31.329.115
Laba Bruto	12.398.886	14.618.708	17.370.785
Laba Usaha	8.364.815	11.554.063	16.953.854
EBITDA	14.636.002	19.330.175	27.236.258
Laba Tahun Berjalan	7.470.911	10.669.088	16.214.238
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.470.911	10.623.497	16.214.238
Financial Position			
Aset	71.618.264	87.769.179	102.689.916
Aset Lancar	7.176.892	12.094.956	20.935.814
Aset Tidak Lancar	64.441.372	75.674.223	81.754.102
Liabilitas	33.697.887	41.256.705	42.419.764
Liabilitas Jangka Pendek	22.933.613	15.856.464	20.177.394
Liabilitas Jangka Panjang	10.764.274	25.400.241	22.242.370
Ekuitas	37.920.377	46.512.474	60.270.152
Key Performance Ratio			
Marjin Laba Bruto	45,61%	48,45%	55,45%
Marjin Laba Usaha	30,77%	38,29%	54,12%
Marjin Laba Tahun Berjalan	27,48%	35,36%	51,75%
Marjin EBITDA	53,84%	64,07%	75,12%
Return on Assets (ROA)	10,43%	12,16%	15,79%
Return on Equity (ROE)	19,70%	22,94%	26,90%
Current Ratio	0,31	0,76	1,04
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,47	0,47	0,41
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	0,89	0,89	0,70

Aset

Total aset di dalam posisi keuangan GTSI per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 17,00% atau sebesar USD14.920.737 dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun kas dan setara kas sebesar USD4.597.534, piutang lainnya - pihak berelasi sebesar USD3.904.222, piutang usaha sebesar USD2.426.974, persediaan sebesar USD1.722.451, aset derivatif lainnya sebesar USD1.650.510 dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD1.103.916 serta penurunan pada akun aset tetap-bersih sebesar USD630.465.

Total aset di dalam posisi keuangan GTSI per 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sekitar 22,55% atau sebesar USD16.150.915 dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun pinjaman kepada pihak berelasi sebesar USD14.998.890, piutang lainnya - pihak berelasi sebesar USD762.236 dan piutang usaha sebesar USD425.119.

Liabilitas

Total liabilitas di dalam posisi keuangan GTSI per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 2,82% atau sebesar USD1.163.059 dibandingkan dengan total liabilitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun beban yang masih harus dibayar sebesar USD5.930.684, utang dividen sebesar USD439.941 dan utang usaha sebesar USD 275.208 serta penurunan pada akun pendapatan ditangguhkan sebesar USD3.086.655 dan pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD2.494.993.

Total liabilitas di dalam posisi keuangan GTSI per 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sekitar 22,43% atau sebesar USD7.558.818 dibandingkan dengan total liabilitas per 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun pinjaman dari pihak ketiga sebesar USD19.207.160, serta penurunan pada akun pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD7.808.030, pendapatan ditangguhkan sebesar USD1.955.634, beban yang masih harus dibayar sebesar USD1.281.631 dan utang lain-lain sebesar USD689.287.

Ekuitas

Total ekuitas di dalam posisi keuangan GTSI per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 29,58%, yaitu sebesar USD13.757.678 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun saldo laba dan kepentingan non pengendali serta penurunan pada akun penghasilan komprehensif lain.

Total ekuitas di dalam posisi keuangan HITS per 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sekitar 22,66%, yaitu sebesar USD8.592.097 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun saldo laba, selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali dan kepentingan non pengendali serta penurunan pada akun penghasilan komprehensif lain.

Berikut adalah Arus Kas GTSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 – 2020:

(dalam USD)

Keterangan	31-Des-18	31-Des-19	31-Des-20
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	31.320.497	28.396.829	23.708.279
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(13.127.173)	(15.261.105)	(14.330.030)
Penerimaan bunga	77.403	193.273	289.069
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(426.290)	(447.548)	(466.766)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	17.844.437	12.881.449	9.200.552
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Perolehan aset tetap	(10.038.885)	(521.160)	(885.038)
Uang muka pengedokan	-	(196.151)	(1.220.696)
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	(19.297.000)	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10.038.885)	(20.014.311)	(2.105.734)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	(9.204.024)	(7.808.030)	(2.494.993)
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga	(460.032)	(235.237)	-
Pembayaran beban keuangan	(567.525)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(4.553)	(5.009)	(3.538)
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	-	19.442.397	-
Arus kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(10.236.134)	11.394.121	(2.498.531)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	987	(1.252)	1.247
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	(2.429.595)	4.260.007	4.597.534
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	9.179.753	6.750.168	11.010.175
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	6.750.168	11.010.175	15.607.709

Kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar USD4.597.534 atau naik sekitar 41,76% dibandingkan dengan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar USD9.200.552 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, penurunan arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar USD2.498.531 yang terutama berasal dari pembayaran pinjaman pihak berelasi serta penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD2.105.734 yang terutama berasal dari uang muka pengedokan.

Kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar USD4.260.007 atau naik sekitar 63,11% dibandingkan dengan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar USD12.881.449 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, peningkatan arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar USD11.394.121 yang terutama berasal dari penerimaan pinjaman dari pihak ketiga serta penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD20.014.311 yang terutama berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi.

3 TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA

3.1 EKONOMI SECARA UMUM

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 sebesar 4%. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%. Namun dalam laporan Proyeksi Ekonomi Global edisi Januari 2021, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun 2021 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dikisaran 5% [sumber: <https://money.kompas.com/read/2021/01/06/111247626/bank-dunia-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-2021-capai-4-persen>, 6 Januari 2021].

Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 juga diperkirakan akan melambat, yakni menjadi sebesar 3,8%. Bank Dunia menyatakan meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian, namun proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan.

Negara maju diproyeksi akan pulih dan tumbuh dikisaran 3,3% pada tahun 2021. Hal itu didukung oleh penanganan pandemi dan vaksinasi yang meluas bersamaan dengan kebijakan moneter yang akomodatif, mengimbangi kebijakan fiskal yang diproyeksi akan semakin berkurang. Pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5% di tahun 2021. Pemulihan tersebut sebagian besar didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Bila tidak menghitung pemulihan Tiongkok, pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun 2021 diperkirakan akan lebih moderat, yakni sebesar 3,5% baik di tahun 2021. Meski mengalami pemulihan, output agregat dari kinerja perekonomian negara berkembang pada tahun 2022 mendatang masih berada di bawah level 6% yang merupakan proyeksi sebelum Covid-19.

Dana Moneter Internasional (IMF) merilis laporan proyeksi ekonomi global untuk tahun 2021 dan 2022. Dalam laporan *World Economic Outlook*, IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi sebesar 5,5% atau naik 0,3 poin persentase dari proyeksi Oktober 2020. Sedangkan pada tahun 2022, diperkirakan ekonomi global diproyeksi sebesar 4,2% [sumber: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/724415/imf-revisi-ke-atas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-2021>, 27 Januari 2021].

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia. Namun di sisi lain, IMF juga mewaspadaikan varian baru Covid-19 yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi global. IMF menekankan pemerintah dunia harus tetap mendukung ekonomi masing-masing melalui stimulus fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Baik negara berkembang maupun negara maju diperkirakan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Sebagai salah satu dari top 10 ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok dan India akan tumbuh impresif di tahun 2021 dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi *emerging market* di kawasan Asia. Tiongkok diperkirakan tumbuh lebih dari 8% sementara India lebih dari 11% untuk tahun 2021. Jepang juga akan

diuntungkan oleh paket bantuan baru yang disetujui pada bulan Desember 2020, sehingga IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan tahun 2021 menjadi 3,1%.

Di zona Eropa, IMF memangkas proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini sebesar 1 poin persentase ke 4,2%. Jerman, Prancis, Italia dan Spanyol adalah empat anggota terbesar Uni Eropa yang mendapatkan pemangkasan proyeksi dari IMF. IMF memperkirakan perekonomian Eropa akan kembali ke level prapandemi pada tahun 2022.

IMF merevisi proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan naik 5,1% tahun 2021 atau naik 2 poin persentase dari proyeksi sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid semester II/2020 yang diharapkan berlanjut di tahun 2021. Pada tahun 2020, AS menyetujui paket stimulus USD 900 miliar dan Presiden Joe Biden siap menambah jumlah stimulus.

Outlook pemulihan ekonomi global akan memberikan efek positif ke perbaikan harga komoditas, khususnya minyak. Permintaan komoditas dan minyak akan meningkat yang berdampak pada kenaikan harga. Perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang akan memperkuat mata uang mereka. Maka setelah pemulihan ekonomi yang sangat kuat pada semester I/2021, pertumbuhan ekonomi secara bertahap akan kembali turun ke pertumbuhan tren global sekitar 3%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terus berada di Tiongkok mewakili kawasan Asia yang bertumbuh serentak.

Menteri Keuangan (Menkeu) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkisar -1,7% hingga -2,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah tersebut tidak jauh berbeda dengan lembaga internasional dimana *Asian Development Bank* (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia -2,2%. Bank Dunia memproyeksikan -2,2% dan Organisasi dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*/OECD) memperkirakan -2,4% [sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/arrah-perekonomian-global-indonesia-2021>, 13 Januari 2021].

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 masih dibayang-bayangi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun sebagian orang yakin bahwa kondisi tersebut akan berakhir karena harapan akan adanya vaksin Covid-19. Beberapa lembaga keuangan dunia maupun nasional telah mengeluarkan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi mulai positif pada tahun 2021. Bahkan, ekonomi Indonesia pada periode Maret-April 2021 dan Mei-Juni 2021 diproyeksi berkisar 4,5%-5,5%. Pada periode September-Oktober 2021, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5% kemudian bertahan di level 5% pada bulan Desember 2020 [sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210104193250-532-589388/sri-mulyani-beberkan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-2021>, 4 Januari 2021].

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I, II, III dan IV tahun 2020 masing-masing sebesar 2,97%, -5,32%, -3,49% dan -2,19% *year on year* (YoY). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I, II, III dan IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% YoY. Perekonomian pada kuartal tersebut tertekan akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, merujuk pada definisi resesi yang berarti penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut, Indonesia telah resmi masuk dalam zona resesi [sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/perekonomian-kuartal-iii-2020-minus-349-yoy-indonesia-resesi>, 5 November 2020].

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I/2021 yaitu sebesar -0,74% YoY dan secara kuartalan turun 0,96%. Meski demikian, tanda pemulihan mulai terlihat. Pasalnya, bila dibandingkan dengan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi konsisten mengalami perbaikan [sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-minus-074-pada-kuartal-i-2021>, 5 Mei 2021].

IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3% sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih rendah dari negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi naik dari 5,5% ke 6% [sumber: <https://money.kompas.com/read/2021/04/09/171847526/imf-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-ini-komentar-sri-mulyani?page=all>, 9 April 2021].

Disisi lain, Bank Dunia dalam *Global Economic Prospect* edisi Januari 2021 memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di level 7,4% sepanjang tahun 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal I/2021 di negara-negara besar, negara-negara berkembang dan negara-negara kecil.

Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian Indonesia tahun 2021 akan kembali ke zona positif, bahkan melesat hingga berada di kisaran 4,8%-5,8%. Ketahanan perekonomian di tahun 2021 ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk PDB, yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan *social distancing* dan vaksinasi massal. Komponen itu bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat program perlindungan sosial.

Berikut adalah kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum:

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	APBN 2021
Pertumbuhan ekonomi riil (%)	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07	5,0
Inflasi (%)	3,0	3,8	3,13	2,72	1,68	3,0
Nilai tukar rata-rata (Rp/USD)	13.307	13.384	14.427	14.146	14.577	14.600
SPN tiga bulan (%)	5,7	5,0	4,95	5,6	3,19	7,29*
Rata-rata harga minyak dunia (USD/ barel)	40	50	67,5	62	40	45
Lifting minyak (ribu barel/hari)	825	801	776	741	705	705

*) Pada APBN 2021, tingkat bunga SBN 10 tahun menggantikan tingkat bunga SPN 3 bulan
 Sumber: Departemen Keuangan

3.2 INDUSTRI PELAYARAN DI INDONESIA

Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengungkapkan pada tahun 2021 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan industri pelayaran pasca pandemi Covid-19. Dalam proyeksi INSA, pelayaran nasional masih memiliki sejumlah peluang makro yang bisa diperoleh dan mengoptimalkan kinerja perusahaan pelayaran. Setidaknya terdapat 5 peluang utama yakni kebijakan *beyond cabotage*, angkutan fame setelah pemerintah menetapkan B40, wisata bahari, pemindahan Ibu Kota negara dan pengiriman material mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) [sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201214/98/1330854/2021-peluang-pemulihan-sektor-pelayaran-kian-tinggi>, 14 Desember 2020].

Sejumlah peluang tersebut perlu untuk ditangkap para pengusaha pelayaran nasional. Tren pemulihan dipastikan terjadi pada tahun 2021 dan terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang dari *beyond cabotage* masih terbuka, dimana pemerintah memberdayakan pelayaran untuk angkutan ekspor untuk mengurangi defisit transaksi jasa. Selain itu, berdasarkan Permendag No.65/2020 saat ini diwajibkan ekspor menggunakan pelayaran nasional dengan kapasitas angkutan 10.000 DT. Angka tersebut masih dapat berkembang tergantung kesiapan perusahaan pelayaran, kemauan pemilik kargo dan keseriusan pemerintah dalam program pemberdayaan pelayaran.

INSA mengungkapkan bahwa kebijakan *beyond cabotage* ini sudah ada sebelum pandemi dan mengharapkan adanya kesetaraan level dengan pelayaran internasional agar pengusaha nasional dapat berdaya dalam aktivitas pengiriman *ocean going*. Di sisi lain, selain peluang angkutan internasional, peluang lainnya datang dari pengangkutan *fatty acid methyl ester* (FAME) yang menjadi bahan campuran dari kelapa sawit untuk membuat biosolar. Pemerintah baru saja menetapkan kewajiban B30 (campuran biodiesel 30% FAME dan 70% solar) menjadi B40.

Peluang lainnya datang dari pelayaran wisata bahari yang menjadi salah satu faktor kunci percepatan pemulihan yang jadi andalan pemerintah yakni pariwisata. Pada tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota, sehingga menjadi peluang bagi pelayaran dalam angkutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Ibu Kota negara baru. Peluang pengangkutan material mentah dan BBM tetap menjadi hal yang menarik pada tahun 2021, apalagi pemerintah sudah menetapkan sejumlah *smelter* baru yang mulai dibangun.

Pada kuartal IV/2020, angkutan laut Indonesia berkontraksi paling rendah dibandingkan beberapa moda atau angkutan lainnya. Hal ini terlihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya secara *year on year* (YoY). Hal tersebut disampaikan Supply Chain Indonesia (SCI) berdasarkan analisis data statistik pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) awal Februari 2021. Pada kuartal IV/2020, angkutan laut berkontraksi sebesar 1,19% (YoY) diikuti angkutan darat sebesar 3,50%, angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar 12,28%, angkutan rel sebesar 45,56% dan angkutan udara sebesar 53,81%. Sementara itu pada periode yang sama, secara kumulatif (c-to-c) angkutan laut berkontraksi sebesar 4,575, diikuti angkutan darat sebesar 5,34%, angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar 13%, angkutan rel sebesar 42,34% dan angkutan udara sebesar 53,01% [sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210217/98/1357197/sci-kontraksi-angkutan-laut-paling-rendah-pada-kuartal-iv2020>, 17 Februari 2021]

Namun demikian, kontribusi angkutan laut terhadap PDB 2020 masih kecil, yaitu sebesar Rp48.614,8 miliar atau 8,7% dari total PDB angkutan sebesar Rp558.069 miliar. Kontributor tertinggi terhadap PDB angkutan masih dari angkutan darat 68,3% yang diikuti angkutan udara 18,8%. Sementara, dua angkutan lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil dari angkutan laut, yaitu angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar 2,85 dan angkutan rel sebesar 1,4%.

Meski begitu, perlunya integrasi transportasi laut, proses kepelabuhanan dan transportasi *hinterland*. Para pengguna akan mempertimbangkan efisiensi transportasi secara *end-to-end*. Berdasarkan data dari Pelni dan INSA, transportasi laut hanya berkontribusi sekitar 19%. Sementara biaya kepelabuhanan sekitar 31% dan transportasi *hinterland* sekitar 50%.

Tarif pengangkutan kontainer ke jalur-jalur pelayaran domestik di tahun 2021 ini diperkirakan masih akan stabil. Pandemi Covid-19 menjadi risiko bagi perusahaan pelayaran domestik karena volume pengangkutan juga berkurang. Selama tahun 2020 beberapa tarif angkutan kontainer di jalur domestik sempat mengalami penurunan. Meski aktivitas bisnis antar pulau mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan ketentuan azas *cabotage* dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) dinilai sebagai salah satu faktor yang menjaga stabilitas tarif angkutan kontainer domestik. Kebijakan pemerintah untuk tetap mengoptimalkan peran pelayaran nasional untuk melayani angkutan domestik sangat positif. Selama ini dengan azas *cabotage* pelaku pelayaran domestik mampu menjaga tarif tidak bergerak liar seperti yang terjadi di angkutan global saat ini [sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5334162/masih-dibayangi-corona-bagaimana-peluang-bisnis-pelayaran-di-2021>, 14 Januari 2021]

Akibat pandemi Covid-19, hampir semua kapal di jalur pelayaran dunia menaikkan *freight rate* kontainer ke luar negeri. Sebagai contoh tarif kontainer 20 feet ('20) Sub ke Ho Chi Min awal 2020 USD300/20' sekarang menjadi USD950/20'. Sub ke Huangpu awal tahun USD150/20' saat ini sudah USD1.050/20'. Sementara Sub ke Shanghai awal tahun USD200/20' sekarang USD1050/20' juga sebaliknya Untuk impor dari Shanghai Ke Surabaya USD500/20' sekarang menjadi USD2.000/20'. Juga untuk Surabaya - Tianjin 350/20 menjadi 1050/20 dan Tianjin Surabaya 500/20 menjadi 4.000/20. Situasi yang sama juga terjadi pada jalur ke Eropa seperti sub Europe Main Port. Pada awal tahun *freight rate* masih USD800/20 lalu meningkat menjadi USD1.000/20' di Oktober 2020 dan saat ini sudah mencapai USD4.000/20'.

Selain *freight rate* yang melambung tinggi, banyak perusahaan pelayaran asing yang memilih jalur-jalur gemuk di luar negeri. Akibatnya lalu lintas kapal ke Indonesia menjadi berkurang sehingga menghambat laju ekspor - impor para pelaku usaha di dalam negeri. *Freight rate* pelayaran global yang mahal dan jadwal kapal yang terbatas menyebabkan biaya ekspor dan impor menjadi semakin tinggi sehingga berdampak pada ekonomi domestik yang tidak efisien. Itu sebabnya, penerapan azas *cabotage* memberikan kepastian bagi pelaku usaha di dalam negeri terhadap biaya pengangkutan barang antar pulau lewat laut.

Seperti diketahui dalam UU CK tetap memcantumkan azas *cabotage*. Ketentuan ini sebelumnya telah ada di UU Pelayaran Nomor 17 tahun 2008. Sesuai ketentuan azas *cabotage*, pelayaran domestik wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penguatan industri pelayaran nasional dan menjaga kedaulatan negara Indonesia.

3.3 INDUSTRI LNG DI DUNIA DAN INDONESIA

LNG di Dunia

Global Gas Report 2020 menginformasikan bahwa tahun 2019 pasar gas dunia berada pada kondisi *oversupply*. Permintaan gas dunia tumbuh sekitar 2,3%, sementara produksi gas dunia

meningkat 3,5%. Kondisi tersebut menyebabkan harga gas pada global hub utama mengalami penurunan hingga 37%. Harga gas Henry Hub turun sekitar 18%, TTM turun 38% dan JKM turun 42%. Data menunjukkan, saat ini porsi gas dalam bauran energi primer global sekitar 25%. Sejumlah lembaga memproyeksikan konsumsi gas dalam beberapa tahun ke depan akan meningkat. Kebijakan transisi energi yang mengarah pada penggunaan energi yang lebih bersih diyakini akan semakin meningkatkan porsi gas dalam bauran energi primer global [sumber: <https://investor.id/opinion/pasar-lng-global-dan-neraca-gas-indonesia>, 2 Februari 2021]

Tahun 2019, volume perdagangan gas global dilaporkan meningkat sekitar 2,9%. Perdagangan gas pada periode tersebut terdistribusi 53% gas pipa dan 47% LNG. Porsi LNG dalam perdagangan gas global meningkat dari 43% pada tahun 2018 menjadi 47% pada tahun 2019. Volume impor LNG di pasar global pada tahun 2019 dilaporkan meningkat sekitar 40,9 *metric ton* (MT) menjadi 354,7 MT atau sekitar 13% dari tahun 2018.

Impor LNG Jepang dan Korea Selatan selama periode tersebut dilaporkan turun sekitar 7%. Sementara impor LNG Tiongkok dilaporkan meningkat 14%. Impor LNG Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh pada tahun 2019 dilaporkan meningkat signifikan. Impor LNG di wilayah tersebut dilaporkan meningkat sekitar 20%. Bangladesh tercatat menjadi pasar LNG terbesar kedua di wilayah Asia setelah Tiongkok.

Dari sisi produsen, Qatar, Australia dan Amerika Serikat tercatat menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Pada 2019, Qatar mengekspor 77,8 MT (22%), Australia 75,4 MT (21%), dan Amerika Serikat 33,8 MT (10%). Sementara, Indonesia merupakan negara eksportir LNG terbesar ketujuh dengan 15,5 MT (4%). Jumlah ekspor LNG Indonesia menurun dari 18,2 MT pada tahun 2018 menjadi 15,5 MT pada tahun 2019. Hal tersebut salah satunya akibat menurunnya produksi LNG dari kilang Bontang. Peningkatan ekspor LNG pada tahun 2019 berasal dari produsen utama LNG global yaitu Amerika Serikat 13,1 MT, Rusia 11 MT, Australia 8,7 MT, dan Malaysia 1,8 MT. Di tengah ekspor LNG global yang dilaporkan meningkat, terdapat tiga eksportir LNG yang volumenya menurun, yaitu Indonesia, Equatorial Guinea dan Norwegia. Penurunan volume ekspor LNG Indonesia tercatat sebagai yang terbesar dengan 2,7 MT.

Dari sisi infrastruktur, kapasitas kilang LNG global tercatat mengalami peningkatan sekitar 11% yaitu dari 388 MTPA pada tahun 2018 menjadi 430,5 MTPA pada tahun 2019. Dengan memperhitungkan proyek kilang LNG di Amerika Serikat, Mozambique, Rusia dan Nigeria yang telah memasuki tahap *final investment decision* (FID) pada tahun 2019, kapasitas kilang LNG global pada akhir tahun 2020 diproyeksikan bertambah menjadi 454,8 MTPA. Kapasitas kilang LNG global diproyeksikan akan meningkat signifikan jika mengingat tahun 2019 terdapat proyek kilang LNG dengan kapasitas sekitar 907,4 MTPA yang telah memasuki tahap pre-FID. Proyek kilang LNG yang memasuki tahap pre-FID pada 2019 di antaranya adalah proyek di Amerika Serikat 350,5 MTPA, Kanada 221,8 MTPA, Australia 50 MTPA, Qatar 49 MTPA dan Rusia 42,2 MTPA.

LNG di Indonesia

Pada saat pasar gas global sedang *oversupply*, kondisi yang terjadi pada Indonesia justru dapat dikatakan sebaliknya. Berdasarkan Neraca Gas Indonesia tahun 2020- 2030, jika hanya mengandalkan produksi *existing*, pada tahun 2022 mendatang Indonesia sudah akan

mengalami defisit pasokan gas. Sejak tahun 2022, *contracted demand* yaitu volume kebutuhan gas bumi berdasarkan PJBG/GSA lebih tinggi dari *existing supply* yaitu perkiraan gas bumi yang mampu dipasok dan dialirkan dari lapangan minyak dan gas bumi yang sedang berproduksi.

Dari *region* yang ditetapkan dalam Neraca Gas Indonesia yaitu *region* I (Aceh dan Sumatera Bagian Utara), *region* II (Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Kepri dan Jawa Bagian Barat), *region* III & IV (Jawa Bagian Tengah dan Timur), *region* V (Kalimantan dan Bali) dan *region* VI (Papua, Sulawesi dan Maluku), terdapat sejumlah *region* yang memerlukan LNG untuk menutup kekurangan pasokan gas di *region* yang bersangkutan.

Untuk *region* III & IV misalnya, sejak tahun 2020 telah memerlukan LNG sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan gas di *region* tersebut. Pada tahun 2020 volume kebutuhan gas bumi berdasarkan PJBG/GSA di *region* tersebut sekitar 700 MMSCFD. Sementara perkiraan gas bumi yang mampu dipasok dan dialirkan dari lapangan minyak dan gas bumi yang sedang berproduksi di *region* yang sama di bawah 600 MMSCFD. Berdasarkan *project supply* dan *potential supply*, kondisi neraca gas *region* III & IV selama tahun 2021 dan 2022 akan relatif membaik.

Project supply yaitu perkiraan gas bumi yang mampu dipasok dan dialirkan dari lapangan minyak dan gas bumi yang POD-nya sudah disetujui maupun yang sedang dalam proses persetujuan, serta dari unit penyimpanan dan regasifikasi yang telah mendapat kepastian pasokan. Sedangkan *potential supply* yaitu perkiraan volume gas bumi yang POD-nya belum diajukan oleh KKKS namun telah terindikasi memiliki cadangan terbukti yang diperkirakan ekonomis untuk dikembangkan dan diproduksi diperhitungkan.

Akan tetapi sejak tahun 2023 produksi tersebut sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi *contracted demand* dan *committed demand* gas di *region* yang sama. Neraca Gas Indonesia menginformasikan, jika di dalam perkembangannya tidak terdapat penambahan penemuan cadangan, Indonesia akan mengalami defisit neraca gas pada 2030 mendatang meskipun seluruh sumber daya gas yang ada telah diproduksi. Tahun 2030 mendatang volume dari *contracted demand*, *committed demand* dan *potential demand* telah lebih besar dari *existing supply*, *project supply* dan *potential supply* gas Indonesia. Mencermati kondisi yang ada tersebut, saya menilai pemanfaatan LNG termasuk impor LNG untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri pada dasarnya hanya masalah waktu. Karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu memformulasikan suatu kebijakan agar Indonesia dapat memanfaatkan dan memperoleh benefit dari tren harga LNG dunia yang saat ini sedang relatif murah.

SKK Migas memperkirakan kondisi pasar LNG akan semakin ketat pada tahun 2021. Pada tahun 2021, akan banyak pemasok untuk pasar LNG dan kompetisi harga LNG diproyeksikan semakin ketat dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, SKK Migas memproyeksikan produksi LNG sebesar 200,7 kargo atau menurun dibandingkan produksi pada tahun 2020 yang sebesar 206,9 kargo [sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210105/44/1339064/skk-migas-persaingan-pasar-lng-2021-makin-ketat>, 5 Januari 2021]

Jumlah proyeksi 2021 tersebut terdiri dari dua kilang LNG utama Indonesia yakni kilang Bontang di Kalimantan Timur dan kilang LNG Tangguh di Papua mencapai 200,74 kargo LNG. Untuk produksi Kilang Bontang pada tahun 2021 berkisar 77,74 kargo, dimana sebanyak 18,7

kargo untuk kebutuhan domestik dan sisanya 59,04 kargo untuk kebutuhan ekspor. Untuk produksi Kilang Tangguh pada tahun 2021 ditargetkan 123 kargo, dimana sebanyak 35 kargo untuk kebutuhan domestik dan 88 kargo untuk kebutuhan diekspor. Strategi pemasaran LNG pada tahun 2021 adalah dengan meminimalisir kargo yang tidak terkontrak yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga. Jika, kargo-kargo LNG dijual dengan harga yang murah maka akan berdampak kepada penerimaan negara yang lebih sedikit.

Sepanjang tahun 2020, realisasi *lifting* dari Kilang LNG Bontang mencapai 84,9 kargo dari target sebesar 84,8 kargo. Realisasi *lifting* dari Kilang LNG Tangguh sebesar 122 kargo dari target 121 kargo. Sedangkan, penerimaan negara sepanjang tahun 2020 tercatat senilai USD8,24 miliar dari target senilai USD 5,86 miliar atau 141% dari target tahun 2019.

SKK Migas mencatat, selama kuartal I/2021 produksi LNG nasional dari dua kilang yakni Kilang Bontang, Kalimantan Timur dan Kilang Tangguh di Papua Barat, mencapai 46,2 standard kargo. Produksi LNG tersebut berasal dari Kilang LNG Bontang sebanyak 16,2 kargo dan Kilang Tangguh 30 kargo. Dari total produksi LNG di kuartal I/2021, penjualan ke domestik mencapai 16,9 kargo dan ekspor lebih besar yakni 29,3 kargo. Dari produksi 16,2 kargo di Kilang Bontang, penjualan ke domestik sebesar 9,6 kargo dan ekspor sebesar 6,6 kargo. Sementara dari produksi 30 LNG di Kilang Tangguh, sebanyak 7,3 kargo dijual ke domestik dan 22,7 kargo diekspor [sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427165259-4-241304/pln-tambah-gas-di-q1-2021-tapi-ekspor-lng-tetap-lebih-tinggi>, 27 April 2021].

SKK Migas mengungkapkan bahwa pada kuartal I/2021 terdapat peningkatan penyerapan LNG untuk domestik, terutama karena adanya peningkatan permintaan dari PLN sebagai imbas dari adanya gangguan pasokan batubara pada awal tahun. Pada Januari 2021, pasokan LNG untuk PLN sebesar 4,2 kargo atau turun tipis dari Januari 2020 yang sebanyak 4,3 kargo. Pada Februari 2021, pengiriman LNG ke PLN meningkat menjadi 6,5 kargo dibandingkan 4,2 kargo pada periode yang sama tahun 2020. Lalu, pada Maret 2021 pasokan LNG untuk PLN mencapai 6,2 kargo, lebih tinggi dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 4,9 kargo.

Seperti diketahui, sejak pertengahan Januari 2021 ketika ada banjir di Kalimantan Selatan, pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN pun terganggu. Stok batubara saat itu dikatakan menipis, bahkan hanya cukup untuk lima hari. Dampaknya, PLN beralih ke gas untuk mengoperasikan pembangkit listriknya dan menjaga agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal dan aman. Untuk keandalan pasokan, khususnya di Pulau Jawa, unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU) Nusantara Regas dituntut untuk dipasok kargo LNG setiap tujuh hari [sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427165259-4-241304/pln-tambah-gas-di-q1-2021-tapi-ekspor-lng-tetap-lebih-tinggi>, 27 April 2021].

Aksi ambil untung selisih harga kargo LNG karena kekurangan pasokan pada Januari 2021 mengakibatkan tarif spot sewa kapal LNG di Asia meningkat ke level tertinggi yaitu mencapai USD350.000/hari. Melonjaknya tarif sewa kapal LNG tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca di Asia dan Eropa yang lebih ekstrim dari yang diperkirakan, kekurangan pasokan LNG dan keterbatasan ketersediaan kapal tanker LNG. Tarif spot sewa kapal LNG di Asia meningkat pada Desember 2020 dan Januari 2021 dipicu meningkatnya permintaan untuk kebutuhan energi pemanas perumahan dan industri yang disebabkan musim dingin ekstrem di beberapa

negara Asia [sumber: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/722365/tarif-sewa-kapal-lng-di-asia-tembus-rekor-tertinggi>, 21 Januari 2021].

Seperti dilansir S&P Global Platts Analytics, provinsi di bagian utara Tiongkok menghadapi gelombang cuaca dingin yang mengakibatkan kekurangan sumber energi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menopang pasokan batubara, listrik, minyak mentah dan gas alam untuk kebutuhan pemanas perumahan. Selain Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan menghadapi peningkatan kebutuhan listrik akibat musim dingin.

S&P Global Platts Analytics melaporkan bahwa permintaan listrik di Jepang meningkat 15% di atas level tahun 2020. Permintaan listrik di Korea Selatan juga meningkat ke level tertinggi selama musim dingin dan perusahaan BUMN Korea yaitu Korea Power Exchange (KPX), bersiaga menghadapi suhu di Seoul yang turun ke level terendah dalam 35 tahun. Dengan sumber daya yang langka, perusahaan utilitas Jepang harus membakar lebih banyak batubara dan bahan bakar minyak dan disaat bersamaan juga membeli lebih banyak LNG dari pasar spot dengan tarif tinggi. Dengan demikian, tarif listrik di Jepang telah menembus 220 Yen per kWh, atau setara dengan USD618 per MMBtu pada 12 Januari berdasarkan data Japan Electric Power Exchange. Tarif tersebut telah meningkat dari tarif seminggu sebelumnya di kisaran 100 Yen per kWh.

Selain lonjakan permintaan gas dan kapal tanker LNG yang besar, pasokan kapal tanker LNG juga mengalami penurunan signifikan akibat keterlambatan yang disebabkan kendala operasional dan perjalanan lebih jauh. S&P Global melaporkan bahwa waktu tunggu di rute Panama Canal untuk kapal tanker LNG menuju Asia dari Teluk Amerika Serikat membutuhkan 13 hari pada akhir tahun 2020. Selain itu, membekunya permukaan laut memperburuk kondisi di pelabuhan bagian utara Tiongkok seperti Dong Ying dan Yingkou, sehingga mengganggu kedatangan kapal dan proses bongkar muat kargo.

3.4 ANALISA SWOT

Kondisi industri yang positif dan negatif merefleksikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh HITS dan GTSI. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka HITS dan GTSI perlu menentukan strategi yang dapat diimplementasikan atau digunakan. Untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan meningkatkan persaingan pasar, maka HITS dan GTSI mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, sebagai berikut:

Kekuatan (*Strengths*)

HITS

- Merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1997;
- Memiliki 8 segmen usaha yaitu angkutan LNG, angkutan petrokimia dan minyak, kapal penunjang kegiatan lepas pantai, *marine support*, pengerukan, manajemen pengelolaan kapal serta jasa pengelolaan dan pengembangan kru kapal;
- HITS memiliki sebaran pelanggan yang merupakan nama-nama besar dalam industri pengolahan dan distribusi sumber energi listrik termasuk Badan Usaha Milik Negara, semisal PLN dan Pertamina, serta bermitra dengan berbagai pelaku industri dari dalam dan luar negeri;

GTSI

- Integrasi bisnis dengan grup usaha HITS yang memperkuat peran vital GTSI dalam rantai suplai LNG di Indonesia;
- Dominasi kontrak persewaan kapal jangka panjang yang memberikan kepastian arus kas untuk GTSI;
- Keunggulan teknis dan rekam jejak GTSI yang solid sebagai modal penting dalam kompetisi industri dengan *entry barrier* yang sangat tinggi;
- Sasaran pangsa pasar yang jelas dan target ekspansi usaha GTSI yang selaras dengan prioritas program pembangunan Pemerintah di bidang energi;
- Manajemen operasional yang kompeten;
- Hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan utama GTSI selama lebih dari 30 tahun;

Kelemahan (*Weaknesses*)

HITS dan GTSI

- Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional;
- Kecelakaan dan kerusakan kapal;

Peluang (*Opportunities*)

HITS dan GTSI

- Pertumbuhan yang positif dari implementasi asas *cabotage*;
- Melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik PLN;
- Adanya peningkatan penyerapan LNG untuk domestik, karena adanya peningkatan permintaan dari PLN;
- Sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek HSE dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi;

Ancaman (*Threats*)

HITS dan GTSI

- Kondisi perekonomian secara makro dan global;
- Perubahan kebijakan pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya;
- Fluktuasi suku bunga;
- Tuntutan dan gugatan hukum

3.5 RISIKO USAHA

Berikut adalah risiko usaha yang dimiliki oleh HITS dan GTSI:

1. Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa pelayaran;
2. Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang;
3. Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga;
4. Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya;

5. Risiko kehilangan sumber daya manusia;
6. Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan GTSI.

4 ANALISA KEGIATAN OPERASI DAN KELANGSUNGAN USAHA

4.1 PROFORMA

Berikut ini adalah ringkasan proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian HITS yang telah diterbitkan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan GTSI dan tanpa terkonsolidasinya GTSI per 31 Desember 2020:

(dalam USD)

Keterangan	Dengan GTSI (Audit)	Penyesuaian	Tanpa GTSI (Proforma)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	21.928.303	(15.607.709)	6.320.594
Piutang usaha	11.480.942	8.079.140	19.560.082
Persediaan	3.558.054	(1.857.451)	1.700.603
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	1.279.018	1.279.018
Pajak dibayar dimuka	715.748	(298.654)	417.094
Biaya dibayar dimuka	490.027	-	490.027
Aset keuangan lancar lainnya	969.688	(28.512)	941.176
Aset lancar lainnya	221.575	(160.839)	60.736
Jumlah Aset Lancar	39.364.337	(8.595.007)	30.769.330
Aset Tidak Lancar			
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.126.738	-	1.126.738
Piutang kepada pihak berelasi	1.500.503	(1.500.503)	-
Pinjaman kepada pihak berelasi	14.998.890	(12.198.917)	2.799.973
Aset derivatif	5.741.915	(5.741.915)	-
Aset hak guna - bersih	19.419.033	(12.063)	19.406.970
Aset tetap - bersih	135.324.959	(54.741.336)	80.583.623
Beban tangguhan - bersih	38.276	-	38.276
Uang jaminan	3.122.563	-	3.122.563
Penyertaan saham - bersih	-	243.009	243.009
Aset pajak tangguhan	81.425	(5.848)	75.577
Aset tidak lancar lainnya	2.257.369	(1.377.975)	879.394
Jumlah Aset Tidak Lancar	183.611.671	(75.335.548)	108.276.123
JUMLAH ASET	222.976.008	(83.930.555)	139.045.453
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	11.579.054	(572.354)	11.006.700
Utang dividen	583.794	(583.794)	-
Utang pajak	2.931.340	(124.684)	2.806.656
Utang lain-lain - pihak ketiga	633.341	(174.639)	458.702
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	107.162	-	107.162
Beban yang masih harus dibayar	12.792.942	(8.456.549)	4.336.393
Pendapatan ditangguhkan	74.436	-	74.436
Utang kepada pihak-pihak berelasi	2.598.783	2.982.649	5.581.432
Uang muka dari pihak-pihak ketiga	1.868.503	(907.216)	961.287
Pinjaman bank jangka pendek	1.914.912	-	1.914.912
Pinjaman dari pihak berelasi	-	1.420.984	1.420.984
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang			
Utang pembiayaan konsumen	15.490	-	15.490
Liabilitas sewa	15.171.264	-	15.171.264
Pinjaman bank jangka panjang	17.471.937	-	17.471.937
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	67.742.958	(6.415.603)	61.327.355
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan ditangguhkan	-	-	-
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	52.770.114	-	52.770.114
Pinjaman dari pihak berelasi	-	1.954.588	1.954.588
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek			
Pinjaman dari pihak-pihak ketiga	19.905.143	(19.442.397)	462.746
Utang pembiayaan konsumen	35.625	-	35.625
Liabilitas sewa	5.864.603	-	5.864.603
Pinjaman bank jangka panjang	6.371.837	-	6.371.837
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.275.615	-	2.275.615
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	87.222.937	(17.487.809)	69.735.128
Jumlah Liabilitas	154.965.895	(23.903.412)	131.062.483

Keterangan	Dengan GTSI (Audit)	Penyesuaian	Tanpa GTSI (Proforma)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
EKUITAS			
Modal saham	95.964.635	-	95.964.635
Tambahan modal disetor	(29.968.401)	1.380.895	(28.587.506)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	(128.803)	(308.306)	(437.109)
Penghasilan komprehensif lain	(37.729.066)	316.339	(37.412.727)
Saham treasuri	(8.959.424)	-	(8.959.424)
Saldo laba	32.641.400	(45.890.719)	(13.249.319)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	51.820.341	(44.501.791)	7.318.550
Kepentingan non pengendali	16.189.772	(15.525.352)	664.420
Jumlah Ekuitas	68.010.113	(60.027.143)	7.982.970
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	222.976.008	(83.930.555)	139.045.453

Analisis terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma HITS per tanggal 31 Desember 2020, menunjukkan bahwa dengan tidak terkonsolidasinya GTSI dalam HITS, terdapat penyesuaian antara lain:

1. Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar USD15.607.709 atau turun 71,18%;
2. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar USD8.079.140 atau naik 70,37%;
3. Persediaan mengalami penurunan sebesar USD1.857.451 atau turun 52,20%;
4. Pinjaman kepada pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar USD1.279.018;
5. Pajak dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar USD298.654 atau turun 41,73%;
6. Aset keuangan lancar lainnya mengalami penurunan sebesar USD28.512 atau turun 2,94%;
7. Aset lancar lainnya mengalami penurunan sebesar USD160.839 atau turun 72,59%;
8. Piutang kepada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar USD1.500.503;
9. Pinjaman pihak berelasi mengalami penurunan sebesar USD12.198.917 atau turun 81,33%;
10. Aset derivatif mengalami penurunan sebesar USD5.741.915;
11. Aset hak guna-bersih mengalami penurunan sebesar USD12.063 atau turun 0,06%;
12. Aset tetap-bersih mengalami penurunan sebesar USD54.741.336 atau turun 40,45%;
13. Penyertaan saham mengalami peningkatan sebesar USD243.009;
14. Aset pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar USD5.848 atau turun 7,18%;
15. Aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan sebesar USD1.377.975 atau turun 61,04%;
16. Utang usaha mengalami penurunan sebesar USD572.354 atau turun 4,94%;
17. Utang dividen mengalami penurunan sebesar USD583.794;
18. Utang pajak mengalami penurunan sebesar USD124.684 atau turun 4,25%;
19. Utang lain-lain-pihak ketiga mengalami penurunan sebesar USD174.639 atau turun 27,57%;
20. Beban yang masih harus dibayar mengalami penurunan sebesar USD8.456.549 atau turun 66,10%;
21. Utang kepada pihak-pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar USD2.982.649 atau naik 114,77%;

22. Uang muka dari pihak-pihak ketiga mengalami penurunan sebesar USD907.216 atau turun 48,55%;
23. Pinjaman dari pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar USD3.375.572;
24. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek pinjaman dari pihak-pihak ketiga mengalami penurunan sebesar USD19.442.397 atau turun 97,68%;
25. Tambahan modal disetor mengalami peningkatan sebesar USD1.380.895 atau naik 4,61%;
26. Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali mengalami penurunan sebesar USD308.306 atau turun 239,36%;
27. Penghasilan komprehensif lain mengalami peningkatan sebesar USD316.339 atau naik 0,84%;
28. Saldo laba mengalami penurunan sebesar USD45.890.719 atau turun 140,59%;
29. Kepentingan non pengendali mengalami penurunan sebesar USD15.525.352 atau turun 95,90%;

Berikut ini adalah ringkasan proforma Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian HITS yang telah diterbitkan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan GTSI dan tanpa terkonsolidasinya GTSI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020:

(dalam USD)

Keterangan	Dengan GTSI (Audit)	Penyesuaian	Tanpa GTSI (Proforma)
Pendapatan	90.254.915	(20.677.264)	69.577.651
Beban Pokok Pendapatan	(61.542.948)	3.306.479	(58.236.469)
Laba Bruto	28.711.967	(17.370.785)	11.341.182
Beban Usaha	(15.877.302)	416.931	(15.460.371)
Laba (Rugi) Usaha	12.834.665	(16.953.854)	(4.119.189)
Pendapatan (Beban) Lainnya	(3.947.607)	254.211	(3.693.396)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	8.887.058	(16.699.643)	(7.812.585)
Beban Pajak Final	(1.377.939)	367.762	(1.010.177)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	7.509.119	(16.331.881)	(8.822.762)
Beban Pajak Penghasilan	(197.337)	117.643	(79.694)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	7.311.782	(16.214.238)	(8.902.456)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	37.522	-	37.522
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	7.349.304	(16.214.238)	(8.864.934)
EBITDA	41.228.636	(27.236.258)	13.992.378

Analisis terhadap Laporan Laba Rugi Konsolidasian Proforma HITS per tanggal 31 Desember 2020, menunjukkan bahwa dengan tidak terkonsolidasinya GTSI dalam HITS, terdapat penyesuaian antara lain:

1. Pendapatan mengalami penurunan sebesar USD20.667.264 atau turun 22,91%;
2. Laba bruto mengalami penurunan sebesar USD17.370.785 atau turun 60,50%;
3. Laba usaha mengalami penurunan sebesar USD16.953.854 atau turun 132,09%;

4. Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar USD16.699.643 atau turun 187,91%;
5. Laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar USD16.331.881 atau turun 217,49%;
6. Laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar USD16.214.238 atau turun 221,75%;
7. EBITDA mengalami penurunan sebesar USD27.236.258 atau turun 66,06%.

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap analisa kegiatan operasi dan kelangsungan usaha HITS dan GTSI, kami dapat simpulkan bahwa jika HITS dan GTSI terjadi putus hubungan afiliasi maka masing masing perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatan operasi secara memadai. Jumlah EBITDA HITS masih tetap positif sebesar USD13.992.378 jika GTSI memisahkan diri. Hal tersebut terlihat juga dari pendapatan GTSI yang hanya berkontribusi sebesar 34,71% terhadap pendapatan HITS secara konsolidasi sehingga tidak berpengaruh signifikan. Masing-masing perusahaan akan tetap memiliki sumber pendapatan operasional yang memadai, dan HITS akan tetap mampu memenuhi syarat pencatatan.

4.2 PROYEKSI KEUANGAN

HITS tanpa GTSI

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	Proyeksi 2021 1	Proyeksi 2022 2	Proyeksi 2023 3	Proyeksi 2024 4	Proyeksi 2025 5
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	7.111.584	12.456.230	13.369.081	24.472.011	29.923.263
Piutang usaha	13.993.710	13.755.278	15.476.359	18.425.697	21.748.796
Persediaan	1.805.922	1.327.290	1.538.965	1.659.245	1.607.770
Pajak dibayar dimuka	3.155.315	4.187.593	4.234.038	4.280.483	4.326.928
Biaya dibayar dimuka	2.288.458	2.335.618	2.335.095	2.335.095	2.335.095
Aset keuangan lancar lainnya	1.393.319	1.497.301	1.601.283	1.705.265	1.809.247
Aset lancar lainnya	1.357.772	1.078.996	1.319.351	1.114.352	966.443
Jumlah Aset Lancar	31.106.080	36.638.306	39.874.173	53.992.148	62.717.542
Aset Tidak Lancar					
Pinjaman kepada pihak berelasi	2.799.973	2.799.973	2.799.973	2.799.973	2.799.973
Aset hak guna - bersih	19.406.970	19.406.970	19.406.970	19.406.970	19.406.970
Aset tetap - bersih	86.211.651	138.610.400	168.092.466	178.925.697	209.483.595
Penyertaan saham - bersih	243.009	243.009	243.009	243.009	243.009
Aset pajak tangguhan	75.577	75.577	75.577	75.577	75.577
Aset tidak lancar lainnya	13.353.368	2.608.344	2.608.344	2.608.344	2.608.344
Jumlah Aset Tidak Lancar	122.090.548	163.744.273	193.226.339	204.059.570	234.617.468
Jumlah Aset	153.196.629	200.382.579	233.100.511	258.051.718	297.335.010
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha	16.044.391	14.202.872	14.294.359	14.925.108	15.636.970
Utang pajak	2.773.908	3.099.030	3.003.637	3.371.052	3.231.106
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.766.548	1.767.343	1.768.137	1.768.932	1.769.726
Beban yang masih harus dibayar	3.943.795	4.873.550	3.911.425	4.365.394	827.959
Uang muka dari pihak-pihak ketiga	491.711	491.711	491.711	491.711	491.711
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang					
Liabilitas sewa	15.328.947	15.273.195	15.248.610	15.243.164	15.229.302
Pinjaman bank jangka panjang	17.739.290	18.772.340	20.435.283	24.083.132	34.479.292
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	58.088.592	58.480.040	59.153.163	64.248.494	71.666.067

Keterangan	Proyeksi 2021 1	Proyeksi 2022 2	Proyeksi 2023 3	Proyeksi 2024 4	Proyeksi 2025 5
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	52.770.114	52.770.114	52.770.114	52.770.114	52.770.114
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek					
Liabilitas sewa	6.098.038	6.028.782	5.996.747	5.965.764	5.921.091
Pinjaman bank jangka panjang	16.271.866	53.829.795	68.040.903	68.408.303	76.642.797
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.537.270	6.565.328	6.610.609	6.672.409	6.749.063
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81.677.288	119.194.019	133.418.374	133.816.590	142.083.065
Jumlah Liabilitas	139.765.880	177.674.059	192.571.537	198.065.085	213.749.132
Ekuitas					
Modal saham	95.964.635	95.964.635	95.964.635	95.964.635	95.964.635
Tambahan modal disetor	(28.587.506)	(28.587.506)	(28.587.506)	(28.587.506)	(28.587.506)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	(437.109)	(437.109)	(437.109)	(437.109)	(437.109)
Penghasilan komprehensif lain	(37.412.727)	(37.412.727)	(37.412.727)	(37.412.727)	(37.412.727)
Saham treasuri	(8.959.424)	(8.959.424)	(8.959.424)	(8.959.424)	(8.959.424)
Saldo laba	(6.434.288)	3.048.821	19.419.169	37.317.860	59.273.673
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indu	14.133.581	23.616.690	39.987.038	57.885.729	79.841.542
Kepentingan non pengendali	(702.833)	(908.170)	541.936	2.100.904	3.744.336
Jumlah Ekuitas	13.430.748	22.708.520	40.528.974	59.986.634	83.585.877
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	153.196.629	200.382.579	233.100.511	258.051.718	297.335.010

Laba Rugi

(dalam USD)

Keterangan	Proyeksi 2021 1	Proyeksi 2022 2	Proyeksi 2023 3	Proyeksi 2024 4	Proyeksi 2025 5
Pendapatan	81.876.362	87.788.919	97.125.018	107.605.369	122.303.861
Beban Pokok Pendapatan	(61.388.486)	(64.057.882)	(63.281.466)	(68.890.938)	(77.901.087)
Laba Bruto	20.487.876	23.731.037	33.843.552	38.714.431	44.402.774
Beban Usaha	(10.454.323)	(11.145.476)	(11.930.535)	(11.783.280)	(12.635.028)
Laba Usaha	10.033.553	12.585.561	21.913.017	26.931.151	31.767.746
Pendapatan (Beban) Lainnya	(2.608.801)	(2.028.474)	(549.077)	(4.632.715)	(4.968.679)
Laba Sebelum Pajak	7.424.752	10.557.088	21.363.940	22.298.435	26.799.067
Beban Pajak	(1.092.878)	(1.279.316)	(3.543.486)	(2.840.776)	(3.199.823)
Laba Tahun Berjalan	6.331.873	9.277.772	17.820.454	19.457.659	23.599.244
Penyusutan dan amortisasi	12.124.374	13.866.146	16.472.351	18.715.385	21.137.978
EBITDA	22.157.927	26.451.707	38.385.368	45.646.536	52.905.724

GTSI sesudah IPO

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	Proyeksi 2021 1	Proyeksi 2022 2	Proyeksi 2023 3	Proyeksi 2024 4	Proyeksi 2025 5
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	72.465.576	154.321.187	191.102.368	145.301.237	125.181.689
Piutang usaha - pihak berelasi	1.626.897	2.249.879	2.362.551	3.350.657	4.131.237
Piutang lainnya - pihak ketiga	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
Persediaan	1.507.322	951.072	333.584	205.134	209.944
Pajak dibayar dimuka	298.654	298.654	298.654	298.654	298.654
Aset lancar lainnya	160.839	160.839	160.839	160.839	160.839
Jumlah Aset Lancar	76.087.799	158.010.143	194.286.507	149.345.034	130.010.875
Aset Tidak Lancar					
Pinjaman kepada pihak berelasi	14.998.890	14.998.890	14.998.890	14.998.890	14.998.890
Piutang lainnya - pihak berelasi	4.876.075	4.876.075	4.876.075	4.876.075	4.876.075
Aset derivatif	5.741.915	5.741.915	5.741.915	5.741.915	5.741.915
Aset tetap - bersih	48.202.885	99.175.989	85.313.984	158.444.185	206.913.867
Aset pajak tangguhan	5.848	5.848	5.848	5.848	5.848
Estimasi tagihan pajak	41.518	41.518	41.518	41.518	41.518
Aset tidak lancar lainnya	1.336.457	1.336.457	1.336.457	1.336.457	1.336.457
Jumlah Aset Tidak Lancar	75.203.588	126.176.692	112.314.687	185.444.888	233.914.570
Jumlah Aset	151.291.388	284.186.835	306.601.194	334.789.922	363.925.445
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	-	173.548	211.130
Utang dividen	756.341	756.341	756.341	756.341	756.341
Utang pajak	124.684	124.684	124.684	124.684	124.684
Utang lain-lain	8.081.232	8.081.232	8.081.232	8.081.232	8.081.232
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549	8.456.549	8.456.549	8.456.549	8.456.549
Uang muka dari pihak ketiga	907.216	907.216	907.216	907.216	907.216
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang					
Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	1.279.018	1.279.018	1.279.018	1.279.018
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	19.605.040	19.605.040	19.605.040	19.778.588	19.816.170
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek					
Pinjaman bank	-	74.800.000	74.800.000	74.800.000	64.194.286
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	19.442.397	19.442.397	19.442.397
Pinjaman dari pihak berelasi	2.799.973	36.222.738	30.889.340	25.555.941	20.222.543
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	22.242.370	130.465.135	125.131.737	119.798.338	103.859.225
Jumlah Liabilitas	41.847.410	150.070.175	144.736.777	139.576.926	123.675.395
Ekuitas					
Modal saham	76.990.586	76.990.586	76.990.586	76.990.586	76.990.586
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	308.306	308.306	308.306	308.306	308.306
Selisih kurs	(240.395)	(240.395)	(240.395)	(240.395)	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.944)	(75.944)	(75.944)	(75.944)	(75.944)
Saldo laba	15.990.299	33.430.836	53.308.082	78.767.215	111.518.992
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	90.735.099	108.175.636	128.052.882	153.512.015	186.263.792
Kepentingan non pengendali	18.708.879	25.941.024	33.811.536	41.700.981	53.986.258
± Jumlah Ekuitas	109.443.978	134.116.660	161.864.418	195.212.995	240.250.050
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	151.291.388	284.186.835	306.601.194	334.789.922	363.925.445

Laba Rugi

(dalam USD)

Keterangan	Proyeksi 2021 1	Proyeksi 2022 2	Proyeksi 2023 3	Proyeksi 2024 4	Proyeksi 2025 5
Pendapatan	42.415.519	58.657.567	61.595.067	87.595.746	107.707.259
Beban Pokok Pendapatan	(19.143.122)	(25.320.489)	(26.694.515)	(38.124.734)	(48.076.099)
Laba Bruto	23.272.398	33.337.078	34.900.552	49.471.012	59.631.161
Beban Usaha	(2.838.165)	(3.461.668)	(3.487.386)	(4.561.330)	(5.354.702)
Laba Usaha	20.434.233	29.875.410	31.413.166	44.909.683	54.276.459
Pendapatan (Beban) Lainnya	(841.017)	(4.558.969)	(2.917.102)	(8.939.908)	(5.617.319)
Laba Sebelum Pajak	19.593.216	25.316.441	28.496.064	35.969.775	48.659.140
Beban Pajak	(419.391)	(643.758)	(748.307)	(2.621.198)	(3.622.085)
Laba Tahun Berjalan	19.173.826	24.672.682	27.747.758	33.348.578	45.037.055
Penyusutan dan amortisasi	6.550.514	10.694.083	13.862.005	19.669.799	21.530.318
EBITDA	26.984.747	40.569.493	45.275.171	64.579.482	75.806.776

4.3 ANALISIS INKREMENTAL DAN PROFITABILITAS

Analisa profitabilitas dan inkremental dilakukan untuk melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang positif bagi HITS tanpa GTSI dan GTSI sesudah IPO dengan membandingkan antara proyeksi keuangan (potensi manfaat ekonomis) HITS tanpa GTSI dan GTSI sesudah IPO.

Berikut adalah kinerja HITS tanpa GTSI selama periode proyeksi tahun 2021-2025:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Aset	153.196.629	200.382.579	233.100.511	258.051.718	297.335.010
Liabilitas	139.765.880	177.674.059	192.571.537	198.065.085	213.749.132
Ekuitas	13.430.748	22.708.520	40.528.974	59.986.634	83.585.877
Pendapatan	81.876.362	87.788.919	97.125.018	107.605.369	122.303.861
Laba Usaha	10.033.553	12.585.561	21.913.017	26.931.151	31.767.746
Laba Tahun Berjalan	6.331.873	9.277.772	17.820.454	19.457.659	23.599.244
EBITDA	22.157.927	26.451.707	38.385.368	45.646.536	52.905.724
Marjin Laba Usaha	12,25%	14,34%	22,56%	25,03%	25,97%
Marjin Laba Tahun Berjalan	7,73%	10,57%	18,35%	18,08%	19,30%
Marjin EBITDA	27,06%	30,13%	39,52%	42,42%	43,26%

*) EBITDA= Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation

Tanpa adanya GTSI, pendapatan HITS diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 11,94% atau mencapai USD122.303.861 pada tahun 2025, dibandingkan dengan pendapatan HITS pada tahun 2020 yang sebesar USD69.577.651. Tanpa adanya GTSI, EBITDA HITS diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 30,47% atau mencapai USD52.905.724 pada

tahun 2025, dibandingkan dengan EBITDA HITS pada tahun 2020 yang sebesar USD13.992.378.

Berdasarkan analisa kami atas kinerja HITS tanpa GTSI, kami dapat simpulkan bahwa HITS tanpa GTSI akan tetap dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik dan berkelanjutan secara memadai dan HITS akan tetap mampu memenuhi syarat pencatatan.

Berikut adalah kinerja GTSI sesudah IPO selama periode proyeksi tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Aset	151.291.388	284.186.835	306.601.194	334.789.922	363.925.445
Liabilitas	41.847.410	150.070.175	144.736.777	139.576.926	123.675.395
Ekuitas	109.443.978	134.116.660	161.864.418	195.212.995	240.250.050
Pendapatan	42.415.519	58.657.567	61.595.067	87.595.746	107.707.259
Laba Usaha	20.434.233	29.875.410	31.413.166	44.909.683	54.276.459
Laba Tahun Berjalan	19.173.826	24.672.682	27.747.758	33.348.578	45.037.055
EBITDA	26.984.747	40.569.493	45.275.171	64.579.482	75.806.776
Marjin Laba Usaha	48,18%	50,93%	51,00%	51,27%	50,39%
Marjin Laba Tahun Berjalan	45,20%	42,06%	45,05%	38,07%	41,81%
Marjin EBITDA	63,62%	69,16%	73,50%	73,72%	70,38%

*) EBITDA= Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation

Setelah IPO, GTSI memperoleh dana sebesar USD30.000.000 akan digunakan untuk:

- Sekitar 64% atau setara dengan USD19,2 juta untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas dalam rangka membangun *permanent* FSRU;
- Sekitar 20% atau setara dengan USD6 juta untuk modal kerja Perseroan
- Sekitar 16% atau setara dengan USD4,8 juta untuk penyertaan modal kepada PT Anoa Sulawesi Regas;

Setelah IPO, kinerja keuangan GTSI tetap baik dimana dapat terlihat dari pendapatan dan laba bersih yang positif.

Pendapatan GTSI diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 28,01% atau mencapai USD107.707.259 pada tahun 2025, dibandingkan dengan pendapatan GTSI pada tahun 2020 yang sebesar USD31.329.115. EBITDA GTSI diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 22,72% atau mencapai USD75.806.776 pada tahun 2025, dibandingkan dengan EBITDA GTSI pada tahun 2020 yang sebesar USD27.236.258.

Berdasarkan analisa kami atas kinerja GTSI khususnya setelah IPO, kami dapat simpulkan bahwa GTSI akan tetap dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik dan berkelanjutan secara memadai.